



**PEMERINTAH  
KABUPATEN NGANJUK**



# RPJMD

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023**



**Nganjuk Nyawiji “Mbangun Deso Noto Kutho”**



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangun Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015-2019;
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12 Seri E)
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 7);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 2);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
dan  
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistemik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, untuk selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, untuk selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil pencapaian (outcome) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

22. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
25. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang dan jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud
26. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran dari visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

#### Pasal 3

- (1) RPJMD dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan:
  - a. Renstra Perangkat Daerah,
  - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - c. perencanaan penganggaran.
- (2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.

- (3) Dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan pedoman seluruh aparatur birokrasi dalam mewujudkan pembangunan.

### BAB III SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN RPJMD

#### Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
  - BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
  - BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB VI STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
  - BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
  - BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  - BAB IX PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

#### Pasal 5

- (1) Perangkat daerah membuat renstra untuk melaksanakan program yang ada dalam RPJMD
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan menuangkannya dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah.

### BAB V PERUBAHAN RPJMD

#### Pasal 6

Apabila terjadi hal diluar kendali Pemerintah Daerah dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 23 Maret 2019  
BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 23 Maret 2019

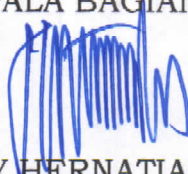
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Sesuai amanat ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Berdasarkan hal dimaksud perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. RPJMD Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025.

Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Yang dimaksud dengan “diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD” adalah keadaan tertentu yang disebabkan antara lain oleh bencana dan atau perubahan peraturan perUndang-Undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya atau perlu dilakukan penyesuaian terhadap program-program dalam RPJMD yang telah ditetapkan.

### Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 12

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR GRAFIK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I - 5
1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJM Nasional.....	I - 5
1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur .....	I - 8
1.3.3 Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Nganjuk.....	I - 10
1.3.4 Hubungan RPJMD dan RTRW .....	I - 15
1.3.5 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Sekitarnya.....	I - 19
1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral.....	I - 25
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I - 25
1.5. Sistematika Penulisan .....	I - 25
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II - 1
2.1.1. Kondisi Geografi.....	II - 1
2.1.1.1 Topografi .....	II - 4
2.1.1.2 Geologi dan Jenis Tanah .....	II - 5
2.1.1.3 Iklim .....	II - 6
2.1.1.4 Hidrologi .....	II - 8
2.1.1.5 Penggunaan Lahan dan Lahan Kritis .....	II - 9
2.1.1.6 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup .....	II - 11
2.1.1.6.1 Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan.....	II - 11
2.1.1.6.2 Daya Dukung Penyediaan Air Bersih .....	II - 12
2.1.1.6.3 Daya Tampung Air Sungai.....	II - 14
2.1.1.6.4 Pengelolaan Sampah .....	II - 15

2.1.2. Demografi .....	II - 17
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II - 33
2.1.4. Wilayah Rawan Bencana.....	II - 37
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 37
2.2.1. Pertumbuhan PDRB.....	II - 38
2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto .....	II - 38
2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	II - 45
2.2.1.3 Laju Infasi (Tingkat Perkembangan Harga) .....	II - 47
2.2.1.4 PDRB Perkapita .....	II - 48
2.2.2. Indeks Gini .....	II - 49
2.2.3. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan .....	II - 50
2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia.....	II - 51
2.2.5. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender .....	II - 52
2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	II - 54
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II - 55
2.3.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Dasar .....	II - 55
2.3.1.1 Pendidikan .....	II - 55
2.3.1.2 Kesehatan.....	II - 60
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II - 66
2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman .....	II - 73
2.3.1.5 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II - 77
2.3.1.6 Sosial .....	II - 79
2.3.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Dasar .....	II - 79
2.3.2.1 Ketenagakerjaan .....	II - 79
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II - 81
2.3.2.3 Ketahanan Pangan .....	II - 83
2.3.2.4 Lingkungan Hidup .....	II - 84
2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II - 87
2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II - 88
2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II - 89
2.3.2.8 Perhubungan .....	II - 90
2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika .....	II - 93
2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah .....	II - 93
2.3.2.11 Penanaman Modal .....	II - 94
2.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga .....	II - 95

2.3.2.13 Statistik .....	II - 96
2.3.2.14 Kebudayaan .....	II - 96
2.3.2.15 Pertanahan .....	II - 97
2.3.2.16 Perpustakaan .....	II - 98
2.3.2.17 Kearsipan .....	II - 98
2.3.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan .....	II - 99
2.3.3.1 Pertanian.....	II - 99
2.3.3.2 Pariwisata .....	II - 101
2.3.3.3 Perdagangan .....	II - 101
2.3.3.4 Perindustrian .....	II - 102
2.3.4. Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan.....	II - 103
2.3.4.1 Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan .....	II - 103
2.3.4.2 Keuangan.....	II - 104
2.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .....	II - 105
2.3.4.4 Fungsi Penunjang Lainnya .....	II - 107
2.4. Aspek Daya Saing .....	II - 109
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II - 109
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II - 110
2.4.3. Iklim Berinvestasi .....	II - 111
2.4.4. Sumber Daya Manusia.....	II - 112
2.4.5. Proses Perijinan.....	II - 113

### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III - 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III - 1
3.1.2. Neraca Daerah.....	III - 8
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III - 21
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III - 21
3.2.2. Analisis Pembiayaan .....	III - 23
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III - 25
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III - 25
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III - 30

<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	IV - 1
4.2. Isu Strategis .....	IV - 16
4.2.1. Lingkungan Internal .....	IV - 16
4.2.2. Lingkungan Eksternal .....	IV - 18
4.2.3. Isu Strategis Kabupaten Nganjuk.....	IV - 28
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	
5.1. Visi .....	V - 1
5.2. Misi .....	V - 4
5.3. Tujuan dan Sasaran .....	V - 10
<b>BAB VI STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	
	VI - 1
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>	
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan .....	VII - 1
7.2. Program Perangkat Daerah .....	VII - 3
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	
	VIII - 1
<b>BAB IX PENUTUP</b>	
9.1. Pedoman Transisi .....	IX - 1
9.2. Kaidah Pelaksanaan .....	IX - 1

## DAFTAR TABEL

### BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Keselarasn RPJMD dengan RPJMN .....	I - 6
1.2.	Keselarasn RPJMD Kabupaten Nganjuk dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur .....	I - 8
1.3.	Hubungan Antara RPJPD dengan RPJMD Kabupaten Nganjuk .....	I - 12
1.4.	Hasil Telaahan Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 .....	I - 15
1.5.	Hubungan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten sekitarnya .....	I - 21

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.	Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan (Berdasarkan data Review RTRW 2018).....	II - 2
2.2.	Statistik Geografis Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2017 .....	II - 3
2.3.	Jenis Tanah Menurut Kecamatan .....	II - 6
2.4.	Lokasi dan Banyaknya Hari Hujan Per Kecamatan.....	II - 7
2.5.	Nama dan Panjang Sungai .....	II - 8
2.6.	Tata Guna Lahan.....	II - 11
2.7.	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kesiediaan Pangan di Kabupaten Nganjuk .....	II - 12
2.8.	Status Daya Dukung Air Tahun 2016.....	II - 13
2.9.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017 .....	II - 14
2.10.	Kualitas Air Sungai .....	II - 14
2.11.	Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Bidang Persampahan .....	II - 16
2.12.	Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk.....	II - 17
2.13.	Jumlah Penyebaran Penduduk per Kecamatan .....	II - 17
2.14.	Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan.....	II - 18
2.15.	Kepadatan penduduk per Kecamatan .....	II - 19
2.16.	Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Nganjuk per Kecamatan.....	II - 20
2.17.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2017 .....	II - 24

2.18	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP di Kabupaten Nganjuk per Kecamatan .....	II - 24
2.19	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK di Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan .....	II - 27
2.20	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Nganjuk per Kecamatan .....	II - 29
2.21	Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017 .....	II - 31
2.22	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 .....	II - 32
2.23	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 – 2017 .....	II - 32
2.24	Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi .....	II - 34
2.25	Kawasan strategis perbatasan Jombang-Nganjuk-Kediri .....	II - 34
2.26	Kawasan jalur jalan Jembatan Kelutan (Nganjuk)-Papar (Kediri) .....	II - 34
2.27	Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri .....	II - 35
2.28	Kawasan sekitar <i>interchange</i> jalan tol .....	II - 35
2.29	Perbatasan pembangunan bandara Kediri .....	II - 36
2.30	Jumlah Kejadian Bencana berdasarkan Jenis Bencana di Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 37
2.31	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Berlaku 2013-2017.....	II - 39
2.32	Persentase PDRB Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Berlaku 2013-2017 .....	II - 40
2.33	Kontribusi per sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Menurut Harga Konstan 2013-2017 Tahun Dasar 2010 .....	II - 42
2.34	Persentase PDRB Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Konstan 2013-2017 Tahun Dasar 2010 Dalam (%) .....	II - 43
2.35	Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Nganjuk Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Dalam (%).....	II - 46
2.36	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2016-2017 .....	II - 50
2.37	Tingkat keberhasilan bidang pendidikan tahun 2014 – 2017 .....	II - 55
2.38	Jumlah Siswa Sekolah Usia Tertentu dan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	II - 56

2.39	Jumlah Siswa dan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	II - 57
2.40	Rata - Rata Nilai UN dan UASB di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017.....	II - 57
2.41	Jumlah Kelulusan Sekolah .....	II - 58
2.42	Rasio Murid terhadap Guru dalam 5 tahun terakhir .....	II - 58
2.43	Rasio Murid terhadap Guru .....	II - 59
2.44	Jumlah Putus Sekolah .....	II - 59
2.45	Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017 .....	II - 59
2.46	Guru Sesuai Kualifikasi .....	II - 60
2.47	Pendidikan Anak Usia Dini .....	II - 60
2.48	Indikator Bidang Kesehatan .....	II - 61
2.49	Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kelahiran Hidup .....	II - 61
2.50	Angka Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Ibu .....	II - 62
2.51	Balita Gizi Buruk .....	II - 62
2.52	Penduduk Miskin yang Dilayani Puskesmas .....	II - 62
2.53	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil .....	II - 63
2.54	Desa dengan cakupan UCI .....	II - 63
2.55	Prevalensi HIV .....	II - 63
2.56	Prevalensi Penderita Kusta .....	II - 64
2.57	Jumlah Kasus TB Per Fasilitas Kesehatan .....	II - 64
2.58	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nganjuk 2014 – 2017 .....	II - 65
2.59	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2017 .....	II - 65
2.60	Capaian Kinerja Pengelolaan Prasarana jalan Tahun 2013-2017 (Persen) .....	II - 67
2.61	Kinerja Pengelolaan Prasarana Jalan .....	II - 67
2.62	Capaian Kinerja Pengelolaan Jembatan Tahun 2013-2017 (Persen) .....	II - 68
2.63	Kinerja Pengelolaan Prasarana Jembatan .....	II - 68
2.64	Capaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 69
2.65	Jaringan Irigasi .....	II - 70
2.66	Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) .....	II - 70
2.67	Ketersediaan Air Irigasi .....	II - 71
2.68	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017 (Persen) .....	II - 72
2.69	Tersusunnya RDTR Perkotaan/Perdesaan .....	II - 72

2.70	Persentase Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Ruang Sesuai Perda RTRW .....	II - 72
2.71	Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 73
2.72	Penduduk Yang Mendapatkan Air Bersih .....	II - 74
2.73	Ketersediaan Drainase Lingkungan .....	II - 75
2.74	Rumah Layak Huni .....	II - 75
2.75	Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan .....	II - 76
2.76	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun 2013-2017 .....	II - 77
2.77	Kondisi Keamanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2016 .....	II - 78
2.78	Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 79
2.79	Persentase Perusahaan Peserta Jamsostek dan yang menerapkan K3 Tahun 2014 – 2017 (Persen) .....	II – 80
2.80	Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3 dan Jamsostek .....	II - 80
2.81	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017 (Persen) .....	II - 81
2.82	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 -2017 .....	II - 82
2.83	Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017 .....	II - 82
2.84	Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 83
2.85	Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2015–2017 .....	II - 84
2.86	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 84
2.87	Sampah Perkotaan Yang Terangkut Ke TPA .....	II - 85
2.88	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL .....	II - 85
2.89	Penghijauan Wilayah Rawan Longsor Dan Sumber Mata Air .....	II - 86
2.90	Peningkatan Usaha/Kegiatan Yang Menggunakan IPAL .....	II - 86
2.91	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) .....	II - 87
2.92	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2017 .....	II - 87
2.93	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017 .....	II - 88
2.94	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Sejahtera	

	Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 -2017.....	II - 90
2.95	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 (Persen).....	II - 90
2.96	Sarana Angkutan Umum Laik Jalan .....	II - 91
2.97	Pemasangan Rambu Lalu Lintas .....	II - 91
2.98	Pemenuhan Prasarana Lalu Lintas.....	II - 92
2.99	Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 93
2.100	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 (Persen).....	II - 94
2.101	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 95
2.102	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nganjuk tahun 2013-2017 .....	II - 95
2.103	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 96
2.104	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 96
2.105	Capaian Kinerja Kesenian dan Kebudayaan .....	II - 97
2.106	Jumlah Aset Tanah Pemda Yang Sudah Bersertifikat Tahun 2013-2017. ....	II - 98
2.107	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 (Persen).....	II - 98
2.108	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 (Persen).....	II - 99
2.109	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Ternak dan Perikanan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 99
2.110	Capaian Kinerja Urusan Kepariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 (Persen).....	II - 101
2.111	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 102
2.112	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017 .....	II - 102
2.113	Capaian Kinerja Perencanaan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 -2017 (Persen).....	II - 103
2.114	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD .....	II - 103

2.115	Persentase indikator kinerja RPJMD yang mencapai target .....	II - 104
2.116	Program Kegiatan Pembangunan Dalam Dokumen Perencanaan Hasil Musrenbang (RKPD) Yang Terangarkan Dalam APBD .....	II - 104
2.117	Capaian Kinerja Pendapatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017.....	II - 104
2.118	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 105
2.119	Statistik Pegawai Pemkab Nganjuk Tahun 2013-2018 Menurut Tipe Pegawai .....	II - 105
2.120	Statistik Pegawai Pemkab Nganjuk Tahun 2013-2018 Menurut Pendidikan.....	II - 106
2.121	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 107
2.122	Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017 (Persen).....	II - 108
2.123	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 .....	II - 109
2.124	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017. ....	II - 110
2.125	Persentase Rumah Tangga Memiliki Telepon Seluler dan Rumah Tangga Menggunakan Listrik Kabupaten Nganjuk.....	II - 111
2.126	Jumlah Bank menurut Jenisnya Kabupaten Nganjuk.....	II - 111
2.127	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2018 .....	II - 112
2.128	Persentase Penduduk Usia di atas 15 Tahun menurut Pendidikan yang Ditamatkan.....	II - 112
2.129	Lama Proses Perijinan Tahun 2016-2018 .....	II - 113

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2017 Kabupaten Nganjuk.....	III - 2
3.2.	Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2017 .....	III - 5
3.3.	Kinerja Pendapatan Asli Daerah 2013-2017 .....	III - 6
3.4.	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2017 .....	III - 7
3.5.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d Tahun 2017 .....	III - 9

3.6.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Nganjuk (Cash Basic) .....	III - 13
3.7.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Nganjuk (Accrual Basic).....	III - 16
3.8.	Rasio Likuiditas Neraca Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2017 (Acrual Basic).....	III - 20
3.9.	Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2017 (Acrual Basic).....	III - 21
3.10.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur .....	III - 22
3.11.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nganjuk .....	III - 23
3.12.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran .....	III - 24
3.13.	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2023 Kabupaten Nganjuk.....	III - 26
3.14.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah .....	III - 31
3.15.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk .....	III - 33
 <b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>		
4.1	Kerangka Pikir Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk .....	III - 2
 <b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>		
5.1.	Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023 .....	V - 2
5.2.	Perwujudan Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023 .....	V - 7
5.3.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk.....	V - 14
 <b>BAB VI STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Nganjuk.....	VI - 1
6.2	Arah Kebijakan Kabupaten Nganjuk .....	VI - 5
6.3	Strategi Umum dan Arah Kebijakan Umum.....	VI - 15
6.4	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagi Indikatif Kabupaten Nganjuk.....	VI - 22

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

- 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023  
Kabupaten Nganjuk ..... VII - 2
- 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan  
Pendanaan..... VII - 4

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- 8.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk ..... VIII - 6
- 8.2 Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Nganjuk..... VIII - 7

## DAFTAR GAMBAR

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Diagram Alir Penyusunan RPJMD .....	I - 2
1.2. Tahapan Pembangunan dan Prioritas Utama RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 .....	I - 11

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk .....	II - 3
2.2. Peta Wilayah Kabupaten Nganjuk .....	II - 33

### BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tema/Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 .....	VI - 17
---	---------

## DAFTAR GRAFIK

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.	Grafik Struktur Penduduk Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur .....	II - 23
2.2.	Perkembangan Kontribusi 4 Sektor Terbesar PDRB ADHB Kabupaten Nganjuk (Persen).....	II - 44
2.3	Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK tahun 2014-2017 .....	II - 45
2.4	Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kab. Nganjuk, Nasional dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017 (Persen) .....	II - 47
2.5	Tingkat Inflasi Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2017 .....	II - 48
2.6	Kajian Perkembangan pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2017 Dalam (Ribuan) .....	II - 49
2.7	Indeks Gini Tahun 2016 dan 2017 .....	II - 49
2.8	Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah Kabupaten, Provinsi dan Nasional 2014-2017 .....	II - 51
2.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Jawa Timur .....	II - 52
2.10	Grafik Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nganjuk.....	II - 53
2.11	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nganjuk .....	II - 53
2.12	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nganjuk periode 2013-2017 .....	II - 54



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan perubahannya.

Pada tahun 2018 Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut pada tanggal 24 September 2018 Gubernur Jawa Timur telah melantik H. Novi Rahman Hidayat, S.Sos, MM dan Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk masa jabatan 2018-2023. Guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka mulai tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD disusun untuk menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025. RPJMD tersebut dimulai dengan penyusunan rancangan teknokratik yang merupakan gambaran capaian kinerja pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya untuk memformulasikan permasalahan dan isu strategis daerah sebagai dasar keberlanjutan perencanaan 5 (lima) tahun kedepan. Kedudukan RPJMD tahun 2018-2023 dalam periodisasi ke-III dan IV RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2005-2025, dengan Visi RPJPD "**Nganjuk yang Maju, Adil dan Sejahtera**". Lebih lanjut RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Adapun proses penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan :

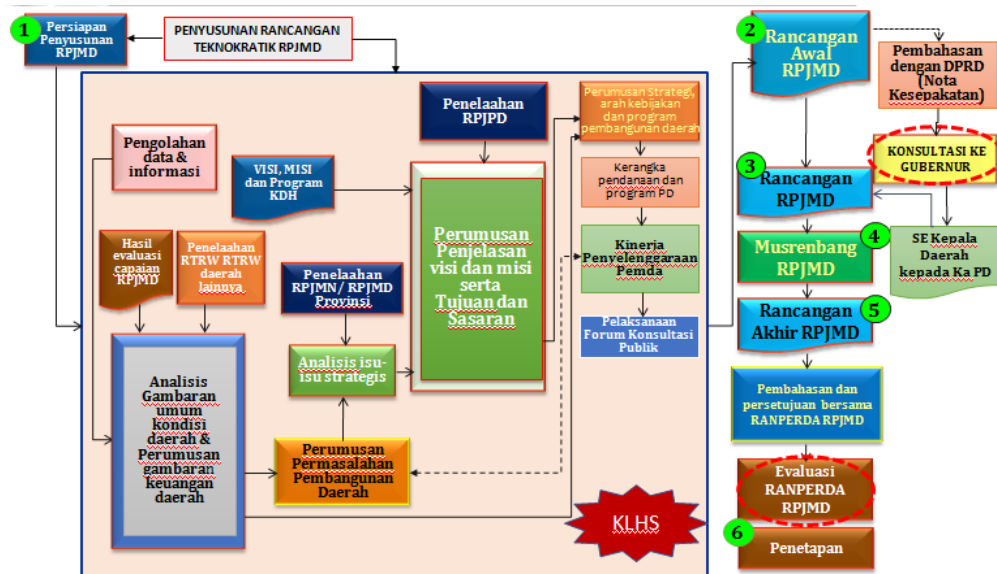
- Politik, yakni perencanaan pembangunan tahun 2018-2023 adalah penjabaran dari visi, misi, dan program calon Bupati Nganjuk dan calon Wakil Bupati Nganjuk pada saat kampanye pemilihan Bupati Nganjuk dan Wakil Nganjuk;
- Teknokratik, yakni penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMD sebelum penetapan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih;
- Partisipatif, yakni penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan yang diwujudkan sekurang-kurangnya dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD dan Musrenbang RPJMD;

- Atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*), yakni perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dalam hal ini penyusunan RPJMD mengacu pada dokumen perencanaan tingkat nasional (RPJPN, RPJMN) dan tingkat provinsi (RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur).

Secara skematik, proses penyusunan RPJMD dapat dilihat pada diagram alur sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Diagram Alur Penyusunan RPJMD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun atas dasar:

- Landasan Idiil : Pancasila
- Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Landasan Operasional :
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangun Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;



28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
32. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 – 2030;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

#### 1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJM Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) yang tertuang dalam RPJMN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah.

Visi pembangunan jangka menengah nasional adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG. Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk yakni “TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)” selaras dengan visi pembangunan nasional tersebut. Identifikasi keselerasan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 1.1  
Keselarasan RPJMD dengan RPJMN

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	RPJMN Tahun 2015-2019	Penjelasan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)	Visi: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Visi Kabupaten Nganjuk, Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho) telah selaras dengan Visi RPJMN, Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Nawa Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Misi 1 RPJMD, Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban telah selaras dengan Nawa Cita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Berkontribusi mewujudkan Nganjuk Bermartabat
Misi 2: Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel ( <i>accountable</i> ) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Nawa Cita 2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Nawa Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Misi 2 RPJMD, Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel ( <i>accountable</i> ) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan selaras dengan Nawa Cita 2 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan Nawa Cita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Berkontribusi mewujudkan Nganjuk Yang Bermartabat.
Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu	Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan	Misi 3 RPJMD, Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas



RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	RPJMN Tahun 2015-2019	Penjelasan
pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	masyarakat Indonesia	selaras dengan Nawa Cita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Berkontribusi mewujudkan Nganjuk Yang Maju.
Misi 4: Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.	Nawa Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Misi 4 RPJMD, Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal selaras dengan Nawacita 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Berkontribusi mewujudkan Nganjuk Yang Maju.
	Nawa Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	Misi 4 RPJMD, Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal selaras dengan Nawacita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Berkontribusi mewujudkan Nganjuk Yang Maju.
Misi 5: Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.	Nawa Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa	Misi 5 RPJMD, Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata selaras dengan Nawa Cita 8, Melakukan revolusi karakter bangsa dan Nawa Cita 9, Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Berkontribusi mewujudkan Nganjuk Bermartabat.
	Nawa Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	
Misi 6: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana	Nawa Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Misi 6 RPJMD, Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana selaras dengan Nawa Cita 6, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Berkontribusi mewujudkan Nganjuk Yang Maju.



### 1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: “**Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak**”.

Apabila mencermati makna Jawa Timur lebih sejahtera, makna Jawa Timur berkeadilan, makna Jawa Timur mandiri, makna Jawa Timur berdaya saing, dan makna Jawa Timur berakhlak, dan disandingkan dengan makna Nganjuk maju dan bermartabat, maka terdapat keselarasan antara RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Keselarasan ini menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Nganjuk adalah bagian dari pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2  
Keselarasan RPJMD Kabupaten Nganjuk dengan  
RPJMD Provinsi Jawa Timur

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	Penjelasan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)	Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak	Visi Pembangunan Kabupaten Nganjuk telah selaras dengan Visi Pembangunan Jawa Timur
Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Misi 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial	Misi 1 RPJMD Kabupaten Nganjuk, Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban telah selaras dengan Misi 5 RPJMD Provinsi Jawa Timur, Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial



RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	Penjelasan
Misi 2: Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel ( <i>accountable</i> ) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Misi 4: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Misi 2 RPJMD Kabupaten Nganjuk, Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel ( <i>accountable</i> ) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan telah selaras dengan Misi 4 RPJMD Provinsi Jawa Timur, Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	Misi 3 RPJMD Kabupaten Nganjuk, Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas telah selaras dengan Misi 1 RPJMD Provinsi Jawa Timur, Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
Misi 4: Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.	Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi	Misi 4 RPJMD Kabupaten Nganjuk, Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna telah selaras dengan Misi 2 RPJMD Provinsi Jawa Timur, Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi



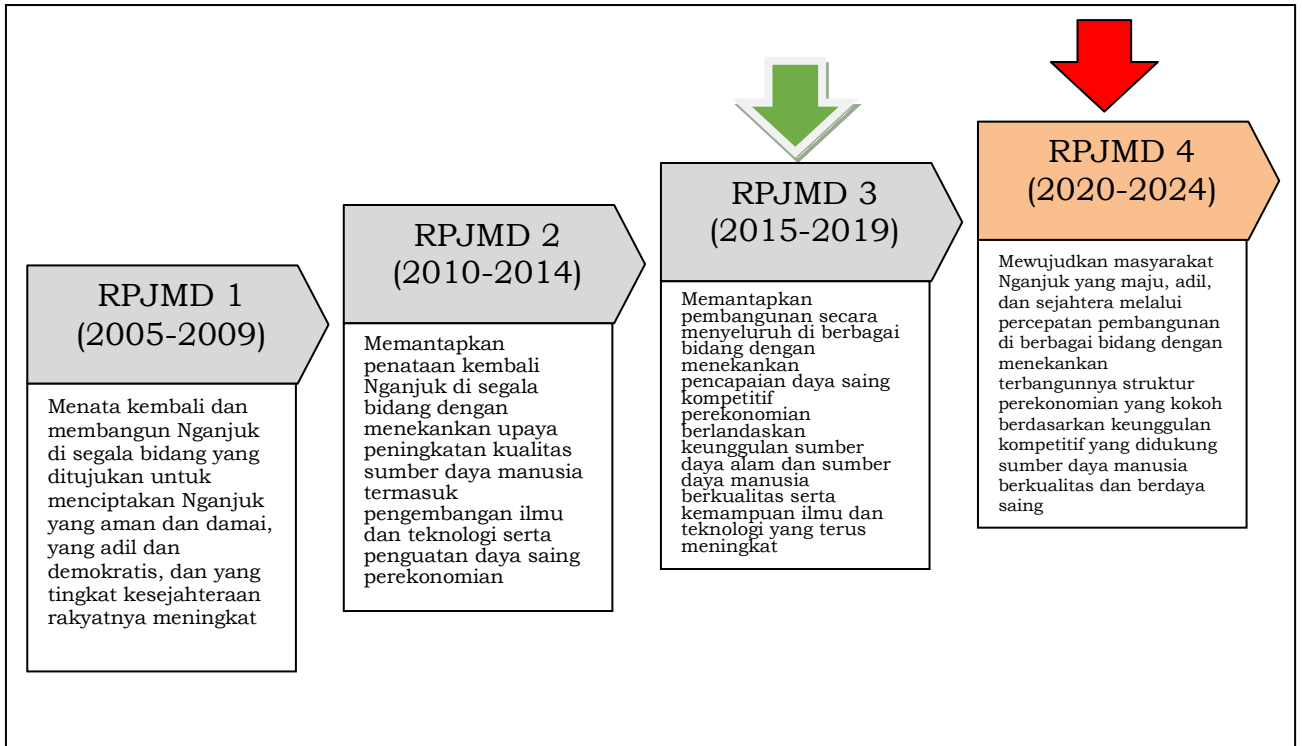
RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	Penjelasan
Misi 5: Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.	Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	Misi 5 RPJMD Kabupaten Nganjuk, Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata telah selaras dengan Misi 1 RPJMD Provinsi Jawa Timur, Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
Misi 6: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana	Misi 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang	Misi 6 RPJMD Kabupaten Nganjuk, Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana telah selaras dengan Misi 3 RPJMD Provinsi Jawa Timur, Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang

### 1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Nganjuk

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan RPJMD Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati nganjuk masa jabatan 2018-2023, juga mempedomani visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Pada RPJPD Kabupaten Nganjuk memiliki Visi yang akan dicapai adalah **“Nganjuk yang Maju, Adil dan Sejahtera”**. Visi RPJPD ini mengandung makna bahwa pada akhir tahun 2025 mendatang diharapkan Kabupaten Nganjuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih Maju, Adil dan Sejahtera. RPJMD disusun untuk mencapai tujuan dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun ketiga yang sudah ditetapkan.

Gambar 1.2

Tahapan Pembangunan dan Prioritas Utama RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025



RPJMD 2018-2023 terletak pada periodisasi RPJPD 2005-2024 periode RPJMD 3 tahun kelima dan periode RPJMD 4 tahun pertama, hingga tahun keempat, yaitu:

RPJMD 3 : Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

RPJMD 4 : Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Dengan penekanan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian yang berdasarkan pada keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk percepatan pembangunan Nganjuk yang maju, adil, sejahtera. Adapun hubungan RPJPD dengan RPJMD Kabupaten Nganjuk dapat digambarkan dalam matrik berikut :



Tabel 1.3  
Hubungan Antara RPJPD dengan RPJMD Kabupaten Nganjuk

RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025			RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	
Visi: Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera			Visi: Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)	
Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Lima Tahunan Ke-IV	Misi	Penjelasan
1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.	Terwujudnya masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.	a. Menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika. b. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. c. Memantapkan jati diri masyarakat Nganjuk untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar nilai luhur dan kearifan lokal	Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Misi 1 RPJMD telah sesuai dengan RPJPD
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.	Terwujudnya Nganjuk yang berdaya saing.	a. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas. b. Memperkuat perekonomian daerah dengan orientasi berdaya saing nasional dan global. c. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi. d. Membangun infrastruktur yang	Misi 3: Meningkatkan kualitas, pelayanan, dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Misi 4: Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan	Misi 3 dan 4 RPJMD telah sesuai dengan RPJPD



RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025			RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	
		maju.	ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.	
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.	Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan	a. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan kecamatan, desa, dan kelurahan b. Peningkatan sinergi kegiatan perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan model <i>backward linkage</i> .	Misi 5: Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.	Misi 5 RPJMD telah sesuai dengan RPJPD
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.	Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral	Misi 2: Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel ( <i>accountable</i> ) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Misi 2 RPJMD telah sesuai dengan RPJPD



RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025			RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai.	Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai.	Memantapkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan keamanan daerah	Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Misi 1 RPJMD telah sesuai dengan RPJPD
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari.	Terwujudnya Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari.	a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian bagi seluruh masyarakat sehingga terwujud kota tanpa pemukiman kumuh. b. Memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam	Misi 6: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana	Misi 6 RPJMD telah sesuai dengan RPJPD

### 1.3.4. Hubungan RPJMD dan RTRW

Selain RPJPD, penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan penetapan kawasan strategis Kabupaten yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Nganjuk telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 – 2030. Pada proses perumusan RPJMD 2018 - 2023 ini, posisi RTRW Kabupaten Nganjuk sedang dilakukan revisi. Revisi RTRW Kabupaten Nganjuk 2018 - 2038 Kabupaten Nganjuk pada tahap persetujuan substansi di Gubernur dan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia. RTRW Kabupaten digunakan sebagai dasar untuk menetapkan indikasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

RTRW Kabupaten Nganjuk secara umum ditetapkan pada 2 kawasan, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Peruntukan Lindung terdiri dari 5 jenis kawasan yaitu: kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan, kawasan budidaya meliputi 7 kawasan, yaitu: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukkan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan peruntukkan pemukiman.

Tabel 1.4  
Hasil Telaahan Struktur Ruang dan Pola Ruang  
RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030

NO.	RENCANA STRUKTUR/POLA RUANG	WAKTU PELAKSANAAN														
		PJM 1					PJM 2			PJM 3		PJM 4				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d	2030
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG															
I	Perwujudan Sistem Perkotaan															
	a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program :															
	1. Program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal : - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. - Penyusunan Peraturan Zonasi. - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. - Penataan dan pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.															
	2. Program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi: - Penyusunan Penetapan Batas Fungsional Kawasan Perkotaan (PKLp)/penyusunan Perda - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. - Penyusunan Peraturan Zonasi. - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. - Penataan dan pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.															
	3. Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan : - Penyusunan Penetapan Batas Fungsional Kawasan Perkotaan (PPK)/penyusunan Perda. - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.															







NO.	RENCANA STRUKTUR/POLA RUANG	WAKTU PELAKSANAAN														
		PJM 1					PJM 2			PJM 3		PJM 4				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d	2030
II	Perwujudan Kawasan Budidaya															
	a. Perwujudan kawasan hutan produksi															
	1. penetapan dan identifikasi batas peruntukan hutan produksi;															
	2. penetapan dan identifikasi lahan kritis pada kawasan hutan produksi dan hutan rakyat,															
	3. pengembangan, reboisasi dan diversifikasi jenis tanaman produksi;															
	4. Penetapan lokasi dan Pengembangan Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat															
	b. Perwujudan kawasan pertanian															
	1. penetapan , pemetaan dan identifikasi lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;															
	2. pengaturan pengelolaan lahan pertanian dan alih fungsi lahan;															
	3. pengelolaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;															
	c. Perwujudan kawasan pertambangan															
	1. Identifikasi potensi tambang															
	2. Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi.															
	3. Pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah (dilakukan bersama antara pemerintah dan penambang).															
	d. Perwujudan kawasan peruntukan Industri															
	1. Penetapan lokasi, identifikasi lahan dan rencana rinci arahan pengembangan kawasan peruntukan industri;															
	2. pengembangan dan pengaturan sarana prasarana dan sistem jaringan penunjang kawasan peruntukan industri; dan															
	3. Pengendalian dan penyiapan perangkat terhadap dampak lingkungan pada kawasan peruntukan industri.															
	4. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.															
	e. Perwujudan kawasan pariwisata															
	1. Penetapan lokasi, pengembangan dan optimalisasi obyek wisata dan rencana tata guna lahan pada kawasan peruntukan pariwisata;															
	2. Pengembangan dan pengaturan pengelolaan jaringan transportasi, akomodasi, prasarana dan informasi serta penunjang kawasan peruntukan pariwisata; dan															
	3. Pengendalian dampak lingkungan dan pengaturan pemanfaatan kawasan wisata															
	f. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan															
	1. Pengaturan rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.															
	2. Penataan pusat permukiman perdesaan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pembentukan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) atau Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).</li> <li>➢ Pembentukan pusat desa.</li> </ul>															
	3. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.															
	g. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan															
	1. Perencanaan penyediaan Sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan .															
	2. Mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota;															
	3. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan															



NO.	RENCANA STRUKTUR/POLA RUANG	WAKTU PELAKSANAAN														
		PJM 1					PJM 2			PJM 3		PJM 4				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d	2030
	perkotaan.															
D	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS															
	a. kawasan pertumbuhan ekonomi:															
	1. pengaturan dan rencana pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang ruang;															
	2. penyediaan fasilitas dan prasarana sarana; dan															
	3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.															
	b. kawasan strategis perlindungan kebudayaan lokal :															
	1. membuka akses lokasi yang ditempati kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal spesifik melalui pembangunan prasarana;															
	2. meningkatkan akses pelayanan fasilitas;															
	3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal spesifik tanpa meninggalkan keunikan budaya dan adat istiadat; dan															
	4. memberikan akses informasi baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional															
	c. kawasan agropolitan:															
	1. pengkajian potensi komoditas agrobisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi;															
	2. penetapan kawasan agrobisnis;															
	3. pembangunan prasarana sarana kawasan agrobisnis;															
	4. pengembangan pengelolaan sistem pemasaran dan hasil pertanian.															
	d. Kawasan Perlu Penanganan Lingkungan															
	1. pembangunan fasilitas IPAL pada Kawasan rawan pencemaran industri dan kegiatan perkotaan															
	2. peningkatan penghijauan pada Kawasan rawan kerusakan alam dan lingkungan.															
E.	PERWUJUDAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG															
	a. Program Penyusunan Perda/Perbup - Izin pemanfaatan ruang, - Izin IMB, - pengaturan zonasi, - pengaturan insentif disinsentif															
	b. Program Pengawasan Penataan Ruang - Pengawasan dan penertiban izin pemanfaatan ruang - Penyidikan penataan ruang															
	c. Program Laporan Evaluasi penataan ruang															

### 1.3.5. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Sekitarnya.

Hasil analisis hubungan menunjukkan adanya keselarasan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 terhadap RPJMD Kabupaten lainnya yang berbatasan dalam hal visi dan misi pembangunan daerah. Meskipun dalam perumusan detail di setiap visi dan misi terkadang berbeda, akan tetapi secara substansi dan makna tetap terdapat ada hubungan atau kesamaan. Walaupun terdapat perbedaan visi dan misi, namun dalam penjabaran tujuan dan sasaran memiliki kesamaan. Dalam penyusunan program pembangunan daerah memiliki ciri khas sesuai dengan potensi dan permasalahan masing-masing daerah.

Perbedaan potensi setiap daerah ini juga menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus suatu daerah dalam sebuah sistem pembangunan wilayah yang lebih makro. Fungsi khusus



tersebut mempengaruhi pada program yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut. Berikut dijelaskan hubungan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten sekitarnya.



Tabel 1.5  
Hubungan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten sekitarnya

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Visi: Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)	Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional	Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018	Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Daerah dan Ergo Negero Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan	Jombang Sejahtera Untuk Semua
Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Misi 1: Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni		Misi 5: Meningkatkan modal sosial masyarakat guna menopang daya tahan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta menjaga kehidupan bernegara yang demokratis	Misi 1: Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama
Misi 2: Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Misi 4: Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi Misi 13: Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi	Misi 4: Meningkatkan Pemerintahan yang Demokratis dan Terpercaya	Misi 6: Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih



RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
<p>Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas</p>	<p>Misi 12: Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan</p> <p>Misi 14: Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan</p>	<p>Misi 2 Meningkatkan Sistem Sosial yang Dinamis, Berkeadilan dan Berbudaya</p>	<p>Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.</p>	<p>Misi 2: Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau</p>
<p>Misi 4: Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.</p>	<p>Misi 6: Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan</p> <p>Misi 7: Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan</p> <p>Misi 8: Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha</p> <p>Misi 9: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam</p>	<p>Misi 1: Peningkatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agro dan Berwawasan Bisnis</p>	<p>Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah</p>	<p>Misi 3: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata</p>



RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
	lingkungan masyarakat yang tertib dan amanah Misi 11: Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro Misi 15: Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat			
Misi 5: Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata., kebudayaan dan kearifan lokal	Misi 2: Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah Misi 3: Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan			



RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018	RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Misi 6: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana	Misi 5: Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang Misi 10: Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang	Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Misi 3: Memantapkan pengelolaan sarana prasarana, sumberdaya alam, infrastruktur, dan industri jasa yang berkualitas Misi 4: Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan nyaman	Misi 4: Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan



### 1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Nganjuk, antara lain: *Sustainable Development Goals* (SDG's), Rencana Aksi Pangan dan Gizi, Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana, Pengarusutamaan Gender, Kabupaten Layak Anak, Hak Asasi Manusia, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta *Roadmap* Pembangunan Teknologi dan Informatika.

## 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023 dalam kerangka kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dengan berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah:

1. Pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 2018-2023;
2. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
3. Pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2018-2023;
4. Menjamin terciptanya sinergi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antara pusat dan daerah;
5. Dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023;
7. Instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi pemangku kepentingan terkait.

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dimuat dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dalam perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

### 2. Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah yang memaparkan tentang kondisi Kabupaten Nganjuk yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.



3. **Bab III: Gambaran Keuangan Daerah**  
Menjelaskan tentang kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan selama 5 tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan dalam 5 tahun ke depannya.
4. **Bab IV: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**  
Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan pembangunan dan berbagai isu strategis sektoral serta isu strategis kabupaten berdasarkan analisis kondisi lingkungan strategis eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Isu-isu Strategis tersebut, maka diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5. **Bab V: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerja tujuan dan sasaran. Perumusan Visi, Misi dan Tujuan harus menunjukkan kerangka logis sistematis dan komprehensif, agar mampu menjadi dasar pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan untuk mencapainya.
6. **Bab VI: Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah**  
Menjelaskan tentang bagaimana strategi dan arah kebijakan serta program-program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung Perangkat Daerah untuk mewujudkan misi dan mencapai visi daerah.
7. **Bab VII: Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah**  
Menjelaskan kebijakan alokasi pendanaan/anggaran program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui penentuan pagu indikatif kepada perangkat daerah, sehingga alokasi anggaran ke dalam program benar-benar dapat mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.
8. **Bab VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**  
Menjelaskan apa dan bagaimana pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator dan target kinerja yang terukur dan tepat dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang akhirnya akan mampu mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.
9. **Bab IX: Penutup**  
Merupakan kata penutup, catatan serta arahan rekomendasi kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misinya.



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah yang dimuat pada Bab II ini adalah menyajikan hasil analisis terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk pada periode RPJMD 2014-2018. Dengan melakukan evaluasi kinerja perencanaan periode yang lalu, akan diketahui gambaran hasil pembangunan yang telah dicapai sekaligus mengetahui rencana pembangunan yang belum dicapai, yang menjadi bahan perumusan masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Nganjuk pada periode 2018-2023.

Gambaran umum kondisi daerah memuat gambaran geografi dan demografi serta capaian kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan publik, secara rinci sebagai berikut:

### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur pada koordinat 111° 50' – 112° 13' Bujur Timur dan 7° 20' – 7° 50' Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 128.897,146 Ha dengan batas-batas wilayah administrasi:

- Sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro,
- Sebelah selatan : Kabupaten Kediri dan Tulungagung.
- Sebelah timur : Kabupaten Jombang dan Kediri.
- Sebelah barat : Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Nganjuk tersebar ke dalam 3 wilayah dataran yaitu 110.433,93 ha (85,68%) terletak di dataran rendah, 11.577,67 ha (8,98%) di dataran sedang 6.885,55 ha (5,34%) merupakan dataran tinggi. Wilayah tersebut tersebar dari selatan yaitu Gunung Wilis bagian utara, hingga kaki gunung Kendeng bagian selatan. Wilayah Kecamatan di kaki Gunung Wilis diantaranya Kecamatan Ngetos, Sawahan, Wilangan, sebagian Kecamatan Loceret dan Pace. Sedangkan di bagian utara yaitu di kaki Gunung Kendeng adalah Kecamatan Ngluyu.

Geografis Kabupaten Nganjuk berada pada titik tengah persimpangan jalan Provinsi Jawa Timur. Keberadaannya menjadi penghubung antara Ibukota Provinsi, Surabaya, dengan wilayah Jawa Timur bagian barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sektor jasa dan perdagangan yang besar sebagai daerah penghubung perdagangan. Selain itu, kondisi geografis yang luas dengan jenis wilayah yang beragam, maka jumlah kecamatan juga cukup banyak dan variatif, sehingga membutuhkan adanya pendekatan dalam pengembangan tata ruang.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Nganjuk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

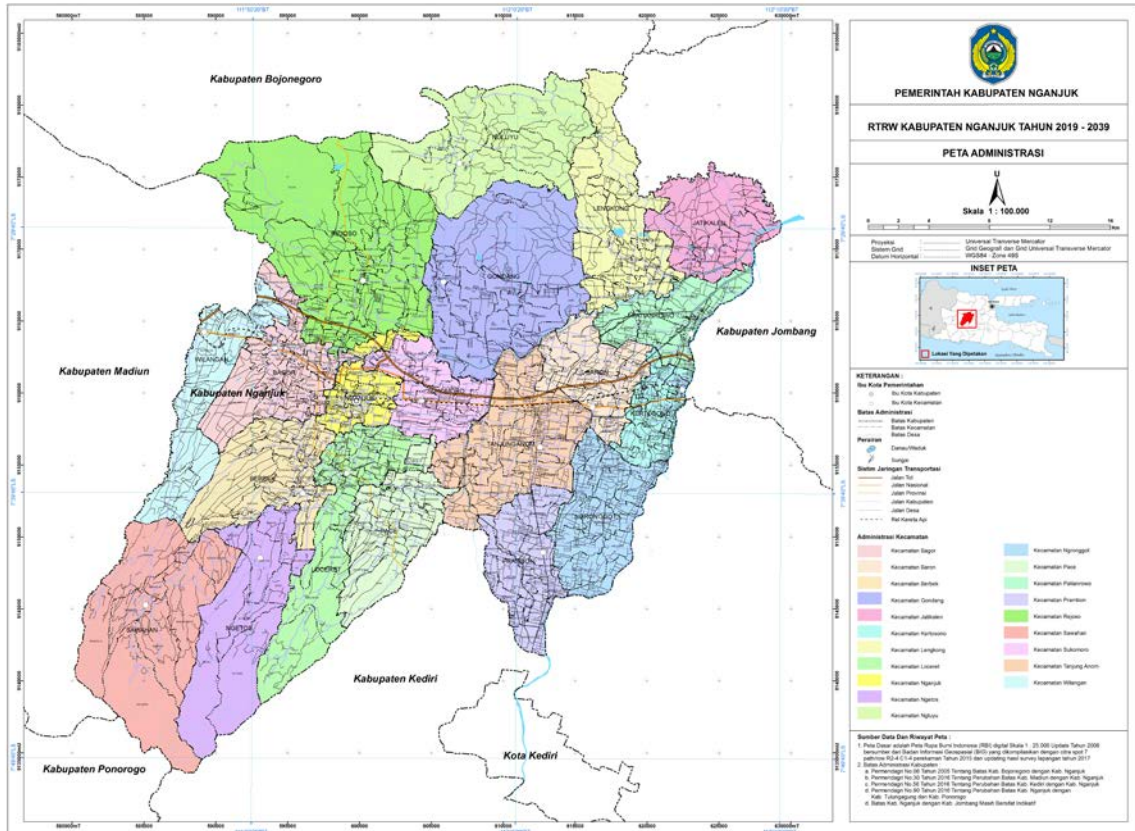


Tabel 2.1.  
Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan  
(Berdasarkan data Review RTRW 2018)

Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut (Terendah-Tertinggi) (mdpl)	Jenis Tanah			Jumlah Total (Ha)
		Sawah (Ha)	Kering (Ha)	Hutan *) (Ha)	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sawahan	150 - >2.000	355,59	6360,95	3570,01	11 138,19
2. Ngetos	50 - >2.000	851,79	4410,86	2150,30	7840,74
3. Berbek	50 - 450	2154,86	2508,97	-	5748,45
4. Loceret	50 - 1.400	2401,77	3239,51	18,38	6865,27
5. Pace	37 - 350	2944,22	1084,10	-	5104,62
6. Tanjunganom	37 - 100	5261,22	-	-	7553,79
7. Prambon	50 - 100	2998,88	-	-	4494,18
8. Ngronggot	37 - 100	3376,88	-	-	5294,03
9. Kertosono	37 - 50	1495,88	-	-	2479,54
10. Patianrowo	37 - 50	2628,56	1,59	-	3545,98
11. Baron	37 - 50	2509,63	-	-	4004,52
12. Gondang	37 - 350	4810,63	1700,33	3737,15	11418,18
13. Sukomoro	37 - 100	2900,81	-	-	3752,74
14. Nganjuk	50 - 100	1350,23	0,04	-	2348,67
15. Bagor	50 - 250	2504,44	1803,50	93,99	5434,51
16. Wilangan	50 - 450	1495,47	3206,45	12,13	5143,54
17. Rejos	37 - 750	6162,56	844,56	8142,30	15682,30
18. Ngluyu	50 - 350	1512,94	997,4	5799,86	8977,29
19. Lengkong	37 - 250	2236,26	782,17	3878,85	7199,19
20. Jaticalen	37 - 100	1767,31	815,76	1467,78	4871,52
JUMLAH		51.719,93	277.56,19	28.870,75	128.897,15

Sumber : diolah dari data Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikompilasikan dengan citra spot 7 path/row, Review RTRW kab. Nganjuk tahun 2019-2039

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk



Sumber : Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikompilasikan dengan citra spot 7 path/row, Review RTRW kab. Nganjuk tahun 2019-2039

Tabel 2.2.  
Statistik Geografis Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2017

Uraian	Satuan	2015	2016	2017
Luas	Ha	122.433,1	128.897,14	128.897,14
Tinggi dari permukaan air laut	mdpl	37 - >2000	37 - >2000	37 - >2000
Curah hujan tertinggi	mm	3669	2264	2264
Hari hujan terlama	Hari	182	115	115
Desa di pegunungan	Desa	41	41	41
Desa/kel di dataran rendah	Desa/kel	243	243	243

Sumber : diolah dari Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2018 dan Permendagri No. 56 Tahun 2016 tentang Batas Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri, Permendagri No. 30 Tahun 2016 tentang Batas Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Nganjuk, Permendagri No. 90 Tahun 2016 tentang Batas Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Tulungagung.



### 2.1.1.1. Topografi

Topografi Kabupaten Nganjuk berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikompilasikan dengan citra spot 7 path/row, Review RTRW kab. Nganjuk tahun 2019-2039 meliputi, Topografi wilayah menjadi salah satu pertimbangan untuk melihat kesesuaian penggunaan lahan. Wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan daratan yang memiliki kontur datar, bergelombang dan berbukit. Kondisi topografi ini terbagi menjadi dua bagian menurut ketinggiannya yaitu 25 – 100 meter dari permukaan laut (dpl) dan 100 – 1.000 meter dpl. Wilayah dengan ketinggian 25 – 100 meter dpl seluas 62%, sedang ketinggian 100 – 1.000 meter dpl seluas 34,05%. Kondisi luasan topografi tersebut tersebar keseluruh wilayah dengan rincian sebagai berikut:

- Kondisi wilayah yang berada diketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 47.507,75 Ha atau 62% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 15 kecamatan, yaitu Kecamatan : Wilangan, Bagor, Nganjuk, Sukomoro, Rejoso, Gondang, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Patianrowo, Lengkong, dan Kecamatan Jaticalen.
- Kondisi wilayah yang berada diketinggian 100 – 1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 41.552,15 Ha atau 34,05% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 11 kecamatan, yaitu Kecamatan : Ngluyu, Lengkong, Gondang, Rejoso, Wilangan, Bagor, Berbek, Ngetos, Pace, sawahan, dan Kecamatan Loceret. Adapun wilayah Kecamatan Rejoso, Ngluyu, Gondang, Jaticalen berada di bagian utara Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-897 m DPL, yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau, bahan galian kapur, hutan produksi, dan hutan lindung. Sedangkan wilayah Kecamatan Ngetos, Sawahan, Brebek, Loceret, Pace, dan Wilangan berada di sebelah selatan dan Barat wilayah Kabupaten Nganjuk berada di lereng Gunung Wilis potensial untuk tanaman perkebunan, hortikultura, hutan produksi dan hutan lindung.
- Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 5.957,15 Ha atau 4,89% dari luas wilayah terdiri atas 2 wilayah kecamatan saja, yaitu : Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos. Wilayah ini berada di bagian Selatan Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.563 m DPL, potensial untuk hutan produksi dan hutan lindung.

Terdapat enam kecamatan memiliki dua jenis topografi yaitu berada pada ketinggian 25 – 100 meter dpl dan 100 – 1.000 meter dpl. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan : Lengkong, Rejoso, Wilangan, Bagor, Pace, dan Loceret.

Selain dikelompokkan dari kondisi konturnya, wilayah Kabupaten Nganjuk juga terbagi menurut kelerengannya. Menurut kelerengannya wilayah ini dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

- Wilayah dengan kelerengan antara 0 % – 2 %, luasnya meliputi 52,95 % dari luas wilayah Kabupaten Nganjuk yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Wilayah ini cukup baik untuk kegiatan budidaya berupa pertanian maupun untuk kegiatan permukiman.
- Wilayah dengan kelerengan 2 % – 15 %, luasnya meliputi 29,86% dari seluruh luas wilayah kabupaten dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Wilayah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian dan permukiman.
- Wilayah dengan kelerengan 15 % – 40 %, luasnya meliputi 10,50% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Loceret, Wilangan, Rejoso, Gondang,



Ngluyu dan Lengkung. Wilayah ini sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman tahunan/tanaman keras.

- Wilayah dengan kelerengan > 40 %, luasnya meliputi sekitar 6,68% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Sawahan, Ngetos, Wilangan dan Ngluyu. Merupakan wilayah yang seharusnya dihindarkan karena merupakan kawasan penyangga tanah, air dan menjaga keseimbangan ekosistem.

### 2.1.1.2. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi daerah dapat menggambarkan potensi sumberdaya alam, serta beberapa kemungkinan bencana yang mungkin timbul. Wilayah Kabupaten Nganjuk termasuk dalam Zona Solo dengan Sub Zona Ngawi. Zona ini ditempati oleh gunung api yang berumur kwarter dengan puncak seperti Wilis, Lawu, dll. Diantaranya terdapat dataran seperti dataran Madiun, Kediri, Jember, yang umumnya tersusun oleh endapan lahar dan batuan gunung api. Dataran tersebut merupakan cekungan air tanah produktif yang didominasi oleh endapan alluvium vulkanik.

Batuan di sebagian wilayah Kabupaten Nganjuk umumnya terdiri dari endapan alluvium, sedangkan sebagian lainnya terdiri dari batuan berumur piosen sampai plistosen. Wilayah Kabupaten Nganjuk berdasarkan ciri-ciri fisik dan batuan penyusunnya secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

#### 1. Perbukitan Kendeng

Di daerah ini tersusun oleh batuan sedimen pasir sampai lempung liat setebal 40 – 80 meter dengan sisipan tipis pasir.

#### 2. Gunung api Wilis

Pada daerah ini terdapat batu pasir tufa yang mengandung sisipan pasir atau breksi. Batuan di daerah ini berupa lapisan batuan yang berasal dari rombakan material letusan gunung api, breksi, lahar dan batu pasir bersifat andesit. Pada daerah ini tanahnya terdiri dari bahan-bahan asal pegunungan dengan ketebalan 80 – 110 meter berupa pasir tufa berbutir halus sisipan kasar atau kerikil dengan sisipan lempung tufaan atau pasir lempung di dalamnya.

#### 3. Dataran Rendah

Di daerah ini bagian atas setebal 30 – 70 meter terdiri dari lempung abu-abu hitam dengan pasir coklat yang dipisahkan oleh lapisan tipis pasir sebagai pengandung air. Bagian bawah berupa lapisan batu pasir tufaan atau lempung tufaan dengan sisipan pasir atau kerikil.

Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi tiga bagian menurut jenis tanah, yaitu tanah sawah (35%), tanah kering (27%) dan tanah hutan (38%). Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan yang berada pada daerah pegunungan terletak pada ketinggian 150 sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi yaitu desa Ngliman di Kecamatan Sawahan.

Bila di lihat dari tipe sebaran tanah yang ada, maka wilayah Kabupaten Nganjuk terbagi ke dalam 3 asal jenis tanah berdasarkan pembentukannya, yaitu berasal dari Jenis tanah yang pembentukannya berasal dari material gunung berapi seperti tanah andosol, latosol, grumosol dan regosol tersebar hampir di seluruh kecamatan-kecamatan, jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai yang sering disebut dengan tanah alluvial di dataran rendah dan tanah yang berasal dari pelapukan bebatuan besar dengan jenis tanah litosol. Wilayah yang memiliki jenis tanah tersebut adalah Rejoso dan Ngluyu. Sebaran jenis tanah ini pada tabel berikut:

Tabel 2.3.  
Jenis Tanah Menurut Kecamatan

Kecamatan Sub Regencies	Jenis Tanah Soil's Type
1. Sawahan	Andosol, Latosol
2. Ngetos	Andosol, Latosol
3. Berbek	Latosol, Gromosol
4. Loceret	Andosol, Latosol, Gromosol, Aluvial
5. Pace	Latosol, Gromosol, Aluvial
6. Tanjunganom	Gromosol, Aluvial
7. Prambon	Aluvial
8. Ngronggot	Aluvial
9. Kertosono	Aluvial
10. Patianrowo	Aluvial, Regosol
11. Baron	Aluvial
12. Gondang	Aluvial, Regosol
13. Sukomoro	Aluvial, Regosol
14. Nganjuk	Gromosol, Aluvial, Regosol
15. Bagor	Gromosol, Regosol
16. Wilangan	Latosol, Gromosol, Regosol
17. Rejoso	Latosol, Regosol, Litosol
18. Ngluyu	Latosol, Regosol, Litosol
19. Lengkong	Regosol
20. Jaticalen	Aluvial, Regosol

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2018

### 2.1.1.3. Iklim

Iklim Kabupaten Nganjuk secara umum, curah hujan di Kabupaten Nganjuk dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur tidak terlalu jauh berbeda. Kabupaten Nganjuk pada bulan Juni sampai dengan September/Oktober terjadi musim kemarau dan pada bulan Nopember/Desember sampai bulan Mei mengalami musim penghujan. Pada bulan-bulan tertentu pada musim kemarau yaitu bulan Juli - September berhembus angin kencang dari Gunung Willis menuju kota Nganjuk, karena itu pula kota Nganjuk dikenal dengan sebutan kota angin.



Tabel 2.4.  
Lokasi dan Banyaknya Hari Hujan Per Kecamatan

Kecamatan	Rata-rata Curah Hujan Per Bulan (Average Rainfall per Month) (mm)					
	Dpl	2013	2014	2015	2016	2017
Sawahan	750*)	20	21	23	23	20
Ngetos	500*)	21	19	25	24	18
Berbek	85	15	14	11	18	18
Loceret	63	15	15	19	19	16
P a c e	60	23	18	23	17	10
Tanjunganom	47	16	11	23	18	18
Prambon	56	20	17	21	18	19
Ngronggot	45	31	27	30	29	11
Kertosono	40	29	29	55	36	12
Patianrowo	46*)	-	-	-	-	-
Baron	46*)	-	-	-	-	-
Gondang	60	22	17	17	21	32
Sukomoro	54*)	-	-	-	-	-
Nganjuk	56	25	24	25	22	15
Bagor	100	17	12	19	21	12
Wilangan	123	19	18	21	27	16
Rejoso	62	17	18	20	20	29
Ngluyu	155	27	23	27	38	12
Lengkong	40	17	24	20	19	34
Jatikalén	39	24	21	23	24	22

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2018



#### 2.1.1.4 Hidrologi

Secara hidrologis, Kabupaten Nganjuk terdiri atas 43 sungai. Dengan jumlah sungai tersebut menyebabkan kondisi dan struktur tanah Kabupaten Nganjuk cukup produktif.

Tabel 2.5.  
Nama dan Panjang Sungai

Nama Sungai	Panjang (Km)	Luas daerah Pengairan (Km <sup>2</sup> )	Debit Air (liter/detik)
Sungai Widas	91,00	430.150	2.643
Sungai Sopang	4,70	6.562	-
Sungai Butuh	4,20	2.000	-
Sungai Manyung	8,30	19.240	100
Sungai Ngumpul	12,00	15.750	100
Sungai Mencaro	6,75	16.200	337
Sungai Kedungmaron	7,50	15.000	180
Sungai Semantok	18,50	27.000	905
Sungai Wedekan	6,10	7.000	250
SungaiWengkal	12,00	24.000	320
Sungai Kedungpadang	11,00	122.845	499
Sungai Senggowar	22,00	76.600	2.151
Sungai Babadan	7,00	1.400	300
Sungai Tretes	15,00	30.000	407
Sungai Kedungsengon	7,20	14.400	148
Sungai Jarakan	4,25	8.500	30
Sungai Jaan	5,10	10.200	45
Sungai Nglempoh	5,12	4.500	155
Sungai Jurangdandang	2,75	19.700	149
Sungai Logawe	3,00	2.450	45
Sungai Sumberkepuh	5,60	34.300	160
Sungai Sumbersono	5,00	3.250	140
Sungai Pering	3,50	36.770	155
Sungai Kedungsoko	6,50	80.850	783
Sungai Kedungpedet	5,25	70.710	223
Sungai Puh Salak	12,60	14.624	126
Sungai Kedung Galih	18,20	24.375	77
Sungai Logo	11,50	4.500	-
Sungai Konang	31,70	28.050	118
Sungai Tunggak	15,20	18.562	46
Sungai Gandu	4,90	7.875	458
Sungai Kunci Kanan	18,41	50.204	2.772
Sungai Kunci Kiri	9,55	26.050	2.035
Sungai Bodor	16,00	21.800	31



Nama Sungai	Panjang (Km)	Luas daerah Pengairan (Km <sup>2</sup> )	Debit Air (liter/detik)
Sungai Watulanang	7,00	14.600	46
Sungai Sumber Kemiri	5,00	3.750	45
Sungai Sumber Doko	3,00	1.500	-
Sungai Sumberklampok	3,00	1.250	20
Sungai Beng	20,00	14.000	30
Sungai Rejoso	5,00	2.300	917
Sungai Margomulyo	7,00	3.200	377
Sungai Kedung Gupit	4,00	1.000	119
Sungai Kuncir	19,45	12.875	566

Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, 2018

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sungai yang berada di Kabupaten Nganjuk terdiri atas 43 sungai dengan panjang antara 2,75 Km (Sungai Jurangdandang) sampai 91 Km (Sungai Widas). Sedangkan, Kabupaten Nganjuk memiliki debit air antara 0 liter/detik sampai 2.772 liter/detik. Sungai yang memiliki luas daerah pengairan tertinggi yaitu Sungai Widas dengan luas 430.150 Km<sup>2</sup>, sedangkan sungai yang memiliki daerah pengairan paling kecil yaitu Sungai Kedung Gupit dengan luas 1.000 Km<sup>2</sup>.

#### 2.1.1.5 Penggunaan Lahan dan Lahan Kritis

Penggunaan lahan Kabupaten Nganjuk merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Luas wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk adalah 128.897,14 Ha yang terbagi menjadi 20 kecamatan, 264 desa 20 kelurahan. Tata guna tanah akhir tahun 2017 wilayah Kabupaten Nganjuk meliputi sawah irigasi 39.746,54 Ha, sawah tadah hujan 9.845,33 Ha, ladang/tegalan 8.456,21 ha, permukiman 19.275,49 Ha, industri dan pergudangan 312,96 Ha, peternakan unggas 71,73 Ha, hutan lindung 7.640,66 ha, hutan produksi 42.748,30 ha, pertambangan 11,47 ha, sungai 706,62 ha, waduk 80,63 ha dan embung 1,20 ha. Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan lahan tersebut mengalami perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah. Alih fungsi lahan sawah tidak hanya pada daerah sub urban, akan tetapi telah masuk ke daerah pedesaan. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk, namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan.

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk, kawasan perkotaan berpusat di sekitar Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten Nganjuk, kemudian berkembang kesemua arah. Penggunaan lahan berupa tegalan masih cukup luas berlokasi di sebelah selatan dan barat Kabupaten Nganjuk. Penggunaan lahan berupa sawah yang tidak luas terutama terdapat di sekitar Kaliulo di sebelah utara kabupaten.



Untuk kawasan terbangun didominasi oleh kawasan permukiman, perkantoran dan perdagangan; sedangkan untuk kawasan tidak terbangun didominasi oleh kebun campuran/tegalan, ladang, sawah di pinggiran kota. Secara lebih rinci penyebaran penggunaan lahan adalah sebagai berikut:

1. Perumahan

Kawasan perumahan umumnya menyebar mengikuti pola jaringan jalan utama kota. Pada kawasan pusat kota, kawasan perumahan ini bersifat masif (memenuhi seluruh ruang) bersamaan dengan penggunaan lahan intensif lainnya (perkantoran, perdagangan, jasa, dan fasilitas kota). Pada kawasan bukan pusat kota, penyebaran kawasan permukiman ini terlihat jelas mengikuti jaringan jalan, sehingga membentuk kantong-kantong kawasan tidak terbangun berupa kebun campuran, tegalan, dan ladang.

2. Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran pemerintah seperti instansi pemerintah sektoral (Kanwil dan Kandep) serta Perangkat Daerah, umumnya beraglomerasi di kawasan pusat kota.

3. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa terutama berlokasi di pusat kota. Penyebaran kawasan perdagangan ini tampak membentuk pola berbentuk pita (*ribbon*).

4. Fasilitas Umum

Untuk fasilitas kota, baik fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, lokasinya menyebar di seluruh wilayah kota, sesuai dengan lingkup pelayanannya.

Selain itu wilayah Kabupaten Nganjuk yang berupa Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga untuk keseimbangan alam. Disamping itu hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi, sebagai hutan produksi. Luas lahan kritis tahun 2017 sebesar 5.765,28 ha. Lahan kritis tersebut dikelompokkan dalam empat tingkat kekritisannya, yaitu potensial kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis.

Lahan kritis di Kabupaten Nganjuk tahun 2017 tersebar di 12 kecamatan, terdiri dari lahan berpotensi kritis seluas 920,00ha, lahan agak kritis seluas 2.594,52 ha, lahan kritis seluas 868,37 ha dan kriteria sangat kritis seluas 152,00 ha. Lahan kritis terluas berada di Kecamatan Sawahan dengan luas 711,60 ha yang berada pada ketinggian rata-rata 750 m DPL. Luas lahan kritis berikutnya di Kecamatan Ngetos mencapai 96,00 ha yang berada pada ketinggian rata-rata 550 m DPL dan Kecamatan Loceret dengan luas 935,12 ha. Kecamatan lain luas lahan kritis maksimal 711,60 ha dengan rata-rata 60 m DPL. Dibandingkan dengan data tahun 2016, terjadi kenaikan lahan kritis yang cukup signifikan yaitu dari 5.765,28 ha menjadi 5.422,92 ha. Hal ini menunjukkan bahwa lahan kritis belum dapat difungsikan menjadi lahan yang potensial untuk lebih produktif dengan usaha diversifikasi lahan.

Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan di atas, nampak bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Nganjuk adalah hutan yaitu sebesar 38,39 persen, kemudian sawah sebesar 35,12 persen dan juga tegal sebesar 11,79 persen. Meskipun tidak mendominasi pada seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, tetapi pemanfaatan sebagai sawah mendominasi 11 kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

Wilayah kecamatan yang didominasi pemanfaatan lahannya oleh hutan ada 8 wilayah kecamatan, dan satu-satu kecamatan yang didominasi penggunaan lahan kering adalah Kecamatan

Ngronggot. Pemanfaatan hutan yang mencapai 38,39 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Nganjuk ini sebagian besar merupakan hutan produksi yaitu mencapai 97,40 persen dan sisanya sebesar 2,60 persen merupakan hutan lindung. Maka dengan analisis pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pemanfaatan lahan Kabupaten Nganjuk memiliki *core competence* (unggulan) daerah sebagai daerah Pertanian dalam arti luas.

Tabel 2.6.  
Tata Guna Lahan

Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
Hutan Lindung	7.640,66
Hutan Produksi	42.748,30
Ladang/Tegalan	8.456,21
Sawah Irigasi	39.746,54
Sawah Tadah Hujan	9.845,33
Industri dan Pergudangan	312,96
Peternakan Unggas	71,73
Permukiman	19.275,49
Pertambangan	11,47
Sungai	706,62
Waduk	80,63
Embung	1,20
<b>Total</b>	<b>128.897,14</b>

Sumber: Review RTRW Kabupaten Nganjuk 2018

#### 2.1.1.6 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

##### 2.1.1.6.1 Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Secara umum analisis daya dukung dan daya tampung kebutuhan pangan tergantung dari fungsi atau tujuan yang akan diukur apakah menyangkut aspek ekonomi, demografi dan sebagainya. Setiap tujuan ini memiliki formulasi tersendiri karena karakteristik unit dan ukuran yang berbeda. Dalam kajian daya dukung dan daya tampung ketersediaan pangan bagi Kabupaten Nganjuk akan memfokuskan pada sektor pertanian, dimana dominansi dari kebutuhan pangan Kabupaten Nganjuk masih tergantung pada sektor pertanian tanaman pangan yakni padi, jagung, ketela pohon dan ubi rambat.

Daya dukung lahan pertanian merupakan perbandingan antara lahan yang tersedia dan jumlah petani. Untuk itu perlu diketahui berapa luas lahan rata-rata yang dibutuhkan per kepala keluarga, potensi lahan yang tersedia dan penggunaannya untuk kegiatan pertanian. Berikut ini akan disajikan perhitungan daya dukung lahan pertanian Kabupaten Nganjuk:

$$\alpha = \frac{Lp/Pd}{KFM/Pr} = \frac{122.511/1.048.799}{114/44.607,09} = 45,71$$

Kabupaten Nganjuk masuk klasifikasi mampu swasembada pangan, dikarenakan nilai  $\alpha > 1$ . Detail daripada kajian daya dukung dan daya tampung kesediaan pangan di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.7.  
Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kesediaan Pangan di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Panen (Ha)	Kebutuhan Fisik Minimum (*) (Kg/Kapita/Tahun)	Produksi rata-rata lahan/hektar (Kg/ha)	DD-Lahan Pertanian	Status
1	Sawah	37.100	5.802	114	45.467,19	62,37	Swasembada
2	Ngetos	34.834	4.167	114	63.719,87	66,86	Swasembada
3	Berbek	54.997	7.082	114	24.653,76	27,85	Swasembada
4	Loceret	70.361	8.669	114	12.999,84	14,05	Swasembada
5	Pace	59.551	8.812	114	36.565,92	47,46	Swasembada
6	Tanjunganom	113.243	11.968	114	26.001,92	24,11	Swasembada
7	Prambon	71.065	7.608	114	13.722,42	12,89	Swasembada
8	Ngronggot	78.607	6.216	114	62.168,08	43,12	Swasembada
9	Kertosono	53.267	3.032	114	12.350,85	6,17	Swasembada
10	Patianrowo	42.062	6.851	114	13.749,66	19,64	Swasembada
11	Baron	49.476	6.418	114	51.597,26	58,71	Swasembada
12	Gondang	50.948	9.063	114	20.224,07	31,56	Swasembada
13	Sukomoro	43.901	5.998	114	13.593,39	16,29	Swasembada
14	Nganjuk	68.559	2.420	114	13.341,06	4,13	Swasembada
15	Bagor	58.768	4.827	114	24.085,89	17,35	Swasembada
16	Wilangan	27.436	3.754	114	33.644,13	40,38	Swasembada
17	Rejoso	68.580	9.593	114	13.474,87	16,53	Swasembada
18	Ngluyu	13.836	3.668	114	11.248,90	26,16	Swasembada
19	Lengkong	32.105	4.359	114	39.640,67	47,21	Swasembada
20	Jatikalen	20.063	2.204	114	13.015,20	12,54	Swasembada
Jumlah Total		1.048.799	122.511	114	44.607,09	45,71	Swasembada

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk 2017

#### 2.1.1.6.2 Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). Salah satu capaian TPB/SDGs, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Dalam rangka menyiapkan implementasi SDGs, Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 akan menyusun *Road Map / Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Road Map SDGs)* yang berpijak dari capaian MDGs. Berkaitan dengan capaian pengelolaan air bersih, gambaran capaian penyediaan air bersih pada saat pelaksanaan Program MDGs adalah sebagai berikut:

Penduduk Kabupaten Nganjuk belum semuanya dapat dilayani air bersih yang berasal dari PDAM. Dengan tingkat pelayanan kapasitas terpasang 258 liter/detik pada Tahun 2014 dan kapasitas produksi 225 liter/detik, dimana PDAM Kabupaten Nganjuk unit Kota Nganjuk kapasitas produksinya sekitar 85 l/dtk, unit Berbek sebesar 30 l/dtk, unit Kertosono sebesar 25 l/dtk, unit Loceret 20 l/dtk dan unit Rejoso 5 l/dtk.



Sampai dengan Tahun 2015 PDAM Kabupaten Nganjuk menargetkan penambahan kapasitas sebesar 20 liter/detik sehingga diharapkan target MDGs bisa tercapai.

Jumlah rumah tangga dan sumber air minum di Kabupaten Nganjuk umumnya memanfaatkan dari air sumur yakni 202.636 rumah tangga, dimana yang paling banyak di Kecamatan Tanjunganom 20.231 rumah tangga, dan di Kecamatan Ngronggot sebanyak 17.683 rumah tangga sedangkan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Sawahan, yakni sebanyak 105 rumah tangga. Penduduk yang memanfaatkan air ledeng sebanyak 34.506 rumah tangga, yang terbanyak di Kecamatan Loceret yakni sebanyak 11.198 rumah tangga. Rumah tangga yang memanfaatkan air hujan untuk air minum sebanyak 6 rumah tangga yang hanya dilakukan penduduk di Kecamatan Loceret dan untuk kebutuhan air minum dengan kemasan sebanyak 3.545 rumah tangga, sedangkan memanfaatkan dengan sumber lainnya sebanyak 2.010 rumah tangga di Kecamatan Sawahan.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui PDAM Kabupaten Nganjuk menargetkan Millennium Development Goals (MDG's) atau Target Pembangunan Millenium bisa tercapai pada Tahun 2016. Untuk mencapai target MDG's, PDAM Nganjuk menambah jaringan distribusi, karena jumlah sambungan distribusi air bersih yang terpasang sekarang, untuk wilayah pedesaan masih sekitar 30 % dan di wilayah kota masih 45%. Sampai sekarang distribusi air bersih di wilayah kota belum mencapai 12%, sementara di wilayah pedesaan juga belum mencapai angka 29% seperti target MDG's.

Daya Dukung Sumber daya Air Kabupaten Nganjuk dilakukan untuk mengetahui dan memahami distribusi ketersediaan air berdasarkan input dari hujan untuk kebutuhan domestik di Kabupaten Nganjuk. Air hujan sampai di permukaan bumi akan berkurang oleh proses evaporasi sebelum dimanfaatkan oleh manusia maupun vegetasi. Dalam kajian keruangan ini, analisis kebutuhan air domestik menggunakan standar kebutuhan air yang digunakan penduduk perkotaan sebesar 150 liter/orang/hari dan penduduk pedesaan sebesar 80 liter/orang/hari, sehingga diketahui sebaran kebutuhan air domestik yang terdistribusi secara keruangan berdasarkan pada administrasi kabupaten. Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, hasil perhitungan daya dukung air pada Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 yaitu surplus. Berikut hasil perhitungannya.

Tabel 2.8.  
Status Daya Dukung Air Tahun 2016

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m <sup>3</sup> /tahun)	Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Daya Dukung Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Status DDL
1	Nganjuk	1.371.497	39.499.113	1.794.578.000	1.755.078.897	<b>SURPLUS</b>

Sumber: Dokumen IKPLHD Jawa Timur Tahun 2017

Sedangkan capaian kinerja penyediaan prasarana air bersih perpipaan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.9.  
Capaian Kinerja Urusan Perumahan  
di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017

No	Jenjang	2014	2015	2016	2017
1	Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan Air bersih dengan sistem perpipaan (%)	15.11	16.67	17.75	18.75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

#### 2.1.1.6.3 Daya Tampung Air Sungai

Kualitas air sungai pada tahun 2015 di Kabupaten Nganjuk untuk wilayah sungai-sungai yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10.  
Kualitas Air Sungai

Parameter	Satuan	Lokasi Sampling						
		Ploso	Kuncir Kanan	Dam Margo mulyo	Dam Kedung Soko	Samping Gedung Juang	Sungai Kedung Suko	Sungai Brantas
pH	-	6,8	7,3	7,0	6,8	7,6	8,3	8,5
Suhu	°C	29,3	29,3	30,3	31,2	29,0	30	31
TSS	mg/l	18,0	18,2	43,2	24,1	19,0	11,2	8,7
TDS	mg/l	160,0	198,0	176,0	254,0	412,0	330,0	276,0
BOD5	mg/l	9,3	7,3	6,4	8,9	25,3	1,79	4,7
COD	mg/l	16,5	12,6	15,4	14,316	61,6	3,0	13,6
DO	mg/l	2,98	3,01	3,8	3,98	2,1	2,9	3,0
Tembaga (Cu)	mg/l	<0,1412	<0,1412	<0,1412	<0,1412	<0,1412	<0,1412	<0,1412
Cobalt (Co)	mg/l	0,015	<0,0849	0,075	<0,0849	<0,0849	<0,0849	<0,0849
Besi (Fe)	mg/l	0,59	0,45	0,44	0,48	0,17	<0,1268	<0,1268
Mangan(Mn)	mg/l	<0,0486	<0,0486	<0,0486	<0,0486	4,3	0,54	0,53
Seng (Zn)	mg/l	<0,0937	<0,0937	<0,0937	<0,0937	<0,0937	<0,0937	<0,0937
H2S	mg/l	0,84	0,84	0,71	0,62	1,1	0,95	0,13

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, 2015

Berdasarkan hasil kualitas air sungai diatas, menunjukkan sungai yang memiliki derajat keasaman baik/netral yaitu Sungai Dam Margomulyo karena memiliki nilai pH 7 sedangkan sungai yang memiliki ph sangat basa di Kabupaten Nganjuk adalah Sungai Brantas dengan nilai pH 8,5.

Berdasarkan baku mutu (PP No. 82 Tahun 2001 Kelas III), nilai TSS yang diperbolehkan yaitu 400 mg/l, sehingga nilai TSS dari 7 lokasi pengamatan masih sangat jauh di bawah kriteria baku mutu.



Sedangkan, berdasarkan baku mutu nilai TDS yang diperbolehkan yaitu 100 mg/l sehingga nilai TDS di 7 lokasi pengamatan telah memenuhi baku mutu (PP No. 82 Tahun 2001 Kelas III).

Konsentrasi BOD Sungai Kedungsuko tidak melebihi baku mutu yaitu Kelas 1 sebesar 2 mg/l, Sungai Brantas melebihi baku mutu Kelas 1 sebesar 2 dan Kelas 2 sebesar 3. Ploso, Kunci Kanan, Dam Margo Mulyo, Dam Kedung Soko telah melebihi baku mutu Kelas I, Kelas II, dan Kelas III, sedangkan Samping Gedung Juang telah melebihi baku mutu Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV. Nilai konsentrasi BOD terendah adalah pada titik Sungai Kedung Suko sebesar 1,79 mg/l, sedangkan nilai BOD tertinggi adalah pada titik samping Gedung Juang sebesar 25,3 mg/l.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pada parameter *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang mengukur kandungan oksigen untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air, maka kualitas air sungai pada beberapa segmen di Kabupaten Nganjuk tidak melebihi baku mutu yaitu sebesar 25 mg/l.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air di Jawa Timur Tahun 2017, maka kondisi kualitas air sungai pada WS Brantas mengalami penurunan yang disebabkan karena pencemaran air yang berasal dari aktivitas domestik. Indeks kualitas air WS Brantas termasuk dalam kategori kondisi "Waspada" dengan nilai indeks kualitas air 47,48 maka perlu dilakukan upaya tambahan untuk mengembalikan kualitas air tersebut.

#### 2.1.1.6.4 Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. menyediakan TPS, TPST dan/atau TPA di tempat yang telah ditentukan;
- c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
- d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
- e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA; dan
- f. memroses sampah di TPA.

Prinsip pengolahan sampah orang pribadi atau badan wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah di daerah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dan penanganan sampah di TPA secara terpadu dilakukan dengan *system control landfill* atau *sanitary landfill*.

Berdasarkan *study masterplan* persampahan Bappeda Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa, sistem pengelolaan sampah terpadu merupakan sistem yang menerapkan prinsip dasar dari sistem manajemen lingkungan. Hal tersebut akan dapat berjalan dengan baik jika mampu mengoptimalkan keterlibatan *stakeholder*, kesetaraan dan kemitraan, transparansi, kesetaraan kewenangan, kesetaraan tanggungjawab, pemberdayaan dan kerjasama. Sehingga untuk meningkatkan sistem persampahan Kabupaten Nganjuk direkomendasikan:

1. Peningkatan sarana dan prasarana sistem persampahan di kawasan perencanaan;
2. Perlunya kegiatan lanjutan sebagai respon dari aktivitas penyusunan *masterplan* Kabupaten Nganjuk berupa RPJM jaringan persampahan dan penyusunan DED sarana dan prasarana persampahan Kabupaten Nganjuk;
3. Rencana tindak jaringan persampahan Kabupaten Nganjuk.



Inovasi yang telah dilakukan antara lain pembuatan pencacah sampah organik non agitasi, pengadaan arisan jamban, pembayaran BPJS tenaga kerja dengan sampah

Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk saat ini mencapai 1.101.302 jiwa (data per-Juni 2018 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk), bila setiap orang menghasilkan sampah 2,5 liter/hari maka jumlah produksi sampah yang dihasilkan 425 m<sup>3</sup>/hr dan sampah yang terangkut hanya sebesar 150 m<sup>3</sup>/hr, sehingga masih terdapat 275 m<sup>3</sup>/hr yang belum terlayani.

Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Nganjuk dan jangkauan pelayanan saat ini berjumlah 4 (empat) unit, yaitu :

1. TPA Kedungdowo terletak di desa Kedungdowo Kecamatan Kota Nganjuk dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Nganjuk, Rejoso, Gondang, Bagor dan Sukomoro, dengan luas lahan 5 Ha dan sistem pengolahan sampah *control landfill*.
2. TPA Pandantoyo terletak di desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan cakupan wilayah perkotaan kecamatan Kertosono, Tanjunganom, Ngronggot, Patianrowo, dengan luas lahan 1,2 Ha dan sistem pengolahan sampah open dumping.
3. TPA Bendil terletak di desa Berbek Kecamatan Berbek dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Sawahan, Pace, Berbek, dengan luas lahan 1,2 Ha dan sistem pengolahan sampah open dumping.
4. TPA Tanjunganom terletak di Desa Warujayeng dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Tanjunganom sebagian Prambon dan Ngronggot.

Hasil-hasil program pembangunan tahun 2013-2017 yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11.  
Pencapaian Kinerja Sasaran  
Urusan Lingkungan Hidup Bidang Persampahan

No.	Sasaran		Satuan	Realisasi Kinerja				
	Uraian	Indikator Kinerja		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Prosentase luas cakupan pemukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah	%	37,00	60,11	60,11	60,11	88,72
		Prosentase sampah perkotaan yang terangkut ke tempat pembuangan akhir TPA	%	69,50	86,50	86,76	89,37	80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2018



### 2.1.2. Demografi

Penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017 sebesar 1.048.799 jiwa, dengan perincian 521.388 jiwa penduduk laki - laki dan 527.411 jiwa penduduk perempuan. Dalam lima tahun terakhir ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah terus, dari 1.033.597 jiwa pada tahun 2013 menjadi 1.048.799 pada tahun 2017, yang berarti pertumbuhan Penduduk selama 5 tahun rata-rata sebesar 0.45 persen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12.  
Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
2013	513.398	520.119	1.033.597	0,79%	844
2014	515.597	522.126	1.037.723	0,40%	848
2015	517.712	524.004	1.041.716	0,38%	851
2016	519.717	525.658	1.045.375	0,35%	854
2017	521.388	527.411	1.048.799	0,33%	857

Sumber : Susenas dan Sensus Penduduk BPS

Tabel 2.13.  
Jumlah Penyebaran Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk Tahun			
		2014	2015	2016	2017
Sawahan	111,38	36.726	36.862	36.984	37.121
Ngetos	78,41	34.610	34.695	34.768	34.854
Berbek	57,48	54.590	54.742	54.875	55.029
Loceret	68,65	69.912	70.083	70.230	70.402
Pace	51,05	59.454	59.504	59.535	59.586
Tanjunganom	75,54	111.540	112.140	112.709	112.699
Prambon	44,94	70.147	70.473	70.777	71.106
Ngronggot	52,94	77.282	77.744	78.184	78.653
Kertosono	24,79	53.029	53.124	53.202	53.298
Patianrowo	35,46	41.662	41.807	41.939	42.086
Baron	40,04	48.993	49.169	49.327	49.505
Gondang	114,18	50.678	50.784	50.873	50.978
Sukomoro	37,52	43.000	43.312	43.610	43.927
Nganjuk	23,48	67.615	67.962	68.288	68.639
Bagor	54,34	58.047	58.303	58.542	58.802
Wilangan	51,43	27.278	27.339	27.391	27.452



Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk Tahun			
		2014	2015	2016	2017
Rejoso	156,82	67.711	68.020	68.307	68.620
Ngluyu	89,77	13.806	13.820	13.829	13.844
Lengkong	71,99	31.800	31.991	32.011	32.123
Jatikalen	48,71	19.843	19.922	19.994	20.075
<b>Jumlah</b>	<b>1.288,92</b>	<b>1.037.723</b>	<b>1.041.716</b>	<b>1.045.375</b>	<b>1.048.799</b>

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2015 - 2017

Dilihat dari data sebaran penduduk di 20 Kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Tanjunganom, Ngronggot dan Prambon, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Ngluyu, Jatikalen dan Wilangan. Laju pertumbuhan penduduk di setiap Kecamatan tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14.  
Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun		
	2015	2016	2017
Sawahan	0,37	0,33	0,37
Ngetos	0,25	0,21	0,25
Berbek	0,28	0,24	0,28
Loceret	0,24	0,21	0,24
Pace	0,08	0,05	0,09
Tanjunganom	0,54	0,51	-0,01
Prambon	0,46	0,43	0,46
Ngronggot	0,60	0,57	0,60
Kertosono	0,18	0,15	0,18
Patianrowo	0,35	0,32	0,35
Baron	0,36	0,32	0,36
Gondang	0,21	0,18	0,21
Sukomoro	0,73	0,69	0,73
Nganjuk	0,51	0,48	0,51
Bagor	0,44	0,41	0,44
Wilangan	0,22	0,19	0,22
Rejoso	0,46	0,42	0,46
Ngluyu	0,10	0,07	0,11
Lengkong	0,35	0,31	0,35
Jatikalen	0,40	0,36	0,41
<b>Jumlah</b>	<b>0,38</b>	<b>0,35</b>	<b>0,33</b>

Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka 2016-2018



3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berturut-turut adalah Kecamatan Nganjuk, Kertosono, dan Prambon. Sedangkan 3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah berturut-turut adalah Ngluyu, Sawahan, dan Lengkong. Data kepadatan penduduk per Kecamatan dapat dilihat di berikut ini:

Tabel 2.15.  
Kepadatan penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )			
		2014	2015	2016	2017
Sawahan	111,38	317	318	319	327
Ngetos	78,41	575	576	577	606
Berbek	57,48	1.130	1.133	1.136	1.220
Loceret	68,65	1.018	1.446	1.012	1.089
P a c e	51,05	1.227	866	1.229	1.358
Tanjunganom	75,54	1.574	1.583	1.591	1.655
Prambon	44,94	1.704	1.712	1.720	1.757
Ngronggot	52,94	1.459	1.467	1.475	1.549
Kertosono	24,79	2.339	2.342	2.346	2.479
Patianrowo	35,46	1.171	1.175	1.178	1.258
Baron	40,04	1.331	1.336	1.340	1.453
Gondang	114,18	528	529	530	570
Sukomoro	37,52	1.215	1.224	1.232	1.298
Nganjuk	23,48	2.994	3.008	3.023	3.070
Bagor	54,34	1.135	1.140	1.145	1.197
Wilangan	51,43	539	540	541	583
Rejoso	156,82	446	449	450	466
Ngluyu	89,77	160	160	161	163
Lengkong	71,99	365	366	367	384
Jatikalen	48,71	472	474	467	487
<b>Jumlah</b>	<b>1.288,92</b>	<b>20 682</b>	<b>20 818</b>	<b>19 085</b>	<b>22 969</b>

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka tahun 2014 - 2018

Penduduk di Kabupaten Nganjuk mayoritas memeluk agama Islam. Pada tahun 2017 persentase jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 99,07%. Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Jumlah pemeluk agama berikutnya adalah Kristen Protestan dengan persentase jumlah pemeluk sebesar 0.630%. persentase jumlah penduduk berikutnya adalah beragama Kristen Katolik sebesar 0,23%, sisanya adalah penduduk yang memeluk agama Hindu 0,031%, agama Budha sebesar 0,021% dan sisanya adalah Kong Hu Cu 0,001% dan Lain-lain kepercayaan sebesar 0,017%. Komposisi ini menunjukkan bahwa agama Islam menjadi agama mayoritas dan penentu bagi stabilitas sosial masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Data jumlah pemeluk agama bisa dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.16.  
Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Nganjuk per Kecamatan

No	Kecamatan	Agama	Tahun		
			2015	2016	2017
1	Sawahan	Islam	40.791	41.873	37.754
		Kristen	170	173	155
		Katholik	12	13	0
		Hindu	1	0	0
		Budha	1	1	0
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	12	10	0
2	Ngetos	Islam	41.232	41.830	36.475
		Kristen	48	49	43
		Katholik	19	16	8
		Hindu	2	2	1
		Budha	0	0	0
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	3	3	0
3	Berebek	Islam	64.882	65.463	58.708
		Kristen	187	180	141
		Katholik	122	118	100
		Hindu	4	5	1
		Budha	1	2	1
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	66	65	0
4	Loceret	Islam	82.044	82.687	73.732
		Kristen	559	526	415
		Katholik	422	425	370
		Hindu	322	314	279
		Budha	10	8	6
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	27	27	1
5	Pace	Islam	73.907	75.491	65.394
		Kristen	438	424	370
		Katholik	73	72	61
		Hindu	1	0	1
		Budha	1	1	1
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	33	36	0
6	Tanjunganom	Islam	131.537	131.721	72.043
		Kristen	718	662	169
		Katholik	384	372	105
		Hindu	11	9	2
		Budha	19	17	0
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	22	67	1
7	Prambon	Islam	83.948	83.087	81.877
		Kristen	211	204	167
		Katholik	136	134	44
		Hindu	3	5	7
		Budha	5	0	1



No	Kecamatan	Agama	Tahun		
			2015	2016	2017
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	39	40	0
8	Ngronggot	Islam	93.416	94.727	54.223
		Kristen	219	202	1.603
		Katholik	55	55	393
		Hindu	5	9	13
		Budha	1	1	60
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	53	48	2
9	Kertosono	Islam	63.740	63.106	44.449
		Kristen	1999	1911	314
		Katholik	515	483	35
		Hindu	22	21	4
		Budha	93	89	1
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	5	9	0
10	Patianrowo	Islam	49.782	49.933	53.133
		Kristen	419	400	278
		Katholik	50	47	70
		Hindu	5	4	0
		Budha	0	1	1
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	6	6	0
11	Baron	Islam	60.150	60.952	116.340
		Kristen	337	329	550
		Katholik	87	84	324
		Hindu	0	1	7
		Budha	1	1	14
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	26	23	0
12	Gondang	Islam	60.303	60.186	45.730
		Kristen	303	294	201
		Katholik	58	55	16
		Hindu	7	4	3
		Budha	2	1	6
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	8	8	0
13	Sukomoro	Islam	50.726	51.890	66.603
		Kristen	260	241	1.494
		Katholik	16	20	853
		Hindu	0	3	22
		Budha	2	6	138
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	22	19	9
14	Nganjuk	Islam	68.682	73.445	60.831
		Kristen	1812	1728	298
		Katholik	1044	1015	100
		Hindu	31	26	0
		Budha	180	168	2
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	34	39	1



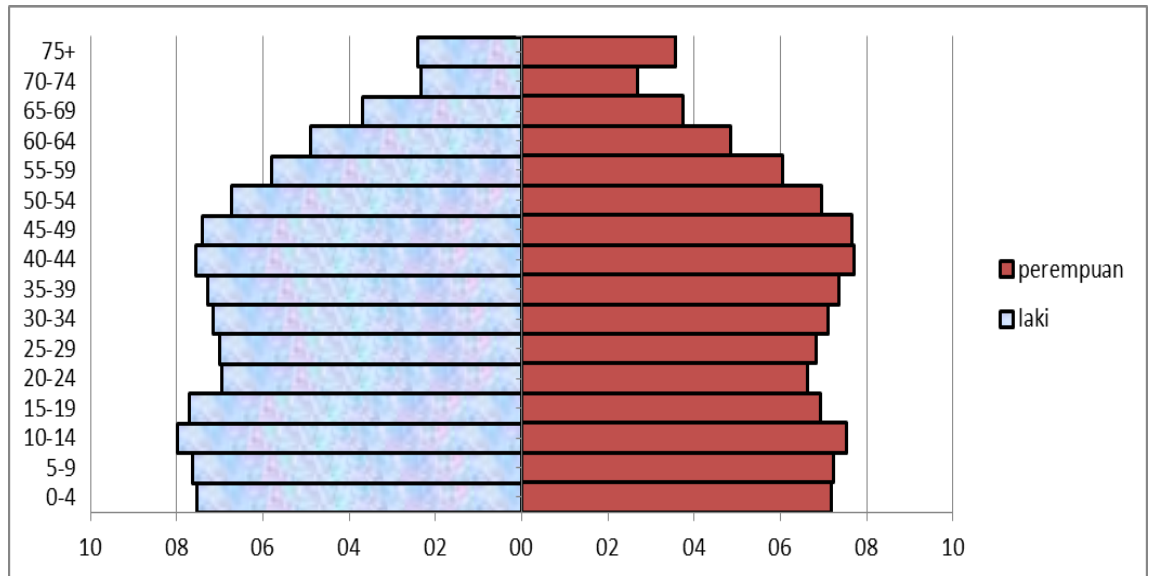
No	Kecamatan	Agama	Tahun		
			2015	2016	2017
		Kepercayaan			
15	Bagor	Islam	66.319	67.527	29.485
		Kristen	365	352	36
		Katholik	116	115	41
		Hindu	3	3	1
		Budha	29	2	2
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	29	29	0
16	Wilangan	Islam	33.329	33.929	70.529
		Kristen	42	45	232
		Katholik	48	47	37
		Hindu	1	1	2
		Budha	8	8	1
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	12	8	0
17	Rejoso	Islam	77.570	78.059	54.430
		Kristen	303	287	243
		Katholik	58	51	37
		Hindu	7	4	4
		Budha	2	1	1
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	5	5	0
18	Ngluyu	Islam	15.549	15.107	14.010
		Kristen	44	42	32
		Katholik	3	4	5
		Hindu	0	0	0
		Budha	0	0	0
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	3	1	0
19	Lengkong	Islam	36.653	36.532	33.203
		Kristen	142	155	139
		Katholik	22	29	16
		Hindu	1	1	1
		Budha	0	0	0
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	13	8	0
20	Jatikalen	Islam	22.527	22.582	20.424
		Kristen	58	57	48
		Katholik	8	8	7
		Hindu	1	1	0
		Budha	0	0	0
		Konghuchu/ Penghayat Kepercayaan	5	5	0

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Nganjuk 2018

Hasil Sensus Penduduk tahun 2017 menunjukkan bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh penduduk muda dan dewasa. Namun demikian komposisi penduduk anak-anak dibawah 10-14 tahun masih cukup tinggi yaitu 24.62 persen. Sedangkan penduduk pada kelompok umur 20–24 tahun mengalami penurunan, hal ini bisa dijelaskan karena sebagian penduduk

pada kelompok umur tersebut tinggal di luar wilayah Kabupaten Nganjuk baik untuk bekerja maupun melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi. Pada Usia kerja kelompok umur yang paling banyak adalah umur 40-44 tahun sebesar 15,27 persen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik 2.1 yang diilustrasikan pada gambar piramida penduduk dan tabel berikut ini:

Grafik 2.1  
Grafik Struktur Penduduk Kabupaten Nganjuk  
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur  
Tahun 2017



Sumber : BPS Kab. Nganjuk 2018



Tabel 2.17.  
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur  
Tahun 2017

Umur	Laki-laki	Perempuan
0 - 4 Tahun	39.938	38.329
5 - 9 Tahun	40.382	38.599
10 - 14 Tahun	41.919	39.894
15 - 19 Tahun	40.560	36.773
20 - 24 Tahun	36.061	34.960
25 - 29 Tahun	36.547	36.046
30 - 34 Tahun	37.865	38.158
35 - 39 Tahun	38.449	39.079
40 - 44 Tahun	39.711	40.824
45 - 49 Tahun	38.548	40.311
50 - 54 Tahun	34.616	36.079
55 - 59 Tahun	29.697	30.774
60 - 64 Tahun	24.530	24.324
65 - 69 Tahun	18.374	19.154
70 - 74 Tahun	11.925	13.910
75 Th Keatas	12.267	18.475
<b>Jumlah</b>	<b>521.388</b>	<b>527.411</b>

Sumber : Susenas 2017 diolah

Tabel 2.18.  
Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP di Kabupaten Nganjuk  
per Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Sawahan	Wajib Memiliki KTP	32.645	32064	32832	33607	33364
		Memiliki KTP	31.578	30982	31761	31857	31091
		Belum Memiliki KTP	1067	1082	1071	1750	2273
2	Ngetos	Wajib Memiliki KTP	32883	31823	32772	33417	32667
		Memiliki KTP	31899	30847	31778	31806	30528
		Belum Memiliki KTP	984	976	994	1611	2139
3	Berebek	Wajib Memiliki KTP	50971	49906	51103	51876	51047
		Memiliki KTP	49.462	48465	49699	49520	47601
		Belum Memiliki KTP	1509	1441	1404	2356	3446



No.	Kecamatan		Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
4	Loceret	Wajib Memiliki KTP	66.245	63902	65346	66620	65125
		Memiliki KTP	64379	62125	63606	63609	61105
		Belum Memiliki KTP	1.866	1777	1740	3011	4020
5	Pace	Wajib Memiliki KTP	60395	57987	59521	60811	58288
		Memiliki KTP	58551	56247	57779	57863	54515
		Belum Memiliki KTP	1844	1740	1742	2948	3773
6	Prambon	Wajib Memiliki KTP	66256	64198	65685	66928	64813
		Memiliki KTP	64301	62240	63742	63711	60688
		Belum Memiliki KTP	1955	1958	1943	3217	4125
7	Ngronggot	Wajib Memiliki KTP	73265	71467	74336	76115	73648
		Memiliki KTP	71256	69649	72311	72650	69026
		Belum Memiliki KTP	2009	1818	2025	3465	4622
8	Kertosono	Wajib Memiliki KTP	51596	50443	51843	52686	50562
		Memiliki KTP	50250	49011	50525	50426	47469
		Belum Memiliki KTP	50.250	1432	1318	2260	3093
9	Patianrowo	Wajib Memiliki KTP	40.118	39111	39992	40660	40005
		Memiliki KTP	39022	38041	38927	38852	37500
		Belum Memiliki KTP	1096	1070	1065	1808	2505
10	Baron	Wajib Memiliki KTP	48129	46956	48010	48826	47505
		Memiliki KTP	46573	45486	46582	46559	44497
		Belum Memiliki KTP	1556	1470	1428	2267	3008
11	Tanjunganom	Wajib Memiliki KTP	105342	102109	104927	106912	104336
		Memiliki KTP	101898	98733	101552	101555	97402
		Belum Memiliki KTP	3444	3376	3375	5357	6934
12	Sukomoro	Wajib Memiliki KTP	40674	39367	40318	41127	39977
		Memiliki KTP	39541	38287	39243	39352	37511
		Belum Memiliki KTP	1133	1080	1075	1775	2466
13	Nganjuk	Wajib Memiliki KTP	60588	58998	60470	61621	60467
		Memiliki KTP	58977	57486	58925	58928	56755
		Belum Memiliki KTP	1611	1512	1545	2693	3712



No.	Kecamatan		Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
14	Bagor	Wajib Memiliki KTP	53270	55587	53277	54318	53068
		Memiliki KTP	51607	50320	51650	51751	49747
		Belum Memiliki KTP	1663	5267	1627	2567	3321
15	Wilangan	Wajib Memiliki KTP	27056	26429	27119	27163	27105
		Memiliki KTP	26299	25670	26353	26414	25444
		Belum Memiliki KTP	757	759	766	749	1661
16	Rejoso	Wajib Memiliki KTP	61443	60386	61653	62768	62040
		Memiliki KTP	59352	58354	59641	59608	58032
		Belum Memiliki KTP	2091	2032	2012	3160	4008
17	Gondang	Wajib Memiliki KTP	47542	46801	47685	48415	48040
		Memiliki KTP	46028	45279	46222	46049	44915
		Belum Memiliki KTP	1514	1522	1463	2366	3125
18	Ngluyu	Wajib Memiliki KTP	12355	12222	12381	12561	12601
		Memiliki KTP	11832	11703	11894	11859	11712
		Belum Memiliki KTP	523	519	487	702	889
19	Lengkong	Wajib Memiliki KTP	28729	28434	29001	29542	29189
		Memiliki KTP	27759	27431	28000	27994	27194
		Belum Memiliki KTP	970	1003	1001	1548	1995
20	Jatikalen	Wajib Memiliki KTP	18163	17902	18211	18494	18149
		Memiliki KTP	17477	17153	17825	17529	17039
		Belum Memiliki KTP	686	749	386	965	1110

Sumber: DispendukCapil Kabupaten Nganjuk, 2018

Pelayanan publik dibidang kependudukan salah satunya adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Cakupan kepemilikan merupakan indikator yang menggambarkan kesadaran masyarakat dan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Data kepemilikan KTP penduduk Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel di atas.



Tabel 2.19.  
Jumlah Penduduk yang Memiliki KK di Kabupaten Nganjuk  
Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Keterangan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Sawahan	Jumlah KK	12.213	12.605	13.137	13.074
		Memiliki KK	12.203	12.584	13.112	13.071
		Belum memiliki KK	10	21	25	3
2	Ngetos	Jumlah KK	11.948	12.432	12.937	12.815
		Memiliki KK	11.939	12.412	12.910	12.810
		Belum memiliki KK	9	20	27	5
3	Berebek	Jumlah KK	18.509	19.509	29.261	19.940
		Memiliki KK	18.495	19.479	28.212	19.915
		Belum memiliki KK	14	30	1.049	25
4	Loceret	Jumlah KK	23.780	24.916	25.995	25.430
		Memiliki KK	23.761	24.856	25.914	25.401
		Belum memiliki KK	19	60	81	29
5	Pace	Jumlah KK	21.878	23.078	24.724	23.066
		Memiliki KK	21.804	23.022	24.200	23.049
		Belum memiliki KK	74	56	524	17
6	Prambon	Jumlah KK	22.967	24.125	25.347	24.456
		Memiliki KK	22.963	24.076	25.180	24.429
		Belum memiliki KK	4	49	167	27
7	Ngronggot	Jumlah KK	25.752	27.296	28.637	27.663
		Memiliki KK	25.702	27.226	28.593	27.621
		Belum memiliki KK	50	70	44	42
8	Kertosono	Jumlah KK	18.635	19.417	20.214	19.330
		Memiliki KK	18.628	19.353	20.127	19.297
		Belum memiliki KK	7	64	87	33
9	Patianrowo	Jumlah KK	14.179	14.806	15.375	15.105
		Memiliki KK	14.172	14.768	15.323	15.086
		Belum memiliki KK	7	38	52	19
10	Baron	Jumlah KK	16.751	17.559	18.471	17.793
		Memiliki KK	16.739	17.519	18.424	17.769
		Belum memiliki KK	12	40	47	24
11	Tanjunganom	Jumlah KK	37.078	38.702	41.355	39.577
		Memiliki KK	37.063	38.623	40.243	39.526
		Belum memiliki KK	15	79	1.112	51
12	Sukomoro	Jumlah KK	15.342	16.028	16.697	16.163
		Memiliki KK	15.335	15.999	16.658	16.125
		Belum memiliki KK	7	29	39	38
13	Nganjuk	Jumlah KK	22.138	23.210	24.358	23.812
		Memiliki KK	22.118	23.138	24.223	23.752
		Belum memiliki KK	20	72	135	60



No.	Kecamatan	Keterangan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
14	Bagor	Jumlah KK	19.957	20.953	21.840	21.316
		Memiliki KK	19.946	20.917	21.820	21.296
		Belum memiliki KK	11	36	20	20
15	Wilangan	Jumlah KK	9.639	10.158	10.688	10.398
		Memiliki KK	9.636	10.142	10.663	10.389
		Belum memiliki KK	3	16	25	9
16	Rejoso	Jumlah KK	21.954	23.057	24.002	23.741
		Memiliki KK	21.913	23.019	23.956	23.727
		Belum memiliki KK	41	38	46	14
17	Gondang	Jumlah KK	17.163	18.088	18.844	18.665
		Memiliki KK	17.146	18.060	18.803	18.642
		Belum memiliki KK	17	28	41	23
18	Ngluyu	Jumlah KK	4.256	4.393	4.564	4.605
		Memiliki KK	4.250	4.389	4.554	4.605
		Belum memiliki KK	6	4	10	-
19	Lengkong	Jumlah KK	11.124	11.538	11.956	11.703
		Memiliki KK	11.120	11.517	11.927	11.690
		Belum memiliki KK	4	21	29	13
20	Jatikalen	Jumlah KK	6.851	7.180	7.480	7.365
		Memiliki KK	6.841	7.163	7.461	7.362
		Belum memiliki KK	10	17	19	3

Sumber: *DispendukCapil Kabupaten Nganjuk, 2018*

Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data lengkap tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Nganjuk merupakan indikator yang menggambarkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kependudukan. Data tentang kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel diatas.

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak bisa mengetahui siapa orangtuanya yang sah menurut hukum negara. Cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan indikator pemerintah daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penerbitan akta kelahiran, diantaranya melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan kependudukan *Mobile*. Data jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Nganjuk bisa dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.20.  
Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Nganjuk per Kecamatan

No.	Kecamatan	Keterangan	Tahun				
			2013	2104	2015	2016	2017
1	Sawahan	Wajib Memiliki Akta Lahir	20.041	40.441	41.319	41.854	41.121
		Memiliki Akta Lahir	17.803	12.567	13.774	14.743	15.312
		Belum Memiliki Akta Lahir	2.238	27.874	27.545	27.111	25.809
2	Ngetos	Wajib Memiliki Akta Lahir	19.539	40.455	41.341	42.056	40.201
		Memiliki Akta Lahir	17.057	9.874	10.723	11.252	11.856
		Belum Memiliki Akta Lahir	2.482	30.581	30.618	30.804	28.345
3	Berebek	Wajib Memiliki Akta Lahir	21.197	64.150	65.278	65.250	63.673
		Memiliki Akta Lahir	20.260	19.059	20.098	20.822	21.741
		Belum Memiliki Akta Lahir	937	45.091	45.180	44.428	41.932
4	Loceret	Wajib Memiliki Akta Lahir	25.013	81.761	83.290	83.596	80.653
		Memiliki Akta Lahir	24.147	22.660	24.137	25.263	26.480
		Belum Memiliki Akta Lahir	866	59.101	59.153	58.333	54.173
5	Pace	Wajib Memiliki Akta Lahir	21.944	73.702	74.424	74.503	72.076
		Memiliki Akta Lahir	21.627	19.928	33.369	34.387	35.527
		Belum Memiliki Akta Lahir	317	53.774	41.055	40.116	36.549
6	Prambon	Wajib Memiliki Akta Lahir	29.864	82.100	84.121	83.274	79.650
		Memiliki Akta Lahir	27.825	19.822	21.341	22.312	23.634
		Belum Memiliki Akta Lahir	2.039	62.278	62.780	60.962	56.016
7	Ngronggot	Wajib Memiliki Akta Lahir	29.909	90.789	93.488	92.928	90.581
		Memiliki Akta Lahir	27.774	14.901	16.623	17.821	19.291
		Belum Memiliki Akta Lahir	2.135	75.888	76.865	75.107	71.290
8	Kertosono	Wajib Memiliki Akta Lahir	29.839	64.127	66.293	66.304	61.908
		Memiliki Akta Lahir	27.703	29.474	22.149	23.688	32.542
		Belum Memiliki Akta Lahir	2.136	34.653	44.144	42.616	29.366
9	Patianrowo	Wajib Memiliki Akta Lahir	20.839	49.541	50.272	51.120	48.765
		Memiliki Akta Lahir	18.333	14.991	15.875	16.516	17.256
		Belum Memiliki Akta Lahir	2.506	34.550	34.397	34.604	31.509



No.	Kecamatan	Keterangan	Tahun				
			2013	2104	2015	2016	2017
10	Baron	Wajib Memiliki Akta Lahir	20.427	59.469	60.528	60.925	58.552
		Memiliki Akta Lahir	18.832	16.077	17.015	17.201	18.041
		Belum Memiliki Akta Lahir	1.595	43.392	43.513	43.724	40.511
11	Tanjunganom	Wajib Memiliki Akta Lahir	46.353	129.378	132.771	133.664	128.559
		Memiliki Akta Lahir	41.919	38.108	40.579	42.269	44.034
		Belum Memiliki Akta Lahir	4.434	91.270	92.192	91.395	84.525
12	Sukomoro	Wajib Memiliki Akta Lahir	19.460	50.257	51.036	52.016	50.410
		Memiliki Akta Lahir	16.933	13.431	14.361	25.055	25.846
		Belum Memiliki Akta Lahir	2.527	36.826	36.675	26.961	24.564
13	Nganjuk	Wajib Memiliki Akta Lahir	33.741	69.247	71.924	73.958	74.715
		Memiliki Akta Lahir	30.133	30.531	36.152	39.466	40.655
		Belum Memiliki Akta Lahir	3.608	38.716	35.772	34.492	34.060
14	Bagor	Wajib Memiliki Akta Lahir	20.937	65.667	66.877	67.764	65.789
		Memiliki Akta Lahir	18.065	19.697	20.874	21.525	22.534
		Belum Memiliki Akta Lahir	2.872	45.970	46.003	46.239	43.255
15	Wilangan	Wajib Memiliki Akta Lahir	17.245	32.701	33.401	34.220	33.081
		Memiliki Akta Lahir	14.515	4.401	5.026	4.437	4.943
		Belum Memiliki Akta Lahir	2.730	28.300	28.375	29.783	28.138
16	Rejoso	Wajib Memiliki Akta Lahir	31.750	75.875	78.127	79.349	77.318
		Memiliki Akta Lahir	25.989	24.167	25.516	26.289	28.376
		Belum Memiliki Akta Lahir	5.761	51.708	52.611	53.060	48.942
17	Gondang	Wajib Memiliki Akta Lahir	18.762	59.197	60.611	61.606	59.289
		Memiliki Akta Lahir	17.248	16.683	17.928	18.639	19.463
		Belum Memiliki Akta Lahir	1.514	42.154	42.683	42.967	39.826
18	Ngluyu	Wajib Memiliki Akta Lahir	12.875	15.100	15.596	16.242	15.091
		Memiliki Akta Lahir	10.611	3.711	3.957	4.054	4.195
		Belum Memiliki Akta Lahir	2.264	11.389	11.639	12.188	10.896
19	Lengkong	Wajib Memiliki Akta Lahir	17.602	35.949	36.844	37.306	36.031
		Memiliki Akta Lahir	13.645	11.065	11.636	11.791	12.477



No.	Kecamatan	Keterangan	Tahun				
			2013	2104	2015	2016	2017
		Belum Memiliki Akta Lahir	3.957	24.884	25.208	25.335	23.554
20	Jatikalen	Wajib Memiliki Akta Lahir	17.264	21.934	22.632	23.273	22.332
		Memiliki Akta Lahir	13.938	7.247	7.714	7.932	8.237
		Belum Memiliki Akta Lahir	3.326	14.687	14.918	15.341	14.095

Sumber: *DispendukCapil Kabupaten Nganjuk, 2018*

Jenis Pekerjaan dan Pendidikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2017, persentase jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.21.**  
**Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2017**

Pendidikan		Pencari Kerja			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1		2	3	4	5
1.	Tidak Tamat SD	0	1	1	0.05
2.	SD	27	100	127	5.75
3.	SLTP	105	398	503	22.79
4.	SLTA				
	- SMA	289	300	589	26.69
	- SMK	302	169	471	21.34
5.	Sarjana Muda	51	106	157	7.11
6.	Sarjana	166	193	359	16.27
7.	S-2	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>					
	2017	940	1267	2.207	100
	2016	2.098	3.123	5.221	100
	2015	1.111	1.256	2.367	100

Sumber : *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka tahun 2018*

Jumlah pencari kerja tahun 2017 didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) sebanyak 589 orang atau sebesar 26,68%. Disusul kemudian lulusan Sekolah Menengah Atas (SMP) sebanyak 503 orang atau sebesar 22,79%. Jumlah pencari kerja sedikit menurun pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016. Namun demikian, komposisi tingkat pendidikan pencari kerja tidak berubah selama hampir 5 tahun berturut-turut. Data ini menunjukkan bahwa tren pencari kerja di Kabupaten Nganjuk berasal dari sekolah kejuruan yang memang disiapkan untuk siap kerja.

Sedangkan, apabila dilihat dari jenis lowongan kerja, maka pada tahun 2017 lowongan kerja sebagai berikut:

Tabel 2.22.  
Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 (000)

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	151.0	43.1	194.0
Industri	31.3	21.1	52.4
Konstruksi	27.8	0.7	28.5
Perdagangan	46.6	77.8	124.4
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	14.6	1.1	15.7
Keuangan	3.3	1.0	4.3
Jasa Kemasyarakatan	28.7	36.2	64.9
Lainnya *)	3.6	0.0	3.6
<b>Jumlah</b>	<b>306.9</b>	<b>181.0</b>	<b>487.8</b>

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk 2017

Tabel 2.23.  
Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 – 2017 (persen)

Lapangan Pekerjaan Utama	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian	42.4	46.0	40.7	41.0	43.4	-	39.8
Industri	14.3	14.0	12.1	11.3	8.6	-	10.7
Konstruksi	4.3	6.3	4.3	6.1	10.1	-	5.8
Perdagangan	22.1	19.0	22.3	22.0	19.8	-	25.5
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.3	2.1	2.5	2.9	2.6	-	3.2
Keuangan	1.0	0.7	1.1	1.8	1.7	-	0.9
Jasa Kemasyarakatan	0.0	9.8	14.8	12.6	13.3	-	13.3
Lainnya *)	14.6	2.1	2.1	2.3	0.4	-	0.7
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Sumber : Sakernas BPS 2017

Lowongan kerja terbanyak pada tahun 2017 adalah sektor pertanian yang mencapai 194.0 (ribu) orang dengan persentase 39.8%, disusul sektor perdagangan yang mencapai 124.4 (ribu) orang atau 25.5%, jasa kemasyarakatan sebesar 64.9 (ribu) orang atau 13.3% dan terakhir adalah sektor keuangan dan lainnya masing-masing sebesar 4.3 (ribu) orang dan 3.6 (ribu) orang. Jenis lowongan kerja mengalami pergeseran dari tahun ke tahun, yaitu dari sektor agraris ke sektor industri. Bahkan pada tahun 2017 ini lowongan kerja pada sektor agraris mulai berkurang dan bergeser ke sektor industri. Sehingga, ke depan dibutuhkan banyak tenaga-tenaga terampil lulusan SMK.

### 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Nganjuk dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (Agraris). Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19.9 persen dari luas wilayah, belum termasuk untuk sektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Dalam perkembangannya, di Kabupaten Nganjuk mulai tumbuh perekonomian yang ditopang oleh industri dan perdagangan. Hal ini terjadi seiring dengan pembangunan infrastruktur dasar perhubungan seperti jalan tol dan jalur ganda kereta api.

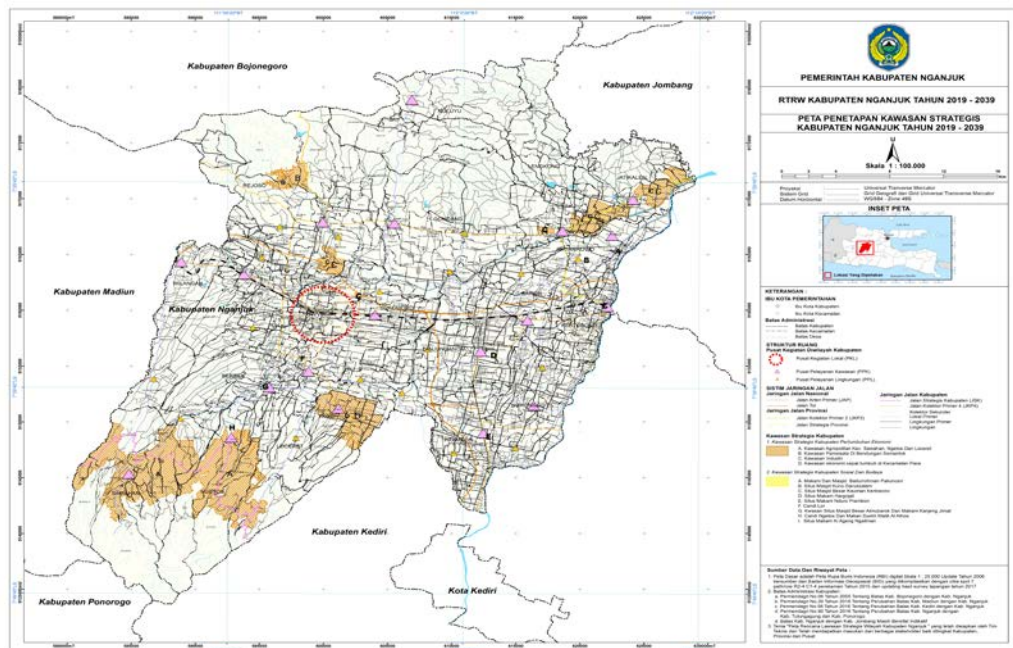
Mempertimbangkan kondisi dan perkembangan tersebut, kawasan strategis di wilayah kabupaten ditentukan berdasarkan sudut kepentingan yang meliputi:

a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi :

1. Kawasan strategis agropolitan lingkaran Wilis dan agropolitan Sukomoro dan sekitarnya;

Kawasan strategis Lingkaran Wilis secara geografi berada di daerah pegunungan Wilis yang meliputi wilayah Kecamatan Sawahan, Ngetos, dan Loceret. Kawasan ini memiliki potensi produk Agro antara lain padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, dan cengkeh. Produk agro lainnya adalah durian, duku, alpukat, manggis, jeruk, rambutan, salak, mangga, serta tanaman biofarmaka. Selain potensi Agro, Kawasan Selingkar Wilis memiliki potensi sektor pariwisata dan budaya.

Gambar 2.2  
Peta Wilayah Kabupaten Nganjuk



Sumber : diolah dari data Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikompilasikan dengan citra spot 7 path/row Review RTRW kab. Nganjuk tahun 2018

Tabel 2.24  
Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi

No	Kecamatan	Padi		Jagung		Ketela Pohon		Kacang Tanah		Cengkeh	
		Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Kw)	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Kw)	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Kw)	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Kw)	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Kw)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sawah	3.386	192.141,43	1.355	76.566,84	940	284.240	453	2.070	1.327,0	13.740
2	Ngetos	2.438	137.926,93	1.620	93.058,60	94	22.781	22	418	371	223
3	Loceret	5.604	355.230,03	3.065	204.158,74	-	-	420	448	28	11,3

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2018

2. Kawasan strategis perbatasan Jombang-Nganjuk-Kediri;

Tabel 2.25  
Kawasan strategis perbatasan Jombang-Nganjuk-Kediri

No	Kecamatan	Usaha Perdagangan					
		Toko	Pasar	Warung	Jumlah Pedagang		
					Kecil	Menengah	Besar
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Kertosono	528	3	570	78	6	-
2	Pace	418	2	330	48	5	-
3	Jatikalen	125	1	128	8	-	-

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2018

3. Kawasan jalur jalan Jembatan Kelutan (Nganjuk)-Papar (Kediri);

Tabel 2.26  
Kawasan jalur jalan Jembatan Kelutan (Nganjuk)-Papar (Kediri)

No	Kecamatan	Usaha Perdagangan					
		Toko	Pasar	Warung	Jumlah Pedagang		
					Kecil	Menengah	Besar
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Ngronggot	7	1	512	102	4	-

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2018

4. Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri;

Tabel 2.27  
Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	2	3	4
1	Kertosono	3	589
2	Baron	2	134
3	Tanjunganom	4	220
4	Sukomoro	9	264
5	Nganjuk	9	776
6	Bagor	3	2.001
7	Wilangan	-	-

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2018

5. Kawasan pariwisata Bendungan Semantok;  
Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk Berlokasi di Kecamatan Rejoso dengan Luas Lahan 375,57 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir yang diperkirakan dapat mengairi lahan pertanian ± 1.400 Ha meliputi Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang, sedangkan fungsi yang lainnya direncanakan untuk pengembangan Kawasan Pariwisata dan diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar bendungan.
6. Kawasan sekitar *interchange* jalan tol dan perbatasan pembangunan bandara Kediri.  
*Interchange* jalan tol Ngawi – Kertosono (Nganjuk) berada di kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, sedangkan *Interchange* jalan tol Kertosono – Kediri berada di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon. Dengan adanya *interchange* jalan tol Ngawi – Kertosono maupun Kertosono – Kediri maka terbukanya akses sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.

Tabel 2.28  
Kawasan sekitar *interchange* jalan tol

No	Kecamatan	<i>Interchange</i>	Usaha Perdagangan						Industri	
			Toko	Pasar	Warung	Jumlah Pedagang			Besarnya dan Sedang	Tenaga Kerja
						Kecil	Menengah	Besar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nganjuk	<i>Interchange</i> jalan tol Ngawi – Kertosono	1.290	4	641	80	3	-	9	776
2	Prambon	<i>Interchange</i> jalan tol Kertosono – Kediri	584	5	314	108	-	-	4	79

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2018



Sedangkan keberadaan Bandara Kediri akan mendorong berkembangnya wilayah sekitar bandara yang meliputi pertumbuhan perekonomian, perumahan permukiman, perhotelan, infrastruktur pendukung, Lembaga Pendidikan Kedirgantaraan, kunjungan wisata dan lain sebagainya di Kecamatan Pace.

Tabel 2.29  
Perbatasan pembangunan bandara Kediri

No	Kecamatan	Usaha Perdagangan						Industri		Hotel	Restauran	Lembaga Pendidikan Kedirgantaraan
		Toko	Pasar	Warung	Jumlah Pedagang			Kecil dan Sedang	Tenaga Kerja			
					Kecil	Menengah	Besar					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Pace	418	2	330	2.157	32	20	272	654	-	-	-

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2018

- b. Kawasan strategis dari sudut sosial budaya di wilayah kabupaten, meliputi :
1. Candi Lor di Desa Candirejo Kecamatan Loceret;
  2. Candi Ngetos di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos;
  3. Masjid Al Mubarak dan Makam Kanjeng Jimat serta para Bupati Wilayah Nganjuk tempo dulu (Pangeran Sosrokusumo, Pangeran Singosari) berada di Desa Kacangan Kecamatan Berbek;
  4. Makam Syekh Suluki berada di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan;
  5. Makam Ki Ageng Ngaliman di Wilayah Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
  6. Makam Suro Mangunjoyo (Mbah Gedhong) Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu;
  7. Makam Sunan Ngatas Angin di Wilayah Ngatas Angin Kecamatan Ngetos;
  8. Gedung Pusaka Ngliman di Kecamatan Sawahan;
  9. Masjid Arfiyyah di Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos;
  10. Pura Kerta Bhuana Giri Willis di Desa Bajulan Kecamatan Loceret;
  11. Makam Sentono Kocek di Desa Pacekulon Kecamatan Pace;
  12. Masjid dan Makam kuno (Tumenggung Purwodiningrat, Tumenggung Suryodiningrat, Patilasan Tumenggung Kopek) Pakuncen di Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo;
  13. Monumen Jenderal Sudirman berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret;
  14. Monumen dan Museum Dr. Sutomo berada di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret;
  15. Museum Anjuk Ladang berada di Kota Nganjuk;
  16. Pura Kerta Bhuwana Giri Willis berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret;
  17. Pertapaan Sadepok Desa Ngliman Kecamatan Sawahan;
  18. Pertapaan Argojali Kecamatan Ngetos;
  19. Makam Ki Ageng Keniten Desa Karangsemi Kecamatan Gondang;
  20. Makam Eyang Mangundikoro Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk;
  21. Makam Mbah Sepet Desa Joho Kecamatan Pace;
  22. Patilasan Gajah Mada Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan sub DAS Widas, kawasan rawan bencana alam dan bencana gunung berapi berada di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan sebagian di Kecamatan Rejoso.

Adapun potensi pendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Nganjuk diantaranya dapat digambarkan dari data produktivitas pertanian sebagaimana tabel 2.109, data kunjungan wisatawan sebagaimana tabel 2.110, data okupansi hotel dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren meningkat (tahun 2016 yaitu 18,5% dan 2017 yaitu 21,27%).

#### 2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Dengan kondisi topografis Kabupaten Nganjuk yang sepanjang sisi selatannya berada di lereng gunung Wilis, serta di sisi utara merupakan pegunungan Kendeng serta dilalui oleh sungai Brantas dan Widas. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat menjanjikan namun juga memiliki potensi bencana alam yang cukup beragam, antara lain :

- a. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah, meliputi kawasan Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Loceret;
- b. Kawasan rawan banjir, meliputi wilayah Kecamatan Prambon, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Pace, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Jatikalen.

**Tabel 2.30.**  
**Jumlah Kejadian Bencana berdasarkan Jenis Bencana di Kabupaten Nganjuk**  
**Tahun 2013-2017**

No.	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bencana Tanah Longsor	12	9	4	12	10	12
2	Bencana Angin Puting Beliung	23	8	9	8	8	8
3	Bencana Kebakaran	13	4	21	1	2	40
4	Bencana Kekeringan	1	14	1	-	3	3
5	Bencana Banjir	13	-	20	41	12	5
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>35</b>	<b>68</b>

Sumber : BPBD Kab. Nganjuk

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kebijakan otonomi daerah memberikan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki di daerah untuk tujuan otonomi daerah dimaksud yaitu meliputi:

- (i). peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- (ii). peningkatan pelayanan umum (*public service*), dan
- (iii). peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab itu Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, baik urusan yang bersifat wajib maupun urusan



pilihan. Pemerintah daerah memiliki *local discretion* (keleluasaan bertindak) yang lebih besar untuk menyusun kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan memberdayakan masyarakat agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat diwujudkan.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di daerah dapat diukur antara lain dengan dua indikator penting, yaitu:

- (i) Indikator Makro Ekonomi Regional, yang antara lain meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat perkembangan harga (inflasi), tingkat pendapatan perkapita (PDRB Perkapita), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan dan lain sebagainya;
- (ii) Indikator Makro Sosial Regional, antara lain berupa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kemampuan daya beli masyarakat.

Secara makro ekonomi, maka indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari:

### 2.2.1. Pertumbuhan PDRB

#### 2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam waktu satu tahun. Apabila ditinjau dari segi pendapatan, merupakan jumlah dari semua pendapatan yang timbul karena ikut sertanya faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2013 - 2017.



Tabel 2.31.  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk  
Atas Dasar Harga Berlaku 2013-2017  
Dalam (Juta Rupiah)

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.253.964	5.676.820	6.218.380	6.765.758	7.168.862,1
2	Pertambangan dan Penggalian	300.068	359.803	400.047	429.684	497.321,7
3	Industri Pengolahan	1.974.963	2.197.618	2.439.876	2.689.528	2.976.421,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.046	7.310	8.020	9.505	10.330,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.038	19.172	20.987	23.144	25.334,4
6	Konstruksi	1.520.005	1.746.874	1.874.989	2.132.260	2.383.478,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.816.761	3.146.396	3.578.616	3.999.952	4.447.934,5
8	Transportasi dan Pergudangan	206.856	239.100	273.508	306.257	340.025,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	262.652	296.397	346.128	396.730	442.961,5
10	Informasi dan Komunikasi	689.681	745.858	824.618	911.622	1.006.116,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	344.751	384.955	433.345	483.303	525.241,3
12	Real Estate	251.276	270.696	312.478	342.771	371.349,4
13	Jasa Perusahaan	50.756	54.893	61.238	67.498	74.426,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	812.506	841.508	928.763	1.019.537	1.092.788,8
15	Jasa Pendidikan	595.520	675.173	740.986	803.179	869.516,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90.705	103.843	114.609	124.313	137.316,2
17	Jasa lainnya	428.988	482.043	548.293	597.874	642.279,7
<b>PDRB</b>		<b>15.624.542</b>	<b>17.248.469</b>	<b>19.124.890</b>	<b>21.102.921</b>	<b>23.011.704,9</b>

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka tahun 2014 - 2017

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan adanya rata-rata kenaikan setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah berkembang semakin membaik. Pertumbuhan PDRB selama 3 tahun masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil yaitu 10.87% tahun 2015, 10.34% tahun 2016 dan 9.04% di tahun 2017.



Tabel 2.32.  
Persentase PDRB Kabupaten Nganjuk  
Atas Dasar Harga Berlaku 2013-2017 dalam (%)

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,63	32,91	32,51	32,06	31,15
2	Pertambangan dan Penggalian	1,92	2,09	2,09	2,04	2,16
3	Industri Pengolahan	12,64	12,74	12,76	12,74	12,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	9,73	10,13	9,80	10,10	10,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,03	18,24	18,71	18,95	19,33
8	Transportasi dan Pergudangan	1,32	1,39	1,43	1,45	1,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,68	1,72	1,81	1,88	1,92
10	Informasi dan Komunikasi	4,41	4,32	4,31	4,32	4,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,21	2,23	2,27	2,29	2,28
12	Real Estate	1,61	1,57	1,63	1,62	1,61
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,20	4,88	4,86	4,83	4,75
15	Jasa Pendidikan	3,81	3,91	3,87	3,81	3,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,58	0,60	0,60	0,59	0,60
17	Jasa lainnya	2,75	2,79	2,87	2,83	2,79
<b>PDRB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka tahun 2014 - 2018



Sedangkan, berdasarkan kontribusi sektor usaha pada PDRB menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menempati urutan tertinggi meskipun dengan kontribusi yang semakin menurun, yaitu 33,63% tahun 2013 menurun menjadi sebesar 31,15% pada tahun 2017. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan tingkat kontribusi yang terus meningkat, yaitu 18,03% tahun 2013 naik menjadi 19,33% pada tahun 2017. Sedangkan, 2 sektor yang memiliki kontribusi PDRB di atas 10% ada 2, yaitu sektor Industri Pengolahan dengan perkembangan yang stabil dan pada tahun 2017 kontribusinya mencapai 12,93% dan sektor konstruksi sebesar 10,36% pada tahun 2017.

Apabila dilihat dari kelompok sektor, yaitu kelompok sektor primer (agraris), sekunder (industri dan pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa), maka PDRB Kabupaten Nganjuk menunjukkan adanya perkembangan yang menarik di mana kontribusi kelompok sektor terbesar adalah tersier di mana tahun 2017 sebesar 43.23%. Disusul kemudian kelompok sektor primer yaitu sebesar 33.31% tahun 2017 dan kontribusi paling kecil adalah kelompok sektor industri dan pengolahan yaitu 23.44% tahun 2017. Namun demikian data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa serapan lapangan kerja kelompok sektor industri dan pengolahan paling besar, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier belum mampu memberikan *multiplier effect* dalam serapan tenaga kerja meskipun kontribusinya paling besar.



Tabel 2.33.  
Kontribusi per sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Menurut  
Harga Konstan 2013-2017  
Tahun Dasar 2010 Dalam (Juta Rupiah)

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.433.540	4.538.475	4.698.475	4.850.647	4.975.498,2
2	Pertambangan dan Penggalian	269.963	283.290	296.067	309.265	334.147,8
3	Industri Pengolahan	1.745.526	1.836.091	1.940.455	1.650.885	2.180.373,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.332	7.500	7.575	8.135	8.452,7
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.668	15.974	16.854	17.762	18.844,3
6	Konstruksi	1.226.485	1.308.905	1.352.035	1.443.101	1.561.414,2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.456.956	2.655.858	2.850.801	3.032.854	3.254.304,4
8	Transportasi dan Pergudangan	183.719	198.627	212.979	228.491	244.568,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	233.886	250.492	271.070	293.909	318.271,5
10	Informasi dan Komunikasi	650.860	700.087	740.005	805.282	868.543,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	307.700	331.105	353.357	379.195	395.268,0
12	Real Estate	233.269	248.269	261.519	276.783	289.527,9
13	Jasa Perusahaan	44.767	47.634	50.382	53.197	56.545,6
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	687.052	696.115	737.673	773.854	798.757,1
15	Jasa Pendidikan	476.493	504.288	537.021	570.854	598.861,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77.956	87.278	88.947	94.157	99.791,2
17	Jasa lainnya	404.812	432.638	456.428	476.657	499.947,7
<b>PDRB</b>		<b>13.455.993</b>	<b>14.142.635</b>	<b>14.875.704</b>	<b>15.661.813</b>	<b>16.503.117,3</b>

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka tahun 2014 – 2018

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan adanya kenaikan setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah berkembang semakin membaik. Pertumbuhan PDRB selama 5 tahun masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil yaitu berkisar antara 5,10% sampai dengan 5,37% dengan rata-rata 5,24% sebagaimana pada tabel di atas.



Tabel 2.34.  
Persentase PDRB Kabupaten Nganjuk  
Atas Dasar Harga Konstan 2013-2017 Tahun Dasar 2010  
Dalam (%)

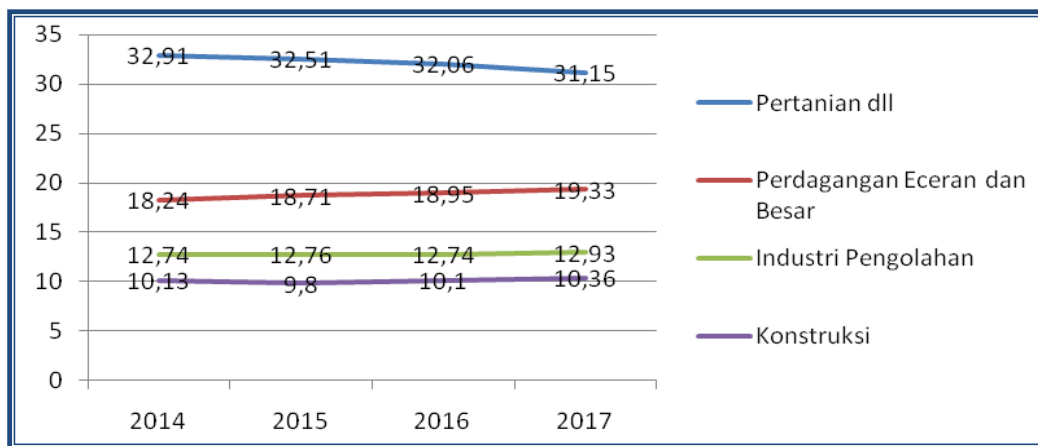
No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,95	32,09	31,56	30,97	29,33
2	Pertambangan dan Penggalian	2,01	2,00	1,99	1,97	2,07
3	Industri Pengolahan	12,97	12,98	13,04	10,54	13,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,50	0,50	0,50	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	9,11	9,26	9,09	9,21	9,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,26	18,78	19,16	19,36	20,07
8	Transportasi dan Pergudangan	1,37	1,40	1,43	1,46	1,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,74	1,77	1,82	1,88	1,98
10	Informasi dan Komunikasi	4,84	4,95	5,03	5,14	5,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	2,34	2,38	2,42	2,36
12	Real Estate	1,73	1,76	1,76	1,77	1,74
13	Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,11	4,92	4,96	4,94	4,73
15	Jasa Pendidikan	3,54	3,57	3,61	3,64	3,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,58	0,62	0,60	0,60	0,60
17	Jasa lainnya	3,01	3,06	3,07	3,04	3,01
<b>PDRB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka tahun 2018

Sedangkan, berdasarkan kontribusi sektor usaha pada PDRB menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menempati urutan tertinggi meskipun dengan kontribusi yang semakin menurun, yaitu 32,95% tahun 2013 menurun menjadi sebesar 29,33% pada tahun 2017. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan tingkat kontribusi yang terus meningkat, yaitu 18,26% tahun 2013 naik menjadi 20,07% pada tahun 2017. Sedangkan, sektor lain yang memiliki kontribusi PDRB di atas 10% hanya ada 1 sektor, yaitu sektor Industri Pengolahan dengan perkembangan yang stabil dan pada tahun 2017 kontribusinya mencapai 13,33%.

Apabila dilihat dari kelompok sektor, yaitu kelompok sektor primer (agraris), sekunder (industri dan pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa), maka PDRB Kabupaten Nganjuk menunjukkan adanya perkembangan yang menarik di mana kontribusi kelompok sektor terbesar adalah tersier di mana tahun 2017 sebesar 45.32%. Disusul kemudian kelompok sektor primer yaitu sebesar 31.4% tahun 2017 dan kontribusi paling kecil adalah kelompok sektor industri dan pengolahan yaitu 23.2% tahun 2017. Namun demikian data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa serapan lapangan kerja kelompok sektor industri dan pengolahan paling besar, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier belum mampu memberikan *multiplier effect* dalam serapan tenaga kerja meskipun kontribusinya paling besar.

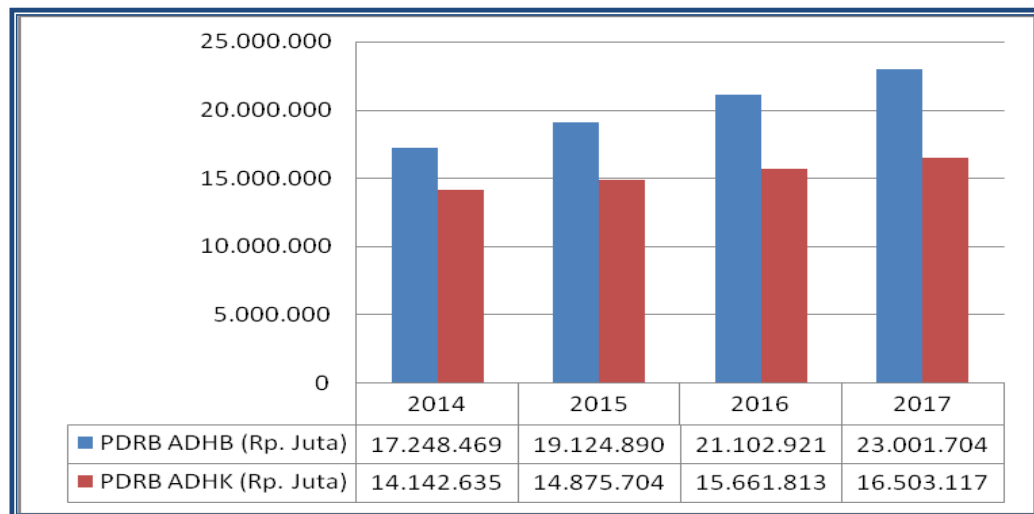
Grafik 2.2  
Perkembangan Kontribusi 4 Sektor Terbesar PDRB  
ADHB Kabupaten Nganjuk  
(Persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Nganjuk, 2018.

Perkembangan 4 sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB ADHB ada 4, yaitu pertanian, perdagangan eceran dan besar, industri pengolahan dan konstruksi. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar pada PDRB tetapi tren kontribusinya makin menurun, yaitu 32,91% tahun 2014 tinggal menjadi 31,15% tahun 2017. Sedangkan, untuk 3 sektor lainnya, tren kontribusi menunjukkan nilai yang semakin meningkat.

Grafik 2.3  
Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK tahun 2014-2017



Sumber : PDRB Kabupaten Nganjuk, 2018

### 2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nganjuk dihitung dari perkembangan PDRB menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2013-2017 rata-rata adalah 5,25 persen. Pertumbuhan sektoral paling tinggi adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,22 persen per tahun, kemudian sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,17 persen per tahun, dan sektor Informasi dan Komunikasi yaitu rata-rata 8,00 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan yang paling kecil adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu rata-rata sebesar 2,17 persen pertahun.



Tabel 2.35.  
Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Nganjuk  
Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Dalam (%)

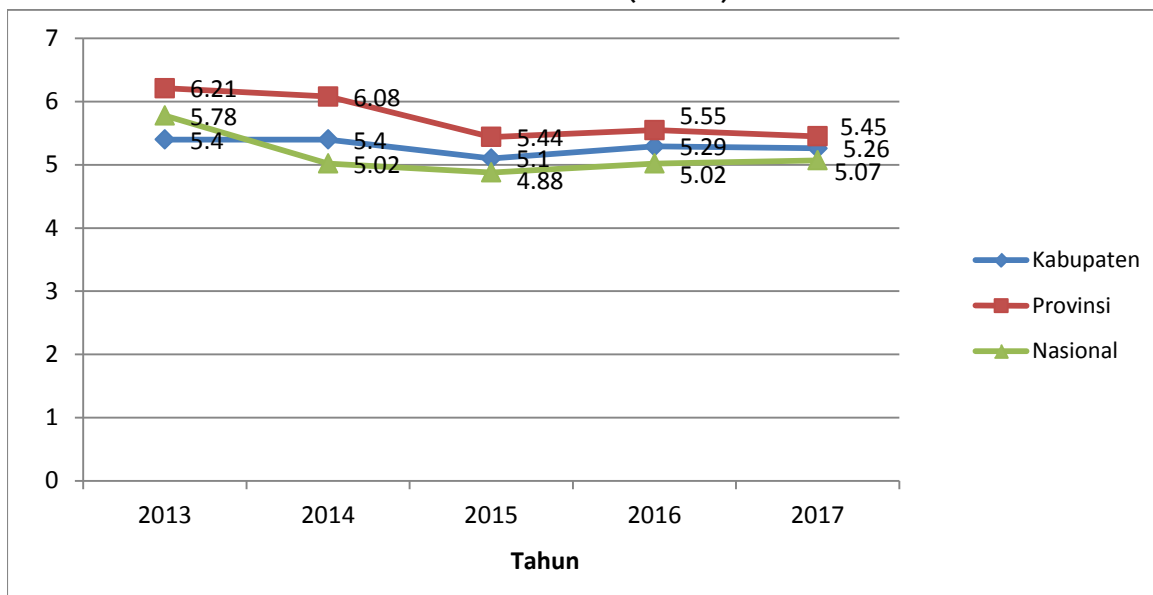
No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,83	2,37	3,44	3,33	0,88
2	Pertambangan dan Penggalian	3,57	4,94	4,51	4,46	7,34
3	Industri Pengolahan	5,73	5,19	5,68	5,54	6,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,69	2,29	0,99	3,61	4,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,17	1,95	5,51	5,38	6,87
6	Konstruksi	7,48	6,72	3,30	6,74	10,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,03	8,10	7,34	6,39	8,26
8	Transportasi dan Pergudangan	8,09	8,12	7,23	7,28	8,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,07	7,10	8,22	8,43	9,02
10	Informasi dan Komunikasi	10,15	7,56	6,84	7,66	7,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,45	7,61	6,72	7,31	3,80
12	Real Estate	7,41	6,43	5,34	5,84	4,80
13	Jasa Perusahaan	6,20	6,40	5,77	5,59	6,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,27	1,32	5,97	4,90	2,87
15	Jasa Pendidikan	7,62	5,83	6,49	6,14	4,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,72	11,96	1,91	5,86	6,37
17	Jasa lainnya	5,87	6,87	5,50	4,72	4,87
<b>Pertumbuhan PDRB</b>		<b>5,40</b>	<b>5,10</b>	<b>5,18</b>	<b>5,29</b>	<b>5,26</b>

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka tahun 2014 - 2018

Sektor Pertanian adalah sektor yang memiliki kontribusi paling besar dan menjadi sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kabupaten Nganjuk, akan tetapi mengalami pertumbuhan yang paling rendah dibandingkan semua sektor yang ada, yaitu rata-rata sebesar 2,49 persen per tahun. Pertumbuhan sektor Pertanian sebenarnya mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 0,83 persen menjadi 2,57 persen di tahun 2017. Kondisi menunjukkan peningkatan produktivitas pertanian meskipun daya dukung lahan sawah berkurang. Maka, perlu ada langkah-langkah nyata untuk mempertahankan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sektor Industri pada kurun waktu yang sama meningkat rata-rata 5,01 persen per tahun, dengan pertumbuhan masing-masing tahun sebesar 4,70 persen; 4,31 persen; 4,74 persen; 5,25 persen; 6,06. Secara agregat pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2013 hingga tahun 2017 lebih tinggi dari Pertumbuhan ekonomi Nasional dan tetapi masih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2013-2017 (lihat grafik 2.4):

Grafik 2.4  
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Nganjuk, Nasional dan Propinsi Jawa Timur  
Tahun 2013 – 2017 (Persen)



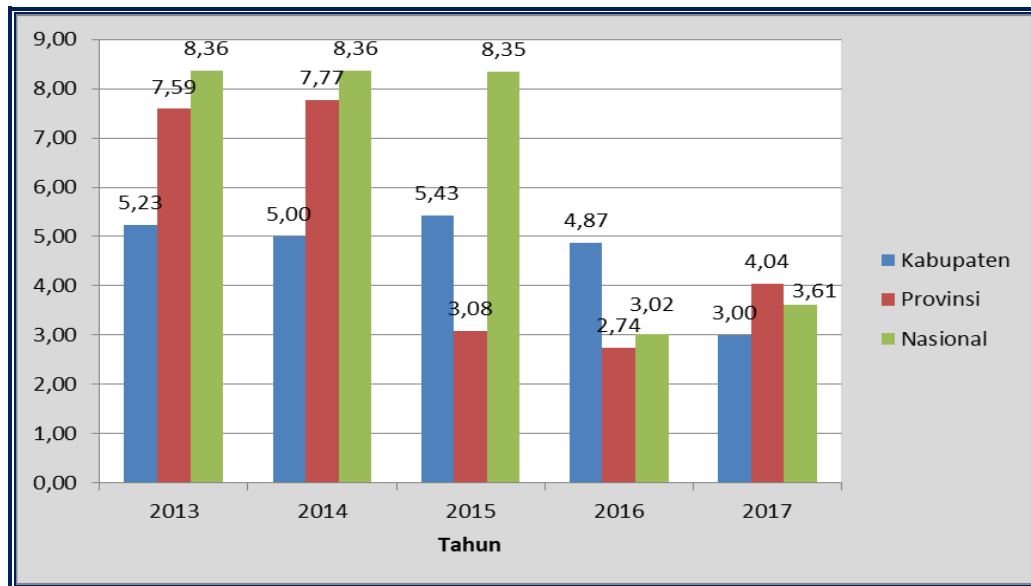
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018

### 2.2.1.3. Laju Inflasi (Tingkat Perkembangan Harga)

Kenaikan bahan bakar minyak pada Tahun 2013 dan pemilihan umum nasional sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat di Kabupaten Nganjuk mengakibatkan inflasi nasional dan Jawa Timur sangat tinggi yaitu mencapai 3,02%% tahun 2016 dan meningkat di tahun 2017 menjadi sebesar 3,61%. Sedangkan, di Kabupaten Nganjuk inflasi tersebut cukup stabil dengan yaitu 4,82% pada tahun 2016 dan menurun menjadi tinggal 3,49% tahun 2017. Tingkat inflasi ini tidak lepas dari pengaruh eksternal yang berpengaruh pada tingkat harga di Jawa Timur selama tahun yang sama yaitu di tahun 2013-2017 (lihat grafik 2.5).

Hal ini menunjukkan perekonomian di Kabupaten Nganjuk masih cukup baik dalam lima tahun terakhir walaupun inflasi naik turun tetapi tidak sampai mengurangi kemampuan daya beli masyarakat karena nilai pertumbuhan masih lebih tinggi dari inflasi. Secara umum, tingkat inflasi Kabupaten Nganjuk jauh di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2013 dan 2014, tetapi kemudian pada tahun 2015 dan 2016 tingkat inflasi melebihi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Tingkat inflasi di disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.5  
Tingkat Inflasi Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur dan Nasional  
Tahun 2013-2017

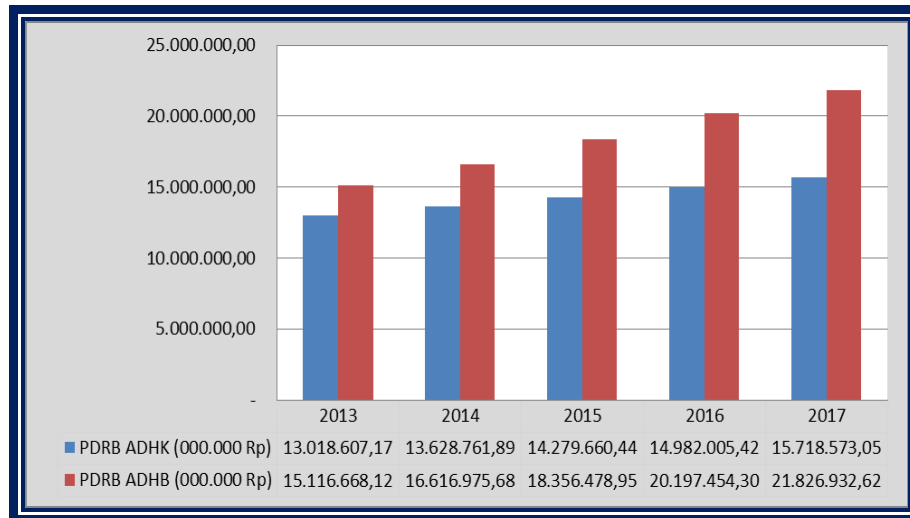


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018

#### 2.2.1.4. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita dihitung dengan cara membagi nilai total pendapatan regional dengan jumlah penduduk rata-rata tengah tahun. Tinggi rendahnya perkapita merupakan gambaran kasar tingkat perekonomian daerah dan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Nilai pendapatan perkapita ini pada umumnya didasarkan atas pendapatan regional atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2013 pendapatan perkapitanya atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah Rp. 15.116.668,12 per tahun dan angka tersebut terus meningkat sampai pada akhir tahun 2017 naik secara signifikan menjadi sebesar Rp. 21.826.932,62 pertahun. Demikian pula untuk pendapatan perkapita atas dasar harga konstan (ADHK) juga menunjukkan kenaikan yang signifikan selama 4 tahun yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 13.018.607,17 pertahun dan di tahun 2017 sebesar Rp. 15.718.573,05 pertahun. Tabel berikut menggambarkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk kabupaten Nganjuk Tahun 2013 -2017.

Grafik 2.6  
Perkembangan pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 – 2017 Dalam (Ribuan)

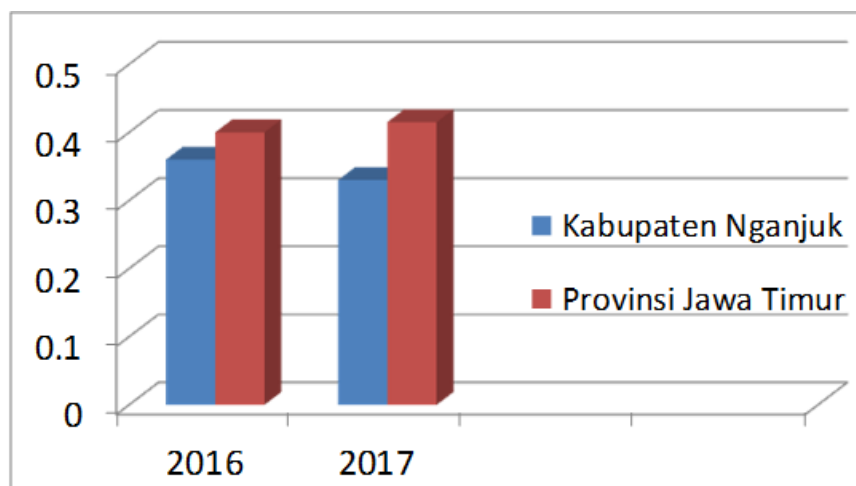


Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka tahun 2014- 2018

### 2.2.2. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks gini di Kabupaten Nganjuk tahun 2016 sebesar 0.36 dan pada tahun 2017 sebesar 0.33 hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan masyarakat Kabupaten Nganjuk rendah dan bahkan ketimpangan semakin menurun.

Grafik 2.7  
Indeks Gini Tahun 2016 dan 2017



	2016	2017
Kabupaten Nganjuk	0.36	0.33
Provinsi Jawa Timur	0.4	0.415

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2018



### 2.2.3. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengertian Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan perangkat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses pada pendidikan dan pekerjaan. Jumlah penduduk miskin di suatu daerah didasarkan atas garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

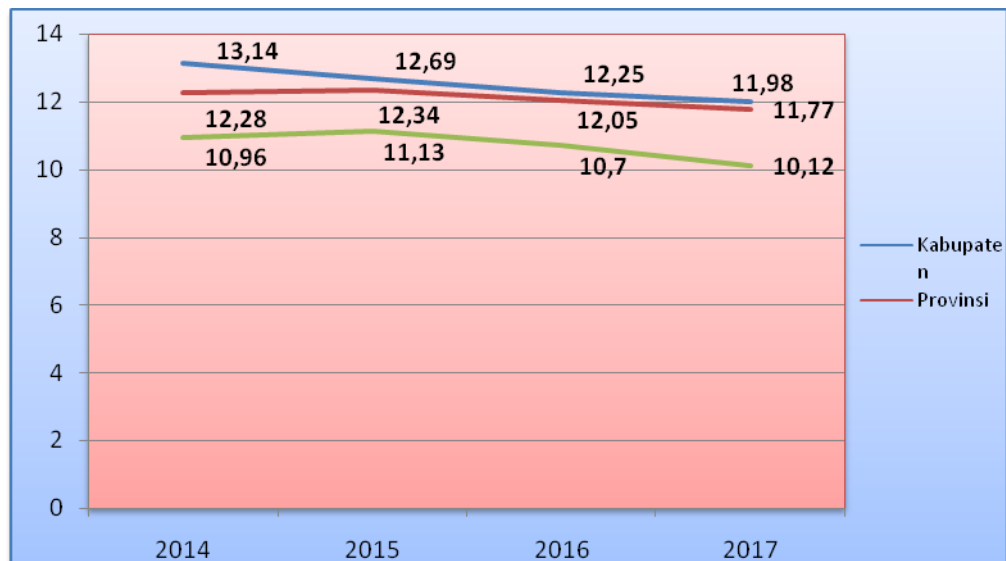
Tabel 2.36.  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nganjuk  
Tahun 2016-2017

Uraian	Tahun	
	2016	2017
Garis Kemiskinan (Rp)	341.653	358.216
Penduduk Miskin (Ribuan)	127.90	125.52
Penduduk Miskin (%)	12.25	11.98
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.72	1.73
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.36	0.40

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk 2018

Angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2017 kembali mengalami penurunan. Data terbaru diketahui angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk sebesar 11,98 persen atau sebanyak 125,52 ribu jiwa. Dibandingkan Tahun 2016, telah terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sekitar 127,90 ribu jiwa atau 12,25 persen namun angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk saat ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 10,12 persen. Rata-rata penurunan angka kemiskinan per tahun yang dialami Kabupaten Nganjuk sejak 2016 cukup tinggi yaitu sekitar 0.27 persen, dimana rata-rata Nasional hanya sekitar 0.27 persen dan Provinsi Jawa Timur sekitar 0,43 persen yang mengindikasikan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk lebih cepat dibandingkan nasional dan mempersempit gap kesenjangan antara kemiskinan nasional dengan Provinsi Jawa Timur.

Grafik 2.8  
Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah Kabupaten,  
Provinsi dan Nasional, 2014-2017



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2018

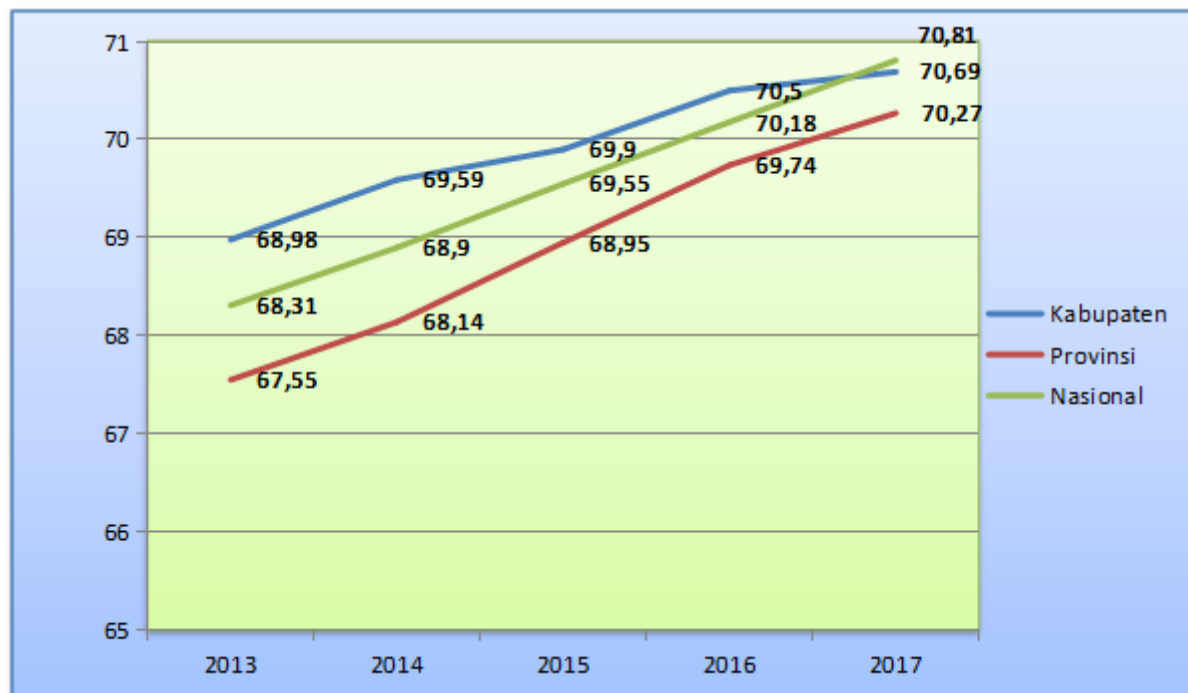
Berdasarkan data di atas nampak bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk masih tinggi, walaupun sudah mengalami penurunan dari 2014 sampai dengan tahun 2017. Penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dinilai sangat menghambat kinerja ekonomi suatu daerah sedangkan bila kinerja ekonomi mengalami tren yang positif, maka hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan indikasi berkurangnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini bisa ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi pendidikan, angkatan kerja, kesehatan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk perlu diketahui faktor-faktor yang berhubungan atau mempengaruhi tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di masing-masing Kabupaten/Kota sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

#### 2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator kesejahteraan rakyat antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain dari itu kesejahteraan masyarakat juga dapat tercermin dari faktor ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan.

Angka IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017 terus mengalami kenaikan. IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 dengan nilai 68,98 pada Tahun 2017 IPM Kabupaten Nganjuk sebesar 70,69. Peningkatan IPM yang konsisten tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2.9  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2018

Komponen IPM dengan metode penghitungan baru terdiri dari 3 aspek yang diukur dengan 4 indikator. Aspek dan indikator tersebut adalah aspek kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup, aspek pendidikan yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan aspek ekonomi yang diukur dengan Pengeluaran Perkapita Tahun yang Disesuaikan. Metode ini berdampak pada revisi nilai IPM setiap daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

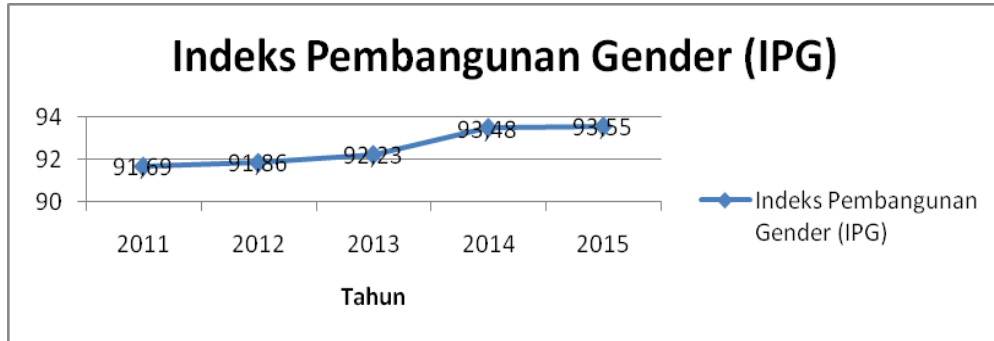
Angka IPM Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2013 selalu di atas Angka IPM rata-rata Provinsi Jawa Timur. Nilai IPM Tahun 2013 adalah sebesar 68,98 poin yang mana di atas rata-rata nilai Provinsi Jawa Timur yaitu 67,55 poin. Capaian angka IPM ini terus meningkat seiring dengan kemajuan pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan, sehingga pada tahun 2017 nilai IPM Kabupaten Nganjuk sebesar 70,69 poin yang nilai di atas nilai rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 70,27 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur.

#### 2.2.5. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. IPG digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki laki dan IPM perempuan sama tinggi serta nilai IPG mendekati 100.

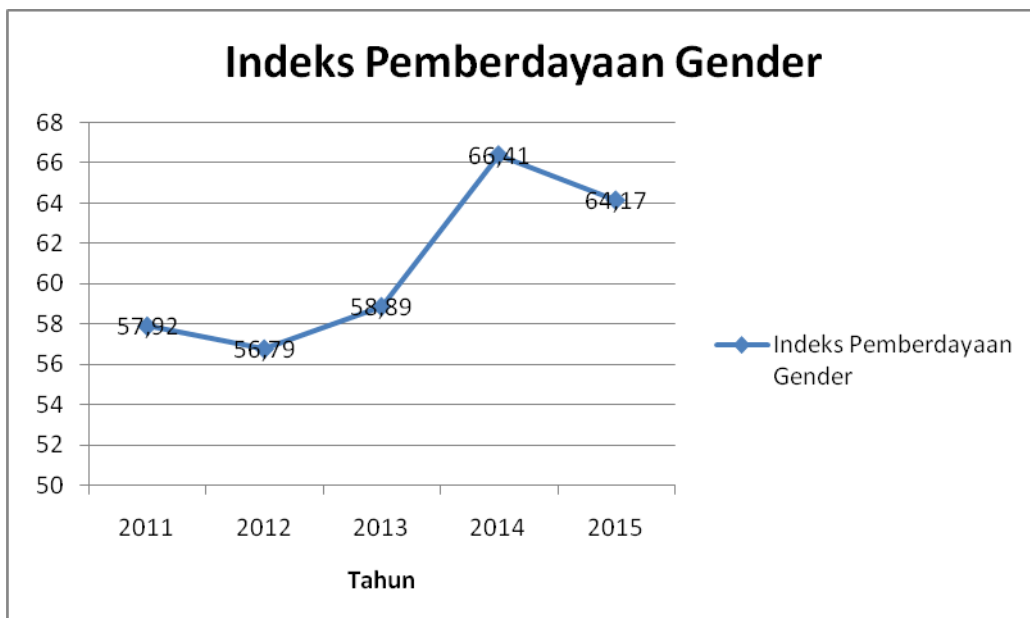
Grafik 2.10  
Grafik Indeks Pembangunan Gender  
Kabupaten Nganjuk



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk 2016

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Grafik 2.11  
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender  
Kabupaten Nganjuk



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk 2016

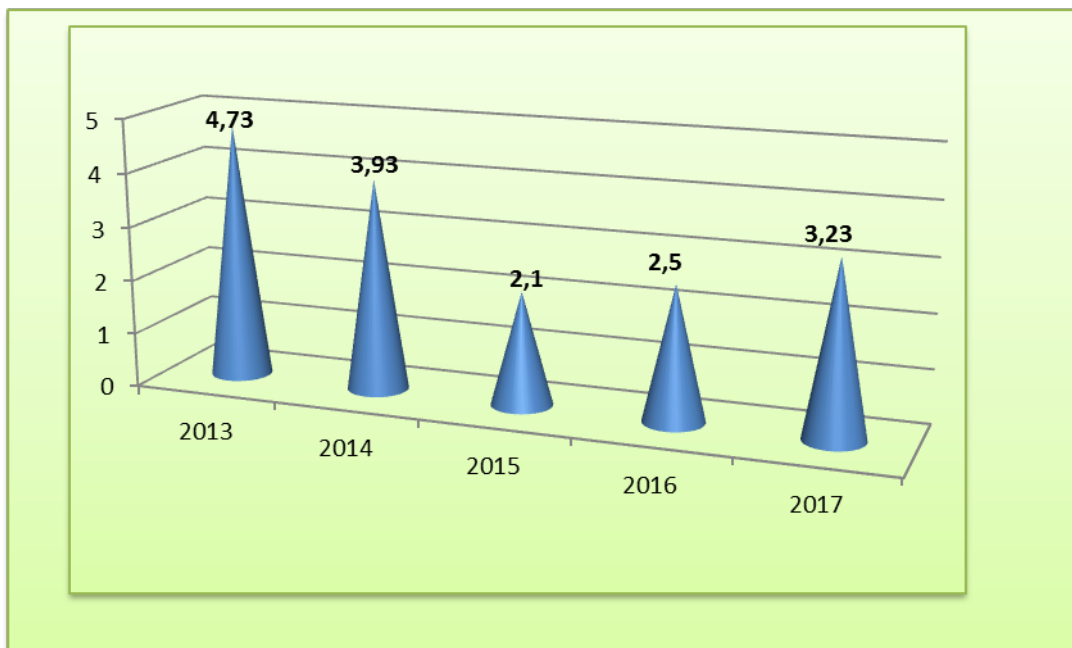
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk adalah perbedaan pendapatan rata-rata

antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih kurang.

### 2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada grafik 2.11 berikut ini:

Grafik 2.12  
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
di Kabupaten Nganjuk periode 2013-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Nganjuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 mencapai 4,73 persen. Pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 3,93 persen. Tingkat pengangguran ini terus berfluktuatif dari tahun 2015 sebesar 2,1 persen dan terakhir pada tahun 2017 sedikit meningkat menjadi 3,23 persen. Dalam lima tahun terakhir ini rata-rata TPT Kabupaten Nganjuk adalah 3,2 persen. Rata-rata TPT tersebut masih tergolong tinggi. Tingginya angka pengangguran ini banyak faktor penyebabnya. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di Kabupaten Nganjuk disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti arus urbanisasi dari daerah/kabupaten lain ke Kabupaten Nganjuk untuk mencari pekerjaan, skill yang masih kurang dari pencari kerja sesuai standar dunia kerja dan masih kurang minatnya pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.

## 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.3.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Dasar

#### 2.3.1.1. Pendidikan

Selama periode RPJMD Tahun 2013 – 2017, capaian bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator makin meningkatnya angka kelulusan di tiap jenjang pendidikan dari SD hingga SMA, angka putus sekolah yang semakin menurun setiap tahun, angka kelulusan yang semakin meningkat di seluruh jenjang, dan persentase guru yang memiliki kualifikasi sarjana juga semakin meningkat. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kabupaten Nganjuk sangat dinamis dan mampu bersaing dengan daerah lain. Selain itu angka APM sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan di tahun 2013 hingga tahun 2017 juga terus mengalami peningkatan. Angka APM bahkan selalu di atas angka rata-rata APM Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun belakangan ini. Capaian kinerja selama 2014 – 2017 terhadap indikator Capaian pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.37.  
Tingkat keberhasilan bidang pendidikan tahun 2014 - 2017

No	Jenjang	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Partisipasi Murni				
-	SD/MI	95.50	98.92	94.43	95.03
-	SMP/MTs	89.39	89.79	79.57	97.28
-	SMA/MA/SMK	79.72	79.80	72.24	-
2	Angka Partisipasi Kasar				
-	SD/MI	116.12	115.66	108.25	104.86
-	SMP/MTs	130.91	106.92	102.98	142.94
-	SMA/MA/SMK	110.83	88.06	91.60	-
3	Angka Putus Sekolah				
-	SD/MI	0.01	0.03	0.01	0.01
-	SMP/MTs	0.03	0.10	0.01	0.01
-	SMA/MA/SMK	0.08	0.08	0.02	-
4	Angka Kelulusan Sekolah				
-	SD/MI	100.00	99.98	100.00	100.00
-	SMP/MTs	99.88	99.98	100.00	99.98
-	SMA/MA/SMK	96.24	99.94	100.00	-
5	Angka Melek Huruf	91.71	94.50	92.13	93.54
6	Rata-rata Lama Sekolah	7.31	7.33	7.34	7.38
7	Persentase Guru Kualifikasi				
-	SD/MI	57.35	89.88	89.73	89.38
-	SMP/MTs	23.58	95.83	95.83	95.76
-	SMA/MA/SMK	19.08	95.71	95.76	-



No	Jenjang	2014	2015	2016	2017
8	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	85.35	79.11	78.71	72.56

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 2017 dan BPS Kabupaten Nganjuk 2018

Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah rasio siswa terhadap daya tampung sekolah. Pencermatan atas dasar sebaran Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

a. **Angka Partisipasi Sekolah**

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur capaian kinerja bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan mendasar.

Tabel 2.38.  
Angka Partisipasi Murni (APM)

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Anak Sekolah SD/MI7 – 12	82.270	87.402	77.022	91.852
2	Jumlah Usia 7 – 12	86.151	88.356	81.569	96.657
	<b>APM SD/MI (%)</b>	95.50	98.92	94.43	95.03
3	Jumlah Anak Sekolah SMP/MTs13 – 15	34.517	42.582	32.254	33.932
4	Jumlah Usia 13 – 15	38.615	47.424	40.537	34.879
	<b>APM SMP/MTs (%)</b>	89.39	89.79	79.57	97.28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2017

Tabel 2.39.  
Angka Partisipasi Kasar (APK)

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Anak Sekolah SD/MI	100.039	102.192	88.301	101.356
2	Jumlah Usia 7 – 12	86.151	88.356	81.569	96.657
	<b>APK SD/MI (%)</b>	116.12	115.66	108.25	104.86
3	Jumlah Anak Sekolah SMP/MTs	50.549	50.706	41.747	49.856
4	Jumlah Usia 13 – 15	38.615	47.424	40.537	34.879
	<b>APK SMP/MTs (%)</b>	130.91	106.92	102.98	142.94

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2017

**b. Rata - Rata Nilai UN dan UASB**

Selain angka putus sekolah indikator capaian kinerja bidang pendidikan adalah rata - rata nilai UN dan UASB di masing - masing tingkatan sekolah. Lebih jelasnya ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nganjuk dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40.  
Rata - Rata Nilai UN dan UASB di  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Sekolah Dasar/MI	Nilai	7,69	8,02	7,96	7,76
2	SLTP/MTs	Nilai	7,75	5,08	5,98	7,35
3	SMA/MA/SMK	Nilai	6,20	6,02	5,90	5.14

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2018

### c. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menggambarkan jumlah murid yang dapat menyelesaikan tingkatan pendidikan tertentu.

Tabel 2.41.  
Jumlah Kelulusan Sekolah

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Siswa Tingkat Akhir SD/MI	16.576	16.378	16.548	13.936
2	Lulusan Jenjang SD/MI	16.576	16.374	16.548	13.936
3	Jumlah Siswa Tingkat Akhir SMP/MTs	15.417	16.852	16.555	11.346
4	Lulusan Jenjang SMP/MTs	15.398	16.833	16.555	11.344
5	Jumlah Siswa Tingkat Akhir SMA/MA/SMK	11.469	12.015	12.139	14.147
6	Lulusan Jenjang SMA	15.417	12.008	12.139	14.143

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2018

### d. Rasio Guru/Murid

Rasio Guru/Murid dalam hal ini adalah perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid untuk masing-masing tingkat pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017.

Tabel 2.42.  
Rasio Murid terhadap Guru dalam 4 tahun terakhir

Jenjang	Negeri			Swasta		
	SD	SMP	SLTA	SD	SMP	SLTA
2014	11,1	14,9	12,6	6,5	4,7	12,3
2015	10,4	14,3	10,0	4,4	4,5	11,7
2016	14,49	14,5	16,6	4,5	6,1	12,9
2017	14,6	15,78	17,4	5,4	4,9	13,1

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.43.  
Rasio Murid terhadap Guru

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Siswa SD/MI	100.039	102.192	88.301	101.356
2	Jumlah Guru SD/MI	9.284	6.738	6.638	6.421
3	Jumlah Siswa SMP/MTs	50.549	50.706	41.747	49.856
4	Jumlah Guru SMP/MTs	9.284	2.396	2.396	2.359
5	Jumlah Siswa SMA/MA/SMK	39.764	31.395	38.041	43.638
6	Jumlah Guru SMA/MA/SMK	9.284	2.077	2.077	2.742

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

e. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menggambarkan jumlah siswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkatan tertentu (*Drop Out*).

Tabel 2.44.  
Jumlah Putus Sekolah

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Anak Sekolah SD/MI	100.039	102.192	88.301	101.356
2	Jumlah anak Putus Sekolah SD/MI	13	34	10	12
3	Jumlah Anak Sekolah SMP/MTs	50.549	50.706	41.747	49.856
4	Jumlah anak Putus Sekolah SMP/MTs	15	50	4	7
5	Jumlah Anak Sekolah SMA	39.764	38.067	38.041	43.638
6	Jumlah anak Putus Sekolah SMA/MA/SMK	32	32	8	47

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.45.  
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK  
di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017
SD/MI	0.01	0.03	0.01	0.01
SMP/MTs	0.03	0.10	0.01	0.01
SMA/MA/SMK	0.08	0.08	0.02	0.10

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2018

#### f. Profesionalitas Guru

Guru merupakan salah satu faktor strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan karena gurulah yang meletakkan dan mempersiapkan dasar perkembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa. Untuk melaksanakan itu, tentu diperlukan guru yang memiliki profesionalisme tinggi.

Tabel 2.46.  
Guru Sesuai Kualifikasi

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Guru SD/MI	9.284	6.738	6.638	6.421
2	Guru Berijazah S1/D IV	5.324	6.056	5.956	5.739
3	Jumlah Guru SMP/MTs	9.284	2.396	2.396	2.359
4	Guru Berijazah S1/D IV	2.189	2.296	2.296	2.259
5	Jumlah Guru SMA/MA/SMK	9.284	2.077	2.077	2.742
6	Guru Berijazah S1/D IV	1.771	1.988	1.989	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2018

#### g. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel 2.47.  
Pendidikan Anak Usia Dini

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Anak Sekolah TK/RA	31.048	33.669	41.646	36.547
2	Jumlah Usia 4 – 6	36.377	42.560	52.911	50.366

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2018

#### 2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi peningkatan SDM, pada calon generasi penerus, sejak dari kandungan dan balita. Indikator bidang kesehatan selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut

Tabel 2.48.  
Indikator Bidang Kesehatan

No	Jenjang	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	11.00	10.75	9.15	9.51
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	108.74	78.86	70.35	84.10
3	Balita dengan gizi buruk	0.11	0.083	0.11	0.09
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	75.17	81.26	81.63	53.54
5	Penduduk miskin yang dilayani	35.38	77.86	66.04	71.36
6	Desa dengan cakupan UCI	122.94	89.00	80.63	71.48
7	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit:				
	- Prevalensi HIV	0.028	0.046	0.0614	0.000115
	- Penderita TBC BTA sembuh setelah pengobatan	21.19	97.00	62.00	42.29
	- Prevalensi Penderita Kusta	0.45	0.6	0.44	0.51

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.49.  
Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kelahiran Hidup

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Kematian Bayi	172	170	143	147
2	Jumlah Kelahiran Hidup	15.634	15.818	15.635	15.458

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

Dari data angka kematian bayi tahun 2014-2017 tercatat jumlah kematian bayi mengalami penurunan dari angka 172 pada tahun 2014 dan angka 147 pada tahun 2017. Sedangkan jumlah kelahiran hidup sempat mengalami kenaikan di tahun 2015 yaitu dengan angka 15.818 dari yang sebelumnya 15.634 pada tahun 2014, kemudian di tahun 2016 dan 2017 kembali turun masing-masing pada angka 15.635 dan 15.458.

Tabel 2.50.  
Angka Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Ibu

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Kematian Ibu	17	12	11	13
2	Jumlah Kelahiran Hidup	15.634	15.818	15.635	15.458

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

Untuk data angka kematian ibu tahun 2014-2017, jumlah kematian ibu mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2016 dengan angka kematian ibu yaitu 17 pada tahun 2014, 12 pada tahun 2015, dan 11 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 angka kematian ibu naik pada angka 13.

Jumlah kelahiran hidup pada data angka kematian ibu naik pada tahun 2015 dengan angka 15.818 yang sebelumnya berada pada angka 15.634. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 turun masing-masing pada angka 15.635 dan 15.458.

Tabel 2.51.  
Balita Gizi Buruk

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	71	67	71	78
2	Jumlah Balita	66.534	79.215	63.288	62.256

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

Status balita gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nganjuk, dari data tahun 2014-2017 memiliki angka balita gizi buruk tertinggi pada tahun 2017 yaitu dengan angka 78.

Tabel 2.52.  
Penduduk Miskin yang Dilayani Puskesmas

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Penduduk Miskin Yang Berkunjung Ke Puskesmas	210.632	463.509	359.220	537.213
2	Penduduk Miskin	595.294	595.294	543.950	537.213

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

Data jumlah penduduk miskin yang dilayani puskesmas tahun 2014-2017 menunjukkan jumlah penduduk miskin yang berkunjung ke puskesmas, paling rendah pada tahun 2014 yaitu dengan angka 210.632 atau 35,38% dari 595.294 dan tahun 2017 merupakan tahun dengan Jumlah penduduk miskin yang berkunjung ke puskesmas paling tinggi dengan angka 537.213 atau 100% dari 537.213 .

Tabel 2.53.  
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Ibu Hamil	19.437	17.400	17.199	17.004
2	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kunjungan	14.619	14.140	14.040	13.578

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

Dari data cakupan ibu hamil Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2017 tercatat jumlah ibu hamil terbanyak pada tahun 2014 dengan angka 19.437 dan ibu hamil yang mendapatkan kunjungan tertinggi pada tahun 2014 dengan angka 14.619 dan selalu turun hingga tahun 2017.

Tabel 2.54.  
Desa dengan cakupan UCI

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Desa/Kelurahan	284	284	284	284
2	Desa/Kelurahan Cakupan UCI	209	256	229	244

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

Pencapaian *Universal Child Immunization (UCI)* pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Dari data Desa dengan cakupan UCI tahun 2014-2017 terlihat pada tahun 2014 Desa/Kelurahan cakupan UCI yaitu 209 atau 73% dari 284 Desa/Kelurahan, pada tahun 2015 cakupan UCI 256 atau 90,14% dari 284 Desa/Kelurahan, pada tahun 2016 menurun menjadi 229 atau 80,63% dari 284 Desa/Kelurahan, dan naik kembali pada tahun 2017 yaitu 244 atau 85,91% dari 284 Desa/Kelurahan.

Tabel 2.55.  
Prevalensi HIV

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Penderita HIV Yang Masih Hidup	293	483	642	727
2	Jumlah Penduduk	1.045.598	1.041.716	1.045.375	1.048.799

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.56.  
Prevalensi Penderita Kusta

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Temuan Baru (PB + MB)	47	63	46	50
2	Jumlah Penduduk	1.045.598	1.041.716	1.045.375	1.048.799

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

Indikator ini menunjukkan jumlah kasus kusta terdaftar *Pausi Basiler (PB)* maupun *Multi Basiler (MB)* pada saat tertentu per 10.000 penduduk. Di Kabupaten Nganjuk pada data Prevalensi Penderita Kusta 2014-2017 pada tahun 2015 tercatat memiliki Jumlah Temuan Baru (PB + MB) paling tinggi dengan angka 63 dari 1.041.716 penduduk.

Tabel 2.57.  
Jumlah Kasus TB Per Fasilitas Kesehatan

NO	DATA	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Kasus TB per Faskes	962	1035
2	Jumlah Penduduk	1.045.375	1.048.799

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

Angka kematian bayi dan ibu melahirkan menunjukkan tren menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pelayanan dasar kesehatan, sehingga mampu menekan kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Namun bila dibandingkan dengan capaian MDGs (23 per 1000 kelahiran hidup) maka angka tersebut masih lebih kecil.

Demikian pula angka kematian ibu melahirkan yang standard capaian MDGs pada angka < 166, maka angka kematian ibu melahirkan berada di bawah angka tersebut. Capaian bidang kesehatan yang paling tampak adalah pada penurunan angka balita gizi buruk, penduduk yang memanfaatkan Puskesmas, dan peningkatan rumah sehat.

Kabupaten Nganjuk termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota yang mendapat prioritas penanganan Stunting secara nasional. Hasil pendataan riset kesehatan dasar yang dilaksanakan pada tahun 2013 dan dipublikasikan tahun 2016 prevalensi stunting Kabupaten Nganjuk adalah 44,33 %. Hasil survey Provinsi Jawa Timur tahun 2018 prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk menurun menjadi 25,9% sedangkan menurut hasil pendataan bulan timbang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk bahwa prevalensi stunting Kabupaten Nganjuk adalah 16,1 %.

**a. Jumlah Rumah Sakit**

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Ketersediaan rumah sakit diukur dari rasio jumlah rumah sakit dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.58.  
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nganjuk 2014 – 2017

Tahun	Fasilitas Kesehatan						
	RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Tempat Tidur	Balai Pengobatan	Rumah Bersalin	Klinik
2014	5	20	83	161	7	8	-
2015	5	20	83	126	7	8	4
2016	5	20	83	148	7	2	4
2017	5	20	83	148	7	2	4

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kab.Nganjuk 2018

**b. Jumlah tenaga medis**

Tenaga medis di rumah sakit yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten nganjuk sangat menentukan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Dimana tenaga medis merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat menerima pelayanan kesehatan. Berikut adalah data secara lengkap mengenai jumlah tenaga medis pada tahun 2017:

Tabel 2.59.  
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2017

No	Tenaga Kesehatan	Dinkes	RSU Nganjuk	RSU Kertosono
1	Dokter Spesialis	-	31	14
2	Dokter Umum	54	22	13
3	Dokter Gigi	13	3	1
4	Apoteker	5	9	2
5	Ahli Gizi	13	10	5
6	Pembantu Ahli Gizi	-	-	-
7	Bidan	362	37	37
8	Perawat	178	229	90



No	Tenaga Kesehatan	Dinkes	RSU Nganjuk	RSU Kertosono
9	Asisten Apoteker/SMF/Ak.F	21	20	9
10	Asisten Rontgen /APRO	-	6	6
11	Perawat Gigi	21	2	3
12	SPPH ( Hygiene )		4	1
13	Kesehatan Masyarakat (SKM)	17	3	3
14	ATEM	-	-	2
15	Analisis kesehatan/pranata laboratorium kesehatan	23	14	-
16	Fisioterapis	-	-	1
17	Rekam Medik	-	1	1
18	Tenaga Kesehatan Lainnya	-	5	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan prasarana dasar permukiman merupakan aspek utama dalam pembangunan suatu daerah serta memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Prasarana transportasi merupakan tulang punggung pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Pada saat ini prasarana transportasi masih belum maksimal dalam memfasilitasi tingginya pergerakan masyarakat yang ditunjukkan oleh masih terdapat jalan dalam kondisi yang rusak. Belum maksimalnya infrastruktur transportasi dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat disebabkan rendahnya jumlah jalan dalam kondisi baik dan pembangunan jalan-jalan baru, serta belum maksimalnya struktur konstruksi jalan. Kondisi tersebut diperburuk dengan tingginya beban lalu lintas yang sering melampaui kapasitas. Namun demikian dari data yang dihimpun, selain peningkatan panjang jalan, dapat dilihat proporsi kondisi jalan yang baik tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

#### a. Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan diarahkan untuk mewujudkan kondisi jaringan jalan yang mantap dalam mendukung konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, pada periode Tahun 2014-2017 telah dilakukan peningkatan jalan sepanjang 187,782 km, pemeliharaan jalan sepanjang 1.095,72 km, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 1.602,534 meter, pemeliharaan rutin bahu jalan (Berm) sepanjang 9,405 km, dan pembangunan pengaman badan jalan sepanjang 5,002 km. Pencapaian tersebut telah memenuhi seluruh kebutuhan jalan sepanjang 1.153,482 km, dan menambah panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sampai tahun 2017 menjadi 866,669 km atau 62,88 % dari keseluruhan panjang jalan.



Penyelenggaraan jalan juga mendukung aksesibilitas destinasi pariwisata, pengembangan kawasan strategis Selingkar Wilis, dan meningkatkan akses bagi daerah-daerah terisolir/terpencil. Untuk mendukung kegiatan pariwisata telah dilaksanakan pelebaran jalan Gondang-Ngluyu yang merupakan akses ke wisata Goa Margotresno, peningkatan Kapasitas Jalan Mangunsari - Bajulan dan Pembangunan pengaman badan jalan di pintu keluar obyek wisata Roro Kuning kiri yang merupakan akses ke lokasi wisata Air Merambat Roro Kuning, pemeliharaan Jalan Tengger - Argojali dan pemeliharaan Jalan Sawahan - Gedangklutuk yang merupakan akses menuju wisata Air Terjun Sedudo.

Untuk mendukung pengembangan kawasan strategis Selingkar Wilis telah dilakukan pelebaran Jembatan Jurangringin dan Lanjutan Opritran ruas Jalan Ngetos - Pogoh dan peningkatan kapasitas Jalan Mangunsari - Bajulan. Sedangkan untuk meningkatkan akses bagi daerah terisolir/terpencil telah dilakukan rekonstruksi jalan Losari - Ngujung, pembangunan / rekonstruksi Jalan Tamanan - Bendoasri, pembangunan jalan Losari - Lengkonglor, peningkatan jalan Gampeng - Lengkonglor, pemeliharaan Berkala Jalan Lumpangkuwik - Pule, dan pembangunan jalan antar kabupaten Bendoasri - Klangon (Madiun),

Perkembangan capaian kinerja pemenuhan kebutuhan jaringan jalan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.60.  
Capaian Kinerja Pengelolaan Prasarana jalan Tahun 2014-2017  
(Persen)

No	Jenjang	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pemenuhan kebutuhan jalan (%)	100	100	100	100
2	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	59.25	62.03	62.86	62.88

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.61.  
Kinerja Pengelolaan Prasarana Jalan

NO	DATA	TH 2014 (Km)	TH 2015 (Km)	TH 2016 (Km)	TH 2017 (Km)
1	Target Pemenuhan Kebutuhan Jalan	1.562,614	1.562,614	1.153,482	
2	Realisasi Panjang Jalan	1.562,614	1.562,614	1.153,482	1.153,482
3	Jalan yang ditingkatkan	57,36	44,99	15,662	69,770
4	Target panjang jalan dalam kondisi baik	1.150,00	1.153,00	845,156	829,542
5	Panjang Jalan yang diperbaiki/dipelihara	363,04	297,24	293,867	141,573
6	Realisasi panjang jalan dalam kondisi baik	925,82	969,24	725.096	866,669

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

### b. Kondisi Jembatan

Penyelenggaraan jalan harus didukung dengan kinerja jembatan yang optimal. Untuk mencapai hal tersebut, pada periode Tahun 2014-2017 telah dilaksanakan pembangunan jembatan sebanyak 36 unit, pemeliharaan jembatan sebanyak 19 unit, pembangunan sayap jembatan sebanyak 70 unit, dan pemeliharaan bronjong jembatan sebanyak 18 unit. Dengan upaya-upaya tersebut, sampai Tahun 2017 telah meningkatkan pemenuhan kebutuhan jembatan sebanyak 634 unit atau 95,91% dari total kebutuhan jembatan sebanyak 661 unit, dan mempertahankan kondisi jembatan yang ada dalam kondisi baik sebanyak 390 unit atau 61,51% dari 634 unit jembatan yang terbangun sampai Tahun 2017.

Perkembangan capaian kinerja pemenuhan jembatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62.  
Capaian Kinerja Pengelolaan Jembatan Tahun 2013-2017  
(Persen)

No	Jenjang	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	62.05	61.45	61.98	61.51
2	Persentase pemenuhan kebutuhan jembatan (%)	92.52	97.80	95.28	95.91

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.63.  
Kinerja Pengelolaan Prasarana Jembatan

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Kebutuhan Jembatan	661 Unit	661 Unit	661 Unit	661 Unit
2	Target Jumlah Jembatan Yang Dibangun	652 Unit	656 Unit	657 Unit	657 Unit
3	Jumlah Jembatan Yang dibangun	8 Unit	14 Unit	6 Unit	8 Unit
4	Realisasi jembatan yang dibangun	606 Unit	620 Unit	626 Unit	634 Unit

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

### c. Perkembangan Jaringan Irigasi

Pengelolaan jaringan irigasi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan air irigasi guna mendukung ketahanan/kedaulatan pangan dengan meningkatkan produksi padi. Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan,



pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Untuk mencapai ketersediaan air irigasi, selama periode Tahun 2014-2017 telah dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 115.996,35 meter, rehabilitasi waduk/dam/bendung sebanyak 50 unit, dan rehabilitasi saluran pembuang sepanjang 14.598,2 meter. Pencapaian tersebut telah meningkatkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik sampai Tahun 2017 sepanjang 243.332,35 meter atau 60,77% dari total panjang jaringan irigasi yang ada yaitu 400.401,0 meter. Pengelolaan jaringan irigasi yang telah dilakukan selama periode 2014-2017 juga telah menjamin ketersediaan air irigasi pada Tahun 2017 mencapai 38.465 lt/det pada setiap musim tanam atau 77,68% dari 49.404 lt/det kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam Tahun 2017.

Selain meningkatkan daya guna air, pengelolaan jaringan irigasi juga diarahkan untuk mengendalikan daya rusak air. Melalui program pengendalian banjir telah dilaksanakan kegiatan normalisasi yang meliputi Normalisasi Kali Rejoso, Normalisasi Saluran Pembuang Banjardowo - Jegreg, Normalisasi Saluran Pembuang Warujayeng, Normalisasi Kali Gandu, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan rehabilitasi saluran dalam rangka pengendalian banjir meliputi Rehabilitasi Kali Konang, Rehabilitasi Kali Joho, Rehabilitasi Saluran Pembuang B 25 KW 145 Desa Babadan, Rehabilitasi Kali Klampok Desa Dawuhan, Rehabilitasi Kali Ngrapah Desa Musir Lor, Rehabilitasi Kali Bodor, Rehabilitasi Kali Cincin Desa Sanan, Rehabilitasi Kali Widias, dan lain-lain. Kejadian banjir terjadi pada 7 Januari 2018 di Sekitar Kali Bodor Desa Bodor Kecamatan Pace disebabkan curah hujan yang sangat deras di beberapa titik sungai, dengan luas genangan 27 ha dan lama genangan 2 jam di permukiman Desa Banaran, Desa Plosoharjo, dan Desa Gemenggeng yang ketiganya berada di wilayah Kecamatan Pace.

Untuk mendorong partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi, telah dilaksanakan pembinaan, pelatihan pengelolaan irigasi, dan penguatan kelembagaan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) melalui program WISMP-2 (*water resources irrigation sector management program phase 2*). Selama periode Tahun 2014-2017 ada 21 GHIPPA yang menjadi kelompok sasaran program WISMP-2. Kegiatan ini telah meningkatkan kelompok GHIPPA yang aktif sampai Tahun 2017 menjadi 216 GHIPPA atau 76,05% dari 284 GHIPPA yang ada.

Berikut secara lengkap disajikan capaian kinerja pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017.

Tabel 2.64.  
Capaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Irigasi  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017

No	Jenjang	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik (%)	40.21	54	58	60,77
2	Persentase Kelompok HIPPA yang aktif (%)	74.3	73.35	76.05	76,05
3	Rasio ketersediaan air irigasi	74.51	75.12	75.61	77.68

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.65.  
Jaringan Irigasi

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Realisasi Panjang Jaringan Irigasi Yang Ada*)	400.401,00 m	400.401 m	400.401,0 m	400.401,0 m
2	Panjang Jaringan Irigasi Yang Ada**)	127.336,00 m	169.476 m	216.419,9 m	232.218,00 m
3	Realisasi Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	42.140,00 m	46.943,9 m	15.798,45 m	11.114,00 m
4	Realisasi Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	240.240,60 m	287.184,5 m	232.218,35 m	243.332,35 m

Ket : \*) Seluruh saluran primer dan sekunder yang ada di Kabupaten Nganjuk

\*\*\*) Saluran yang merupakan kewenangan kabupaten

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.66.  
Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Kelompok HIPPA	284 klp	284 klp	284 klpk	284 klpk
2	Realisasi Kelompok HIPPA Yang Aktif	211 Klpk	214 Klpk	216 Klpk	216 klpk
3	Target Kelompok HIPPA Yang Aktif	210 Klpk	213 Klpk	215 klpk	215 Klpk

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.67.  
Ketersediaan Air Irigasi

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Total Kebutuhan Air Irigasi Berdasarkan Rencana Tanam	47.900 lt/det	47.885 lt/det	47.863 lt/det	49.404 lt/det
2	Total ketersediaan air irigasi yang sampai di petak tersier	107.077 lt/det	107.908 lt/det	108.566 lt/det	108.566 lt/det
3	Realisasi ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam	35.692 lt/det	35.969 lt/det	36.188 lt/det	38.465 lt/det

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

#### d. Pengelolaan Bangunan Gedung Negara

Pengelolaan bangunan gedung negara dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bangunan gedung sebagai tempat melakukan kegiatan sosial maupun budaya. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan guna menjaga kondisi bangunan gedung agar layak dipergunakan, serta membuat regulasi tentang bangunan gedung. Selama periode Tahun 2014 - 2017 telah dilaksanakan pembangunan 18 gedung dan pemeliharaan 73 gedung. Pencapaian tersebut meningkatkan pengelolaan dan pembangunan gedung negara pada Tahun 2017 menjadi 54 unit atau 66,67% dari 81 unit bangunan gedung yang terbangun sampai Tahun 2017. Untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan Bangunan Gedung sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan Bangunan Gedung agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pada Tahun 2017 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.

#### e. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk sebagai pusat kawasan peruntukan pertanian di wilayah tengah pada wilayah Provinsi Jawa Timur yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, perdagangan, jasa dan industri yang berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam perencanaan tata ruang, selama periode Tahun 2014-2017 telah tersusun dokumen RDTR Perkotaan/Pedesaan sebanyak 9 dokumen atau 100% dari 9 dokumen yang direncanakan. Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, telah diterbitkan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang sesuai RTRW sebanyak 207 ijin atau 100% dari 207 ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan.

Dengan tersusunnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara otomatis semua peraturan tentang tata ruang harus mengacu pada Perda tersebut. Capaian kinerja urusan tata ruang dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.68.  
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk  
Tahun 2014-2017  
(Persen)

No	Jenjang	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase tersusunnya dokumen RDTR Perkotaan/Pedesaan (%) *) Pengajuan Rekomendasi Gubernur menunggu penetapan Perda tentang Review RTRW	100	100	100	100
2	Persentase rekomendasi ijin pemanfaatan ruang sesuai perda RTRW (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.69.  
Tersusunnya RDTR Perkotaan/Perdesaan

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah dokumen rencana detail yang direncanakan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen
2	Realisasi dokumen rencana detail yang telah disusun sampai dengan tahun sebelumnya	5 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen
3	Realisasi dokumen rencana detail yang telah disusun sampai dengan tahun ini	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.70.  
Persentase Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Ruang Sesuai Perda RTRW

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah dokumen tata ruang yang ada	10 dokumen	9 dokumen	10 dokumen	20 Dokumen
2	Jumlah permohonan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang masuk ke BKPRD	29 Ijin	35 ijin	73 ijin	81 ijin



NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
3	Jumlah rekomendasi ijin pemanfaatan ruang sesuai RTRW	29 Ijin	35 ijin	68 ijin	75 ijin
4	Jumlah rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW	-	-	5 ijin	6 ijin

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

#### 2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan prasarana dasar permukiman pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan menyediakan pelayanan dasar. Pembangunan prasarana dasar permukiman meliputi penyediaan prasarana air minum, sanitasi, drainase, perumahan dan permukiman serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Capaian kinerja urusan perumahan dapat dilihat dari perkembangan penyediaan prasarana air bersih perpipaan, dan lantainisasi/pemugaran rumah tidak layak huni. Capaian kinerja urusan perumahan yang terdiri dari pemenuhan air bersih, pelayanan drainase, pemenuhan rumah layak huni, dan pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan perumahan yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.71.  
Capaian Kinerja Urusan Perumahan  
di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017

No	Jenjang	2014	2015	2016	2017
1	Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan Air bersih dengan sistem perpipaan (%)	15.11	16.67	17.75	18.75
2	Persentase ketersediaan drainase lingkungan (%)	72.61	78.25	87.46	87.39
3	Persentase rumah layak huni (%)	23.6	25.75	25.97	25.98
4	Persentase pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan (%)	73.07	73.84	74.20	74.31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan dari Tahun 2014 – 2017 telah meningkatkan persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan Air bersih dengan sistem perpipaan sebanyak 18,75%, Persentase ketersediaan drainase lingkungan sebesar 87,39%, Persentase rumah layak huni sebesar 25,98%, dan pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan sebesar 74,31 pada tahun 2017.



Tabel 2.72.  
Penduduk Yang Mendapatkan Air Bersih

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Perkiraan Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.037.723	1.041.716	1.045.375	1.048.799
2	Jumlah target penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan sampai dengan tahun ini (jiwa)	120.776	130.499	140.192	149.261
3	Jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan tahun sebelumnya (jiwa)	122.352	156.210	173.013	185.048
4	Jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan (jiwa)	33.858	16.803	12.035	14.370
5	Realisasi jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan (jiwa)	156.210	173.013	185.048	199.418

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Dalam rangka meningkatkan pelayanan air terhadap masyarakat, dilaksanakan sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan pembangunan sarana-sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/ sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran. Untuk mendukung pencapaian target juga dilaksanakan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat juga dilakukan pengelolaan air minum melalui kelompok HIPPAM, pelaksanaan program PAMSIMAS, dan peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat. Upaya-upaya tersebut telah meningkatkan realisasi jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan sebesar 199.418 jiwa atau 18,75% dari 1.042.326 jiwa perkiraan penduduk Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2.73.  
Ketersediaan Drainase Lingkungan

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Panjang drainase lingkungan yang dibutuhkan (Km)	460,189	462,766	465,357	467,947
2	Target panjang drainase yang dibangun/tersedia (Km)	317,576	332,590	465,357	362,565
3	Panjang drainase lingkungan yang sudah ada sebelumnya (Km)	302,597	334,171	384,570	407,008
4	Realisasi panjang drainase yang dibangun (Km)	31,574	27,961	22,438	8,736
5	Realisasi panjang drainase yang dibangun (Km)	334,171	362,132	407,008	415,744

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk

Ketersediaan drainase lingkungan menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam membangun dan menyediakan drainase bagi lingkungan perumahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik sehingga layak untuk dipergunakan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Beberapa program yang mendukung ketersediaan drainase lingkungan diantaranya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan Program Kotaku. Upaya-upaya tersebut telah meningkatkan Realisasi panjang drainase yang dibangun sebesar 415,744 km pada tahun 2017 atau 87,39 % dari 467,947 km Panjang drainase lingkungan yang dibutuhkan.

Tabel 2.74.  
Rumah Layak Huni

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Perkiraan Jumlah rumah s/d Akhir Tahun	290.478 unit	292.466 unit	294.454 unit	317.341 unit
2	Perkiraan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni s/d Akhir Tahun	66.871 unit	66.178 unit	68.301 unit	41.116 unit
3	Perkiraan Jumlah Rumah Layak Huni s/d Akhir Tahun				276.225 unit
4	Jumlah Target Rumah Layak Huni s/d Akhir Tahun	14.444 unit	14.407 unit	14.978 unit	61.018 unit
5	Realisasi Rumah Layak Huni	14.337 unit	15.782 unit	17.043 unit	17.744 unit



NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
	Tahun Sebelumnya				
6	Realisasi Rumah Layak Huni	1.445 unit	1.261 unit	701 unit	1.090 unit

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Rumah layak huni menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, telah dilakukan pembangunan rumah layak huni dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan APBN. Selain itu juga dilakukan pembangunan rumah layak huni melalui kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Upaya-upaya tersebut menghasilkan realisasi rumah layak huni sebanyak 1090 rumah.

Tabel 2.75.  
Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibutuhkan	2.736 km	2.737,30 km	2.736 km	2.736 km
2	Target Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun sampai dengan tahun ini	1.976,49 km	2.015,47 km	2.047,89 km	2.081,55 km
3	Panjang Jalan Yang Telah Dibangun Tahun Sebelumnya	1.980,486 km	1.999,22 km	2.021,11 km	2.030,10 km
4	Realisasi Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun Tahun Ini	18,73364 km	21,89 km	8,99 km	6,865 km
5	Realisasi panjang jalan lingkungan yang dibangun sampai dengan Tahun ini	1.999,22 km	2.021,11 km	2.030,10 km	2.036,965 km

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Pemenuhan jalan lingkungan menggambarkan upaya Pemerintah Daerah dalam membangun dan menyediakan jalan bagi lingkungan perumahan dalam rangka pelayanan publik sehingga layak untuk dipergunakan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan yang bersumber dari APBD, pembangunan jalan lingkungan melalui program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), dan pembangunan jalan lingkungan melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan (PIIP), upaya-upaya tersebut telah



meningkatkan realisasi panjang jalan lingkungan yang dibangun sepanjang 2.036,965 km atau 74,31 % dari 2.736 km panjang jalan lingkungan yang dibutuhkan.

### 2.3.1.5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan semakin dirasakan perlunya meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk terutama upaya menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk terutama upaya menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap, suatu kondisi dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur. Indikator urusan kesatuan bangsa dan politik mencakup 3 urusan, yaitu urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan urusan berikutnya adalah urusan kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut:

Tabel 2.76.  
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Nganjuk tahun 2013-2017

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pelaksanaan operasi penegakan Perda	46	47	60	125	62
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100	100	100	100	63,9
3. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Nganjuk	70	82,56	82,56	82,56	74,04
4. Persentase forum antar umat beragama yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	100	100	100	100	100
6. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk 2018



Kondisi keamanan di Kabupaten Nganjuk terdapat permasalahan terkait jumlah kejahatan selama 2014 – 2016, dimana tahun 2014 sebanyak 421, naik menjadi 488 tahun 2015 dan menurun menjadi 412 pada 2016. Sementara itu, persentase tindak pidana yang diselesaikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan pada tahun 2016 mencapai 42,72%, di bawah rata-rata persentase Provinsi Jawa Timur sebesar 69,70%. Gambaran kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.77.  
Kondisi Keamanan Kabupaten Nganjuk  
Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
<b>Jumlah Tindak Pidana:</b>			
- dilaporkan (Crime Total)	421	488	412
- diselesaikan (Crime Cleared)	134	234	176
<i>persentase penyelesaian</i>	31,83%	47,95%	42,72%
<b>Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan:</b>			
- pembunuhan	0	3	2
- penganiayaan berat	30	32	17
- penganiayaan ringan	5	6	13
- kekerasan dalam rumah tangga	6	11	6
- perkosaan	0	3	1
- pencabulan	18	34	21
- penculikan	0	0	0
- pencurian dengan kekerasan	8	13	7
- pencurian biasa	38	46	31
- pencurian kendaraan bermotor	123	81	54
- pencurian dengan pemberatan	63	87	77
- pengrusakan / penghancuran barang	13	6	8
- pembakaran dengan sengaja	0	0	0
- narkoba dan psikotropika	5	27	47
- penipuan / perbuatan curang	97	112	110
- penggelapan	14	26	18
- korupsi	1	1	0
- kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0
<i>jumlah total kejahatan</i>	421	488	412
<b>Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah polisi</b>			
- jumlah polisi	1.082	1.082	1.090
- jumlah penduduk	1.037.723	1.041.716	1.045.375
<i>rasio</i>	1 : 959	1 : 963	1 : 959
<b>Jumlah kelembagaan:</b>			
- Polsek	20	20	20
- pos polisi	14	14	14

Sumber : BPS Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Timur 2017

### 2.3.1.6. Sosial

Kondisi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar bermata pencaharian petani masih banyak yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya komitmen pemerintah untuk membantu memberdayakan secara ekonomi masyarakat miskin, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan dan kelompok rentan sosial lainnya dan meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi Sosial/LSM dengan memberikan bantuan sosial, bantuan permodalan dan bantuan pendidikan dan pelatihan ketrampilan agar mampu dan mandiri. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat salah satunya adalah keberadaan sarana sosial dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Capaian kinerja urusan sosial tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.78.  
Capaian Kinerja Urusan Sosial  
di Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Sarana Sosial	16	16	17	20	22
2. Persentase PMKS (%)	5,80	8,18	8,31	7,93	7,24
3. Persentase Penanganan PMKS (%)	38,00	32,18	37,03	44,05	13.39
4. Jumlah PMKS yang tertangani (orang)	22.832	27.202	21.513	25.550	64.893

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Dasar

#### 2.3.2.1. Ketenagakerjaan

Peningkatan kesejahteraan di bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 – 2017 difokuskan pada peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak buruh agar dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Kebijakan yang diambil diantaranya :

- Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap Norma Jamsostek; dan
- Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan Norma keselamatan dan kesehatan kerja;

Kedua hal tersebut menjadi sangat penting untuk lebih meningkatkan kepedulian perusahaan terkait dengan jaminan kesehatan pekerja dan pengurangan kecelakaan kerja. Untuk diketahui jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk trendnya terus mengalami kenaikan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Tahun 2013 jumlah perusahaan besar sebanyak 1 buah, menengah 36 usaha dan usaha kecil sebanyak 488 usaha. Pada tahun 2017, jumlah tersebut terus meningkat sehingga menjadi 11 perusahaan besar, dan usaha kecil sebanyak 542 usaha. Jenis usaha menengah mengalami penurunan menjadi sebanyak 34 usaha. Sedangkan, untuk capaian kinerja atas perusahaan yang menerapkan norma K3 dan Jamsostek juga terus menunjukkan peningkatannya.

Tabel 2.79.  
Persentase Perusahaan Peserta Jamsostek dan yang menerapkan K3  
Tahun 2014 – 2017  
(Persen)

No	Jenjang	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesejahteraan kerja (K3) (%)	89.09	95.93	95.43	0*
2	Persentase kepatuhan perusahaan terhadap norma Jamsostek (%)	93.86	93.48	96.00	96.85

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.80.  
Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3 dan Jamsostek

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Perusahaan Menerapkan Norma K3	294	330	344	344
2	Jumlah Perusahaan	330	344	350	350
3	Jumlah Perusahaan Menerapkan Jamsostek	153	344	336	366
4	Jumlah Perusahaan	163	330	350	350

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk 2018

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Nganjuk juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2013 jumlah pencari kerja masih sebanyak 1.637 orang, jumlah ini terus menaik secara signifikan yaitu menjadi 2.493 orang tahun 2014 dan meningkat drastis pada tahun 2016 menjadi 5.221 orang dan di tahun 2017 sebanyak 2.207 orang. Sektor industri dan pengolahan menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan, dilihat dari tingkat pendidikan, lulusan SMK adalah paling banyak pencari kerjanya. Dari semua sektor ini, kesempatan kerja di level menengah yang dapat terdeteksi dan di kalangan lulusan pendidikan tinggi tidak terdeteksi dengan baik. Asumsinya bahwa sebagian besar angkatan kerja yang memiliki keahlian pendidikan tinggi terserap oleh kesempatan kerja.

Jumlah pencari kerja tahun 2016 didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 2.249 orang atau sebesar 43,08%. Disusul kemudian lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1.154 orang atau sebesar 22,10%. Jumlah pencari kerja meningkat tajam pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2014. Sedangkan di tahun 2017 jumlah pencari kerja oleh lulusan SMK sebanyak 471 dan lulusan SMA sebanyak 589. Namun demikian, komposisi tingkat pendidikan pencari kerja tidak berubah selama hampir 5 tahun berturut-turut. Data ini menunjukkan bahwa tren pencari kerja di Kabupaten Nganjuk berasal dari sekolah kejuruan yang memang disiapkan untuk siap kerja. Beberapa masalah yang diidentifikasi di urusan ketenagakerjaan antara lain:

- 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;

- 2) Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda dan masih besarnya angkatan kerja yang berpendidikan rendah;
- 3) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja masih rendah dan belum sesuai kebutuhan pasar;
- 4) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- 5) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai;

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurut pendidikan di Kabupaten Nganjuk tahun 2015 sebanyak 662 orang, tahun 2016 sebanyak 616, dan tahun 2017 sebanyak 814. Sedangkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk berdasarkan UMK tahun 2015 sebesar Rp 1.265.000, tahun 2016 sebesar Rp 1.411.000, dan pada tahun 2017 sebesar Rp 1.527.410.

Masih tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan oleh tidak seimbang pertambahan angkatan kerja dibanding jumlah ketersediaan lapangan kerja yang ada menyebabkan makin tingginya angka pencari kerja yang tidak tersalurkan. Tingginya lulusan baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi tiap tahun merupakan potensi pencari kerja yang akan menambah jumlah makin besar rasio pencari kerja bila dibandingkan dengan jumlah lowongan yang tersedia. Data di bawah menggambarkan tingkat kemampuan lowongan kerja yang disediakan tiap tahun terhadap jumlah pencari kerja yang makin bertambah.

**Tabel 2.81.**  
**Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017**  
**(Persen)**

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Persentase Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (%)	89,09	95,93	95,43	95,95
2. Persentase kepatuhan perusahaan terhadap norma Jamsostek (%)	93,86	93,48	96,00	96,85

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk 2018*

#### 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu perlu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan ketrampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi. Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

Tabel 2.82.  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan  
dan perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk  
Tahun 2013 -2017

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	3,20	3,14	3,68	3,31	3,29
2. Persentase Penyelesaian KDRT yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100
3. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2018

Perlindungan anak dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten layak anak. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pemenuhan hak-hak anak yaitu :

- hak sipil dan kebebasan,
- hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
- hak kesehatan dasar dan kesejahteraan,
- hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya,
- hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kepedulian kepada perempuan dan anak diantaranya, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bhayangkara, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Nganjuk, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan *Women Crisis Center (WCC)*.

Beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.83.  
Tabel 2.84. Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017

Uraian	Perempuan	Anak	Jumlah
Perkosaan	1	0	1
Persetubuhan	1	32	33
Pencabulan	0	4	4
Pelecehan Seksual	2	0	2
KDRT	31	2	33
Kekerasan Fisik	1	13	14
Kekerasan Psikis	10	4	14
Penelantaran	1	6	7



Uraian	Perempuan	Anak	Jumlah
Trafficking	0	0	0
Asuh/Eksekusi Anak	0	0	0
ABH	0	33	33
Lain-lain	1	10	11
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>104</b>	<b>152</b>

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.2.3. Ketahanan Pangan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan, dalam kaitan ini pemerintah melakukan: pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap ketersediaan pangan cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Ketahanan pangan juga menyangkut lembaga/instansi, dalam menyelenggarakan operasional yang sesuai dengan potensi dan budaya setempat, mengingat cakupan yang multi sektor dan multi wilayah dalam peragaman kegiatan ketahanan pangan sangat membutuhkan adanya koordinasi lintas sektoral yang mantap dan dukungan yang penuh dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk, guna mewujudkan ketahanan pangan daerah maupun local wilayah. Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari tingkat ketersediaan konsumsi pangan dan penyaluran raskin.

Kinerja ketahanan pangan salah satunya diukur dari ketersediaan pangan. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Persentase peningkatan ketersediaan pangan pada tahun 2013 sebesar 3,10% naik hingga 3,97% pada 2015 lalu menurun menjadi 3,73% pada 2016 dan 3,50% pada 2017. Salah satu penyebab penurunan adalah makin berkurangnya lahan produktif.

Tabel 2.84.  
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah (%)	3,10	3,80	3,97	3,73	3,50

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.85.

## Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2015–2017

Kontribusi	2015		2016		2017	
	Energi (kal/kap/hr)	Protein (gr/Kap/hr)	Energi (kal/kap/hr)	Protein (gr/Kap/hr)	Energi (kal/kap/hr)	Protein (gr/Kap/hr)
Hewani	771,16	66,82	771,16	66,82	584,81	49,13
Total	5.974	230,72	5.974	230,72	5.344	183,16

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk 2018

## 2.3.2.4. Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspek keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan, yang dapat menjamin pembangunan daerah berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal.

Beberapa indikator kinerja urusan persampahan antara lain Persentase luas cakupan pemukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah, persentase sampah perkotaan yang terangkut ke tempat pembuangan akhir TPA, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, cakupan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, persentase peningkatan usaha/ kegiatan yang menggunakan IPAL, dan persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tabel 2.86.

## Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Persentase luas cakupan pemukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah (%)	60,11	60,11	60,11	88,72
2. Persentase sampah perkotaan yang terangkut ke tempat pembuangan akhir TPA (%)	86,50	86,76	89,37	80
3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	17,33	42	15,57	16,75
4. Cakupan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	1,27	14,46	1,81	15,19
5. Persentase peningkatan usaha/ kegiatan yang menggunakan IPAL (%)	29,33	25,00	25	22,68
6. Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	51,53	52,20	52,25	52,25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2018

Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan selama tahun 2014-2017 telah meningkatkan cakupan pemukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah sebesar 88,72%, Persentase sampah perkotaan yang terangkut ke tempat pembuangan akhir TPA sebesar 80%, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 16,75%, Cakupan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sebesar 15,19%, Persentase peningkatan usaha/ kegiatan yang menggunakan IPAL sebesar 22,68%, dan Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 52,25% pada tahun 2017.

Tabel 2.87.  
Sampah Perkotaan Yang Terangkut Ke TPA

NO	DATA	TH 2014 (Ton)	TH 2015 (Ton)	TH 2016 (Ton)	TH 2017 (Ton)
1	Perkiraan Produksi Sampah	174.763	175.462	176.222	177.084
2	Target sampah yang terangkut dalam 1 tahun	127.350	140.369	140.977	141.677,2
3	Realisasi sampah yang terangkut	151.170	153.116	157.496	155.824,7

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2018

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara meningkatkan cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah dan meningkatkan sampah perkotaan yang terangkut ke TPA. Upaya-upaya ini telah meningkatkan realisasi sampah perkotaan yang terangkut ke TPA sebesar 155.824,7 Ton atau 80% dari 177.084 Ton perkiraan produksi sampah.

Tabel 2.88.  
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah usaha/kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL	75	212	366	412
2	Jumlah usaha/kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL yang diawasi	13	41	57	69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2018

Indikator ini merupakan indikator untuk mengukur fungsi pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan AMDAL. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi dengan jumlah perusahaan yang wajib AMDAL.

Realisasi Jumlah usaha/kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL yang diawasi sebanyak 69 kegiatan atau 16,75% dari 412 usaha/kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL.

Tabel 2.89.  
Penhijauan Wilayah Rawan Longsor Dan Sumber Mata Air

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sampai dengan tahun ini	2 titik	24 titik	24 titik	24 titik
2	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang perlu penghijauan sampai tahun ini	158 titik	166 titik	166 titik	166 titik
3	- Jumlah wilayah Rawan Longsor	12 titik	8 titik	8 titik	8 titik
4	- Jumlah mata air yang masih hidup	146 titik	158 titik	158 titik	158 titik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2018

Cakupan wilayah longsor dan sumber mata air menunjukkan tingkat kepedulian Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk melindungi Kawasan rawan longsor serta untuk memelihara sumber-sumber mata air. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan adalah penanaman pohon atau penghijauan di wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Pada tahun 2017 telah dilakukan 24 titik lokasi penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air atau 15,19% dari seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang perlu penghijauan sebanyak 166 titik lokasi.

Tabel 2.90.  
Peningkatan Usaha/Kegiatan Yang Menggunakan IPAL

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah usaha/kegiatan yang wajib menggunakan IPAL sampai dengan tahun ini	75	88	88	116
2	Jumlah usaha/kegiatan yang telah menggunakan IPAL sampai dengan tahun ini	22	25	22	32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2018

Peningkatan usaha/kegiatan yang menggunakan IPAL menunjukkan ketaatan dan peran serta dunia usaha dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peruntukannya. Pada tahun 2017 terdapat 32 usaha/kegiatan yang telah menggunakan IPAL atau 22,68% dari 116 usaha/kegiatan yang wajib menggunakan IPAL.

Tabel 2.91.  
Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk	28.95,710 Ha	28.950,710 Ha	28.950,710 Ha	28.950,710 Ha
2	Luas RTH Perkotaan yang seharusnya ada	8.685,213 Ha	4.475,64 Ha	8.685,21 Ha	8.685,21 Ha
3	Luas RTH perkotaan tahun sebelumnya	4.470,21 Ha	4.475,64 Ha	4.533,94 Ha	4.537,963 Ha
4	Penambahan RTH Tahun ini	5.43 Ha	58,29 Ha	4,022965 Ha	11,4 Ha
5	Luas RTH perkotaan sampai tahun ini	4.475,64 Ha	4.533,94 Ha	4.537,963 Ha	4.549,363 Ha

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2018

Pemerintah Kabupaten Nganjuk selalu berupaya meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Keberadaan RTH memiliki 3 fungsi yaitu fungsi ekologis, social-ekonomi, dan evakuasi. Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan pengatur iklim. RTH juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yaitu RTH mampu memberikan ruang interaksi social, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota. Sedangkan dalam fungsi evakuasi, RTH digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Sampai tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyediakan RTH sebesar 4.549,363 Ha.

#### 2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan Catatan Sipil dan Kependudukan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat dengan menertibkan akta-akta kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang.

Indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil. Hal ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran. Bila dilihat selama kurun waktu tahun 2014-2017, Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, dan Akte kelahiran rata-rata mengalami peningkatan, peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Capaian Kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:

Tabel 2.92.  
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan	78,255	78,250	79,611	70,100

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
2. Cakupan penerbitan KK	96,47	99,78	99,72	122,11
3. Cakupan kepemilikan akta kelahiran	87,35	87,83	89,46	90,53
4. Cakupan kepemilikan KTP	64,80	97,08	97,96	99,85
5. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	0,43	8,9	73,58	226,62

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan perdesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan ada penguatan kelembagaan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Salah satu Indikator untuk melihat pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah jumlah pengurus yang telah pelatihan BUMDES.

Tabel 2.93.  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Persentase BUMDesa aktif (%)	90,9	94,70	94,70	100
2. Persentase BUMDesa Bersama aktif (%)	0	0	100	100
3. Persentase lembaga ekonomi desa aktif (%)	81,18	82,57	85,83	111,98
4. Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100
5. Persentase Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan (%)	82,75	85,21	88,03	90,49
6. Persentase Jumlah desa yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik di Bidang Administrasi Keuangan (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nganjuk 2018

BUMDesa aktif dicerminkan dari indikator kelembagaan (dasar hukum pembentukan, kepengurusan, administrasi), keberadaan aktivitas unit usaha dan permodalan, serta kontribusi peningkatan pendapatan asli desa. Realisasi BUMDesa aktif tahun 2017 sebesar 100%, meningkat



dibandingkan tahun 2014 sebesar 90,9%. Faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja adalah adanya dukungan regulasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran Dana Desa yang dapat digunakan untuk penguatan BUMDesa, kebijakan revitalisasi BUMDesa, serta pendampingan desa.

Sedangkan tingkat keaktifan Lembaga Ekonomi Desa diindikasikan dari peningkatan jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2017 keaktifan mencapai 111,98% meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 81,18%. Faktor pendukung keberhasilan ini adalah tumbuhnya kekuatan partisipasi masyarakat desa, adanya pola kolektif dalam permodalan usaha oleh masyarakat, serta kemauan tinggi untuk menerapkan manajemen pengembangan usaha yang telah dilatihkan.

Capaian kinerja pembinaan untuk mewujudkan Posyandu yang aktif telah menuai hasil yang ditargetkan yakni 100% setiap tahun. Capaian ini diperoleh berkat upaya berupa sinergi pembinaan antara Dinas PMD dan Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah di tingkat Kabupaten serta dukungan 20 Kecamatan melalui tim Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu.

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan adalah indikator untuk mengukur jumlah desa yang mempunyai swadaya masyarakat dalam rangka mendukung program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2017 terdapat 90,49% desa memiliki kegiatan yang mengandung swadaya. Meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 82,75%. Hal ini, membuktikan meskipun terdapat kucuran besar dana transfer desa setiap tahun, namun tidak menghilangkan tradisi gotong royong, partisipasi dan swadaya masyarakat desa.

Indikator kinerja tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah untuk mengukur jumlah desa yang telah melaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan Penyusunan (RKP) Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Laporan Pertanggungjawaban. Realisasi jumlah desa yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2017 sebesar 100% selama 5 tahun dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 80,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 90,33%. Faktor pendukung keberhasilan kinerja ini adalah dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa yang semakin baik, adanya sinergi yang baik antara Kecamatan dan perangkat daerah kabupaten dalam pembinaan desa, adanya regulasi daerah yang cukup lengkap untuk pedoman pembinaan desa.

#### 2.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator kinerja untuk urusan keluarga berencana dan sejahtera di Kabupaten Nganjuk adalah perkembangan rasio akseptor KB. Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Nganjuk cukup Baik. Masyarakat Kabupaten Nganjuk saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013 sebanyak 159.212 peserta dari 203.739 pasangan usia subur. Capaian kinerja urusan keluarga berencana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.94.  
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Sejahtera  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 -2017.

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Persentase capaian peserta KB baru	139,73	95,25	78,07	41,86
2. Persentase Cakupan peserta KB aktif	79,78	79,65	78,07	77,38
3. Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (%)	48,99	44,50	51,20	-
4. Persentase laju pertumbuhan penduduk (%)	0,40	0,38	0,35	0,33

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Nganjuk 2018

#### 2.3.2.8. Perhubungan

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan transportasi terpadu berbasis pengembangan wilayah, meningkatkan keselamatan transportasi secara terpadu, serta mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat. Beberapa indikator kinerja terkait dengan pembangunan bidang perhubungan antara lain pemenuhan sarana angkutan umum yang laik jalan, persentase pemasangan rambu lalu lintas, dan persentase pemenuhan perlengkapan sarana lalu lintas jalan raya. Capaian kinerja urusan perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2.95.  
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Nganjuk  
Tahun 2013-2017  
(Persen)

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Persentase sarana angkutan umum yang laik jalan (%)	89,31	89,31	83,92	86,87	87,40
2. Persentase pemasangan rambu-rambu (%)					
a. APILL	11,11	11,11	33,33	55,55	66,66
b. Flash Light	21,73	21,73	56,52	91,30	100
c. Rambu	21,72	21,72	46,83	71,79	80,41
3. Persentase pemenuhan perlengkapan prasarana Lalu Lintas (%)					
a. Halte	90,48	90,48	104,76	109,52	109,52
b. Guardrail	22,40	22,40	52,40	77,40	99

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
c. Marka Jalan	10,16	10,16	26,16	43,16	60,16
d. Delineator	9,59	9,59	23,38	44,07	57,86
e. Paku Jalan	0,00	0,00	11,78	17,11	21,55
f. Terminal	100	100	77,78	77,78	77,78
g. Cermin Tikungan	0	0	0	20	40

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk 2018

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait transportasi beberapa poin yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu transportasi yang aman, transportasi yang lancar, dan transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Hasil-hasil program urusan perhubungan yaitu meningkatkan angkutan umum laik jalan sebesar 87,40% pada tahun 2017, pemasangan rambu-rambu (APIL 50%, Flash Light 40%, dan rambu-rambu 35% pada tahun 2017) dan pemenuhan perlengkapan prasarana lalu lintas yang meliputi: halte, guardrail, marka jalan, delineator, paku jalan, terminal dan cermin tikungan.

Tabel 2.96.  
Sarana Angkutan Umum Laik Jalan

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah angkutan umum yang lulus uji KIR	3.042 kendaraan	3.095 kendaraan	3.111 kendaraan	7.088 kendaraan
2	Jumlah angkutan umum yang wajib uji KIR	3.406 kendaraan	3.688 kendaraan	3.581 kendaraan	8.106 kendaraan

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk 2018

Untuk mewujudkan transportasi yang aman, setiap tahun dilakukan kegiatan Uji KIR untuk angkutan umum, dimana setiap tahun terjadi kenaikan jumlah angkutan umum yang lulus uji KIR, pada tahun 2017 ada 7.088 (87,44%) angkutan umum yang lulus uji KIR dari 8.106 yang melakukan uji KIR.

Tabel 2.97.  
Pemasangan Rambu Lalu Lintas

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	APILL	1	2	2	1
2	Flash Light	5	8	8	2
3	Rambu-rambu Lalu Lintas	315	364	362	125
4	Jumlah APILL sampai dengan Tahun ini	1	3	5	6
5	Jumlah Flash Light sampai dengan Tahun ini	5	13	21	23
6	Jumlah Rambu-rambu lalu lintas sampai dengan Tahun	315	679	1.041	1.166



NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
	ini				
7	Jumlah Kebutuhan APILL	9	9	9	9
8	Jumlah Kebutuhan Flash Light	23	23	23	23
9	Jumlah Kebutuhan Rambu-rambu Lalu Lintas	1.450	1.450	1.450	1.450

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk 2018

Pada tahun 2014-2017 telah dilaksanakan pemasangan rambu-rambu antara lain: 6 APILL (67,7%) , 23 Flash Light (100%), dan 1166 rambu-rambu lalu lintas (80,4%).

Tabel 2.98.  
Pemenuhan Prasarana Lalu Lintas

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Halte	19 unit	3 unit	0 unit	0 unit
2	Guard Rail	224 m	300 m	250 unit	216 unit
3	Marka Jalan	508 m2	800 m2	850 m2	850 m2
4	Delineator	139 unit	200 unit	300 unit	200 unit
5	Paku Jalan	0 unit	265 unit	120 unit	100 unit
6	Terminal	9 unit	7 unit	7 unit	7 unit
7	Cermin Tikungan	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
8	Jumlah Halte sampai dengan tahun ini	19 unit	22 unit	22 unit	22 unit
9	Jumlah Guard Rail sampai dengan tahun ini	224 m	524 m	774 unit	990 unit
10	Jumlah Marka Jalan sampai dengan tahun ini	508 m2	1.308 m2	2.158 m2	3.008 m <sup>2</sup>
11	Jumlah Delineator sampai dengan tahun ini	139 unit	339 unit	639 unit	839 unit
12	Jumlah Paku Jalan sampai dengan tahun ini	0 unit	265 unit	385 unit	485 unit
13	Jumlah Terminal sampai dengan tahun ini	9 unit	7 unit	7 unit	7 unit
14	Jumlah Cermin Tikungan sampai dengan tahun ini	0 unit	0 unit	2 unit	4 unit
15	Jumlah Kebutuhan Halte	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit
16	Jumlah Kebutuhan Guard Rail	1000 m	1.000 m	1.000 m	1.000 m
17	Jumlah Kebutuhan Marka Jalan	5000 m2	5.000 m2	5.000 m	5.000 m <sup>2</sup>
18	Jumlah Kebutuhan Delineator	1450 unit	1.450 unit	1.450 unit	1.450 unit
19	Jumlah Kebutuhan Paku Jalan	2250 unit	2.250 unit	2.250 unit	2.250 unit
20	Jumlah Kebutuhan Terminal	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit
21	Jumlah Kebutuhan Cermin Tikungan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk 2018



Untuk pemenuhan prasarana lalu lintas sepanjang tahun 2014-2017 telah dilaksanakan pembuatan halte sebanyak 22 Halte atau 104,74% dari 21 Halte yang dibutuhkan, 990 unit Guard Rail atau 99% dari 1000 unit Guard Rail yang dibutuhkan, 3008 m<sup>2</sup> Marka Jalan atau 60,16% dari 5000 m<sup>2</sup> Marka Jalan yang dibutuhkan, 839 Delineator atau 57,86% dari 1450 Delineator yang dibutuhkan, 485 paku jalan atau 21,55% dari 2250 paku jalan yang dibutuhkan, 7 terminal atau 77,78%, dari 9 terminal yang dibutuhkan, dan 4 unit cermin tikungan atau 40% dari 10 unit cermin tikungan yang dibutuhkan.

### 2.3.2.9. Komunikasi dan Informatika

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peranan Teknologi Informasi sangat penting dalam mengimplementasikan Undang-undang dimaksud. Melalui website *www.nganjukkab.go.id* dapat diinformasikan kebijakan Pemerintah Daerah dan kegiatan pembangunan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan khususnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Saat ini, *www.nganjukkab.go.id* telah cukup aktif menyampaikan informasi tersebut meskipun perlu peningkatan pengelolaan khususnya *update* data dan informasi secara kontinyu. Peranan komunikasi dan informatika juga sangat penting di dalam mengkomunikasikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat sehingga dapat dihindari kerawanan atau konflik antar kelompok maupun kesalahpahaman terhadap Pemerintah Daerah. Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

Tabel 2.99.  
Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Intensitas update website Pemkab Nganjuk per minggu	1	2	2	2	2
2. Rata-rata publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui : majalah, Radio dan Pemutaran film	12	42	38	128	128
3. Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	25	21	23	23	23

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.2.10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Jumlah Koperasi aktif pada tahun 2017 di Kabupaten Nganjuk sebanyak 922 Unit dan sebanyak 426 diantaranya atau 46,20% adalah koperasi aktif. Indikator kinerja urusan koperasi dan usaha mikro antara lain persentase koperasi aktif dan persentase usaha mikro di Kabupaten Nganjuk. Capaian kinerja urusan koperasi dan usaha mikro sebagai berikut:

Tabel 2.100.  
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017  
(Persen)

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Persentase Koperasi Aktif (%)	32,39	41,75	42,67	38,83	46,20
2. Persentase Usaha Mikro Kecil (%)	96,5	98,20	98,18	98,00	99,29
3. Persentase Usaha Menengah (%)	1,73	1,80	2,00	2,00	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk 2018

Capaian prosentase koperasi aktif mengalami kenaikan sampai dengan 2015 yang menunjukkan bahwa kesadaran koperasi untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin dan berkala sebagai tolok ukur koperasi aktif sudah semakin besar. Tahun 2016 capaian mengalami penurunan prosentase di angka 38,83 % disebabkan kurangnya pengawasan intensif. Persentase Usaha Mikro Kecil pada tahun 2017 realisasi kinerja berada diangka 99,29% dari target yang telah ditetapkan 98,20, mengalami penurunan karena adanya pengalihan kewenangan pembinaan sektor usaha kecil dan menengah dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Propinsi.

#### 2.3.2.11. Penanaman Modal

Suasana yang kondusif mutlak di perlukan bagi suatu daerah guna keutuhan dan menjangking penanaman modal. Untuk mewujudkannya dengan memberikan kontribusi dan pelayanan yang prima melalui :

- Pengembangan dan promosi potensi sumber daya di segala bidang
- Mengoptimalkan dan pemberdayaan masyarakat sekitar potensi dan produk unggulan
- Pengawasan Penanaman Modal di daerah Nganjuk
- Peningkatan profesional aparat penanaman modal
- Peningkatan kerjasama baik dengan instansi terkait maupun pihak swasta.

Dari beberapa hal tersebut di atas, indikator kinerja terkait dengan penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan jumlah investor (PMA/PMDN) di Kabupaten Nganjuk dan perkembangan nilai investasinya. Capaian kinerja urusan penanaman modal sebagai berikut:



Tabel 2.101.  
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017

No	Jenjang	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi investasi penanaman modal (ribu)	138.000.000	154.682.150	406.903.001	168.168.774	126.938.907
2	Investor Usaha Besar (usaha)	-	1	1	3	18
3	Investor Usaha Menengah (usaha)	-	31	8	34	85
4	Jumlah permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang	-	-	35	68	81

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.2.12. Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Nganjuk salah satunya dapat dilihat dari jumlah pemuda dan cabang olahraga yang berprestasi ditingkat provinsi maupun nasional, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.102.  
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Nganjuk tahun 2013-2017

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Kegiatan Pemuda Berprestasi					
-Target (jenis kegiatan)	5	5	5	5	5
-Realisasi (jenis kegiatan)	5	5	5	5	5
-Capaian kinerja (%)	100	100	100	100	100
2. Cabang Olahraga Berprestasi					
-Target (jenis olah raga)	2	2	2	2	2
-Realisasi (jenis olah raga)	2	2	2	2	2
-Capaian kinerja (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, dan Kebudayaan Kab. Nganjuk 2018

Capaian kinerja bidang pemuda dan olah raga tahun 2013-2017 telah mencapai target yang direncanakan. Faktor pendukung keberhasilan antara lain dukungan Pemerintah Daerah, kerjasama kepemudaan, pembinaan yang intensif. Sedangkan tantangan yang perlu diatasi antara lain kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga pelatih olah raga, sistem pembinaan yang belum terintegrasi, dan pengaruh negatif perkembangan teknologi informasi, gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai sosial budaya Indonesia, ancaman bahaya narkoba.

Tantangan tersebut dapat diatasi salah satunya dengan menggalakkan budaya olah raga di masyarakat. Berdasarkan data Persentase Penduduk Jawa Timur Umur 5 Tahun ke Atas Melakukan Kegiatan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Tahun 2012, sebanyak 24,78% penduduk Nganjuk melakukan olah raga dan 75,22% tidak melakukan olah raga selama seminggu terakhir. Angka ini lebih rendah dari persentase Jawa Timur sebesar 28,35%. (data BPS Provinsi Jawa Timur update tanggal 5. Maret 2015). Olahraga adalah kegiatan seseorang dengan sengaja meluangkan waktunya untuk melakukan satu atau lebih kegiatan fisik secara teratur (gerak badan dengan gerakan-gerakan tertentu atau dengan macam-macam permainan seperti senam, atletik, tenis meja, voli, sepak bola, dsb).

### 2.3.2.13. Statistik

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Dokumen statistik sebagaimana dimaksud adalah Kabupaten Dalam Angka, PDRB dan IKM. Capaian kinerja urusan statistik yaitu:

**Tabel 2.103.**  
**Capaian Kinerja Urusan Statistik**  
**Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Nganjuk Dalam Angka	1	1	1	1	1
2. Dokumen PDRB	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.2.14. Kebudayaan

Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Urusan Kebudayaan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, menanamkan dan melestarikan budaya daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Capaian kinerja urusan kebudayaan sebagai berikut:

**Tabel 2.104.**  
**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk**  
**Tahun 2013-2017**

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Peningkatan even seni dan budaya daerah (kali)	8	8	8	8	8
2. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan (%)	69,00	68,42	73,68	84,21	94,74

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, dan Kebudayaan Kab. Nganjuk 2018

Tabel 2.105.  
Capaian Kinerja Kesenian dan Kebudayaan

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah seluruh situs	5	5	16	16
	Jumlah situs yang dilestarikan	3	3	13	15
2	Jumlah seluruh cagar budaya	14	14	3	3
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	10	11	3	3
3	Target peningkatan kegiatan seni budaya daerah	8	8	8	8
	Realisasi peningkatan kegiatan seni budaya daerah	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, dan Kebudayaan Kab. Nganjuk 2018

Kegiatan budaya dan kesenian masyarakat yang saat ini masih menjadi tradisi diantaranya adalah :

- Upacara/ prosesi siraman sedudo yang dilaksanakan pada awal bulan syuro ;
- Tradisi bersih desa/ nyadranan;
- Prosesi gembyangan waranggono;
- Langen Tayub wilayah Nganjuk Utara;
- Seni Jaranan, Seni Hadrah;
- Tari Salepuk, Tari Mongde, Sandur;
- Kentrung Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot;
- Jamasan pusaka di Gedung Pusaka Ngliman Kecamatan Sawahan;
- Pawai alegoris pada peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk;
- Wayang timplong Desa Jetis Kecamatan Pace.

#### 2.3.2.15. Pertanahan

Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar tingkat ketertiban administrasi aset tanah Pemda dan desa. Indikator ini menunjukkan bagaimana upaya pengelolaan tanah-tanah milik pemerintah daerah yang sudah disertifikasikan hak miliknya. Jumlah aset tanah Pemda dan desa yang sudah tersertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.106.  
Jumlah Aset Tanah Pemda Yang Sudah Bersertifikat  
Tahun 2013-2017.

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah aset tanah Pemda	1.185	1.185	1.225	1.272	1.354
2	Jumlah Aset Tanah Pemda Yang Sudah Bersertifikat	765	765	805	867	960
3	Persentase Jumlah Aset Tanah Pemda Yang Sudah Bersertifikat (%)	65	65	66	68	71

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk 2018

#### 2.3.2.16. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2013-2017, Kabupaten Nganjuk hanya memiliki 1 buah perpustakaan milik pemerintah Daerah. Capaian kinerja urusan perpustakaan sebagai berikut:

Tabel 2.107.  
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017  
(Persen)

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	10	8,09	12,03	8,70	6,89
2. Persentase peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	4	8,39	7,02	4,82	8,14

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2018

#### 2.3.2.17. Kearsipan

Dalam urusan kearsipan ditunjukkan pada peningkatan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip dari instansi-instansi lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan melakukan manajemen kearsipan yang baik akan lebih memudahkan dalam menyimpan maupun pengambilan data sehingga lebih efisien dan aman. Capaian

kinerja urusan kearsipan menjadi satu dinas dengan urusan perpustakaan yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Capaian kinerja urusan kearsipan sebagai berikut:

Tabel 2.108.  
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017  
(Persen)

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa yang memiliki tata kearsipan yang baku (%)	8,95	14,92	20,89	26,95	31,43
2. Persentase SDM Pengelola Kearsipan Yang telah mengikuti Pelatihan Kearsipan (%)	26,17	34,90	43,63	52,36	61,08

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1. Pertanian

Urusan Pertanian (dalam arti mencakup pertanian, perkebunan dan perikanan) di Kabupaten Nganjuk dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin kuat, sehingga usaha tani diarahkan agar dapat menghasilkan produk bermutu, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar baik domestik maupun luar negeri. Salah satu indikator kinerja untuk melihat gambaran kondisi Kabupaten Nganjuk di Sektor Pertanian adalah Produktivitas komoditi pertanian yang akan disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.109.  
Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Ternak dan Perikanan  
di Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan.						
a. Tanaman Pangan						
1. Produksi						
a. Padi	Ton	575.065	582.810	623.267	711.244	648.773,91
b. Jagung	Ton	241.811	203.953	218.815	168.528	201.318,16
c. Kedelai	Ton	251.235	19.274	22.416	18.466	24.035,28
2. Produktivitas						



Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a. Padi	Kw/ha	68,80	67,25	68,18	67,02	67,71
b. Jagung	Kw/ha	67,60	67,79	69,32	67,04	68,15
c. Kedelai	Kw/ha	18,61	19,67	20,31	20,14	20,26
<b>b. Tanaman Hortikultura</b>						
<b>1. Produksi</b>						
a. Bawang merah	Kw	1.226.100	1.402.290	1.428.168,00	1.306.634	1.211.980
b. Cabai Rawit	Kw	53.550	6.043	73.704,00	1.095	75.258
c. Cabe Merah	Kw	38.500	30.643	41.656,00	16.459	7.772
d. Melon	Kw	56.420	110.135	126.633,80	99.765	29.560
e. Garbis	Kw	27.200	19.788	19.788	3.982	1.290
f. Durian	Buah	14.535	57.672	83.664,00	53.628	30.211
g. Alpukat	Kw	6.371	10.937	15.714,96	13.056	8.667
h. Jeruk	Kw	4.585	22.170	17.650,96	25.316	20.852
i. Mangga	Kw	181.316	177.269	181.661,40	2.450	79.853
j. Rambutan	Kw	11.501	28.641	49.115,00	15.705	23.955
<b>2. Produktivitas</b>						
a. Bawang merah	Kw/ha	122,00	124,08	123,37	108,57	101,10
b. Cabai Rawit	Kw	105,00	38,01	148,00	10,95	54,10
c. Cabe Merah	Kw	35,00	27,61	51,20	7,69	32,70
d. Melon	Kw	260,00	286,06	313,45	236,41	183,60
e. Garbis	Kw	170,00	162,20	204,05	102,10	107,50
f. Durian	Bh/pohon	51,00	215,53	181,64	209,24	85,60
g. Alpukat	Kg/pohon	35	50,49	50,55	52,10	26,90
h. Jeruk	Kw	35	41,73	43,11	43,99	27,80
i. Mangga	Kw	55	51,11	44,91	15,20	72,20
j. Rambutan	Kw	40	77,48	69,77	77,03	48,20
<b>c. Tanaman Perkebunan</b>						
<b>2. Produksi</b>						
a. Kakao	Ton	735,76	925	550,00	525,50	522,40
b. Cengkeh	Ton	684,40	504	517,00	554,00	548,40
c. Kopi	Ton	169,31	98	94,00	118,30	117,70
d. Kelapa	Ton	856,88	625	604,00	516,30	395,90
e. Tebu	Ton	24.047,41	21.076	23.632,00	18.415,54	19.025,68
f. Tembakau	Ton	719,39	796	1.376,67	85,47	7.859,50
g. Nilam	Ton	924,00	1.145	7.077	5.565,00	2.891,00
h. Wijen	Ton	141,30	509	465,00	0,75	36,60
<b>2. Produktivitas</b>						
a. Kakao	Kg/Ha	850,00	905,97	634,00	596,00	597,00
b. Cengkeh	Kg/Ha	580,00	631,58	588,00	599,40	597,00
c. Kopi	Kg/Ha	752,50	720,59	653,00	791,00	787,00
d. Kelapa	Kg/Ha	1.292,33	1.379,69	1.184,00	1.155,00	1.234,00
e. Tebu	Kg/Ha	6.346,00	5.487,11	7.506,00	5.753,00	5.825,00
f. Tembakau	Kg/Ha	789,67	835,00	2.276,21	627,30	17.236,00
g. Nilam	Kg/Ha	5.600,00	5.200,00	34.186,00	25.884,00	25.139,00
h. Wijen	Kg/Ha	900,00	1.446,00	1.417,00	600,00	1.200,00



Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>2. Peningkatan Persentase Produksi Hasil Peternakan</b>						
<b>a. Peningkatan produksi hasil peternakan</b>						
a. Daging	Ton	2.155,00	3.242,36	3.486,62	3.722,81	3.711,22
b. Telur	Ton	3.736,27	7.146,20	6.420,66	6.661,12	6.608,48
c. Susu	Ton	9,44	131,57	57,80	41,77	20,57
<b>b. Peningkatan produksi hasil peternakan</b>						
a. Ternak besar	Ekor	169.539	135.140	139.293	139.341	139.732
b. Ternak besar	Ekor	187.726	181.277	180.014	186.668	198.268
c. Ternak unggas	Ekor	1.332.692	2.373.684	2.648.880	4.888.802	2.638.547
<b>c. Produktivitas peternakan program IB</b>						
a. Service per conception	Kali	1,04	1,04	1,04	1,07	1,79
b. Calving interval	Bulan	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
c. conception rate	%	94,95	95,90	99,68	92,85	62,50

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu alat strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan pariwisata suatu daerah akan mudah dikenal sekaligus potensi-potensi unggulannya sehingga secara tidak langsung pariwisata merupakan alat promosi bagi daerah untuk menarik minat investasi. Pada tabel berikut dapat dilihat gambaran capaian kinerja urusan pariwisata yaitu:

Tabel 2.110.  
Capaian Kinerja Urusan Kepariwisata  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017  
(Persen)

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	50,85	155	103,20	195,20	92,40
2. Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata (%)	90,83	30,62	-15,55	200	240

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah raga dan Kebudayaan Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.3.3. Perdagangan

Pemerintah dituntut mengambil langkah strategis/kebijakan pembangunan yang utamanya adalah pembangunan ekonomi yang diarahkan pada pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan Usaha Ekonomi Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dirasakan bisa mempertahankan kondisi ekonomi nasional.

Sektor Perdagangan di Kabupaten Nganjuk saat ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu difasilitasi dengan mewujudkan kebijakan public yang menyederhanakan regulasi untuk menarik investor dan untuk pengembangan dan perluasan perdagangan guna akselerasi perdagangan serta memperkuat dan memperbaiki struktur perdagangan baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung. Tabel berikut merupakan gambaran capaian kinerja urusan perdagangan.

**Tabel 2.111.**  
**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan**  
**Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Jumlah Nilai Ekspor Daerah (ribu)	1.130.015,00	958.327,42	381.533,66	48.509,83	1.362.353,19
2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	32,55	35,53	64,20	65,69	72,00
3. Persentase Penggunaan ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (%)	77,21	89,60	74,13	83,68	1,17

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk 2018

#### 2.3.3.4. Perindustrian

Sektor Perindustrian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah mengingat pentingnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Di bawah ini tabel capaian kinerja urusan perindustrian.

**Tabel 2.112.**  
**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian**  
**Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017**

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Jumlah Usaha (unit)	16.389	16.445	16.591	17.088
2. Tenaga Kerja Terserap (orang)	60.810	61.018	61.570	66.803
3. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	57,63	54,05	72,50	83,75

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk 2018

### 2.3.4. Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan

#### 2.3.4.1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satu indikatornya adalah ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis SKPD
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja SKPD

Lebih jelasnya ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.113.**  
**Capaian Kinerja Perencanaan di Kabupaten Nganjuk**  
**Tahun 2014 -2017**  
**(Persen)**

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98,59	99,67	83,96	88,21
2. Persentase indikator kinerja RPJMD yang mencapai target (%)	95,45	93,47	95,34	95,34
3. Persentase program kegiatan pembangunan dalam dokumen perencanaan hasil musrenbang (RKPD) yang teranggarkan dalam APBD (%)	96,56	94,35	96,46	77,41

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk, 2018

**Tabel 2.114.**  
**Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD**

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah Program dalam RPJMD	284 program	301 program	212 program	196 program
2	Jumlah Program dalam RKPD	280 program	300 program	178 program	149 program

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk, 2018

Tabel 2.115.  
Persentase indikator kinerja RPJMD yang mencapai target

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah sasaran dalam RPJMD	44 sasaran	43 sasaran	43 sasaran	43 sasaran
2	Jumlah sasaran yang mencapai target tahun ini	42 sasaran	42 sasaran	41 sasaran	40 sasaran

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk, 2018

Tabel 2.116.  
Program Kegiatan Pembangunan Dalam Dokumen Perencanaan Hasil Musrenbang (RKPD)  
Yang Teranggarakan Dalam APBD

NO	DATA	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Jumlah kegiatan dalam RKPD	2.916 program	2.338 kegiatan	2.672 kegiatan	1.266 kegiatan
2	Jumlah kegiatan dalam APBD	3.020 program	2.478 kegiatan	2.770 kegiatan	1.278 kegiatan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk, 2018

#### 2.3.4.2. Keuangan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator pengukuran kemandirian daerah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan urusan daerah. Dalam lima tahun terakhir kontribusi PAD terhadap belanja daerah terus meningkat. Besaran peningkatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.117.  
Capaian Kinerja Pendapatan  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun (dalam %)				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Kontribusi PAD terhadap belanja daerah (%)	7,00	14,74	14,51	14,68	18,00
2. Prosentase realisasi PAD dibanding target	112,16	114,10	116,75	109,78	101,20

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk, 2018

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah selama periode 2013-2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mencapai kinerja yang baik berdasarkan indikator ketepatan penyusunan LKPD dan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit LKPD. Sedangkan untuk kinerja

pengelolaan aset daerah selama 5 tahun terakhir cukup baik namun masih perlu ditingkatkan pengelolannya. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.118.**  
**Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset**  
**Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret
2. Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi BMD (Barang Milik Daerah/inventaris daerah) dengan baik (%)	100	100	98,57	100	100
3. Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk, 2018

#### 2.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi, Fungsi penting dari manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya adalah kecukupan jumlah personel dan kualitas yang baik. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus di dukung oleh sistem informasi kepegawaian yang baik. Informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian sebuah instansi.

**Tabel 2.119.**  
**Statistik Pegawai Pemkab Nganjuk Tahun 2013-2018**  
**Menurut Tipe Pegawai**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Struktural	855	850	881	881	785	785
2.	Fungsional Umum	3172	3152	3088	3071	2478	2303
3.	Fungsional Pendidikan	6850	6647	6318	6492	5409	5112
4.	Fungsional Kesehatan	1083	1060	1042	1148	1154	1143



No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5.	Fungsional Lainnya	226	212	203	203	209	201
	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>12186</b>	<b>11921</b>	<b>11532</b>	<b>11795</b>	<b>10035</b>	<b>9544</b>

Sumber: BKD Nganjuk, 2018

Selama 5 tahun terakhir, komposisi pegawai di Kabupaten Nganjuk sebagian besar adalah fungsional pendidikan (guru tenaga pendidik) diikuti tenaga kesehatan. Jumlah ASN fungsional pendidikan dan fungsional umum semakin menurun, disebabkan pensiun sementara penerimaan ASN belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Kondisi ini memengaruhi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 2.120.  
Statistik Pegawai Pemkab Nganjuk Tahun 2013-2018  
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD	191	181	179	179	105	105
2.	SLTP	296	285	281	295	185	185
3.	SLTA	2018	1929	1898	1916	1351	1351
4.	DI	385	291	278	278	169	169
5.	D II	1502	1427	1334	1360	821	821
6.	D III	1098	1109	1067	1270	868	868
7.	D IV	22	39	39	39	78	78
8.	S1	6163	6125	5930	5966	5989	5589
9.	S2	444	4661	458	426	395	304
10.	S3	1	1	1	1	-	-
11.	Spesialis	1	1	1	1	3	-
12.	Profesi	65	67	66	64	78	81
	<b>Jumlah</b>	<b>12186</b>	<b>11921</b>	<b>11532</b>	<b>11795</b>	<b>10042</b>	<b>9544</b>

Sumber: BKD Nganjuk, 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kabupaten Nganjuk sebagian besar adalah S1, diikuti SLTA dan diploma. Sementara pertumbuhan jumlah ASN berpendidikan S2 dan S3, mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, antara lain disebabkan ASN yang pensiun. Memperhitungkan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masa mendatang yang semakin kompleks dengan tuntutan pelayanan yang tinggi, maka kebutuhan ASN berpendidikan sarjana, spesialis dan profesi perlu ditingkatkan.

#### 2.3.4.4. Fungsi Penunjang Lainnya

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, selain Dinas Daerah terdapat perangkat daerah lainnya yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan dan Inspektorat yang menyelenggarakan fungsi penunjang. Adapun capaian kinerja dari perangkat daerah tersebut selama periode 2013-2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.121.  
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda (%)	100,00	42,85	45,45	50,00	64,70
2. Rasio publikasi kegiatan legislative	100,00	100,00	100,00	100,00	83,00
3. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diterapkan	15	15	15	15	6
4. Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik	20	20	20	52	50
5. Persentase kasus hukum yang diselesaikan (%)	100	80	100	100	80
6. Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	100	100	100	100	80

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2018

Prosentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2014 sampai 2017 terus mengalami peningkatan kinerja, meskipun belum sampai 100%. Untuk perencanaan mendatang, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang memengaruhi antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga pembentuk peraturan daerah, ketepatan perencanaan program pembentukan peraturan daerah, peningkatan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, realisasi kinerja publikasi kegiatan legislatif antara tahun 2014 sampai tahun 2016 sebesar 100%, dengan penurunan pada tahun 2017 sebesar 83%.

Dalam hal kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM):

- Tahun 2014 target jumlah SPM 13 urusan dapat terealisasi 13 Urusan atau 100 %.
- Tahun 2015 target jumlah SPM 15 urusan dapat terealisasi 15 Urusan atau 100 %.
- Tahun 2016 target jumlah SPM 15 urusan dapat terealisasi 15 Urusan atau 100%.
- Tahun 2017 target jumlah SPM 15 urusan dapat terealisasi 6 Urusan atau 40%.

Sedangkan kinerja perangkat daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai berikut:

- Tahun 2014 target jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik 12 SKPD dapat terealisasi 20 SKPD atau 200 %.
- Tahun 2015 target jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik 14 SKPD dapat terealisasi 20 SKPD atau 166,67 %
- Tahun 2016 target jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik 18 SKPD dapat terealisasi 52 SKPD atau 371,43 %.
- Tahun 2017 target unit kerja yang mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik 20 SKPD dapat terealisasi 50 SKPD atau 277 %.

**Tabel 2.122.**  
**Capaian Kinerja Pengawasan**  
**Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2017**  
**(Persen)**

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti (%)	92,59	92,48	97,07	90,2
2. Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang ditangani (%)	100	100	100	95,24
3. Persentase PKPT yang dilaksanakan (%)	142,86	117,94	133,33	84,5

*Sumber Data : Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2018*

Indikator kinerja sasaran temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti untuk mengukur sejauh mana temuan hasil pemeriksaan atau Rekomendasi yang diberikan dengan pelaksanaan tindak lanjut. Sampai dengan 31 Oktober 2017, terdapat 654 temuan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti dari 725 temuan hasil pemeriksaan atau sebesar 90,2%.

Indikator Prosentase kasus pengaduan yang ditangani dilaksanakan dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan kasus yang telah ditangani Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sampai dengan 31 Oktober 2017, terdapat 21 kasus pengaduan yang masuk, dan dapat ditangani sebanyak 20 kasus pengaduan, atau sebesar 95,24%.

Indikator prosentase PKPT yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan PKPT dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dari 129 Obyek pemeriksaan / pengawasan yang ditargetkan selama Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan sampai dengan 31 Oktober 2017 sebanyak 109 Obyek pemeriksaan / pengawasan atau 84,5% dari target yang telah ditetapkan.

## 2.4. ASPEK DAYA SAING

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari Kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

### 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* peningkatan daya saing daerah.

Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Nganjuk sebagaimana digambarkan pada tabel-tabel di bawah ini.

Indikator lain yang menunjukkan kinerja daya saing daerah adalah pengeluaran perkapita. Berikut tabel yang menunjukkan gambaran pengeluaran rata-rata perkapita di Kabupaten Nganjuk:

Tabel 2.123.  
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Menurut Kelompok Makanan (Rupiah)	264.084	287.534	302.098	338.447	421.446	12,40%
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah)	246.979	259.231	312.718	329.665	331.525	7,64%

Sumber Data : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2018 (BPS)

Berdasarkan data di atas, digambarkan bahwa terjadi pertumbuhan rata-rata 12,40% pengeluaran rata-rata perkapita menurut kelompok makanan dengan posisi terakhir tahun 2017 sebesar Rp.421.446,-. Sedangkan pengeluaran rata-rata perkapita kelompok non makanan terjadi pertumbuhan rata-rata 7,64%. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan ekonomi yang diindikasikan dari konsumsi rumah tangga Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Nganjuk.

#### 2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi fasilitas wilayah/infrastruktur mempengaruhi daya saing daerah. Fasilitas wilayah ini antara lain: ketersediaan perbankan, ketersediaan air bersih, ketersediaan listrik, akses telekomunikasi, serta jalan dan jembatan.

Kondisi fasilitas wilayah/infrastruktur di Kabupaten Nganjuk fisik digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.124.  
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017.

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi jalan Kabupaten (Km)	1.907,55	1.907,55	1.907,55	1.907,55	1.907,55
	- Baik	881,00	1.102,24	1.191,96	1.231,44	1.238,34
	- Sedang	885,65	576,25	576,25	576,25	576,25
	- Rusak berat	73,59	229,06	139,34	99,86	92,96
2	Kondisi Jembatan (M)	-	-	-	5.769,59	5.825,10
	- Baik	-	-	-	-	-
	- Rusak Ringan	-	-	-	525,2	525,2
	- Rusak Berat	-	-	-	-	-
3	Waduk Besar (Jumlah)	10	10	10	12	14
	-Bendung/Dam (Jumlah)	76	80	81	85	96
	- Embung (Jumlah)	4	4	4	4	5
4	Ketaatan terhadap RTRW (berdasarkan permohonan izin pemanfaatan ruang) (%)	100	100	100	100	100
5	Luas wilayah Produktif (Ha) (Sawah beririgasi)	-	-	-	-	24.356,34
6	Luas wilayah Industri (Ha)	-	-	-	-	1.806,56
7	Luas wilayah permukiman (Ha)	-	-	-	-	35.056,26
9	Luas wilayah perkotaan (Ha)					13.045

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2018

Berdasarkan data di atas, infrastruktur jalan dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan dari panjang 881 Km pada tahun 2013 menjadi 1.238,34 Km pada tahun 2017. Jalan dalam kondisi sedang pada tahun 2013 sepanjang 885,65 Km berkurang menjadi 575,25 Km, serta jalan dalam kondisi rusak cenderung fluktuatif setiap tahun dengan kerusakan tertinggi pada tahun 2014 sepanjang 229,06 Km dan menurun pada 2017 sepanjang 92,96 Km. Kerusakan jalan disebabkan banyaknya jalan yang dilalui kendaraan angkutan material proyek-proyek di Kabupaten Nganjuk.

Fasilitas wilayah lain yang menggambarkan aspek daya saing sebagaimana data tabel berikut:

**Tabel 2.125.**  
**Persentase Rumah Tangga Memiliki Telepon Seluler dan Rumah Tangga Menggunakan Listrik Kabupaten Nganjuk**

Uraian	Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	
Persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangganya menguasai/memiliki telepon seluler (%)	84,30	86,32	0,59%
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik PLN sebagai Penerangan Utama Tempat Tinggal (%)	99,19	99,60	0,10%

*Sumber Data : Statistik Kesejahteraan Kabupaten Nganjuk (BPS) 2017*

Berdasarkan di atas, kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Nganjuk yang diindikasikan dari banyaknya rumah tangga yang menggunakan listrik dan kepemilikan telepon seluler menunjukkan pertumbuhan, hal ini mengindikasikan pula pertumbuhan daya saing daerah.

**Tabel 2.126.**  
**Jumlah Bank menurut Jenisnya Kabupaten Nganjuk**

Uraian	Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	
Jumlah Bank (Bank Umum, BPR) yang berkantor pusat/cabang di Kabupaten Nganjuk	57	57	67	4,12%

*Sumber Data : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2016, 2017, 2018 (BPS)*

Sementara itu, fasilitas wilayah yang berkaitan dengan ketersediaan layanan institusi perbankan juga menunjukkan pertumbuhan rata-rata 4,12% pada periode 2015 hingga 2017. Ketersediaan institusi perbankan akan menunjang daya saing daerah.

### 2.4.3. Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan iklim berinvestasi yang baik salah satunya minimnya jumlah kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah.

#### 2.4.4. Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator yang menggambarkan daya saing daerah dari aspek sumber daya manusia adalah Rasio Ketergantungan. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.127.  
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Nganjuk  
Tahun 2013-2018

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Ketergantungan	47.52	47.17	46.89	46.67	46.52

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2018

Rasio Ketergantungan penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2013 sebesar 47,52% yang berarti setiap 100 orang penduduk Nganjuk yang berusia kerja (usia 15-64 tahun dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan penduduk semakin menurun hingga pada tahun 2018 sebesar 46,52% yang berarti setiap 100 orang penduduk Nganjuk yang berusia kerja (usia 15-64 tahun dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Aspek lain yang mengindikasikan daya saing daerah dalam hal sumber daya manusia adalah pendidikan lulusan sarjana. Berikut data persentase penduduk Kabupaten Nganjuk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan:

Tabel 2.128.  
Persentase Penduduk Usia di atas 15 Tahun menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	
D4/S1 (%)	3,86	4,05	3,25	-4,21%
S2/S3 (%)	0,17	0,13	0,29	14,28%

Sumber Data : Statistik Kesejahteraan Kabupaten Nganjuk (BPS) 2018



### 2.4.5. Proses Perijinan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik peningkatan kualitas pelayanan yang menyangkut berbagai bidang dan berbagai aspek harus terus ditingkatkan. Perlunya disusun standar operasional prosedur untuk mewujudkan standarisasi pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing.

Tabel 2.129.  
Lama Proses Perijinan Tahun 2016-2018

Indikator	2016	2017	2018
Ijin mendirikan bangunan	1 – 2 hari	1 – 2 hari	1 – 2 hari
Surat ijin usaha perdagangan	1 – 4 hari	1 – 4 hari	1 – 4 hari
Tanda daftar perusahaan	5 – 7 hari	5 – 7 hari	5 – 7 hari
Ijin Reklame	1 – 4 hari	1 – 4 hari	1 – 4 hari
Ijin usaha industry	5 – 7 hari	5 – 7 hari	5 – 7 hari
Tanda daftar industry	5 – 7 hari	5 – 7 hari	5 – 7 hari
Ijin usaha kawasan industry	5 – 7 hari	5 – 7 hari	5 – 7 hari

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk 2018



### BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran adalah salah satu sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menuju terwujudnya tujuan otonomi daerah yakni: kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

##### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dilaksanakan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun, yang mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk periode 2013 – 2017 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 3.1  
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun 2013 s/d Tahun 2017  
Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Pendapatan	1.559.541.595.673,67	1.827.609.658.045,74	2.017.545.802.497,95	2.097.461.647.980,96	2.299.759.167.913,45	10,20%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	153.130.115.172,67	255.957.914.871,74	287.881.055.209,95	323.045.177.741,96	332.495.541.853,18	21,39%
1.1.1	Pajak Daerah	19.600.066.015,44	55.590.857.338,70	60.555.034.760,26	74.267.774.969,00	81.975.131.175,15	43,01%
1.1.2	Retribusi Daerah	19.387.701.357,45	21.654.463.259,96	24.266.970.618,45	23.449.787.947,87	23.644.104.388,49	5,09%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.450.319.617,96	3.223.184.050,94	3.446.055.368,44	3.541.913.722,00	3.402.661.148,56	-0,35%
1.1.4	Lain – Lain PAD Yang Sah	110.692.028.181,82	175.489.410.222,14	199.612.994.462,80	221.785.701.103,09	223.473.645.140,98	19,20%
1.2	Dana Perimbangan	1.072.429.653.231,00	1.132.151.189.738,00	1.166.956.491.647,00	1.438.057.806.688,00	1.503.523.174.920,00	8,81%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	84.730.119.231,00	77.274.457.738,00	65.782.737.647,00	76.916.649.574,00	63.117.679.922,00	-7,10%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	928.265.611.000,00	1.004.037.764.000,00	1.024.223.014.000,00	1.078.695.643.000,00	1.059.746.429.000,00	3,37%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	59.433.923.000,00	50.838.968.000,00	76.950.740.000,00	282.445.514.114,00	380.659.065.998,00	59,08%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	333.981.827.270,00	439.500.553.436,00	562.708.255.641,00	336.358.663.551,00	463.740.451.140,27	8,55%
1.3.1	Hibah	444.296.925,00	2.734.441.700,00	8.599.721.313,00	6.878.233.400,00	105.477.734.389,27	292,53%
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Pemerintah Kabupaten Nganjuk



1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	62.585.858.345,00	108.028.420.736,00	101.489.806.478,00	110.411.191.701,00	137.446.689.751,00	21,73%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	256.595.597.000,00	295.455.134.000,00	420.428.419.000,00	211.259.059.000,00	215.210.307.000,00	-4,30%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	14.356.075.000,00	33.282.557.000,00	32.190.308.850,00	7.810.179.450,00	5.605.720.000,00	-20,95%
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>1.486.896.745.684,16</b>	<b>1.736.787.185.571,56</b>	<b>1.983.727.931.370,27</b>	<b>2.201.118.780.938,52</b>	<b>2.218.770.813.887,94</b>	<b>10,52%</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>975.835.194.665,00</b>	<b>1.092.725.964.697,90</b>	<b>1.217.634.799.117,67</b>	<b>1.361.026.275.302,36</b>	<b>1.348.890.638.469,00</b>	<b>8,43%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	889.154.118.220,00	976.726.988.040,90	1.007.459.513.657,67	1.052.985.490.168,36	918.257.371.167,00	0,81%
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	18.141.970.000,00	10.935.590.165,00	9.403.547.594,00	20.965.736.811,00	57.684.961.397,00	33,53%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.170.811.000,00	5.320.564.250,00	7.419.455.600,00	6.762.925.600,00	14.918.600.000,00	88,93%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.235.493.445,00	2.146.885.150,00	5.778.769.500,00	6.273.321.000,00	7.656.774.005,00	36,04%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	65.038.405.000,00	97.240.080.500,00	187.450.525.966,00	273.960.776.723,00	348.000.879.900,00	52,09%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	94.397.000,00	355.856.592,00	122.986.800,00	78.025.000,00	2.372.052.000,00	123,89%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>511.061.551.019,16</b>	<b>644.061.220.873,66</b>	<b>766.093.132.252,60</b>	<b>840.092.505.636,16</b>	<b>869.880.175.418,94</b>	<b>14,22%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	32.271.138.975,00	31.925.823.300,00	38.360.166.324,00	47.846.038.030,00	59.117.372.051,02	16,34%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	239.407.806.129,16	334.615.335.695,66	366.436.987.064,60	344.516.959.010,00	490.772.560.447,21	19,66%
2.2.3	Belanja Modal	239.382.605.915,00	277.520.061.878,00	361.295.978.864,00	447.729.508.596,16	319.990.242.920,71	7,53%
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>155.743.041.130,17</b>	<b>225.340.108.543,17</b>	<b>309.520.831.084,92</b>	<b>337.987.719.882,40</b>	<b>227.945.755.720,83</b>	<b>9,99%</b>
3.1	Penerimaan Pembiayaan	158.743.041.130,17	230.400.215.543,17	319.407.531.084,92	344.193.089.882,40	233.945.755.720,83	10,18%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	5.060.107.000,00	9.886.700.000,00	6.205.370.000,00	6.000.000.000,00	18,92%



Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui gambaran kinerja pelaksanaan APBD 2013 – 2017 Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

- **KINERJA PENDAPATAN**

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10,20%. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

PAD selama 5 tahun tumbuh rata-rata 21,39%. Pajak Daerah sebagai salah satu jenis PAD mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 43,01%, dengan pertumbuhan signifikan pada tahun 2014 sejak adanya pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah. Sedangkan retribusi daerah, sebagai komponen PAD, mengalami pertumbuhan yang cenderung stabil pada angka 5,09%. Sementara itu, jenis PAD lain yakni Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan minus disebabkan karena pendapatan dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Bagian terbesar pendapatan daerah adalah berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 59,08%. Kenaikan DAK paling signifikan sejak tahun 2016 yang disebabkan adanya DAK Non Fisik. Sementara itu, DAU mengalami rata-rata pertumbuhan yang cenderung stabil pada angka 3,37%. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -7,10%.

Kelompok pendapatan daerah yang ketiga adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak Provinsi, dana penyesuaian otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Hibah mengalami rata-rata pertumbuhan paling besar yakni sebesar 149,23%, dengan kenaikan yang signifikan sejak tahun 2017 yang disebabkan adanya pengakuan pencatatan atas Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sementara itu, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 21,73%. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan minus dialami oleh pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan Dana Penyesuaian/Dana Otonomi Khusus masing-masing -20,95% dan -4,30%. Penurunan Dana Penyesuaian/Otonomi Khusus karena sebelum tahun 2016 untuk Tunjangan Profesi Guru dan TPP Guru dicatat pada akun Dana Penyesuaian/Otonomi Khusus sedangkan mulai tahun 2016 dan 2017 dicatat pada DAK Non Fisik.

Jika dilihat dari kontribusi tiap-tiap sumber pendapatan daerah, maka diperoleh gambaran proporsi sumber pendapatan daerah periode 2013 – 2017 sebagai berikut:



Tabel 3.2  
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah  
Tahun 2013 s/d Tahun 2017  
(dalam ribuan)

No	Uraian	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
	Pendapatan	1.559.541.596		1.827.609.658		2.017.545.802		2.097.461.648		2.299.759.168	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	153.130.115	9,82	255.957.915	14,01	287.881.055	14,27	323.045.178	15,40	332.495.542	14,46
1.2	Dana Perimbangan	1.072.429.653	68,77	1.132.151.190	61,95	1.166.956.492	57,84	1.438.057.807	68,56	1.503.523.175	65,38
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	333.981.827	21,42	439.500.553	24,05	562.708.256	27,89	336.358.664	16,04	463.740.451	20,16

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Sedangkan untuk memperoleh gambaran kinerja PAD, maka dapat diketahui dari perbandingan target PAD dan realisasi PAD selama 2013 – 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Kinerja Pendapatan Asli Daerah 2013 – 2017  
(dalam ribuan)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
a	Target	118.056.878	201.044.853	237.473.874	280.808.587	308.555.890
b	Realisasi	153.130.115	255.957.915	287.881.055	323.045.178	332.495.542
c	Persentase realisasi dibandingkan target (= b/a x 100%)	129,71	127,31	121,23	115,04	107,76

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

#### • KINERJA BELANJA

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 10,52%. Belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung selama 5 tahun mengalami pertumbuhan yang terkendali pada angka rata-rata 8,43%. Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) rata-rata pertumbuhan pada besaran 0,81%, dengan penurunan realisasi belanja pada tahun 2017 karena terdapat pelimpahan pegawai dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk Ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Tenaga Pendidikan/Guru SMA dan SMK pada akhir 2016. Sedangkan pertumbuhan terbesar Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Tidak Terduga sebesar 123,89%.

Belanja Langsung mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 14,22%. Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal masing-masing mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 16,34%, 19,66%, dan 7,53%.

Gambaran proporsi jenis belanja dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 3.4  
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah  
Tahun 2013 s/d Tahun 2017  
(dalam ribuan)

No	Uraian	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.	
2	Belanja	1.486.896.746		1.736.787.186		1.983.727.931		2.201.118.781		2.218.770.814	
2.1	Belanja Tidak Langsung	975.835.195	65,63	1.092.725.965	62,92	1.217.634.799	61,38	1.361.026.275	61,83	1.348.890.638	60,79
2.1.1	Belanja Pegawai	889.154.118	59,80	976.726.988	56,24	1.007.459.514	50,79	1.052.985.490	47,84	918.257.371	41,39
2.1.4	Belanja Hibah	18.141.970	1,22	10.935.590	0,63	9.403.548	0,47	20.965.737	0,95	57.684.961	2,60
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.170.811	0,08	5.320.564	0,31	7.419.456	0,37	6.762.926	0,31	14.918.600	0,67
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.235.493	0,15	2.146.885	0,12	5.778.770	0,29	6.273.321	0,29	7.656.774	0,35
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	65.038.405	4,37	97.240.081	5,60	187.450.526	9,45	273.960.777	12,45	348.000.880	15,68
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	94.397	0,01	355.857	0,02	122.987	0,01	78.025	0,00	2.372.052	0,11
2.2	Belanja Langsung	511.061.551	34,37	644.061.221	37,08	766.093.132	38,62	840.092.506	38,17	869.880.175	39,21
2.2.1	Belanja Pegawai	32.271.139	2,17	31.925.823	1,84	38.360.166	1,93	47.846.038	2,17	59.117.372	2,66
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	239.407.806	16,10	334.615.336	19,27	366.436.987	18,47	344.516.959	15,65	490.772.560	22,12
2.2.3	Belanja Modal	239.382.606	16,10	277.520.062	15,98	361.295.979	18,21	447.729.509	20,34	319.990.243	14,42

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018



### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Utang, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Rata-rata pertumbuhan Neraca daerah Kabupaten Nganjuk periode 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.5  
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah  
Kabupaten Nganjuk  
Tahun 2013 s/d Tahun 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Per- tumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	<b>ASET</b>						
1.1	<b>ASET LANCAR</b>	287.667.613.271,44	373.845.245.883,66	413.014.665.499,20	309.241.135.130,63	380.681.689.868,53	0,07
1.1.1	Kas	228.908.472.072,60	316.256.600.842,35	346.938.549.944,33	237.488.618.274,44	309.629.931.490,26	0,08
1.1.2	Piutang	39.578.983.100,13	35.061.932.678,72	40.879.040.139,55	45.931.634.706,22	38.929.683.992,92	(0,00)
1.1.3	Persediaan	19.180.158.098,71	22.526.712.362,59	25.197.075.415,32	25.820.882.149,97	32.122.074.385,35	0,14
1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	30.146.049.334,10	30.827.140.532,43	34.849.277.697,87	39.740.012.227,52	47.098.858.568,23	0,12
1.2.1	Investasi Non Permanen	6.573.898.867,09	4.911.342.972,45	1.392.288.075,54	175.931.093,76	45.261.934,13	(0,71)
1.2.2	Investasi Permanen	23.572.150.467,01	25.915.797.559,98	33.456.989.622,33	39.564.081.133,76	47.053.596.634,10	0,19
1.3	<b>ASET TETAP</b>	1.582.915.481.432,68	1.722.717.479.627,55	1.935.778.845.946,57	2.258.662.427.514,19	2.605.846.718.243,10	0,13
1.3.1	Tanah	306.350.125.217,80	308.573.955.467,80	314.265.668.207,80	317.768.212.317,80	605.017.058.964,77	0,19
1.3.2	Peralatan dan Mesin	258.718.412.818,89	333.081.550.759,89	388.448.596.341,88	504.377.533.698,29	543.856.959.590,34	0,20
1.3.3	Gedung dan bangunan	561.318.904.599,32	639.144.681.582,48	760.054.781.910,48	1.054.862.830.775,48	1.053.883.371.491,80	0,17
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.627.700.248.897,00	1.736.155.049.449,00	1.871.274.469.819,00	2.012.132.042.248,00	2.158.235.149.048,00	0,07



No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Per- tumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.3.5	Aset tetap lainnya	33.876.000.021,00	62.807.951.490,00	73.787.665.840,00	79.641.448.615,00	78.308.329.407,00	0,23
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	2.614.205.520,00	6.300.071.750,00	63.007.666.624,70	101.994.600,00	7.631.339.600,00	0,31
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.207.662.415.641,33	-1.363.345.780.871,62	-1.535.060.002.797,29	-1.710.221.634.740,38	-1.841.085.489.858,81	11,14
<b>1.4</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>21.870.224.692,21</b>	<b>20.273.791.921,81</b>	<b>8.071.730.021,56</b>	<b>8.998.375.556,31</b>	<b>35.015.047.963,31</b>	<b>0,12</b>
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	14.249.420,00	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	(1,00)
1.4.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	2.455.736.000,00	2.455.736.000,00	2.455.736.000,00	2.455.736.000,00	2.455.736.000,00	-
1.4.4	Aset tak berwujud	2.636.676.761,00	997.203.380,60	261.275.690,35	298.563.000,10	553.324.625,10	(9,09)
1.4.5	Aset Lain-lain	16.763.562.511,21	16.820.852.541,21	5.352.928.331,21	6.244.076.556,21	28.805.987.338,21	77,54
1.4.6	Aset yang dibatasi penggunaannya					3.200.000.000,00	
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>1.922.599.368.730,43</b>	<b>2.147.663.657.965,45</b>	<b>2.391.714.519.165,20</b>	<b>2.616.641.950.428,65</b>	<b>3.068.642.314.643,17</b>	
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>1.873.035.338,00</b>	<b>7.481.009.855,00</b>	<b>21.373.040.659,34</b>	<b>26.182.133.280,50</b>	<b>48.403.673.799,92</b>	
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1.873.035.338,00</b>	<b>7.481.009.855,00</b>	<b>21.373.040.659,34</b>	<b>26.182.133.280,50</b>	<b>48.403.673.799,92</b>	
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	10.960.300,00	26.116.180,00	(14.710.195,00)	101.076.300,00	477.404.107,33	1,57
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00	0,00	



No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Per- tumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Utang Beban			14.887.024.933,64	26.081.056.980,50	23.393.924.942,59	
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.862.075.038,00	6.378.193.538,00	6.498.710.920,70	0,00	24.532.344.750,00	0,91
2.1.5	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	1.076.700.137,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>1.920.726.333.392,43</b>	<b>2.140.182.648.110,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>285.794.577.933,44</b>	<b>366.364.236.028,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3.1.1	SILPA	228.387.891.119,68	316.162.581.017,35	0,00	0,00	0,00	(1,00)
3.1.2	Cadangan piutang	39.578.983.100,13	35.061.932.678,72	0,00	0,00	0,00	(1,00)
3.1.3	Cadangan persediaan	19.180.158.098,71	22.526.712.362,59	0,00	0,00	0,00	(1,00)
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(1.862.075.038,00)	(7.454.893.675,00)	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	509.620.652,92	67.903.645,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>1.634.931.755.458,99</b>	<b>1.773.818.412.081,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	30.146.049.334,10	30.827.140.532,43	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset tetap	1.582.915.481.432,68	1.722.717.479.627,55	0,00	0,00	0,00	(1,00)
3.2.3	Diinvestasikan dalam aset lainnya	21.870.224.692,21	20.273.791.921,81	0,00	0,00	0,00	(1,00)



No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Per-tumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	EKUITAS			2.370.341.478.505,86	2.590.459.817.148,15	3.020.238.640.843,25	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.922.599.368.730,43	2.147.663.657.965,45	2.391.714.519.165,20	2.616.641.950.428,65	3.068.642.314.643,17	

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018



Sebelum tahun 2015, Neraca Daerah menggunakan pola *Cash Basic* dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah  
Kabupaten Nganjuk  
(Cash Basic)

No.	Uraian	2013	2014	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	<b>ASET</b>			
1.1	<b>ASET LANCAR</b>	287.667.613.271,44	373.845.245.883,66	0,30
1.1.1	Kas	228.908.472.072,60	316.256.600.842,35	0,38
1.1.2	Piutang	39.578.983.100,13	35.061.932.678,72	(0,11)
1.1.3	Persediaan	19.180.158.098,71	22.526.712.362,59	0,17
1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	30.146.049.334,10	30.827.140.532,43	0,02
1.2.1	Investasi Non Permanen	6.573.898.867,09	4.911.342.972,45	(0,25)
1.2.2	Investasi Permanen	23.572.150.467,01	25.915.797.559,98	0,10
1.3	<b>ASET TETAP</b>	1.582.915.481.432,68	1.722.717.479.627,55	0,09
1.3.1	Tanah	306.350.125.217,80	308.573.955.467,80	0,01
1.3.2	Peralatan dan Mesin	258.718.412.818,89	333.081.550.759,89	0,29
1.3.3	Gedung dan bangunan	561.318.904.599,32	639.144.681.582,48	0,14
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.627.700.248.897,00	1.736.155.049.449,00	0,07
1.3.5	Aset tetap lainnya	33.876.000.021,00	62.807.951.490,00	0,85
1.3.6	Konstruksi			



	dalam pengerjaan	2.614.205.520,00	6.300.071.750,00	1,41
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	- 1.207.662.415.641,33	- 1.363.345.780.871,62	0,13
<b>1.4</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>21.870.224.692,21</b>	<b>20.273.791.921,81</b>	<b>(0,07)</b>
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	
1.4.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	14.249.420,00	0,00	(1,00)
1.4.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	2.455.736.000,00	2.455.736.000,00	-
1.4.4	Aset tak berwujud	2.636.676.761,00	997.203.380,60	(0,62)
1.4.5	Aset Lain-lain	16.763.562.511,21	16.820.852.541,21	0,00
1.4.6	Aset yang dibatasi penggunaannya			
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>1.922.599.368.730,43</b>	<b>2.147.663.657.965,45</b>	<b>0,12</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>1.873.035.338,00</b>	<b>7.481.009.855,00</b>	<b>2,99</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1.873.035.338,00</b>	<b>7.481.009.855,00</b>	<b>2,99</b>
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	10.960.300,00	26.116.180,00	1,38
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	0,00	0,00	
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	
	Utang Beban			
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.862.075.038,00	6.378.193.538,00	2,43
2.1.5	Utang Kepada	0,00	1.076.700.137,00	



	Pihak Ketiga			
3	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>1.920.726.333.392,43</b>	<b>2.140.182.648.110,45</b>	0,11
3.1	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>285.794.577.933,44</b>	<b>366.364.236.028,66</b>	0,28
3.1.1	SILPA	228.387.891.119,68	316.162.581.017,35	0,38
3.1.2	Cadangan piutang	39.578.983.100,13	35.061.932.678,72	(0,11)
3.1.3	Cadangan persediaan	19.180.158.098,71	22.526.712.362,59	0,17
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(1.862.075.038,00)	(7.454.893.675,00)	3,00
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	509.620.652,92	67.903.645,00	(0,87)
3.2	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>1.634.931.755.458,99</b>	<b>1.773.818.412.081,79</b>	0,08
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	30.146.049.334,10	30.827.140.532,43	0,02
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset tetap	1.582.915.481.432,68	1.722.717.479.627,55	0,09
3.2.3	Diinvestasikan dalam aset lainnya	21.870.224.692,21	20.273.791.921,81	(0,07)
	<b>EKUITAS</b>			
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.922.599.368.730,43</b>	<b>2.147.663.657.965,45</b>	0,12

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018



Dari data di atas, untuk rata-rata pertumbuhan piutang terjadi minus karena adanya perhitungan penyisihan piutang. Sedangkan rata-rata pertumbuhan investasi non permanen karena minus karena adanya perhitungan penyisihan piutang dan ada yang melakukan pembayaran.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka mulai tahun 2015, Neraca Daerah menggunakan pola *Accrual Basic* dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah  
Kabupaten Nganjuk  
(Accrual Basic)

No.	Uraian	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	ASET				
1.1	ASET LANCAR	413.014.665.499,20	309.241.135.130,63	380.681.689.868,53	(0,04)
1.1.1	Kas	346.938.549.944,33	237.488.618.274,44	309.629.931.490,26	(0,06)
1.1.2	Piutang	40.879.040.139,55	45.931.634.706,22	38.929.683.992,92	(0,02)
1.1.3	Persediaan	25.197.075.415,32	25.820.882.149,97	32.122.074.385,35	0,13
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	34.849.277.697,87	39.740.012.227,52	47.098.858.568,23	0,16
1.2.1	Investasi Non Permanen	1.392.288.075,54	175.931.093,76	45.261.934,13	(0,82)
1.2.2	Investasi Permanen	33.456.989.622,33	39.564.081.133,76	47.053.596.634,10	0,19
1.3	ASET TETAP	1.935.778.845.946,57	2.258.662.427.514,19	2.605.846.718.243,10	0,16
1.3.1	Tanah	314.265.668.207,80	317.768.212.317,80	605.017.058.964,77	0,39
1.3.2	Peralatan dan Mesin	388.448.596.341,88	504.377.533.698,29	543.856.959.590,34	0,18
1.3.3	Gedung dan bangunan	760.054.781.910,48	1.054.862.830.775,48	1.053.883.371.491,80	0,18
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.871.274.469.819,00	2.012.132.042.248,00	2.158.235.149.048,00	0,07
1.3.5	Aset tetap				0,03



No.	Uraian	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	lainnya	73.787.665.840,00	79.641.448.615,00	78.308.329.407,00	
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	63.007.666.624,70	101.994.600,00	7.631.339.600,00	(0,65)
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	0,10
		1.535.060.002.797,29	1.710.221.634.740,38	1.841.085.489.858,81	
1.4	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>8.071.730.021,56</b>	<b>8.998.375.556,31</b>	<b>35.015.047.963,31</b>	<b>1,08</b>
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	1.790.000,00	0,00	0,00	(1,00)
1.4.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	2.455.736.000,00	2.455.736.000,00	2.455.736.000,00	-
1.4.4	Aset tak berwujud	261.275.690,35	298.563.000,10	553.324.625,10	0,46
1.4.5	Aset Lain-lain	5.352.928.331,21	6.244.076.556,21	28.805.987.338,21	1,32
1.4.6	Aset yang dibatasi penggunaannya			3.200.000.000,00	
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>2.391.714.519.165,20</b>	<b>2.616.641.950.428,65</b>	<b>3.068.642.314.643,17</b>	<b>0,13</b>
2	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>21.373.040.659,34</b>	<b>26.182.133.280,50</b>	<b>48.403.673.799,92</b>	<b>0,50</b>
2.1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>21.373.040.659,34</b>	<b>26.182.133.280,50</b>	<b>48.403.673.799,92</b>	<b>0,50</b>
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	(14.710.195,00)	101.076.300,00	477.404.107,33	
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	2.015.000,00	0,00	0,00	(1,00)
	Utang Beban	14.887.024.933,64	26.081.056.980,50	23.393.924.942,59	0,25



No.	Uraian	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.498.710.920,70	0,00	24.532.344.750,00	0,94
2.1.5	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
3	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3.1	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3.1.1	SILPA	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Cadangan piutang	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Cadangan persediaan	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	
3.2	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset tetap	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Diinvestasikan dalam aset lainnya	0,00	0,00	0,00	
	<b>EKUITAS</b>	<b>2.370.341.478.505,86</b>	<b>2.590.459.817.148,15</b>	<b>3.020.238.640.843,25</b>	<b>0,13</b>



No.	Uraian	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.391.714.519.165,20	2.616.641.950.428,65	3.068.642.314.643,17	0,13

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Dari data di atas, terdapat pertumbuhan minus antara lain pada Kas yang hal ini terjadi terkait dengan tingkat penyerapan anggaran. Sedangkan rata-rata pertumbuhan piutang minus karena adanya perhitungan penyisihan piutang. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan Investasi Non Permanen minus karena adanya perhitungan penyisihan piutang Dana Bergulir serta pada pertumbuhan minus pada Konstruksi Dalam Pengerjaan disebabkan adanya pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :
  - (a) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
  - (b) Rasio *quick* = ( aktiva lancar – persediaan ) : kewajiban jangka pendek

Berdasarkan pedoman di atas, maka Rasio Likuiditas Neraca Daerah tahun 2015 – 2017 digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3.8  
Rasio Likuiditas Neraca Daerah  
Tahun 2015 s/d Tahun 2017  
(Accrual Basic)

Uraian	2015	2016	2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
ASET LANCAR	413.014.665.499,20	309.241.135.130,63	380.681.689.868,53
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21.373.040.659,34	26.182.133.280,50	48.403.673.799,92
<b>Rasio Lancar = aset lancar : kewajiban jangka pendek</b>	<b>19,32</b>	<b>11,81</b>	<b>7,86</b>
ASET LANCAR	413.014.665.499,20	309.241.135.130,63	380.681.689.868,53
Persediaan	25.197.075.415,32	25.820.882.149,97	32.122.074.385,35
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21.373.040.659,34	26.182.133.280,50	48.403.673.799,92
<b>Rasio Quick = aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban jangka pendek</b>	<b>18,15</b>	<b>10,82</b>	<b>7,20</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

- 2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:
- (a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
  - (b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2015 – 2017 digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3.9  
Rasio Solvabilitas Neraca Daerah  
Tahun 2015 s/d Tahun 2017  
(Acruai Basic)

Uraian	2015	2016	2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
JUMLAH ASET DAERAH	2.391.714.519.165,20	2.616.641.950.428,65	3.068.642.314.643,17
KEWAJIBAN	21.373.040.659,34	26.182.133.280,50	48.403.673.799,92
Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset	0,01	0,01	0,02
KEWAJIBAN	21.373.040.659,34	26.182.133.280,50	48.403.673.799,92
EKUITAS	2.370.341.478.505,86	2.590.459.817.148,15	3.020.238.640.843,25
Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas	0,01	0,01	0,02

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

#### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Nganjuk, khususnya belanja pegawai (aparatur). Belanja aparatur meliputi:

1. Belanja Tidak Langsung, terdiri atas:
  - Belanja gaji dan tunjangan
  - Belanja tambahan penghasilan
  - Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/Wakil KDH
  - Belanja pemungutan pajak daerah
  - Belanja pemungutan retribusi daerah
2. Belanja Langsung, terdiri atas:
  - Belanja honorarium PNS
  - Belanja honorarium Non PNS
  - Belanja uang lembur
  - Belanja beasiswa pendidikan PNS

- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis PNS
- Belanja premi asuransi kesehatan
- Belanja makanan dan minuman pegawai
- Belanja pakaian dinas dan atributnya
- Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
- Belanja perjalanan dinas
- Belanja perjalanan pindah tugas
- Belanja pemulangan pegawai
- Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubeler, peralatan, perlengkapan)

Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Tabel berikut menunjukkan proporsi belanja kebutuhan aparatur di Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 2015 – 2017:

**Tabel 3.10**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
		A	b	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2015	1.466.136.683.765,27	1.993.614.631.370,27	73,54
2	Tahun 2016	1.606.716.971.645,52	2.207.324.150.938,52	72,79
3	Tahun 2017	1.366.532.696.554,42	2.224.770.813.887,94	61,42

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Pada tahun 2015, proporsi Belanja Aparatur sebesar 73,54%, terus menurun menjadi 72,79% pada tahun 2016 dan 61,42% persen pada tahun 2017. Proporsi belanja aparatur terhadap total belanja, menunjukkan tren negatif yang berarti Belanja Aparatur semakin menurun. Hal tersebut mengindikasikan kemajuan yang semakin baik dalam hal peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan pembangunan daerah.



### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk ditinjau berdasarkan surplus ataupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah.

Tabel berikut menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit di Kabupaten Nganjuk:

Tabel 3.11  
Defisit Riil Anggaran  
Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.017.545.802.497,95	2.097.461.647.980,96	2.299.759.167.913,45
	<i>Dikurangi Realisasi:</i>			
2	Belanja Daerah	1.983.727.931.370,27	2.201.118.780.938,52	2.218.770.813.887,94
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.886.700.000,00	6.205.370.000,00	6.000.000.000,00
	<b>Defisit / (Riil)</b>	<b>23.931.171.127,68</b>	<b>(109.862.502.957,56)</b>	<b>74.988.354.025,51</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Nganjuk pada periode 2015 – 2017 mengalami dua kali surplus dan satu kali defisit riil berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Surplus anggaran terjadi pada tahun 2015 dan 2017, sedangkan defisit anggaran terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2015, terdapat surplus anggaran sebesar 23,93 miliar rupiah dan tahun 2017 sebesar 74,98 miliar rupiah. Pada tahun 2016, terjadi defisit anggaran yang cukup besar, yaitu 109,86 miliar rupiah.

Defisit riil dapat ditutupi dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pada kondisi Kabupaten Nganjuk, defisit riil dapat dipenuhi dengan SiLPA. Hal tersebut disebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya memiliki proporsi dari total defisit riil sebesar lebih dari 100 persen, dengan data sebagai berikut:



Tabel 3.12  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Nilai			Proporsi dari total defisit riil		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
		Rp	Rp	Rp	%	%	%
	<b>Defisit Riil (Rp)</b>	<b>23.931.171.128</b>	<b>-109.862.502.958</b>	<b>74.988.354.026</b>			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	316.161.387.041,34	343.338.702.212,60	233.495.326.570,34	1.321,13	312,52	311,38
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	3.246.144.043,58	854.387.669,80	450.429.150,49	13,56	0,78	0,60

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018



### 3.3 Kerangka Pendanaan

#### 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan yakni periode 2019 – 2023. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang yakni 2013 – 2017. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Tabel proyeksi APBD Kabupaten Nganjuk ditunjukkan seperti berikut:



Tabel 3.13  
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun 2019 s/d Tahun 2023  
Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbu han 2013- 2017	Tahun Dasar 2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan		2.167.413.056.4 40,10	2.241.559.583.5 81,73	2.714.568.075.0 86,33	2.954.315.920.2 29,08	3.260.348.784.1 09,07	3.657.251.935.2 55,67
1.1	Pendapatan Asli Daerah		303.997.393.21 0,73	378.143.920.35 2,36	474.556.458.23 8,94	601.010.878.74 9,73	768.284.058.75 3,08	991.378.753.31 6,49
1.1.1	Pajak Daerah	43,01%	79.653.019.052, 17	113.909.091.43 9,82	162.897.543.20 7,34	232.954.272.98 7,12	333.140.035.35 2,67	476.412.309.29 8,64
1.1.2	Retribusi Daerah	5,09%	17.801.307.808, 00	18.706.866.478, 98	19.658.491.232, 03	20.658.525.464, 66	21.709.431.783, 79	22.813.798.070, 01
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-0,35%	3.438.163.361,0 0	3.426.228.723,5 1	3.414.335.513,8 3	3.402.483.588,1 5	3.390.672.803,1 7	3.378.903.016,0 8
1.1.4	Lain – Lain PAD Yang Sah	19,20%	203.104.902.98 9,56	242.101.733.71 0,05	288.586.088.28 5,74	343.995.596.70 9,80	410.043.918.81 3,45	488.773.742.93 1,76
1.2	Dana Perimbangan		1.488.853.250.9	1.488.853.250.9	1.787.203.848.6	1.846.346.358.1	1.907.777.783.0	1.971.576.339.1



			60,80	60,80	89,83	79,34	25,98	16,01
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	-3,17%	77.044.503.995,00	74.599.487.500,30	72.232.063.894,78	69.939.770.758,85	67.720.223.818,14	65.571.114.463,49
1.2.2	Dana Alokasi Umum	3,37%	1.059.436.592.960,00	1.095.109.116.679,12	1.131.982.777.830,10	1.170.098.020.176,94	1.209.496.649.274,54	1.250.221.878.321,90
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	59,08%	352.372.154.005,80	560.566.352.850,92	582.989.006.964,95	606.308.567.243,55	630.560.909.933,29	655.783.346.330,63
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>		374.562.412.268,57	374.562.412.268,57	452.807.768.157,56	506.958.683.300,01	584.286.942.330,02	694.296.842.823,16
1.3.1	Hibah	149,23%	18.949.643.924,57	47.228.293.568,93	70.479.021.793,38	105.176.201.331,57	156.954.978.163,13	234.224.709.186,12
1.3.2	Dana darurat	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	21,73%	114.038.188.344,00	138.824.087.438,72	163.609.986.533,43	193.783.035.343,99	229.343.233.870,41	271.461.464.877,51
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-4,30%	235.353.700.000,00	225.229.097.718,95	215.104.495.437,89	205.415.440.043,71	196.161.931.536,41	187.325.233.269,79
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-20,95%	6.220.880.000,00	4.917.572.196,43	3.614.264.392,85	2.584.006.580,74	1.826.798.760,08	1.285.435.489,74



2	<b>Belanja</b>		2.001.169.766.7 52,68	2.227.253.615.6 44,76	2.783.709.584.2 91,03	3.444.924.050.3 57,57	4.404.386.791.0 04,98	5.821.883.409.5 02,20
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		1.296.471.804.1 49,00	1.522.555.653.0 41,08	1.862.427.843.8 73,57	2.377.670.943.0 64,60	3.165.340.549.5 53,70	4.380.399.954.2 25,62
2.1.1	Belanja Pegawai	0,81%	859.678.831.37 7,00	866.628.720.35 2,83	873.634.794.21 4,23	880.697.507.17 5,86	887.817.317.12 4,37	894.994.685.64 8,08
2.1.2	Belanja Bunga			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	33,53%	56.268.086.440, 00	75.137.490.562, 72	100.334.716.27 0,89	133.981.787.43 7,48	178.912.344.92 0,34	238.910.286.07 0,27
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	88,93%	7.456.000.000,0 0	14.086.925.514, 96	26.615.004.085, 84	50.284.814.932, 63	95.005.155.913, 29	179.497.123.77 7,87
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	36,04%	10.708.626.000, 00	14.568.064.581, 42	19.818.462.765, 29	26.961.128.857, 17	36.678.045.005, 88	49.896.982.896, 40
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	52,09%	360.942.139.10 0,00	548.959.370.63 8,56	834.916.065.39 2,94	1.269.829.560.3 19,49	1.931.292.472.4 98,18	2.937.315.944.5 03,38
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	123,89%	1.418.121.232,0 0	3.175.081.390,5 9	7.108.801.144,3 7	15.916.144.341, 97	35.635.214.091, 63	79.784.931.329, 62
2.2	<b>Belanja Langsung</b>		704.697.962.60 3,68	704.697.962.60 3,68	921.281.740.41 7,46	1.067.253.107.2 92,97	1.239.046.241.4 51,28	1.441.483.455.2 76,58
2.2.1	Belanja Pegawai	16,34%	58.770.135.459, 00	68.372.569.022, 52	77.975.002.586, 03	90.715.313.223, 39	105.537.259.12 5,30	122.780.958.00 9,29
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,66%	412.837.538.04 2,74	493.986.034.31 3,66	575.134.530.58 4,58	688.184.575.72 2,65	823.456.052.58 8,58	985.316.867.69 1,67



2.2.3	Belanja Modal	7,53%	233.090.289.10 1,94	250.631.248.17 4,39	268.172.207.24 6,85	288.353.218.34 6,93	310.052.929.73 7,40	333.385.629.57 5,61
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>		<b>301.514.963.74 6,34</b>	<b>331.555.476.48 0,10</b>	<b>364.530.265.65 6,40</b>	<b>400.714.591.34 3,86</b>	<b>440.407.296.64 7,43</b>	<b>483.932.368.50 7,38</b>
3.1	Penerimaan Pembiayaan	10,18%	309.014.963.74 6,34	340.474.529.84 2,62	375.136.867.37 4,20	413.328.037.57 2,66	455.407.296.64 7,43	501.770.475.23 2,43
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	18,92%	7.500.000.000,0 0	8.919.053.362,5 2	10.606.601.717, 80	12.613.446.228, 81	15.000.000.000, 00	17.838.106.725, 04

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk.

Berkaitan dengan proyeksi APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel di atas, terhadap proyeksi pendapatan yang bersumber dari dana transfer khususnya Dana Alokasi Khusus, penetapan pengalokasian besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan penganggaran oleh Pemerintah.



### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menyajikan perhitungan kapasitas riil keuangan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang yakni 2019 – 2023, guna mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dengan cara menghitung proyeksi seluruh penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, pencairan dana cadangan, dan SiLPA selanjutnya dikurangi dengan Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel berikut menyajikan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2019 – 2023:



Tabel 3.14  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian	Proyeksi				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan	2.388.432.841.879,08	2.631.990.899.572,77	2.900.385.547.363,27	3.196.149.471.762,69	3.522.073.627.465,05
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	255.222.360.383,84	236.843.336.663,21	219.025.018.005,39	201.687.740.220,83	184.751.047.548,39
	<b>Total penerimaan</b>	<b>2.643.655.202.262,92</b>	<b>2.868.834.236.235,97</b>	<b>3.119.410.565.368,65</b>	<b>3.397.837.211.983,53</b>	<b>3.706.824.675.013,44</b>
	Dikurangi:					
1	Belanja Tidak Langsung	1.432.279.376.799,61	1.595.491.493.354,74	1.777.302.072.906,61	1.979.830.460.716,73	2.205.437.507.182,71
2	Pengeluaran Pembiayaan	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>1.194.875.825.463,31</b>	<b>1.256.842.742.881,23</b>	<b>1.325.608.492.462,04</b>	<b>1.401.506.751.266,79</b>	<b>1.484.887.167.830,73</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018



Berdasarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah pada data di atas, maka kapasitas riil digunakan untuk memproyeksi pembiayaan prioritas belanja pembangunan periode 2019 – 2023.

Prioritas belanja disusun dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158 sebagai berikut:

- (1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3), dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga;
- (2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- (3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- (4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Dengan mendasarkan pada pedoman di atas, maka prioritas belanja Kabupaten Nganjuk 2019 – 2023 diproyeksikan sebagai berikut:



Tabel 3.15  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.194.875.825.463	1.256.842.742.881	1.325.608.492.462	1.401.506.751.267	1.484.887.167.831
I	Prioritas I					
	1. Belanja Rutin	98.275.306.415	103.371.917.851,16	109.027.714.852,75	115.270.141.455,98	122.127.955.307,61
	2. Pemenuhan SPM	424.102.235.619	446.096.410.788,80	470.503.723.674,24	497.442.607.659,37	527.037.164.949,82
II	Prioritas II					
	Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati	667.127.629.809	701.725.235.570,77	740.118.791.246,10	782.494.596.684,78	829.047.868.990,94
III	Prioritas III					
	Belanja Tak Terduga	5.370.653.620	5.649.178.670,27	5.958.262.688,92	6.299.405.466,87	6.674.178.582,63

Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018



## BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada BAB IV ini akan dimuat Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dengan demikian, BAB IV ini berhubungan dengan BAB II Gambaran Kondisi Umum Daerah yang telah menguraikan capaian kinerja dan kesenjangan. Rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

### 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan **Masalah Pokok** yang bersifat makro bagi daerah dan lintas sektor/urusan. Penyebab dari Masalah Pokok disebut sebagai **Masalah**, dan penyebab Masalah disebut sebagai **Akar Masalah**. Masalah dan **Akar Masalah** pada umumnya lebih bersifat teknis dan sektoral sesuai urusan pemerintahan daerah. Masalah Pokok dipecahkan melalui rumusan Misi, Tujuan, dan Sasaran, sedangkan Masalah dan Akar Masalah dipecahkan melalui Strategi dan Arah Kebijakan.

Permasalahan pembangunan dapat dirumuskan dari kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja pembangunan yang direncanakan dalam periode 2014 – 2018 yang telah diuraikan pada BAB II Gambaran Kondisi Umum Daerah. Dalam konteks masa datang, permasalahan pembangunan daerah dapat dirumuskan dari kesenjangan antara kondisi ideal pada masa datang yang ingin dicapai atau telah ditetapkan dibandingkan dengan kondisi daerah saat ini. Kondisi ideal dapat diselaraskan dengan kebijakan provinsi (target RPJMD provinsi), nasional (target RPJMN, standar pelayanan minimal), maupun isu-isu internasional, misalnya SDG's.



Berdasarkan pedoman perumusan permasalahan pembangunan di atas dan hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk periode 2014 – 2018 sebagaimana diuraikan pada BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk yang meliputi aspek kesejahteraan rakyat dan aspek daya saing daerah sebagai berikut:

Tabel 4.1

**KERANGKA PIKIR PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
A.	Kesejahteraan Rakyat:		
1.	Penurunan kemiskinan belum optimal	1. Pendapatan keluarga miskin rendah	1. Rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat miskin
			2. Rendahnya kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi warga miskin
		2. Banyaknya masyarakat yang rentan miskin karena dampak kebijakan/peristiwa ekonomi dan sosial	1. Kerentanan masyarakat miskin terhadap dampak peristiwa ekonomi (kenaikan harga pangan dan pangan)
			2. Kerentanan masyarakat miskin terhadap dampak bencana dan keadaan sakit
2.	Pertumbuhan ekonomi belum optimal	1. PDRB sektor pertanian kontribusi menurun	1. Kualitas sumber daya manusia petani dan peternak terbatas
			2. Sarana dan prasarana produksi pertanian dan peternakan terbatas dan mahal
			3. Lahan pertanian berkurang akibat alih fungsi lahan
			4. Lemahnya akses permodalan bagi petani dan peternak



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			5. Belum optimalnya dukungan industri dan UM pengolahan produk pertanian dan peternakan
			6. Belum optimalnya peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi dengan sistem pengelolaan pertanian terpadu.
		2. PDRB sektor usaha mikro, kecil dan koperasi serta pengembangan ekonomi kreatif belum tergarap optimal	1. Belum adanya sinergi dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi serta ekonomi kreatif
			2. Sistem permodalan, perijinan usaha, dan pemasaran belum optimal
			3. Kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha dan koperasi masih terbatas
		3. PDRB sektor pariwisata belum optimal	1. Pengembangan destinasi wisata belum optimal
			2. Dukungan infrastruktur belum optimal
			3. Kapasitas sumber daya manusia pelaku wisata masih terbatas
			4. Pemasaran pariwisata belum optimal
			5. Kurangnya sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata
		4. Ketahanan pangan belum optimal	1. Produksi dan diversifikasi produk pangan lokal hasil pertanian belum optimal



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			2. Keamanan pangan masih rentan dari bahan berbahaya
			3. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun
			4. Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal
3.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan pelestarian seni budaya	1. Akses dan kualitas pendidikan belum merata	1. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas
			2. Belum optimalnya implementasi kurikulum 2013
			3. Kuantitas, kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan belum optimal
			4. Belum terintegrasi pemanfaatan tata kelola pendidikan berbasis informasi dan teknologi
			5. Belum optimalnya pendidikan karakter dan budi pekerti bagi peserta didik
		2. Derajat kesehatan masyarakat belum optimal	1. Belum optimalnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas
			2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi masih belum optimal
			3. Masih terdapat kasus balita gizi buruk
			4. Masih tingginya kasus penyakit tidak menular



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			5. Cakupan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin masih terbatas
			6. Capaian kinerja rumah sakit umum daerah (RSUD) pada beberapa sasaran masih di bawah standar
			7. Belum optimalnya Upaya Kesehatan Berswadaya Masyarakat
		3. Pengarusutamaan gender dan hak anak belum optimal	1. Masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender
			2. Implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak belum sinergi
			3. Meningkatnya angka kekerasan dan diskriminasi pada perempuan dan anak
		4. Prestasi pemuda dan olah raga belum optimal	1. Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah
			2. Meningkatnya masalah sosial di kalangan pemuda
			3. Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga belum mencukupi
			4. Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah
			5. Pembinaan olah raga belum optimal



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		5. Belum maksimalnya pelestarian seni budaya dan kearifan lokal	1. Minat masyarakat terhadap seni budaya dan kearifan lokal mulai luntur 2. Kurang optimalnya pengelolaan event kegiatan seni budaya dan kearifan lokal
B.	Daya Saing Daerah:		
1.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur belum mantap	1. Pembangunan infrastruktur daerah belum merata dan berwawasan lingkungan	1. Tingkat kerusakan jalan, jembatan, pengairan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan 2. Pemenuhan sarana prasarana permukiman masih belum memenuhi standar pelayanan minimal 3. Kurangnya peralatan dan tenaga teknis 4. Belum ditetapkannya perda review RTRW dan perda RDTR, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang tidak optimal 5. Pengawasan pembangunan infrastruktur dan tata ruang masih belum optimal 6. Belum adanya sinergi pembangunan infrastruktur daerah dan desa 7. Belum optimalnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana 8. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana perhubungan



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2.	Iklim investasi belum optimal	1. Gangguan kriminalitas masih terjadi dan perlindungan masyarakat dari bencana belum optimal	1. Penegakan Perda belum optimal
			2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan
			3. Penanganan ketentraman dan ketertiban belum optimal
		2. Kualitas layanan perijinan belum optimal	1. Kurangnya promosi potensi dan informasi investasi
			2. Kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat
			3. Kurang respon pelaku usaha terhadap penyampaian laporan kegiatan Penanaman Modal
			4. Belum dilaksanakan online Single Submission (OSS) sebagaimana PP No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		3. Desa swasembada yang merepresentasikan kemampuan ekonomi rakyat jumlahnya masing sedikit	1. Pertumbuhan ekonomi desa belum optimal
			2. Tata kelola pemerintahan desa belum optimal
3. Swadaya, partisipasi, gotong royong masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun			



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			4. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa belum optimal
			5. Koordinasi pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat belum optimal
		4. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal	1. Proses perencanaan dan penganggaran belum terintegrasi
			2. Kemandirian keuangan daerah belum optimal yang ditunjukkan ketergantungan keuangan daerah pada dana transfer
			3. Kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara belum optimal
			4. Akuntabilitas kinerja masih rendah
			5. Kinerja koordinasi penyusunan dan pengendalian kebijakan belum optimal

Berdasarkan Tabel Permasalahan diatas dapat dijelaskan gambaran permasalahan pembangunan di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

**Permasalahan Aspek Kesejahteraan Rakyat**

1. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan merupakan kondisi yang mencerminkan belum terwujudnya kesejahteraan rakyat pada aspek ekonomi. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 13,14% menjadi 11,98% pada tahun 2014, namun angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk masih lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur sebesar 11,77 pada tahun 2017 dan nasional sebesar 10,12% tahun 2017. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target RPJMN yang menargetkan pada tahun 2019 angka kemiskinan pada kisaran 7-8% (kondisi yang diharapkan), maka kondisi eksisting Kabupaten Nganjuk pada angka 11,98% (tahun 2017) menunjukkan kesenjangan



yang harus dituntaskan.

2. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dan diversifikasi produksi pertanian.  
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang diukur dari pertumbuhan/perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang cenderung stagnan pada angka 5%, dengan sektor unggulan pertanian yang meskipun produksinya meningkat namun kontribusinya mengalami trend penurunan (tahun 2013 sebesar 32,95%, tahun 2017 29,33%) seiring dengan peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor industri pengolahan. Sebagai daerah yang mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian, maka sektor pertanian membutuhkan prioritas penyelesaian masalah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

3. Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi serta pengembangan ekonomi kreatif.

Capaian prosentase koperasi aktif tahun 2013 sebesar 32,39% mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2015 sebesar 42,67% lalu mengalami penurunan pada tahun 2016 pada angka 38,83 % disebabkan kurangnya pengawasan intensif. Persentase Usaha Mikro Kecil pada tahun 2017 realisasi kinerja berada pada angka 41,24% dari target yang telah ditetapkan 98,20, mengalami penurunan karena adanya pengalihan kewenangan pembinaan sektor usaha kecil dan menengah dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Propinsi. (BAB II Tabel 2.91 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017). Penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya sinergi dalam pemberdayaan usaha mikro dan koperasi yang dapat diatasi dengan cara meningkatkan keterpaduan program pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

4. Belum optimalnya penanganan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan masih menjadi tantangan di Kabupaten Nganjuk. Ketahanan pangan suatu daerah diindikasikan antara lain dalam bentuk ketersediaan pangan dan akses pangan. Dalam hal ketersediaan pangan, meskipun secara target kinerja periode 2013 – 2017 telah terpenuhi target peningkatan ketersediaan pangan pada tahun 2013 sebesar 3,10% naik hingga 3,97% pada 2015. Namun kinerja peningkatan ketersediaan pangan menurun menjadi 3,73% pada 2016 dan 3,18% pada 2017 (BAB II Tabel 2.75 Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017). Salah satu penyebab penurunan adalah makin berkurangnya lahan produktif.



Dalam hal akses pangan diindikasikan antara lain melalui tingkat konsumsi beras. Pada tahun 2018, tingkat konsumsi beras Kabupaten Nganjuk sebesar 114.551 ton, sedangkan rata-rata tingkat konsumsi Jawa Timur sebesar 213.783 ton (sumber data: website BPS Provinsi Jawa Timur).

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan seni budaya dan kepariwisataan daerah dan desa berbasis potensi budaya, kearifan lokal serta pemberdayaan produk unggulan daerah.

Kabupaten Nganjuk memiliki kekayaan seni, budaya, dan potensi pariwisata, namun pengembangannya belum optimal. Even kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan dalam periode 2013 – 2017 hanya berjumlah 8 kegiatan setiap tahun. Sementara itu, pelestarian situs dan benda cagar budaya sudah cukup optimal dengan capaian kinerja 94,74% pada 2017 (BAB II Tabel 2.95 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017). Penyebab utama permasalahan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata adalah: kurangnya momentum kegiatan yang dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan kreativitas seni, budaya, dan pariwisata; seniman Nganjuk yang banyak jumlahnya dan berkemampuan tinggi namun belum dioptimalkan perannya; serta belum adanya keterpaduan antara desa, daerah, lembaga swasta dalam pengembangan seni, budaya, dan pariwisata.

6. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi serta penerapan literasi di Kabupaten Nganjuk.

Pendidikan merupakan bagian dari aspek kesejahteraan rakyat dalam lingkup fokus kesejahteraan sosial. Pemerataan dan kualitas pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Nganjuk, terutama berkaitan dengan Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PAUD kurang dari 100%, masih adanya angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan tingkat kualifikasi guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK (BAB II Tabel 2.29 Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan tahun 2014 – 2017). Penyebab utama permasalahan pendidikan adalah belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang, serta manajemen pelayanan pendidikan yang belum optimal.

7. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan kesehatan.

Derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian dari aspek kesejahteraan rakyat dalam lingkup fokus kesejahteraan sosial. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten



Nganjuk yang didalamnya memuat indikator kesehatan, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 sebesar 69,98 dan pada 2017 sebesar 70,69. Hal ini mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat semakin membaik. Meskipun demikian, untuk mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Nganjuk yang berkualitas, masih terdapat permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan antara lain: angka kematian bayi, angka kematian ibu, balita gizi buruk, penyakit HIV dan TBC.

8. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak.

Kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai pada aspek kesejahteraan sosial. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nganjuk tahun 2011 sebesar 91,69 dan mengalami kenaikan pada 2015 sebesar 93,65 yang artinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. Namun demikian, permasalahan utama yang terjadi adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam jabatan publik (DPRD, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa) masih kurang. Ini menjadi masalah krusial, sebab dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki serta meningkatnya kesadaran mengenai peran perempuan dalam kehidupan sosial, akan menimbulkan permasalahan perempuan yang perlu mendapatkan penyelesaian.

Di sisi lain, anak-anak (penduduk usia 0 sampai 19 tahun) berjumlah 29,84% dari 1.048.799 jiwa penduduk Nganjuk (BPS: Nganjuk Dalam Angka 2018). Kondisi ini, menimbulkan tuntutan kebutuhan pemenuhan hak anak antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan dari ancaman kekerasan, dan hak-hak anak lainnya.

9. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, baik olah raga prestasi, olah raga rekreasi (tradisional) masyarakat dan olah raga sekolah.

Sebagai bagian dari wujud kesejahteraan rakyat, perkembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Nganjuk masih perlu ditingkatkan. Meskipun capaian kinerja bidang pemuda dan olah raga selama 2013 – 2014 telah mencapai 100% dari target (BAB II Tabel 2.92 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nganjuk tahun 2013-2017), namun kehidupan berolah raga masyarakat Kabupaten Nganjuk masih tergolong rendah. Berdasarkan data Persentase Penduduk Jawa Timur Umur 5 Tahun ke Atas Melakukan Kegiatan Olahraga Selama Seminggu Terakhir Tahun 2012, sebanyak 24,78% penduduk Nganjuk melakukan olah raga dan 75,22% tidak melakukan olah raga selama seminggu terakhir. Angka ini lebih rendah dari persentase Jawa Timur sebesar 28,35%. Penyebab



permasalahan ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga, kurangnya sarana prasarana penunjang olah raga, terbatasnya sumber daya manusia tenaga pelatih yang berkualitas.

### **Permasalahan Daya Saing Daerah**

1. Belum optimalnya penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, konektivitas antar wilayah dan fasilitas umum lainnya.

Fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai salah satu aspek daya saing daerah merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah. Fasilitas wilayah/infrastruktur yang lengkap dan berkualitas akan mampu mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Nganjuk serta mendukung pelayanan publik. Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir, capaian pembangunan infrastruktur menunjukkan perkembangan yang cenderung stagnan. Pada 2015 jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 62,03%, naik sedikit menjadi 62,86% pada 2016 dan 62,88% pada 2017. Banyaknya kegiatan proyek nasional dengan aktivitas pengangkutan material berat mengakibatkan kondisi jalan banyak yang rusak. Di sisi lain, kemampuan anggaran untuk pendanaan infrastruktur masih terbatas.

2. Belum optimalnya pemenuhan air bersih masyarakat di daerah rawan kekeringan dan sanitasi lingkungan.

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu aspek daya saing daerah. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 19,13%, sementara bila dibandingkan target RPJMN tahun 2019 sebesar 100% sehingga terdapat kesenjangan/*gap* sebesar 80.87%. Di sisi lain, proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan sebesar 78,17% (jumlah penduduk : 1.046.495), sementara target RPJMN tahun 2019 sebesar 68,42%, artinya Kabupaten Nganjuk telah mencapai target, namun yang menjadi masalah adalah penyediaan air bersih belum merata di semua wilayah. Selain itu, akses air minum penduduk sebagian besar menggunakan sumur gali sebagai sumber air baku, sedangkan kemampuan PDAM Kabupaten untuk mensuplai air bersih masih terbatas.

3. Belum optimalnya strategi pemanfaatan ruang dan penciptaan kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan strategis selingkar wilis (tunggal rogo mandiri) serta pengelolaan sumber daya alam (hayati dan non hayati termasuk pengembangan potensi MIGAS) yang berwawasan lingkungan.
4. Belum optimalnya strategi peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terdidik pada sektor pertanian, perdagangan dan



industri serta pengembangan kawasan industri.

Iklim investasi merupakan bagian dari aspek daya saing daerah yang mempengaruhi tingkat investasi. Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Kinerja investasi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan nilai investasi antara tahun 2013 – 2017 menunjukkan peningkatan meskipun terjadi fluktuasi nilai investasi dari tahun ke tahun (BAB II Tabel 2.101 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017).

Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Angka kriminalitas di Kabupaten Nganjuk sebagaimana ditunjukkan pada (BAB II Tabel 2.76 Kondisi Keamanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2016), tahun 2014 sebanyak 421, naik menjadi 488 tahun 2015 dan menurun menjadi 412 pada 2016. Sementara itu, persentase tindak pidana yang diselesaikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan pada tahun 2016 mencapai 42,72%, di bawah rata-rata persentase Provinsi Jawa Timur sebesar 69,70%.

Lama proses perijinan di Kabupaten Nganjuk yakni 1 – 2 hari untuk izin mendirikan bangunan, 1 – 4 hari untuk surat ijin usaha perdagangan dan ijin reklame, dan 5 – 7 hari untuk tanda daftar perusahaan, ijin usaha industri, tanda daftar industri, ijin usaha kawasan industri. (BAB II Tabel 2.129 Lama Proses Perijinan Tahun 2016 – 2018).

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013, jenis pajak daerah terdapat 10 jenis meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk mendukung peningkatan investasi, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.

Sementara itu, jumlah persentase desa yang berstatus swasembada terhadap total jumlah desa di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2014 sebesar 2,65%, tahun 2015 sebesar 4,55%,

tahun 2016 sebesar 8,33% dan tahun 2017 sebesar 12,12%, yang berarti mengalami peningkatan tiap tahun. Kondisi ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang dapat menarik minat investasi di Kabupaten Nganjuk.

5. Kurangnya akselerasi penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi dan elektronik *government* menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Masih terdapat permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nganjuk yang bisa dilihat dari adanya kesenjangan kinerja urusan penunjang pemerintahan daerah antara lain perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara, fungsi pengawasan, dan fungsi penyusunan kebijakan daerah.

Pada aspek perencanaan, masih kurang konsisten perencanaan program antara RPJMD dan RKPD, belum optimal capaian target sasaran RPJMD, dan efektivitas tindak lanjut hasil musrenbang (BAB II Tabel 2.113 Capaian Kinerja Perencanaan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 -2017). Penyebab utama dari belum optimalnya perencanaan daerah adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya ASN perencana pada perangkat daerah, manajemen data pembangunan yang belum optimal, serta regulasi dan standar operasional prosedur mengenai perencanaan yang perlu diperbarui.

Pada aspek pengelolaan keuangan, masih terdapat permasalahan terutama ketergantungan pendapatan daerah pada dana perimbangan meskipun kontribusi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (BAB II Tabel 2.117 Capaian Kinerja Pendapatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017), padahal pajak daerah berpotensi naik seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk. Penyebab utama permasalahan adalah kurangnya kualitas data potensi pendapatan daerah, kurangnya sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

Pada aspek kepegawaian, permasalahan utama adalah kurangnya kompetensi dan kapasitas pegawai yang tercermin dari persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural baru mencapai 80% pada tahun 2017 dan persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan teknis fungsional sebesar 90,29% pada tahun 2017. Penyebab utama permasalahan adalah menurunnya jumlah aparatur sipil negara dan belum optimalnya penerapan penempatan jabatan sesuai kompetensi.

Pada aspek pengawasan, masih terdapat permasalahan menyangkut efektivitas tindak lanjut temuan pengawasan (BAB II Tabel 2.122 Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten



Nganjuk Tahun 2014-2017). Penyebab utama permasalahan adalah kurangnya sumber daya manusia aparatur pengawas dan kurangnya kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan pengawasan.

Efektivitas fungsi koordinasi kesekretariatan daerah dalam penyusunan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah juga masih terdapat permasalahan. Hal ini tercermin dari kinerja berupa persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah tahun 2015 sebesar 45,45%, 2016 sebesar 50%, dan 2017 sebesar 64,70% (BAB II Tabel 2.121 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017). Permasalahan lainnya dalam fungsi koordinasi ini adalah rendahnya nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang pada tahun 2017 mendapat predikat CC. Penyebab utama permasalahan antara lain kurangnya kapasitas sumber daya manusia lembaga pembentuk peraturan daerah, kurangnya ketepatan perencanaan program pembentukan peraturan daerah, belum optimalnya koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

6. Belum optimalnya koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta penciptaan stabilisasi ketentraman, ketertiban, kerukunan yang menjunjung tinggi budaya gotong royong masyarakat.

Penanganan kebencanaan serta penciptaan keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari pelayanan urusan dasar wajib yang diselenggarakan pemerintahan daerah. Kabupaten Nganjuk tergolong daerah kategori tinggi rawan bencana dengan skor Indeks Resiko Bencana sebesar 152,8. Penyebab utama permasalahan adalah belum tersusunnya strategi pengurangan resiko bencana, kurang optimalnya koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana serta kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang terbatas.

Kondisi keamanan di Kabupaten Nganjuk terdapat permasalahan terkait jumlah kejahatan selama 2014 – 2016, dimana tahun 2014 sebanyak 421, naik menjadi 488 tahun 2015 dan menurun menjadi 412 pada 2016. Sementara itu, persentase tindak pidana yang diselesaikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan pada tahun 2016 mencapai 42,72%, di bawah rata-rata persentase Provinsi Jawa Timur sebesar 69,70%. (BAB II Tabel 2.76 Kondisi Keamanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2016).



## 4.2. Isu Strategis

### 4.2.1. Lingkungan Internal

Pembahasan mengenai lingkungan internal yang akan dikaji dalam bagian ini, mencakup: (i) Posisi Geografis dan Geo ekonomi Daerah, (ii) Kondisi Demografi, dan (iii) Lingkungan Sosial Budaya. Penjelasan selengkapnya akan dipaparkan pada bagian berikut.

#### a. Posisi Geografis dan Geo-ekonomi Daerah

Menurut RTRW 2010-2030 Kawasan strategis Kabupaten Nganjuk dibagi menjadi kawasan strategis yang meliputi: Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari 6 jenis kawasan yaitu: kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya. Sedangkan, kawasan budidaya meliputi 9 kawasan, yaitu: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya..

#### b. Kondisi Demografi

Kabupaten Nganjuk termasuk daerah dengan laju pertumbuhan yang cukup rendah di Provinsi Jawa Timur, dengan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, maka beberapa isu strategi kependudukan antara lain: (a) memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah serta perencanaan dan penganggaran pembangunan, mengantisipasi dampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah perkotaan, yang dapat beresiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup.

#### c. Lingkungan Sosial Budaya.

Kabupaten Nganjuk adalah daerah yang memiliki beberapa obyek yang dapat menjadi tujuan wisata baik alam, buatan maupun sejarah. Wisata sejarah dipusatkan di Museum Anjuk Ladang yang menyimpan berbagai cagar budaya peninggalan sejarah berupa candi Ngetos, candi lor, bukit batu Songgong, bukit batu Ngroto dll. Sedangkan, untuk obyek wisata alam berupa air terjun dan goa serta gunung. Sedangkan, untuk wisata buatan adalah Waterpark di Kertosono. Nilai sejarah Nganjuk yang lekat dengan jaman keemasan Mpu Sindok sebagai cikal bakal Kerajaan Nganjuk, sudah saatnya dilakukan penggalian nilai-nilai sejarah budaya Nganjuk



untuk memberikan kontribusi penting dalam kekayaan sejarah bangsa. Kebijakan untuk mengembangkan Cagar Budaya perlu diprioritaskan di beberapa wilayah Nganjuk dengan mengembangkan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengorganisir komunitas sebagai forum warga yang potensial dimanfaatkan sebagai modal sosial dan budaya daerah.

**d. Telaah isu strategis RPJPD Nganjuk Tahun 2005 – 2025**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk masa 20 tahun ke depan mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025. RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2020, dimaksudkan untuk memberikan arah bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Nganjuk (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuannya adalah agar dapat diwujudkan gambaran masa depan yang diinginkan untuk setiap tahapan pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta masa depan 20 tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat terwujud tujuan pembangunan daerah. Visi yang ingin dicapai dalam masa 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Nganjuk, adalah: **“NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”**. Pencapaian Visi ini ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa beretika dan berbudaya;
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai,
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari;

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan tahap ketiga pencapaian RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025. Ditahap pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2018 fokus pembangunan diarahkan pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan meningkatnya perekonomian daerah melalui terselenggaranya pelayanan prima kepada



masyarakat yang dilandasi moral agama. Fokus pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 lebih diarahkan pada penguatan capaian hasil yang telah dicapai dengan menitikberatkan pada:

1. Penciptaan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kerukunan melalui apresiasi seni, budaya, keolahragaan yang berlandaskan gotong royong serta kearifan lokal di masyarakat ;
2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) dan pelayanan publik yang prima berlandaskan keimanan yang ber-Ketuhanan YME ;
3. Peningkatan daya saing produk sektor unggulan Daerah Kabupaten Nganjuk melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, peningkatan mutu dan perlindungan produk lokal daerah;
4. Peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan ;
5. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan investasi, pembinaan ekonomi kerakyatan dan perluasan kesempatan berusaha serta daya saing industri ;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dari keenam fokus pembangunan tersebut perlu dikembangkan tema pembangunan tahunan dalam setiap penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk.

#### 4.2.2. Lingkungan Eksternal

##### a. Telaah Isu Strategis Internasional SDG's

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDG's*). Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berkewajiban untuk mendukung pencapaian target SDG's. SDG's (*Sustainable Development Goals*) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDG's adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDG's ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDG's (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MGD's sekarang



diganti dengan SDG's.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, SDG's (*Sustainable Development Goals*) mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Tujuan dan target SDG's tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu. Tujuan dari SDG's (*Sustainable Development Goals*) yang dikutip dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
4. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
5. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
9. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
10. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
11. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
12. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
13. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
14. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.



15. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
16. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
17. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

Mempertimbangkan kesepakatan global *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyusun perencanaan daerah tahun 2018-2023 dengan memprioritaskan: (1) meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat; (4) mengatur tata kelola pemerintahan daerah yang baik; (5) menciptakan kondisi masyarakat stabil, harmonis, dan kolaboratif.

#### **b. Telaah Isu Strategis Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Tantangan dari pemberlakuan MEA pada tahun 2015 adalah kesiapan pemerintah Kabupaten Nganjuk mempersiapkan mental dan ketrampilan hidup penduduk Kabupaten Nganjuk menghadapi MEA; yaitu: (a) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (b) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi ketrampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; (c) meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.

#### **c. RPJMN Tahun 2015 – 2019**

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: *Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.



2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sejalan dengan nawacita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) 2015-2019, maka RPJMD Kabupaten Nganjuk mengambil peran secara aktif dalam tiga cita : cita kedua (2) yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; cita kelima (5) cita untuk meningkatkan kualitas hidup



masyarakat Kabupaten Nganjuk melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dan cita ke enam(6) adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produk lokal di pasaran Internasional.

#### d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk adalah: (1) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (2) mengelola sumber daya aparatur menjadi lebih profesional, kompetitif, akuntabel; (3) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (4) tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel sangat dibutuhkan. Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan pengesahan Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

#### e. Telaah isu strategis RPJMD Jawa Timur Tahun 2014 – 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa RPJMD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJMD Provinsi. Amanah ini agar terjadi sinkronisasi sehingga perencanaan pembangunan di tingkat bawah dan yang lebih tinggi saling melengkapi satu sama lain agar ketercapaian visi dan misi yang diemban dua dokumen perencanaan tersebut dapat menunjang satu sama lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk. Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah: **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Timur lebih sejahtera dan mandiri bersama wong cilik. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

##### **Jawa Timur Lebih Sejahtera**

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan



dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

### **Jawa Timur Lebih Berkeadilan**

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan. Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **Jawa Timur Lebih Mandiri**

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi mengembangkan kemampuan "Berdikari" (Berdiri di atas Kaki Sendiri), dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Jawa Timur Lebih Berdaya Saing**

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen



produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi *ASEAN Economic Community* pada 2015. Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi *ASEAN Socio-Cultural Community* pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

#### **Jawa Timur Lebih Berakhlak**

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2018 tersebut selaras dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan Masyarakat Nganjuk yang Maju, Adil dan sejahtera. Visi Kabupaten Nganjuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat Jawa timur yang Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak. Keselarasan ini menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Nganjuk adalah bagian dari Propinsi Jawa Timur.

Konsep kemajuan pada hakikatnya merupakan suatu kondisi yang masyarakatnya telah mampu menghadapi semua tantangan, yang dibarengi dengan semakin tangguhnya kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya



kemajuan suatu daerah di dalamnya juga mengandung konsep kemandirian dari masyarakat setempat. Kemandirian merupakan suatu wewenang daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar daerah semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Daerah mandiri adalah daerah yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia.

Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau masyarakat mengenai dirinya, dan semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban umum maupun pertahanan keamanan. Tingkat kemajuan suatu daerah dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu daerah diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan



penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan.

Kemajuan suatu masyarakat juga diukur berdasarkan indikator kependudukan. Terdapat kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor pertanian, sektor industri, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya.

Pembangunan daerah bukan hanya sebagai daerah yang maju, melainkan juga daerah yang adil dan sejahtera. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah.

Keadilan dan kesejahteraan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; bela bangsa dan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, daerah adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun antar kecamatan, desa dan kelurahan. Daerah yang sejahtera adalah daerah yang sudah terpenuhi



seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi daerah-daerah lain.

**f. Telaah isu strategis RTRW (Nasional, Provinsi dan Kabupaten).**

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan salah satu prinsip dalam penyusunan RPJMD adalah bahwa RPJMD harus merupakan Integrasi dari rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini akan mendukung terciptanya koordinasi antar pelaku pembangunan agar terjadi integrasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sehingga mampu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dan akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor : 02 tahun 2011, menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018. Sesuai ketentuan yang berlaku, penyusunan dokumen ini telah mengacu pada ketentuan pasal 25 Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 yaitu tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Secara implisit menerangkan bahwa dokumen RPJMD yang mengacu pada RTRW Kabupaten yang telah secara signifikan menjadikan RTRW provinsi dan Nasional juga sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah tersebut. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan



pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan Kebijakan dan Strategi serta rencana pola ruang untuk Kabupaten Nganjuk.

#### 4.2.3. Isu Strategis Kabupaten Nganjuk

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dari rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah (aspek kesejahteraan dan aspek daya saing) serta permasalahan urusan, serta disinergikan dengan hasil penelaahan isu strategis internasional (*SDG's*), nasional maupun regional dapat dirumuskan isu-isu strategis utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan strategi efektifitas kebijakan intervensi program pengentasan kemiskinan.
2. Pelembagaan strategi dan intervensi program penanganan kecukupan pangan dan gizi.
3. Peningkatan kualitas aksesibilitas kelembagaan dan pelayanan kesehatan.
4. Pelembagaan dan intervensi program pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.
5. Penguatan strategi penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, konektivitas antar wilayah, dan fasilitas umum lainnya.
6. Pemenuhan kebutuhan pemukiman yang layak dengan mempertimbangkan pembangunan berwawasan lingkungan.
7. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana penunjang transportasi jalan
8. Peningkatan pelayanan pemenuhan air bersih masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
9. Penguatan strategi peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terdidik pada sektor pertanian, perdagangan dan industri



serta pengembangan kawasan industri.

10. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan melalui Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan.
11. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pasar tradisional untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan serta mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.
12. Tata kelola dan pengembangan seni, budaya dan kepariwisataan daerah, kawasan pedesaan dan desa berbasis potensi budaya, kearifan lokal serta pemberdayaan produk unggulan daerah.
13. Pengembangan wilayah agropolitan lingkaran wilis (tunggal rogo mandiri)
14. Optimalisasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
15. Penguatan upaya peningkatan sarana prasarana, kualitas pendidikan dasar dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi serta pengembangan budaya baca dan literasi;
16. Optimalisasi pemanfaatan ruang, ruang terbuka hijau (RTH) publik dan penciptaan kawasan strategis cepat tumbuh serta pengelolaan sumber daya alam (hayati dan non hayati termasuk pengembangan potensi MIGAS) yang berwawasan lingkungan.
17. Peningkatan sarana prasarana pendukung dan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat dan akurat.
18. Keberpihakan Pemerintah daerah terhadap keberlanjutan peningkatan pertumbuhan usaha mikro serta pengembangan ekonomi kreatif.
19. Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi dan elektronik government menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) dengan mengembangkan kemitraan global, kerjasama Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha.
20. Mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta stabilisasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan yang menjunjung tinggi budaya gotong royong masyarakat.
21. Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, baik olah raga prestasi, olah raga rekreasi (tradisional) masyarakat dan olah raga sekolah.
22. Peningkatan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi tata kelola pemerintahan desa yang baik.



23. Peningkatan pendapatan asli daerah dari obyek pajak sektor pertanian, perdagangan, industri dan konstruksi yang memiliki kontribusi PDRB tinggi.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di atas, selanjutnya dirumuskan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah.



## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi merupakan Kondisi Ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Visi harus memiliki pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana Kabupaten Nganjuk akan dibawa. Visi berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan. Visi menjadi arah dan tujuan dalam mengelola berbagai potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang dibangun secara terpadu, sinergis dan produktif. Visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 digali dari visi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Nganjuk yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun serta disesuaikan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025.

Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT**

**(NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”**

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:



Tabel 5.1.  
Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi
TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWUJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)	MAJU	Pembangunan Kabupaten Nganjuk ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju. Kemajuan Nganjuk dicerminkan dari meningkatnya kesejahteraan ekonomi di level makro daerah yang berimbans dengan pemerataan “kue ekonomi” di level keluarga/masyarakat. Kemajuan juga dicerminkan dari meningkatnya kesejahteraan sosial yakni pendidikan yang semakin maju, derajat kesehatan yang semakin tinggi. Selain itu, Kabupaten Nganjuk yang maju dicerminkan dari kondisi terpenuhinya layanan infrastruktur dasar yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan daerah yang maju dengan penerapan <i>smart government</i> yakni serangkaian sistem elektronik yang didukung teknologi informasi guna meningkatkan kinerja birokrasi serta mewujudkan pelayanan masyarakat dengan prima.
	BERMARTABAT	Harapan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju tentu dengan tidak meninggalkan jati diri manusia yang bermartabat. Oleh sebab itu, pembangunan juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam dimensi hubungan dengan Sang Pencipta. Selain itu, dalam dimensi hubungan antar manusia, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki etika yang luhur, toleran, ramah, memiliki etos kerja tinggi. Pada lingkup pemerintahan, kemartabatan



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi
		diwujudkan melalui kepemimpinan dan keteladanan setiap aparatur Pemerintah Kabupaten, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
	NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO	<p>Nganjuk Nyawiji bermakna bersatu, kerjasama, gotong royong, melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak ada sekat antara seorang pemimpin dan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan daerah yang bermartabat". Konsep ini sebagai spirit dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023.</p> <p>Adapun penjelasan secara umum dari konsep Nganjuk Nyawiji sebagaimana berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kabupaten Nganjuk mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dan kaya akan khazanah kebudayaannya. Apabila sumber daya alam yang Melimpah seperti sektor pertanian, pertemakan, dan sektor pariwisata dimaksimalkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya, ekonomi yang memadai.</li><li>2. Kabupaten Nganjuk kaya akan keragaman budaya yang mempunyai nilai-nilai illahiyah (KeTuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna</li></ol>



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi
		lainnya yang mempunyai implikasi positif dalam membangun peradaban manusia seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah era globalisasi saat ini. Intinya keberagaman budaya dapat dijadikan sebuah spirit penguatan ikatan sosial antar masyarakat.

**5.2. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi “BERMARTABAT”, yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang sejahtera melalui: Peningkatan kualitas keimanan, ketaqwaan, toleransi dan kerukunan umat beragama; Peningkatan kemampuan fasilitasi layanan keagamaan; Peningkatan kualitas ketentraman, ketertiban, kenyamanan lingkungan.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi “BERMARTABAT”, yakni untuk mewujudkan institusi Pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang bermartabat melalui: Penciptaan Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government) serta tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis elektronik (e-government); Pelaksanaan integrasi perencanaan berbasis elektronik (e-planning) dan penganggaran berbasis elektronik (e-budgeting) serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan



akuntabel; Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengawas internal; Peningkatan sistem koordinasi, sarana dan prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia yang mendukung sinergitas kinerja Eksekutif dan Legislatif dalam penyaluran aspirasi masyarakat (hasil reses maupun hasil musrenbang), penyusunan kebijakan dan produk hukum Pemerintahan Daerah; Peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan; Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung publikasi, penyebarluasan informasi dan komunikasi terintegrasi dengan mengembangkan konsep Kabupaten Cerdas (Nganjuk Smart City); Pemantapan manajemen kearsipan, sarana prasarana, dan kapasitas pengelola arsip; Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan peneliti untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi pembangunan daerah; Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis manajemen SDM berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil merit system; Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, sarana dan prasarana, dan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi; Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "MAJU", yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat; Peningkatan efektivitas program pemberdayaan masyarakat; Peningkatan minat baca masyarakat dan pengembangan perpustakaan Daerah dan Desa; Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi (fasilitasi Kartu Nganjuk Mandiri bidang pendidikan); Penyelenggaraan manajemen pelayanan pendidikan yang didukung sarana prasarana yang memadai; Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan; Peningkatan kemampuan dan minat berprestasi pemuda dalam olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi masyarakat; Peningkatan pelayanan kesehatan; Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB; Peningkatan pemberdayaan peran Perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.

4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.



Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "MAJU", yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: Pemberian kemudahan akses permodalan Petani (Kartu Nganjuk Mandiri bidang Pertanian); Pemberian bantuan sarana prasarana serta fasilitasi teknologi pertanian; Pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan melalui Nganjuk Farming Development Center; Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi pangan daerah; Pengembangan kelembagaan ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan; Pengembangan keunggulan teknologi tepat guna; Penciptaan pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan industri dan pusat perdagangan terintegrasi; Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dan koperasi serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; Fasilitasi dan kemudahan proses perizinan usaha; Penyelenggaraan pemberdayaan pemuda wirausaha; Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi..

5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.

Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang kaya akan keragaman budaya, dengan peradaban yang penuh nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah era globalisasi saat ini. Upaya tersebut diwujudkan melalui: Pengembangan pemasaran pariwisata dan sumber daya kepariwisataan; Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal; Peningkatan promosi seni budaya dan kearifan lokal serta kerjasama investasi kepariwisataan.

6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "MAJU", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju melalui: Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang memenuhi standar; Pembangunan infrastruktur jalan Kawasan Selingkar Wilis di Kabupaten Nganjuk; Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan; Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jembatan yang berkualitas; Pelaksanaan pembangunan infrastruktur saluran irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai; Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; Peningkatan penyediaan rumah layak huni dan prasarana pemukiman; Pengembangan sinergitas pembangunan desa dan daerah; Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perhubungan; Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; Pelaksanaan pengelolaan,



pemeliharaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran; Peningkatan fasilitas dan tata kelola persampahan, pertamanan serta ruang terbuka hijau lainnya; Meningkatkan mitigasi serta ketangguhan masyarakat dan Desa dalam menghadapi bencana.

Keterkaitan visi, pokok visi, dan misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.  
Perwujudan Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)		
Pokok-Pokok Visi	MISI	Penjelasan Misi
MAJU	Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi “MAJU”, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan; peningkatan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan masyarakat yang gemar membaca; peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk; peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan; peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.
	Misi 4: Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi “MAJU”, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani; peningkatan volume usaha sektor industri dan perdagangan; peningkatan perluasan



VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)		
Pokok-Pokok Visi	MISI	Penjelasan Misi
	teknologi tepat guna.	lapangan pekerjaan bagi masyarakat; peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro; peningkatan kemandirian pangan daerah; peningkatan kemandirian Desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan
	Misi 6: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "MAJU", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju melalui: peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal; peningkatan ketaatan pemanfaatan ruang Daerah; peningkatan penyelenggaraan transportasi Daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan; peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam; peningkatan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
BERMARTABAT	Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang sejahtera melalui: peningkatan kehidupan sosial masyarakat yang religius, yang aman, tentram, dan tertib; peningkatan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis.



VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)		
Pokok-Pokok Visi	MISI	Penjelasan Misi
	Misi 2: Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan institusi Pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang bermartabat melalui: peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah; peningkatan kualitas pelayanan publik
	Misi 5: Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang kaya akan keragaman budaya, dengan peradaban yang penuh nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah era globalisasi saat ini. Upaya tersebut diwujudkan melalui: peningkatan daya saing pariwisata Daerah; peningkatan pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah



### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu ditetapkan Tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum, yang selanjutnya juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan. Adapun Sasaran (*objective*) pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam kurun waktu satu tahun. Lebih lanjut Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

1. **Misi 1**, *"Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban"*.

**Tujuan:** Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang harmonis, toleran, dan aman.

**Sasaran yang akan dicapai :**

- a. Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius ;

2. **Misi 2**, *"Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan"*.

**Tujuan:** Meningkatnya birokrasi pemerintah daerah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, dan bersih.

**Sasaran yang ingin dicapai:**

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik ;
- b. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah ;

3. **Misi 3**, *"Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas"*.

**Tujuan:** Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

**Sasaran yang ingin dicapai:**

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;



- b. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan.

**4. Misi 4, “Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna”.**

**Tujuan:** Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal.

**Sasaran yang ingin dicapai:**

- a. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani ;
- b. Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan ;
- c. Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat ;
- d. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

**5. Misi 5, “Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata”.**

**Tujuan:** Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pariwisata dan sektor unggulan daerah yang didukung kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya dan kearifan lokal.

**Sasaran yang ingin dicapai:**

- a. Meningkatnya daya saing pariwisata;
- b. Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.

**6. Misi 6, “Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana”.**

**Tujuan:** Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang handal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

**Sasaran yang ingin dicapai:**

- a. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal;
- b. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang Daerah;
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam;



- d. Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk disajikan dalam tabel 5.3. Akan lebih lanjut diukur menggunakan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- A. Indeks Kesalehan Sosial, terdiri dari indikator Sasaran meliputi Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang terselesaikan.
- B. Indeks Reformasi Birokrasi, meliputi: Opini BPK terhadap LKPD, Rasio kemandirian keuangan daerah, Maturitas SPIP, Predikat SAKIP, Nilai EKPPD, Indeks SPBE, Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target, Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (Policy Brief), Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi,.
- C. Indeks Pembangunan Manusia, terdiri dari indikator Sasaran meliputi: Tingkat Kemiskinan, Persentase penurunan PMKS, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender.
- D. Laju Pertumbuhan Ekonomi; Laju Inflasi; Indeks Gini, terdiri dari indikator Sasaran meliputi: Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan, Nilai Tukar Petani (NTP Tanaman Pangan dan Hortikultura), Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri, Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan.
- E. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata, terdiri dari indikator Sasaran meliputi: Persentase peningkatan kunjungan wisatawan, Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan.
- F. Pemenuhan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, terdiri dari indikator Sasaran meliputi: Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional, Indeks Kinerja Sistem Irigasi, Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik, Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik, Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan, Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/kawasan/kota, Persentase Pemenuhan drainase lingkungan, Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan, Persentase pengurangan Kawasan Kumuh, Persentase ketesediaan Rumah



Layak Huni, Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R, Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan, Cakupan penanganan Penanggulangan Bencana.

Berikut disajikan pula target pencapaian indikator tujuan/sasaran dalam periode RPJMD 2018-2023 sebagaimana tabel dibawah:



Tabel 5.3.  
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah  
Kabupaten Nganjuk

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT  
(NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR (2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2019	2020	2021	2022	2023		
MISI 1: MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DINAMIS DAN HARMONIS, BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, SERTA DAPAT MEMELIHARA KERUKUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN												
1.1 MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT YANG HARMONIS, TOLERAN, DAN AMAN	A. INDEKS KESALEHAN SOSIAL			Skor	62,52	-	-	-	-	-	63,42	
		1.1.1 Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius	a. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang terselesaikan	%	100	70	75	80	85	90	90	Satpol PP



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR (2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2019	2020	2021	2022	2023			
MISI 2 : MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL (ACCOUNTABLE) DEMI MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG ASPIRATIF, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN													
2.1 MENINGKATNYA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL DENGAN KARAKTERISTIK BERINTEGRITAS, BERKINERJA TINGGI, DAN BERSIH	B. INDEKS REFORMASI BIROKRASI	2.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik		Skor	65	-	-	-	-	-	68		
			a.	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
			b.	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	14,46	14,71	14,80	14,80	14,82	14,85	14,85	Bapenda
			c.	Maturitas SPIP	Nilai	2,2	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
			d.	Predikat SAKIP	Nilai	61,24 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)	85 (A)	85 (A)	Sekretariat Daerah
			e.	Nilai EKPPD	Nilai	3,2640	3,3140	3,3640	3,4140	3,4640	3,5140	3,5140	Sekretariat Daerah
			f.	Indeks SPBE	Skor	N/A	Cukup (1,8 – < 2,6)	Cukup (1,8 – < 2,6)	Baik (2,6 – < 3,5)	Baik (2,6 – < 3,5)	Sangat Baik (3,5 – < 4,2)	Sangat Baik (3,5 – < 4,2)	Dinas Komunikasi dan Infomartika
			g.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	40	52	64	76	88	100	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR (2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2019	2020	2021	2022	2023		
			h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.	Skor	77,58	78	79	80	81	82	82	Sekretariat Daerah
			i. Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target	%	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
			j. Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (Policy Brief)	%	80	80	80	80	80	80	80	BAPPEDA
		2.1.2 Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi	%	15	24	30	47	59	71	71	BKD



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR (2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2019	2020	2021	2022	2023			
MISI 3 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, MUTU PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS													
3.1	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL	C. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA		Skor	70,69	-	-	-	-	-	72,28		
		3.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Tingkat Kemiskinan	%	12,11	11,50	10,75	10,36	9,97	9,57	9,57	Dinas Sosial PPPA
				b. Persentase penurunan PMKS	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	Dinas Sosial PPPA
		3.1.2	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	a. Indeks Pendidikan	Skor	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	Dinas Pendidikan
		3.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a. Indeks Kesehatan	Skor	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	Dinas Kesehatan
		3.1.4	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender	Skor	93,48	93,78	94,08	94,38	94,68	94,98	94,98	Dinas Sosial PPPA
				b. Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	66,56	66,76	66,96	67,16	67,36	67,56	67,56	Dinas Sosial PPPA



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR (2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2019	2020	2021	2022	2023		
MISI 4 : MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA												
4.1 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL	D. - Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	5,26	-	-	-	-	-	5,85	
	- Laju Inflasi			%	3,49	-	-	-	-	-	<4	
	- Indeks Gini			Skor	0,36	-	-	-	-	-	<0,36	
		4.1.1 Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3,10	3,30	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20	Dinas Pertanian
			b. Nilai Tukar Petani	Nilai	102	103	103,7	104,1	104,5	104,9	104,9	Dinas Pertanian
		4.1.2 Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	%	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	5,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			b. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	18,95	19,45	19,95	20,45	20,95	21,45	21,45	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR (2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2019	2020	2021	2022	2023		
		4.1.3 Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,64	2,3	2,20	2,1	2,05	2	2	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Mikro dan Koperasi
		4.1.4 Meningkatnya iklim investasi	a. Nilai Investasi Daerah	Rp (milyar)	1.987,69	2.072,87	2.175,99	2.284,79	2.899,03	2.518,99	2.518,99	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MISI 5 : MENINGKATKAN KEBANGGAAN TERHADAP KESENIAN, KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL YANG MAMPU MENDORONG PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA.												
5.1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN LAPANGAN USAHA PARIWISATA DAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH YANG DIDUKUNG KESADARAN UNTUK MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN	E. PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PARIWISATA		%	14,62	-	-	-	-	-	14,75	
		5.1.1 Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	a. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		5.1.2 Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.	a. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	26	27	28	29	30	31	31	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR (2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2019	2020	2021	2022	2023		
SENI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL			b. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	%	22,22	23	25	28	30	32	32	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
MISI 6 : INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN BERKUALITAS SEBAGAI PENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA												
6.1 MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG HANDAL, BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN BERKELANJUTAN	F. PEMENUHAN INFRASTRUKTUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN			%	59,25	-	-	-	-	-	75,04	
		6.1.1 Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	%	48,94	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Skor	70,41	70,91	71,51	72,11	72,61	73,11	73,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			c. Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	61,98	73,01	74,47	76,70	78,24	80,58	80,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			d. Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	%	27,20	32,25	33,82	35,39	36,96	38,53	38,53	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR (2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2019	2020	2021	2022	2023		
			e. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan	%	80,21	81,26	82,31	83,36	84,41	85,46	85,46	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			f. Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/kawasan/ kota	%	55,36	58,28	61,14	64,03	66,92	69,81	69,81	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			g. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	%	85,46	86,87	88,28	89,69	91,1	92,51	92,51	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			h. Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	%	75,7	76,95	78,2	79,45	80,7	81,95	81,95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			i. Persentase pengurangan Kawasan Kumuh	%	0	12,5	25	37,5	50	62,5	62,5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			j. Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni	%	87,21	88,96	90,71	92,46	94,21	95,96	95,96	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR (2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2019	2020	2021	2022	2023		
		6.1.2 Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	a. Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	%	79,43	79,63	80,13	80,63	81,23	81,83	81,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6.1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam	a. Indeks Kualitas Air	Skor	66	67	68	69	70	71	71	Dinas Lingkungan Hidup
			b. Indeks Kualitas Udara	Skor	82,4	82,9	83,4	83,9	84,4	84,9	84,9	Dinas Lingkungan Hidup
			c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor	74,86	75,01	75,26	75,51	75,76	76,01	76,01	Dinas Lingkungan Hidup
			d. Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	73	80	75	74	73	72	72	Dinas Lingkungan Hidup
			e. Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	%	18	20	22	24	26	27	27	Dinas Lingkungan Hidup
			f. Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	%	52,44	53,04	53,64	54,24	54,84	55,44	55,44	Dinas Lingkungan Hidup



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR (2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2019	2020	2021	2022	2023		
		6.1.4 Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	a. Cakupan penanganan Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD



**BAB VI**  
**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi “**TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)**” maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja RPJMD secara efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Strategi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi**  
**Kabupaten Nganjuk**

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
MISI 1: MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DINAMIS DAN HARMONIS, BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, SERTA DAPAT MEMELIHARA KERUKUNAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN					
1.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang harmonis, toleran, dan aman	1.1.1	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius	a.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog menuju “Gerakan Nganjuk Damai”
				b.	Meningkatkan fasilitasi layanan keagamaan
				c.	Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum melalui “Gerakan Nganjuk Aman”



VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)					
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		
<b>MISI 2 : MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL (ACCOUNTABLE) DEMI MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG ASPIRATIF, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN</b>					
2.1	Meningkatnya birokrasi pemerintah daerah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, dan bersih	2.1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a.	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif
				b.	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif)
				c.	Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan yang profesional, proporsional dan berkeadilan
				d.	Meningkatkan sinergitas kinerja eksekutif dan legislatif dalam penyaluran aspirasi masyarakat (hasil reses maupun hasil musrenbang) penyusunan kebijakan pembangunan dan produk hukum daerah
				e.	Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
				f.	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ( <i>E-Government</i> )
				g.	Meningkatkan tata kelola kearsipan
				h.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, inovasi
				i.	Mengembangkan sistem pelayanan yang inovatif, cepat, ramah, berkualitas, transparan ( <i>One Stop Service</i> )
		2.1.3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a.	Meningkatkan kapasitas, kompetensi, kinerja dan kesejahteraan ASN melalui pemberian <i>reward and punishment</i> yang layak dan berkeadilan
<b>MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS, PELAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS</b>					
3.1	Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang unggul	3.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a.	Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat
		3.1.2	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	a.	Meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui gerakan dan budaya "Nganjuk Membaca"
				b.	Meningkatkan kinerja pelayanan lembaga pendidikan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan serta meningkatkan apresiasi bagi siswa berpotensi dan berprestasi
c.	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan keolahragaan				



VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		3.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang didukung sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, sistem manajemen dan peran serta masyarakat
				b.	Memperkuat Kepesertaan KB Aktif
		3.1.4	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a.	Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak
<b>MISI 4. MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>					
4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah berbasis pertanian dan potensi lokal	4.1.1	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a.	Meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan potensi lokal secara berkelanjutan
				b.	Meningkatkan kemampuan pemenuhan konsumsi dan keamanan pangan
				c.	Memberdayakan potensi ekonomi perdesaan dan kawasan perdesaan
				d.	Mengembangkan teknologi tepat guna
		4.1.2	Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a.	Mengembangkan sektor industri dan perdagangan dengan menciptakan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang baru untuk pemerataan ekonomi kewilayahan
				b.	Mengembangkan sektor Usaha Mikro, Koperasi serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan
		4.1.3	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	a.	Membuka iklim investasi sektor usaha berbasis ekonomi kerakyatan
				b.	Memperluas akses dan program peningkatan kapasitas pemuda untuk berwirausaha
		4.1.4	Meningkatnya iklim investasi	a.	Meningkatkan iklim investasi melalui penciptaan kondisi pendukung antara lain terkait keamanan, kualitas pelayanan perijinan, perkembangan desa, tata kelola pemerintahan daerah yang baik
		<b>MISI 5 : MENINGKATKAN KEBANGGAAN TERHADAP KESENIAN, KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL YANG MAMPU MENDORONG PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA.</b>			
5.1	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pariwisata dan sektor unggulan daerah yang didukung kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya dan kearifan lokal	5.1.1	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	a.	Meningkatkan Promosi Kepariwisata dan Seni Budaya daerah
				b.	Meningkatkan fungsionalisasi sarana prasarana daya tarik objek dan destinasi wisata serta investasi pendukung kepariwisataan
		5.1.2	Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah	a.	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pelestarian seni budaya dan kearifan lokal



VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		
<b>MISI 6 : INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN BERKUALITAS SEBAGAI PENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA</b>						
6.1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang handal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	6.1.1	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a.	Meningkatkan rasio jalan dalam kondisi baik dan mantap	
				b.	Meningkatkan rasio jembatan dalam kondisi baik	
				c.	Meningkatkan rasio saluran irigasi dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik dan lancar	
				d.	Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat	
				e.	Meningkatkan jumlah permukiman dengan sarana dan prasarana yang layak	
				g.	Meningkatkan dukungan kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan	
					h.	Meningkatkan pemenuhan standar keselamatan jalan
		6.1.2	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang Daerah	a.	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.	
		6.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam	a.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari	
		6.1.4	Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	a.	Meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa dengan "Desa Tangguh Bencana"	



Sedangkan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN						
			2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.1 Meningkatkan stabilitas kondisi sosial, tenram, tertib, dan religius	a.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog menuju "Gerakan Nganjuk Damai"	a.	Peningkatan kualitas keimanan, ketaqwaan, toleransi dan kerukunan umat beragama	√	√	√	√	√
	b.	Meningkatkan fasilitasi layanan keagamaan	a.	Peningkatan kemampuan fasilitasi layanan keagamaan	√	√	√	√	√
	c.	Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum melalui "Gerakan Nganjuk Aman"	a.	Peningkatan kualitas ketentraman, ketertiban, kenyamanan lingkungan	√	√	√	√	√
2.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a.	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif	a.	Penciptaan Pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>Good and Clean Government</i> ) serta tata kelola Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) berbasis elektronik ( <i>e-government</i> ):	√	√	√	√	√
	b.	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif)	a.	Pelaksanaan integrasi perencanaan berbasis elektronik ( <i>e-planning</i> ) dan penganggaran berbasis elektronik ( <i>e-budgeting</i> ) serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;	√	√	√	√	√
	c.	Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan yang profesional, proporsional dan berkeadilan	a.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengawas internal	√	√	√	√	√
	d.	Meningkatkan sinergitas kinerja Eksekutif dan Legislatif dalam penyaluran aspirasi masyarakat (hasil reses maupun hasil musrenbang), penyusunan kebijakan dan produk hukum Pemerintahan Daerah	a.	Peningkatan sistem koordinasi, sarana dan prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia yang mendukung sinergitas kinerja Eksekutif dan Legislatif dalam penyaluran aspirasi masyarakat (hasil reses maupun hasil musrenbang), penyusunan kebijakan dan produk hukum Pemerintahan Daerah;	√	√	√	√	√
	e.	Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	a.	Peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	√	√	√	√	√
	f.	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ( <i>E-Government</i> )	a.	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung publikasi, penyebaran informasi dan komunikasi terintegrasi dengan mengembangkan konsep Kabupaten Cerdas ( <i>Nganjuk</i>	√	√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN							
			2019	2020	2021	2022	2023			
		Smart City);								
	g.	Meningkatkan tata kelola kearsipan	a.	Pemantapan manajemen kearsipan, sarana prasarana, dan kapasitas pengelola arsip.	√	√	√	√	√	
	h.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, inovasi	a.	Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan peneliti untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi pembangunan daerah	√	√	√	√	√	
2.1.2	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a.	Meningkatkan kapasitas, kompetensi, kinerja dan kesejahteraan ASN melalui pemberian <i>reward and punishment</i> yang layak dan berkeadilan	a.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis manajemen SDM berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil <i>merit system</i> ;	√	√	√	√	√
		b.	Mengembangkan sistem pelayanan yang inovatif, cepat, ramah, berkualitas, transparan ( <i>One Stop Service</i> )	a.	Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, sarana dan prasarana, dan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi.	√	√	√	√	√
3.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a.	Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat	a.	Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
				b.	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat	√	√	√	√	√
				c.	Peningkatan efektivitas program pemberdayaan masyarakat	√	√	√	√	√
3.1.2	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	a.	Meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui gerakan dan budaya "Nganjuk Membaca"	a.	Peningkatan minat baca masyarakat dan pengembangan perpustakaan Daerah dan Desa	√	√	√	√	√
		b.	Meningkatkan kinerja pelayanan lembaga pendidikan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan serta meningkatkan apresiasi bagi siswa berpotensi dan	a.	Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	√	√	√	√	√
				b.	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi (fasilitasi Kartu Nganjuk Mandiri bidang pendidikan)	√	√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	berprestasi	c. Penyelenggaraan manajemen pelayanan pendidikan yang didukung sarana prasarana yang memadai	√	√	√	√	√	
	c. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan keolahragaan	a. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan	√	√	√	√	√	
		b. Peningkatan kemampuan dan minat berprestasi pemuda dalam olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi masyarakat	√	√	√	√	√	
3.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang didukung sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, sistem manajemen dan peran serta masyarakat	a. Peningkatan pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√
			b. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	√	√	√	√	√
	b. Memperkuat Kepesertaan KB Aktif	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB	√	√	√	√	√	
3.1.7	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak	a. Peningkatan pemberdayaan peran Perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak	√	√	√	√	√
4.1.1	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan potensi lokal secara berkelanjutan	a. Pemberian kemudahan akses permodalan Petani melalui <i>Kartu Nganjuk Mandiri</i> bidang Pertanian dan pengembangan <i>inti plasma</i>	√	√	√	√	√
			b. Pemberian bantuan sarana prasarana serta fasilitasi teknologi pertanian	√	√	√	√	√
			c. Pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan melalui <i>Nganjuk Farming Development Center</i>	√	√	√	√	√
		b. Meningkatkan kemampuan pemenuhan konsumsi dan keamanan pangan	a. Peningkatan ketersediaan dan penganeekaragaman konsumsi pangan daerah	√	√	√	√	√
		c. Memberdayakan potensi ekonomi perdesaan dan kawasan perdesaan	a. Pengembangan kelembagaan ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan	√	√	√	√	√
		d. Mengembangkan teknologi tepat guna	a. Pengembangan keunggulan teknologi tepat guna	√	√	√	√	√
4.1.2	Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a. Mengembangkan sektor industri dan perdagangan dengan menciptakan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang baru untuk pemerataan ekonomi kewilayahan	a. Penciptaan pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan industri dan pusat perdagangan terintegrasi	√	√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	b. Mengembangkan sektor Usaha Mikro, Koperasi serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan	a. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dan koperasi serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan						
4.1.3	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	a. Membuka iklim investasi sektor usaha berbasis ekonomi kerakyatan	a. Fasilitasi dan kemudahan proses perizinan usaha	√	√	√	√	√
	b. Memperluas akses dan program peningkatan kapasitas pemuda untuk berwirausaha	a. Penyelenggaraan pemberdayaan pemuda wirausaha		√	√	√	√	√
4.1.4	Meningkatnya iklim investasi	a. Meningkatkan iklim investasi melalui penciptaan kondisi pendukung antara lain terkait keamanan, kualitas pelayanan perijinan, perkembangan desa, tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	√	√	√	√	√
			b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	√	√	√	√	√
5.1.1	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	a. Meningkatkan Promosi Kepariwisata dan Seni Budaya daerah	a. Pengembangan pemasaran pariwisata dan sumber daya kepariwisataan	√	√	√	√	√
		b. Meningkatkan fungsionalisasi sarana prasarana daya tarik objek dan destinasi wisata serta investasi pendukung kepariwisataan	a. Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal	√	√	√	√	√
5.1.2	Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah	a. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pelestarian seni budaya dan kearifan lokal	a. Peningkatan promosi seni budaya dan kearifan lokal serta kerjasama investasi kepariwisataan	√	√	√	√	√
6.1.1	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a. Meningkatkan rasio jalan dalam kondisi baik dan mantap	a. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang memenuhi standar	√	√	√	√	√
			b. Pembangunan infrastruktur jalan Kawasan Selingkar Wilis di Kabupaten Nganjuk	√	√	√	√	√
			c. Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan	√	√	√	√	√
	b. Meningkatkan rasio jembatan dalam kondisi baik	a. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jembatan yang berkualitas		√	√	√	√	√
	c. Meningkatkan rasio saluran irigasi dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik dan lancar	a. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur saluran irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai		√	√	√	√	√
	d. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat	a. Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat		√	√	√	√	√
	e. Meningkatkan jumlah permukiman dengan sarana dan prasarana yang layak	a. Peningkatan penyediaan rumah layak huni dan prasarana permukiman		√	√	√	√	√
	g. Meningkatkan dukungan kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan	a. Pengembangan sinergitas pembangunan desa dan daerah		√	√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	h. Meningkatkan pemenuhan standar keselamatan jalan	a. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perhubungan	√	√	√	√	√
6.1.2 Meningkatkan ketaatan pemanfaatan ruang Daerah	a. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.	a. Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	√	√	√	√	√
		b. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran	√	√	√	√	√
6.1.3 Meningkatkan kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam	a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari	a. Peningkatan fasilitas dan tata kelola persampahan, pertamanan serta ruang terbuka hijau lainnya	√	√	√	√	√
6.1.4 Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	a. Meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa dengan "Desa Tangguh Bencana"	a. Peningkatan mitigasi serta ketangguhan masyarakat dan Desa dalam menghadapi bencana	√	√	√	√	√

Strategi dan Arah Kebijakan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Misi 1**

*Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban* dijabarkan dengan serangkaian Strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog menuju "Gerakan Nganjuk Damai"
- 2) Meningkatkan fasilitasi layanan keagamaan.
- 3) Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum melalui "Gerakan Nganjuk Aman"

*Serangkaian Strategi tersebut di atas dilaksanakan dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:*

- 1) Peningkatan kualitas keimanan, ketaqwaan, toleransi dan kerukunan umat beragama
- 2) Peningkatan kemampuan fasilitasi layanan keagamaan
- 3) Peningkatan kualitas ketentraman, ketertiban, kenyamanan lingkungan



**MISI 2**

*Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan, dijabarkan dengan Strategi pembangunan sebagai berikut :*

- 1) Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif
- 2) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif)
- 3) Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan yang profesional, proporsional dan berkeadilan
- 4) Meningkatkan sinergitas kinerja Eksekutif dan Legislatif dalam penyaluran aspirasi masyarakat (hasil reses maupun hasil musrenbang), penyusunan kebijakan dan produk hukum Pemerintahan Daerah
- 5) Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
- 6) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (E-Government)
- 7) Meningkatkan tata kelola kearsipan
- 8) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, inovasi.
- 9) Meningkatkan kapasitas, kompetensi, kinerja dan kesejahteraan ASN melalui pemberian reward and punishment yang layak dan berkeadilan
- 10) Mengembangkan sistem pelayanan yang inovatif, cepat, ramah, berkualitas, transparan (One Stop Service)

*Serangkaian Strategi tersebut di atas dilaksanakan dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:*

- 1) Penciptaan Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government) serta tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis elektronik (e-government);
- 2) Pelaksanaan integrasi perencanaan berbasis elektronik (e-planning) dan penganggaran berbasis elektronik (e-budgeting) serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- 3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengawas internal
- 4) Peningkatan sistem koordinasi, sarana dan prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia yang mendukung sinergitas kinerja Eksekutif dan Legislatif dalam penyaluran aspirasi masyarakat (hasil reses maupun hasil musrenbang), penyusunan kebijakan dan produk hukum Pemerintahan Daerah;
- 5) Peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan



- 6) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung publikasi, penyebarluasan informasi dan komunikasi terintegrasi dengan mengembangkan konsep Kabupaten Cerdas (Nganjuk Smart City);
- 7) Pemanjagan manajemen kearsipan, sarana prasarana, dan kapasitas pengelola arsip.
- 8) Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan peneliti untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi pembangunan daerah
- 9) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis manajemen SDM berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil merit system;
- 10) Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, sarana dan prasarana, dan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi.

### **MISI 3**

***Meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, dijabarkan dengan Strategi Pembangunan :***

- 1) Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui gerakan dan budaya "Nganjuk Membaca"
- 3) Meningkatkan kinerja pelayanan lembaga pendidikan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan serta meningkatkan apresiasi bagi siswa berpotensi dan berprestasi
- 4) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan keolahragaan
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang didukung sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, sistem manajemen dan peran serta masyarakat
- 6) Memperkuat Kepesertaan KB Aktif
- 7) Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak

***Serangkaian Strategi tersebut di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:***

- 1) Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 2) Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat
- 3) Peningkatan efektivitas program pemberdayaan masyarakat
- 4) Peningkatan minat baca masyarakat dan pengembangan perpustakaan Daerah dan Desa
- 5) Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- 6) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi (fasilitasi Kartu Nganjuk Mandiri bidang pendidikan)
- 7) Penyelenggaraan manajemen pelayanan pendidikan yang didukung sarana prasarana yang memadai
- 8) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan



- 9) Peningkatan kemampuan dan minat berprestasi pemuda dalam olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi masyarakat
- 10) Peningkatan pelayanan kesehatan
- 11) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- 12) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB
- 13) Peningkatan pemberdayaan peran Perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak

#### MISI 4

***Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna, dijabarkan dengan Strategi yang ditempuh sebagai berikut :***

- 1) Meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan potensi lokal secara berkelanjutan
- 2) Meningkatkan kemampuan pemenuhan konsumsi dan keamanan pangan
- 3) Memberdayakan potensi ekonomi perdesaan dan kawasan perdesaan
- 4) Mengembangkan teknologi tepat guna
- 5) Mengembangkan sektor industri dan perdagangan dengan menciptakan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang baru untuk pemerataan ekonomi kewilayahan
- 6) Mengembangkan sektor Usaha Mikro, Koperasi serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan
- 7) Membuka iklim investasi sektor usaha berbasis ekonomi kerakyatan
- 8) Memperluas akses dan program peningkatan kapasitas pemuda untuk berwirausaha
- 9) Meningkatkan iklim investasi melalui penciptaan kondisi pendukung antara lain terkait keamanan, kualitas pelayanan perijinan, perkembangan desa, tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

***Serangkaian Strategi tersebut di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:***

- 1) Pemberian kemudahan akses permodalan Petani melalui *Kartu Nganjuk Mandiri* bidang Pertanian dan pengembangan *inti plasma*
- 2) Pemberian bantuan sarana prasarana serta fasilitasi teknologi pertanian
- 3) Pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan melalui Nganjuk Farming Development Center
- 4) Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi pangan daerah
- 5) Pengembangan kelembagaan ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 6) Pengembangan keunggulan teknologi tepat guna
- 7) Penciptaan pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan industri dan pusat perdagangan terintegrasi
- 8) Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dan koperasi serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan
- 9) Fasilitasi dan kemudahan proses perizinan usaha
- 10) Penyelenggaraan pemberdayaan pemuda wirausaha
- 11) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 12) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi



#### MISI 5

*Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata, dijabarkan dengan Strategi Percepatan pembangunan sebagai berikut :*

- 1) Meningkatkan Promosi Kepariwisata dan Seni Budaya daerah
- 2) Meningkatkan fungsionalisasi sarana prasarana daya tarik objek dan destinasi wisata serta investasi pendukung kepariwisataan
- 3) Meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pelestarian seni budaya dan kearifan lokal

*Serangkaian Strategi tersebut di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:*

- 1) Pengembangan pemasaran pariwisata dan sumber daya kepariwisataan
- 2) Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal
- 3) Peningkatan promosi seni budaya dan kearifan lokal serta kerjasama investasi kepariwisataan

#### MISI 6

*Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana, dijabarkan dengan Strategi Percepatan pembangunan sebagai berikut :*

- 1) Meningkatkan rasio jalan dalam kondisi baik dan mantap
- 2) Meningkatkan rasio jembatan dalam kondisi baik
- 3) Meningkatkan rasio saluran irigasi dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik dan lancar
- 4) Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat
- 5) Meningkatkan jumlah permukiman dengan sarana dan prasarana yang layak
- 6) Meningkatkan dukungan kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan
- 7) Meningkatkan pemenuhan standar keselamatan jalan
- 8) Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.
- 9) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari
- 10) Meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa dengan "Desa Tangguh Bencana"

*Serangkaian Strategi tersebut di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:*

- 1) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang memenuhi standar
- 2) Pembangunan infrastruktur jalan Kawasan Selingkar Wilis di Kabupaten Nganjuk
- 3) Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan
- 4) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jembatan yang berkualitas
- 5) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur saluran irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai
- 6) Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
- 7) Peningkatan penyediaan rumah layak huni dan prasarana permukiman



- 8) Pengembangan sinergitas pembangunan desa dan daerah
- 9) Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perhubungan
- 10) Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 11) Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran
- 12) Peningkatan fasilitas dan tata kelola persampahan, pertamanan serta ruang terbuka hijau lainnya
- 13) Peningkatan mitigasi serta ketangguhan masyarakat dan Desa dalam menghadapi bencana.

Rincian strategi dan arah kebijakan di atas merupakan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya perlu disusun strategi umum dan arah kebijakan umum yang menggambarkan perencanaan pembangunan pada tingkat daerah. Rumusan strategi umum dan arah kebijakan umum pembangunan daerah tahun 2019-2023 sebagai berikut:



Tabel 6.3  
STRATEGI UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM

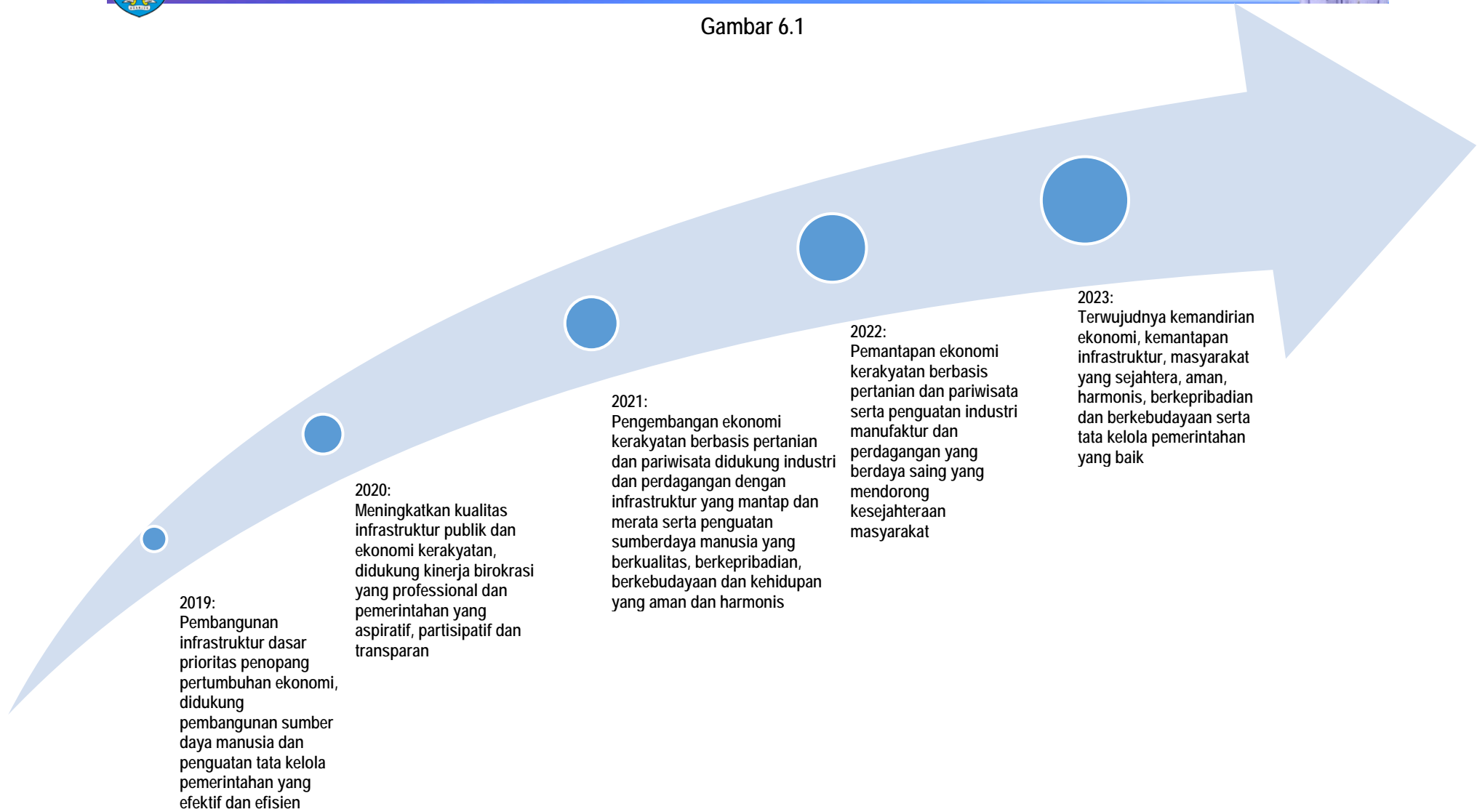
Strategi Umum	Arah Kebijakan Umum				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU:</b>					
1. Membangun infrastruktur yang mantap, merata dan berkelanjutan	▪	▪	▪	▪	▪
2. Memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		▪	▪	▪	
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	▪	▪	▪	▪	▪
<b>KABUPATEN NGANJUK YANG BERMARTABAT :</b>					
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	▪	▪	▪	▪	▪
5. Penguatan kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan harmonis serta berkepribadian dan berkebudayaan	▪	▪	▪	▪	▪
	Arah Kebijakan Tahun-I : Pembangunan infrastruktur dasar prioritas penopang pertumbuhan ekonomi, didukung pembangunan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Arah Kebijakan Tahun-II : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik dan ekonomi kerakyatan, didukung kinerja birokrasi yang profesional dan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Arah Kebijakan Tahun-III : Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata didukung industri dan perdagangan dengan infrastruktur yang mantap dan merata serta penguatan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkepribadian, berkebudayaan dan kehidupan yang aman dan harmonis	Arah Kebijakan Tahun-IV : Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata serta penguatan industri manufaktur dan perdagangan yang berdaya saing yang mendorong kesejahteraan masyarakat	Arah Kebijakan Tahun-V : Terwujudnya kemandirian ekonomi, kemantapan infrastruktur, masyarakat yang sejahtera, aman, harmonis, berkepribadian dan berkebudayaan serta tata kelola pemerintahan yang baik



Berdasarkan strategi umum dan arah kebijakan umum tersebut, selanjutnya dirumuskan tema/fokus pembangunan tahunan yang menggambarkan tahapan dan program prioritas setiap tahun. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahun ke tahun lainnya dalam rangka mencapai sasaran RPJMD. Tema/fokus pembangunan tahunan periode 2019-2023 sebagai berikut :



Gambar 6.1



Tema/Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023



Untuk menjalankan Strategi dan Arah Kebijakan guna mencapai Sasaran RPJMD, maka disusun Program Pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah mencakup Program Unggulan yang merupakan gagasan dan pemikiran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat kampanye, dan menjadi komitmen yang harus diwujudkan di dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, serta Program Perangkat Daerah yang bersifat strategis yang outcome-nya mendukung langsung dengan Sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah

Adapun 14 (empat belas) program unggulan **Bupati H. Novi Rahman Hidayat, S.Sos, MM** dan **Wakil Bupati Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA** untuk mewujudkan Visi **"TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"** adalah sebagai berikut.

**1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan**

Salah satu komitmen utama Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih adalah hendak mewujudkan infrastruktur dasar jalan dan jembatan yang mantap dan merata di wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa infrastruktur dasar yang berkualitas merupakan faktor daya saing daerah yang utama yang dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah.

Komitmen membangun infrastruktur ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: Tambahan anggaran PIK untuk pembangunan Jalan di Desa; membentuk Unit Reaksi Cepat Penambal Jalan (URCPJ); meningkatkan kualitas (mutu) jalan; normalisasi saluran irigasi dan melanjutkan pembangunan waduk; penataan kawasan industri.

**2. Peningkatan Profesionalisme dan Birokrasi Inovatif, Bersih Tanpa Korupsi**

Menyadari bahwa birokrasi merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi yang inovatif, bersih, tanpa korupsi, sehingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang prima.

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: *mobile one stop service* pelayanan administrasi kependudukan setiap Kecamatan dan mal pelayanan publik; mutasi, promosi, rekrutmen, ijin belajar yang bebas dari pungutan (tanpa upeti) dan dilaksanakan dengan proses *assessment*; mewujudkan pusat pengaduan pelayanan publik; pemberian *reward and punishment* untuk pegawai; biaya pendidikan bagi peningkatan pendidikan formal untuk ASN; memotivasi ASN; serta pengembangan *smart city* untuk efektivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.



**3. *Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran***

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menanggulangi kemiskinan merupakan komitmen Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih, sebab kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan adanya otonomi daerah.

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: memberikan edukasi kewirausahaan; gerdu taskin; membatasi pendirian pasar modern dan revitalisasi pasar tradisional; program terpadu pengentasan kemiskinan; kredit modal usaha dengan bunga ringan & tanpa agunan; pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu rumah tangga dan pemuda melalui antara lain pelatihan teknologi informasi dan ekonomi kreatif; pemberian kartu nganjuk mandiri yakni bantuan mulai 1 juta sampai 10 juta rupiah untuk golongan yang tidak punya pedagang, petani kecil, buruh tani dan peternak.

**4. *Peningkatan Akses dan kualitas Pendidikan***

Akses dan kualitas pendidikan merupakan komitmen Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Nganjuk.

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: bantuan khusus siswa miskin; meningkatkan kesejahteraan pendidik antara lain pemberian tunjangan transport untuk Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap; pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi kuliah S1.

**5. *Penguatan Pendidikan Diniyah dan Pesantren***

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: pemberantasan buta huruf & baca tulis Al-Qur'an; pemberian honor bagi guru TPO diniyah, hafidz / hafidzah dan pengasuh pondok pesantren untuk mendukung Satu Desa Satu Hafidz Al-Qur'an; pemberian bantuan hibah bagi lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren; peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan diniyah & pondok pesantren; pemberian bantuan hibah kepada pendidikan keagamaan (muslim, non muslim & aliran kepercayaan); meningkatkan komunikasi lintas agama.

**6. *Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat***

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: akses pelayanan kesehatan terjangkau; peningkatan mutu pelayanan kesehatan; ambulan gratis untuk masyarakat kurang mampu; serta mobil siaga desa.

**7. *Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Destinasi Wisata***

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan obyek wisata & sarana olah raga yang sudah ada; membuka obyek wisata baru (desa wisata) yang potensial; meningkatkan promosi pariwisata; meningkatkan Sumber Daya Manusia pelaku wisata; membangun/mengembangkan *sport centre*; serta kawasan wisata desa terintegrasi.



- 8. *Optimalisasi dan Revitalisasi Pasar Tradisional***  
Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: membangun/mengembangkan pasar tradisional yang ada di kecamatan; merelokasi pasar tradisional yang sudah tidak layak; bangga, bela & beli produk lokal; menciptakan pasar yang bersih & sehat.
- 9. *Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Agropolitan***  
Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: ekstensifikasi lahan pertanian; intensifikasi produk pertanian; inovasi pengolahan produk pertanian sehingga memiliki branding yang dikenal & disukai masyarakat; promosi produk unggulan pertanian (bawang merah) go nasional.
- 10. *Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Layak Anak dan Responsif Gender***  
Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: menciptakan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di setiap Kecamatan; menciptakan kesempatan untuk kaum wanita di segala jenjang profesi secara berkeadilan.
- 11. *Melestarikan Seni Budaya dan Kearifan Lokal***  
Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: menciptakan identitas khas Nganjuk dalam hal busana, seni & budaya; merevitalisasi sarana dan prasarana kesenian yang ada dan memberdayakan kelompok-kelompok seni budaya agar tercipta seni budaya Nganjuk yang dikenal sampai ke tingkat Nasional; penataan lingkungan dan pemanfaatan lingkungan produktif.
- 12. *Revitalisasi Bidang Pertanian dan Perternakan***  
Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan produk pangan alternatif; Intensifikasi peternakan melalui pengembangan inseminasi buatan; mengembangkan sentra-sentra industri ternak, pertanian terpadu, model inti dan plasma pertanian, gudang penyangga;
- 13. *Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif***  
Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan industri mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi; meningkatkan kreatifitas pemuda untuk menemukan & mengembangkan produk-produk unggulan baru; mendirikan lembaga ekonomi kreatif di Kabupaten Nganjuk; serta menumbuhkembangkan BUM Desa.
- 14. *Pengembangan Jejaring antar Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan***  
Jejaring merupakan salah satu kekuatan/modal sosial yang sangat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. untuk



itu, Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih berkomitmen membangun jejaring yang terbuka, komunikatif, dan produktif.

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: kerjasama daerah; pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dengan unsur di dalam dan di luar Kabupaten Nganjuk dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Implementasi 14 (empat belas) Program Unggulan tersebut kedalam RPJMD Tahun 2018-2023 dirumuskan sebagai Program-Program RPJMD atau sebagai Kegiatan-Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Hal ini sesuai dengan kaidah penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang menegaskan bahwa ruang lingkup RPJMD memuat Program, sedangkan ruang lingkup Renstra memuat Program dan Kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas pembangunan daerah beserta pagu indikatif tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. VI.4**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif**  
**Kabupaten Nganjuk**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode 2023			
				Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)		
<b>MISI 1: MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DINAMIS DAN HARMONIS, BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, SERTA DAPAT MEMELIHARA KERUKUNAN, KETETRAMAN DAN KETERTIBAN</b>																	
<b>Tujuan : 1.1 MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT YANG HARMONIS, TOLERAN, DAN AMAN</b>																	
<b>Sasaran : 1.1.1. Meningkatkan stabilitas kondisi sosial, tenang, tertib, dan religious</b>																	
05	02	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat															
		Program Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas	Persentase rekomendasi forum kewaspadaan dini yang ditindaklanjuti	80%	80%	305,000,000	80%	318,750,000	80%	333,187,500	80%	348,455,750	80%	384,262,000	80%	1,689,655,250	Kesbangpol
		Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Persentase konflik sosial yang tertangani	80%	80%	857,000,000	80%	982,000,000	80%	1,087,000,000	80%	1,187,000,000	80%	1,287,000,000	80%	5,400,000,000	Kesbangpol
05	01	Satuan Polisi Pamone Praja															Satpol PP
		Program Penegakan Perundang Undangan	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	59%	74%	213,834,000	80%	296,000,000	80%	336,000,000	85%	350,000,000	90%	366,000,000	90%	1,561,834,000	Satpol PP
		Program Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban dan ketertiban umum	70%	70%	709,822,000	75%	755,437,200	80%	798,880,920	85%	844,369,034	85%	891,105,869	85%	3,999,615,023	Satpol PP
		Program Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Petugas Linmas dan peningkatan rasa nasionalisme	92%	92%	2,368,144,500	94%	2,576,009,000	96%	2,802,010,000	98%	3,051,612,000	100%	3,326,793,000	96%	14,124,568,500	Satpol PP
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran yang tertangani	60%	60%	1,336,810,000	65%	2,102,810,000	65%	2,111,810,000	70%	2,366,810,000	75%	2,496,810,000	67%	10,415,050,000	Satpol PP
01	03	Sekretariat Daerah															
		Program Pembinaan/Penyuluhan hukum	Persentase sosialisasi di bidang hukum yang dilaksanakan dengan baik	-	90%	325,000,000	90%	325,000,000	90%	325,000,000	90%	325,000,000	90%	325,000,000	90%	1,625,000,000	Setda
		Program Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang kesejahteraan rakyat		100%	9,637,000,000	100%	10,107,000,000	100%	10,452,000,000	100%	10,842,000,000	100%	11,162,000,000	100%	52,200,000,000	Setda
<b>MISI 2 : MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI BERSIH, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL ( ACCOUNTABLE) DEMI MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG ASPIRATIF, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN</b>																	
<b>Tujuan : 2.1 MENINGKATNYA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL DENGAN KARAKTERISTIK BERINTEGRITAS, BERKINERJA TINGGI, DAN BERSIH</b>																	
<b>Sasaran : 2.1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik</b>																	
04	01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah															
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah	Ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan P. APBD)	100%	100%	1,969,550,000	100%	2,068,028,000	100%	2,171,429,000	100%	1,816,950,000	100%	2,394,000,000	100%	10,419,957,000	BPKAD
		Program Peningkatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%	100%	534,000,000	100%	560,700,000	100%	588,735,000	100%	618,172,000	100%	649,080,000	100%	2,950,687,000	BPKAD
04	02	Badan Pendapatan Daerah															
		Program Peningkatan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Capaian penerimaan PAD	101%	101%	1,150,000,000	101%	1,160,000,000	101%	1,260,000,000	101%	1,270,000,000	101%	1,400,000,000	101%	6,240,000,000	Bapenda
02	01	Inspektorat															
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%	100%	1,416,400,000	100%	1,580,000,000	100%	1,669,000,000	100%	1,950,000,000	100%	1,925,000,000	100%	8,540,400,000	Inspektorat
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	60%	70%	730,000,000	75%	880,000,000	75%	900,000,000	80%	1,165,000,000	80%	1,180,000,000	80%	4,855,000,000	Inspektorat
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerikasaan dan Aparatur Pengawasan	Cakupan klinik konsultasi	127 obwas	127 obwas	400,000,000	135 obwas	720,000,000	135 obwas	900,000,000	143 obwas	1,065,000,000	143 obwas	1,080,000,000	143 obwas	4,165,000,000	Inspektorat
			Jumlah auditor yang bersertifikat	13 Orang	16 Orang	400,000,000	16 Orang	720,000,000	16 Orang	900,000,000	16 Orang	1,065,000,000	16 Orang	1,080,000,000	16 Orang	4,165,000,000	Inspektorat
01	03	Sekretariat Daerah															
		Program Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi bidang Pemerintahan	Persentase aspek penilaian LPPD dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	392,000,000	Sangat Baik	430,000,000	Sangat Baik	430,000,000	Sangat Baik	430,000,000	Sangat Baik	430,000,000	Sangat Baik	2,112,000,000	Setda
		Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	nilai aspek pelaporan kinerja dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Baik	Baik	350,000,000	Baik	350,000,000	Baik	350,000,000	Baik	350,000,000	Baik	350,000,000	Baik	1,750,000,000	Setda
14	01	Dinas Komunikasi dan Informatika															
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah implementasi Sistem Informasi	22	27	7,270,000,000	30	5,203,500,000	33	8,809,025,000	36	6,480,378,750	38	4,569,935,563	38	32,332,839,313	Dinas Kominfo
		Program pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	1. Meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi	7 media	8 Media		9 media		10 Media		10 media		10 media		10 media	Dinas Kominfo	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		2. Ditindaklanjuti laporan masyarakat yang dikelola melalui sistem informasi Laporan SP4N	0	70%	730,000,000	80%	802,000,000	90%	885,850,000	100%	1,002,190,000	100%	1,125,433,800	100%	4,545,473,800		
		3. Jumlah OPD yang mengisi Daftar Informasi Publik pada PPID	8	20 OPD		52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD	52 OPD		
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	2 buku	2 buku	270,000,000	3 buku	300,000,000	3 buku	300,000,000	3 buku	300,000,000	3 buku	300,000,000	3 buku	1,470,000,000	Dinas Keminfo	
17	01	Dinas Keairan dan Perikanan															
		Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	28.288 Dokume arsip terselamatkan dengan baik	30%	36%	330,000,000	42%	360,000,000	48%	385,000,000	54%	410,000,000	60%	430,000,000	60%	1,915,000,000	Dinas Arpus
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana arsip daerah	Persentase Arsip dalam kondisi baik	100%	100%	167,000,000	100%	175,000,000	100%	195,000,000	100%	210,000,000	100%	225,000,000	100%	972,000,000	Dinas Arpus
03	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	% Kesesuaian usulan kegiatan pembangunan dalam RKPd terhadap prioritas tahunan daerah	100%	100%	2,780,000,000	100%	2,828,000,000	100%	2,853,000,000	100%	2,909,000,000	100%	2,945,000,000	100%	14,315,000,000	Bappeda
			% data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas	53%	75%		85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Bappeda	
			% hasil rekomendasi pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti	69.70%	70%		75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Bappeda	
		Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	% Outcome program lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia dengan tingkatan capaian ≥ 80 %	100%	100%	1,050,250,000	100%	707,500,000	100%	682,500,000	100%	822,500,000	100%	1,772,500,000	100%	5,035,250,000	Bappeda
		Program Perencanaan Bidang Sosial	% keriasama yang dilaksanakan	100%	100%		5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	Bappeda
			% Outcome program Bidang Sosial dengan tingkatan capaian ≥ 80 %	100%	100%	762,000,000	100%	762,000,000	100%	762,000,000	100%	762,000,000	100%	762,000,000	100%	3,810,000,000	Bappeda
		Program Perencanaan Bidang Ekonomi	% Outcome program Bidang ekonomi	100%	100%	537,500,000	100%	537,500,000	100%	537,500,000	100%	537,500,000	100%	537,500,000	100%	2,687,500,000	Bappeda
		Program Perencanaan Bidang Infrastruktur	% Outcome program Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian ≥ 80 %	100%	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	2,250,000,000	Bappeda
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	% kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan KTRW	100%	100%	1,100,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	3,500,000,000	Bappeda
		Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pembangunan Daerah	% implementasi rencana kelibangan (jumlah kelibangan dalam RKPd/Jumlah kelibangan dalam RPJMD X 100)	100%	100%	10,130,500,000	100%	9,000,000,000	100%	8,000,000,000	100%	7,000,000,000	100%	10,000,000,000	100%	44,130,500,000	Bappeda
			% pemanfaatan hasil kelibangan kegiatan yg ditindaklanjuti/Σ kelibangan dalam renja perangkat daerah X 100)	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>Sasaran : 2.1.2. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah</b>																	
05	01	Badan Kepegawaian Daerah															
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang lulus diklat	95%	100%	10,086,000,000	100%	9,540,000,000	100%	9,930,000,000	100%	9,730,000,000	100%	11,680,000,000	100%	50,966,000,000	BKD
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan struktural yang terisi	92%	100%	4,614,600,000	100%	4,700,000,000	100%	4,980,000,000	100%	5,010,000,000	100%	5,040,000,000	100%	24,344,600,000	BKD
		Program Pengendalian dan Pembinaan Pegawai	Persentase kasus pelanggaran disiplin yang tertangani selesai	100%	100%	985,000,000	100%	985,000,000	100%	985,000,000	100%	985,000,000	100%	985,000,000	100%	4,925,000,000	BKD
01	03	Sekretariat Daerah															
		Program Koordinasi Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	Persentase OPD yang nilai SKM ≥ Baik	Baik	100%	380,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	100%	1,900,000,000	Setda
<b>MISI 3 MENINGKATKAN KUALITAS, PELAYANAN, MUTU PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS.</b>																	
<b>Tujuan : 3.1 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL</b>																	
<b>Sasaran : 3.1.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b>																	
06	01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
		Program perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial	Persentase penanganan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	84%	85%	8,226,350,000	86%	9,563,500,000	87%	10,039,500,000	88%	9,919,000,000	88%	10,297,000,000	88%	48,045,350,000	Dinsos PPPA
		Program pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Persentase pelayanan PMKS	75%	80%	900,000,000	85%	1,000,000,000	85%	1,175,000,000	85%	1,250,000,000	85%	1,300,000,000	85%	5,625,000,000	Dinsos PPPA
<b>Sasaran : 3.1.2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan</b>																	
01	01	Dinas Pendidikan															

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Target	Rp	
				Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	
01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase Anak yang Bersekolah Pendidikan Dasar	81%	81.50%	81.75%	81.75%	82.00%	82.25%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	112,795,784,198	Didik
		Prosentase SD/SMP yang Memiliki Akreditasi ≥B	78%	78.00%	78.20%	78.50%	78.70%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%	79.00%		
		Prosentase Anak yang Bersekolah PAUD	52%	52.50%	52.80%	53.00%	53.20%	53.50%	53.50%	53.50%	53.50%	53.50%	53.50%	53.50%		
		Prosentase Satuan Pendidikan AUD yang Memiliki Akreditasi ≥B	22%	22.50%	23.00%	23.50%	24.00%	24.50%	24.50%	24.50%	24.50%	24.50%	24.50%	24.50%		
		Prosentase Peserta Didik Non Formal yang Tuntas Mengikuti Pendidikan Kesetaraan	66%	66.45%	66.75%	67.00%	67.25%	67.50%	67.50%	67.50%	67.50%	67.50%	67.50%	67.50%		
		Prosentase Satuan Pendidikan Non Formal yang Memiliki Akreditasi ≥B	25%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%		
17 01	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan															
	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	93,963	103,359	892,900,000	113,695	990,000,000	125,064	1,182,000,000	137,571	1,192,000,000	151,328	1,250,000,000	151,328	5,506,900,000	Dinas Arpus
02 01	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan															
13	Kepemudaan dan Olah Raga															
	Program Peningkatan Pemasyarakatan Kepemudaan dan Olahraga	Prosentase cabang olahraga yang dihina	60.87%	69.57%	725,000,000	78.26%	800,000,000	82.61%	855,000,000	91.30%	925,000,000	100%	990,000,000	100%	4,295,000,000	Dinas Parporabud
		Prosentase organisasi kepemudaan yang aktif	64%	71%	225,000,000	79%	300,000,000	86%	350,000,000	93%	400,000,000	100%	440,000,000	100%	1,715,000,000	Dinas Parporabud
		Prosentase wirasaha muda	16 Kelompok wirasaha muda (@ 15 orang)	26 Kelompok wirasaha muda (@ 15 orang)	450,000,000	36 wirasaha muda (@ 15 orang)	500,000,000	46 wirasaha muda (@ 15 orang)	650,000,000	56 wirasaha muda (@ 150 orang)	800,000,000	66 wirasaha muda (@ 20 orang)	950,000,000	100%	3,350,000,000	Dinas Parporabud
		Prosentase kasus kenakalan remaja yang tertangani	100%	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	90,000,000	100%	350,000,000	Dinas Parporabud
		Prosentase peningkatan prestasi olahraga dan pemuda	42%	50%	950,000,000	58%	1,150,000,000	67%	1,350,000,000	75%	1,550,000,000	83%	1,700,000,000	100%	6,700,000,000	Dinas Parporabud
<b>Sasaran : 3.1.3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>																
02 01	Dinas Kesehatan /RSUD															
	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer Terakreditasi	100%	100%	830,600,000	100%	873,675,373	100%	921,476,852	100%	974,236,387	100%	1,032,197,033	100%	4,632,185,645	Dinkes
		Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Terakreditasi	60%	80%	13,596,540,160	100%	14,301,664,210	100%	15,084,152,445	100%	15,947,801,790	100%	16,896,590,909	100%	75,826,749,514	
		Prosentase Penyehat Tradisional yang memiliki STPT (Surat Tandaftar Penyehat Tradisional)	11.80%	20%	69,260,000	30%	72,851,862	40%	76,837,812	50%	81,237,193	60%	86,070,270	60%	386,257,137	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Prosentase SPM yang memenuhi target	87	88	188,000,000,000	90	197,000,000,000	92	210,000,000,000	93	222,000,000,000	95	235,000,000,000	95	1,052,000,000,000	RSUD
	Program Penguatan Kesehatan Masyarakat	Prosentase Keluarga Sehat	20%	30%	8,431,103,000	40%	8,868,344,638	50%	9,353,559,173	60%	9,889,101,046	70%	10,477,437,394	70%	47,019,545,251	Dinkes
	Program Pencegahan dan pengendalian penyakit	Cakupan Desa/Kelurahan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	65.14%	80%	279,700,000	80%	294,205,396	80%	310,302,282	80%	328,068,767	80%	347,586,696	80%	1,559,863,141	Dinkes
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	49%	48%	304,300,000	47%	320,081,165	46%	337,593,795	45%	356,922,866	44%	378,157,425	43%	1,697,055,251	
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC	100%	100%	98,200,000	100%	103,292,706	100%	108,944,169	100%	115,181,812	100%	122,034,371	100%	547,653,058	
		Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam	100%	100%	694,385,000	100%	730,396,188	100%	770,358,420	100%	814,465,608	100%	862,920,945	100%	3,872,526,160	
08 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
	Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Prosentase pasangan usia subur yang seharusnya KB tapi belum KB (unmet need)	10.20	11.75	8,686,300,000	11.70	9,554,930,000	11.65	10,510,423,000	11.60	11,561,465,300	11.50	12,717,611,830	11.50	53,030,730,130	Dinas PPKB
	Program Keluarga Berencana	Prosentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23.20	26.19	831,000,000	26.95	2,001,740,000	27.65	2,201,914,000	28.29	2,422,105,400	28.87	2,664,315,940	28.87	10,121,075,340	Dinas PPKB

<b>Sasaran : 3.1.4. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan</b>																
06 01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Kesetaraan Gender dan Peran Aktif Masyarakat	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender	90%	90%	1,175,000,000	92%	1,200,000,000	93%	1,225,000,000	95%	1,250,000,000	95%	1,275,000,000	95%	6,125,000,000	Dinsos PPPA
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	80%	85%	841,000,000	86%	866,000,000	87%	891,000,000	88%	916,000,000	90%	941,000,000	90%	4,455,000,000	Dinsos PPPA
<b>MISI 4 : MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>																
<b>Tujuan : 4.1 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL</b>																
<b>Sasaran : 4.1.1. Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani</b>																
03	Pertanian															
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :			4,648,728,000		4,275,000,000		5,360,000,000		6,445,000,000		7,445,000,000		28,173,728,000	Diperta
		- Padi	623.147,62 ( ton )	0.89%		0.89%		0.88%		0.87%		0.86%		0.86%		Diperta
		- Jagung	200.293,77 ( ton )	3.41%		3.49%		3.26%		3.26%		3.14%		3.14%		Diperta
		- Kedelai	21.460,47 ( ton )	2.20%		2.23%		2.18%		2.14%		2.09%		2.09%		Diperta
		Prosentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	50%	65%	239,000,000	70%	247,000,000	75%	260,000,000	80%	277,000,000	85%	297,000,000	85%	1,320,000,000	Diperta
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura :			658,760,000		840,000,000		860,000,000		880,000,000		905,000,000		4,143,760,000	Diperta
		- Bawang merah	1.464.414 ( ton )	62.04%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		Diperta
		- Cabe rawit	37.262,25 ( ton )	0.50%		0.50%		0.50%		0.50%		0.50%		0.50%		Diperta
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan :			250,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		1,450,000,000	Diperta
		- Tebu	16.314,05 ( ton )	0.70%		0.80%		0.92%		1.00%		1.10%		1.10%		Diperta
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Prosentase Deteksi penyakit menular ternak			200,000,000		300,000,000		330,000,000		332,000,000		335,000,000		1,497,000,000	Diperta
		- Brucella	0.14	0.14		0.18		0.18		0.22		0.22		0.22		Diperta
		- Antrax	-	0.03		0.07		0.07		0.11		0.11		0.11		Diperta
		- Helintiasis	0.36	0.36		0.36		0.72		0.72		0.72		0.72		Diperta
		- Avian Influenza	2.63	4.39		7.02		7.02		7.02		7.02		7.02		Diperta
		Produksi Hasil Peternakan			2,060,635,000		1,306,000,000		1,305,000,000		1,325,000,000		1,335,000,000		7,331,635,000	Diperta
		- Susu ( ton )	20.63	20.68		20.73		20.78		20.83		20.89		20.89		Diperta
		- Telur ( ton )	6.655,449	6.755,281		6.856,610		6.959,460		7.063,851		7.169,809		7.169,809		Diperta
		Jumlah populasi ternak														Diperta
		- Ternak Besar (ekor)	142.680	146.220		149.849		153.569		157.383		161.292		161.292		Diperta
		- Ternak Kecil (ekor)	194.802	201.931		209.323		216.987		224.933		233.172		233.172		Diperta
		- Unggas	4.857,126	4.905,698		4.954,755		5.004,302		5.054,345		5.104,889		5.104,889		Diperta
		- Aneka Ternak	36.731	37.098		37.469		37.844		38.118		38.499		38.499		Diperta
	Program Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan Penjualan	Prosentase pengurangan biaya produksi	10%	13.00%	732,600,000	16%	402,600,000	19.00%	432,600,000	22%	462,600,000	25.00%	492,600,000	25.00%	2,523,000,000	Diperta
		Prosentase penyuluh pertanian/ perkebunan yang terlatih	30%	35%	914,014,000	50%	776,500,000	65%	801,500,000	80%	801,500,000	80%	816,500,000	80%	4,110,014,000	Diperta
		Jumlah kelompok tani yang sudah MOU dengan pengusaha hasil bumi	27 Gapoktan, 23 Poktan	35 Gapoktan, 30 Poktan	260,000,000	42 Gapoktan, 37 Poktan	270,000,000	56 Gapoktan, 42 Poktan	280,000,000	67 Gapoktan, 49 Poktan	290,000,000	78 Gapoktan, 56 Poktan	300,000,000	78 Gapoktan, 56 Poktan	1,400,000,000	Diperta
		Prosentase kelompok tani yang menerapkan sistem pertanian terpadu	3%	5%	1,000,000,000	7%	850,000,000	9%	850,000,000	11%	850,000,000	13%	850,000,000	13%	4,400,000,000	
01	01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan														
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan			923,490,000		3,065,000,000		4,005,000,000		4,350,000,000		4,610,000,000		16,953,490,000	Dinas KPP
		- Budidaya (Ton)	11.785	11.820		11.835		11.844		11.858		11.871		11.871		Dinas KPP
		- Non Budidaya (Ton)	656	674		655		666		678		668		668		Dinas KPP
		Jumlah ikan dikonsumsi oleh masyarakat (Kg)	22.45	23.89		25.10		26.35		27.12		28.75		28.75		Dinas KPP
03	01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan														
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan														
		Prosentase ketersediaan pangan utama	302.1	301.1	1,610,000,000	300.1	2,375,000,000	299.1	2,800,000,000	298.1	3,100,000,000	297.1	3,225,000,000	297.1	13,110,000,000	Dinas KPP
		Prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita			350,000,000		750,000,000		840,000,000		855,000,000		900,000,000		3,695,000,000	
		a. Ketersediaan Energi	89.7	91.4		93.1		94.8		96.6		98.3		98.3		
		b. Ketersediaan Protein	1.109	1.022		936.3		850		763.7		677.3		677.3		
07	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
		Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa														
		Prosentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	39%	50%	24,367,600,000	50%	26,810,360,000	75%	29,472,596,000	80%	32,403,853,600	85%	35,651,841,160	85%	148,706,250,760	Dinas PMD
		Prosentase KPMD yang aktif														

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif jumlah kawasan pedesaan yang terbenefit	13%	15%	12,183,800,000	20%	13,405,180,000	25%	14,736,298,000	30%	16,201,926,800	35%	17,825,920,580	35%	74,353,125,380	Dinas FMD
	Program Tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan capaian LKK kategori 'Baik'	57.73%	65%	705,000,000	72%	777,000,000	79%	850,000,000	86%	931,000,000	93%	1,026,000,000	93%	4,289,000,000	Dinas FMD
	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase desa yang Telah Menerapkan Administrasi Keuangan dan Aset Desa yang baik	23%	100%	10,773,800,000	100%	11,851,180,000	100%	13,036,298,000	100%	14,339,926,800	100%	15,773,920,580	100%	65,775,125,380	Dinas FMD

**Sasaran : 4.1.2. Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan**

06	01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan															
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Volume usaha perdagangan	769 M	813 M	3,650,000,000	854M	3,957,000,000	897M	4,340,700,000	942M	4,718,320,000	989M	5,102,472,000	989M	21,768,492,000	Dinas Indag
		Program Pengembangan Pemasaran	Hasil informasi harga bahan pokok yang dilaporkan	28 Komuditi	28 Komuditi	100,000,000	28 Komuditi	112,000,000	28 Komuditi	117,000,000	28 Komuditi	135,000,000	28 Komuditi	145,000,000	28 Komuditi	609,000,000	Disperindag
		Program Pengembangan Pasar	Omzet Perdagangan	768.70 M	813.75 M	1,375,000,000	854.44 M	1,425,000,000	897.16 M	1,320,000,000	942.02 M	1,584,000,000	989.12 M	1,900,800,000	989.12 M	7,604,800,000	Disperindag
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Pemilik UTPP yang dibina	12.00%	14.00%	1,306,800,000	16.00%	853,700,000	18.00%	1,457,800,000	20.00%	986,550,000	20.00%	1,278,205,000	100%	5,883,055,000	Disperindag
07		Perindustrian															
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil menengah yang terfasilitasi	13.2%	14.40%	4,650,000,000	16.00%	6,725,500,000	16.00%	5,766,750,000	18.00%	6,953,445,000	19.20%	7,747,060,500	19.20%	31,842,755,500	Disperindag
01	01	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro															
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	46.96%	47%	675,000,000	47.25%	700,000,000	47.50%	725,000,000	47.75%	750,000,000	48%	800,000,000	48%	3,650,000,000	Dinasaker UKM
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUM	2.24%	2.25%	1,040,000,000	2.50%	1,100,000,000	3.00%	1,125,000,000	3.25%	1,150,000,000	3.50%	1,200,000,000	3.50%	5,615,000,000	Dinasaker UKM
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi permodalan	40 org	40 org	115,000,000	45 org	125,000,000	50 org	140,000,000	60 org	160,000,000	70 org	180,000,000	70 org	720,000,000	Dinasaker UKM

**Sasaran : 4.1.3. Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat**

01	01	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro																
01	01	08	Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase penganggur/ setengah penganggur yang ditempatkan	41.79%	42%	865,000,000	45%	925,000,000	47%	1,100,000,000	50%	1,250,000,000	53%	1,500,000,000	53%	5,640,000,000	Dinasaker UKM

**Sasaran : 4.1.4. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif**

07	01	Dinas Penanaman Modal Perikanan Ternadu Satu Pintu															
		Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi Penanaman Modal	Persentase investor yang menanamkan investasinya di daerah	100%	100%	395,000,000	100%	425,000,000	100%	452,500,000	100%	482,750,000	100%	515,975,000	100%	2,271,225,000	DPMPSTP
			Persentase Peluang Investasi	100%	100%	700,000,000	100%	277,500,000	100%	305,250,000	100%	355,250,000	100%	369,302,000	100%	2,007,302,000	DPMPSTP

**MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA, SEKTOR PRODUKTIF LAINNYA BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG DIDUKUNG KEBANGGAAN TERHADAP KESENIAN, KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL**

**Tujuan : 5.1 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN LAPANGAN USAHA PARIWISATA DAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH YANG DIDUKUNG KESADARAN UNTUK MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN SENI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL**

**Sasaran : 5.1.1. Meningkatnya daya saing pariwisata**

02	01	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan															
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pariwisata	2.00%	2.10%	750,000,000	2.20%	848,500,000	2.30%	938,100,000	2.40%	1,039,160,000	2.50%	1,157,076,000	2.60%	4,732,836,000	Dinas Paparorabud
			Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	5%	5%	750,000,000	5%	848,500,000	5%	938,100,000	5%	1,039,160,000	5%	1,157,076,000	5%	4,732,836,000	Dinas Paparorabud
			Jumlah kemitraan pariwisata yang terjalin	10 lembaga	13 lembaga	125,000,000	15 lembaga	144,500,000	17 lembaga	165,300,000	20 lembaga	191,360,000	22 lembaga	215,846,000	25 lembaga	842,006,000	Dinas Paparorabud
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata berbasis potensi lokal	6 OW	10 OW	1,860,000,000	15 OW	11,491,000,000	18 OW	1,097,000,000	21 OW	760,000,000	25 OW	511,000,000	25 OW	15,719,000,000	Dinas Paparorabud

**Sasaran : 5.1.2. Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.**

02	01	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan															
----	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode 2023		
				Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Nilai dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah nilai budaya (tradisi) yang dikembangkan Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah penyelenggaraan even seni dan budaya	22 tradisi 26% 60 even	23 27% 62	1,370,000,000 860,000,000 2,359,000,000	24 28% 64	1,474,000,000 4,910,000,000 2,840,000,000	25 29% 66	1,631,000,000 3,705,000,000 3,684,000,000	26 30% 68	1,679,000,000 2,610,000,000 6,571,000,000	27 31% 70	1,790,000,000 1,465,000,000 4,195,000,000	27 31% 114	7,944,000,000 13,550,000,000 19,649,000,000	Dinas Parporabud Dinas Parporabud Dinas Parporabud
<b>MISI 6 : INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN BERKUALITAS SEBAGAI PENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MEMPERHATKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA</b>																
<b>Tujuan : 6.1 MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG HANDEL, BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN BERKELANJUTAN</b>																
<b>Sasaran : 6.1.1. Meningkatkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal</b>																
03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
03 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
	Program pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnyanya	Panjang Jalan dan Jembatan yang terbangun Panjang saluran drainase/gorong- gorong yang terbangun Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun Persentase Panjang jalan dan Jembatan yang terpelihara	1153,48 km 294 m 6 km 48.94%	1242,78 km 300 m 9 km 60.00%	52,459,500,000 5,500,000,000 6,171,000,000 74,546,592,648	1332,08 km 350 m 14 km 67.00%	58,508,690,000 6,000,000,000 6,294,420,000 76,037,524,501	1421,39 km 400 m 19 km 75.00%	64,678,863,800 6,500,000,000 6,420,308,400 77,558,274,991	1510,69 km 450 m 24 km 80.00%	65,972,441,076 7,000,000,000 6,548,714,568 79,109,440,491	1600,00 km 500 m 29 km 85.00%	67,291,889,898 7,500,000,000 6,679,688,859 80,691,629,301	1600,00 km 500 m 29 km 85.00%	308,911,384,774 32,500,000,000 32,114,131,827 387,943,461,933	Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR
	Program peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa konstruksi	Persentase peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa konstruksi dalam kondisi baik	75.00%	75.00%	625,657,800	75.00%	638,170,956	75.00%	650,934,375	75.00%	663,953,063	75.00%	677,232,124	75.00%	3,255,948,318	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan pengairan dalam kondisi baik Persentase Jumlah sungai, waduk, dan bendung dalam kondisi baik Penurunan luas genangan	60.77% 43.42% 27 ha	61.99% 45.59% 22 ha	29,504,520,000 3,801,000,000 9,282,000,000	63.23% 47.87% 18 ha	30,094,610,400 3,991,050,000 9,467,640,000	64.49% 50.27% 14 ha	30,696,502,608 4,190,602,500 9,656,992,800	65.78% 52.78% 10 ha	31,310,432,660 4,400,132,625 9,850,132,656	67.10% 55.42% 5 ha	31,936,641,313 4,620,139,256 10,047,135,309	67.10% 55.42% 5 ha	153,542,706,982 21,002,924,381 48,303,900,765	Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR
	Program Tata Bangunan	Jumlah fasilitas umum dalam kondisi baik Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	29 unit 51 unit	39 unit 54 unit	11,628,000,000 6,013,920,000	46 unit 71 unit	11,860,560,000 6,134,198,400	49 unit 74 unit	12,097,771,200 6,256,882,368	54 unit 79 unit	12,339,726,624 6,382,020,015	59 unit 84 unit	12,586,521,156 6,509,660,416	59 unit 84 unit	60,512,578,980 31,296,681,199	Dinas PUPR Dinas PUPR
	Program Tata Ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang Persentase Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	79.43% 10.00%	82.00% 30.00%	636,000,000 1,000,000,000	84.00% 20.00%	728,720,000 1,000,000,000	86.00% 15.00%	828,294,400 1,000,000,000	88.00% 10.00%	934,860,288 1,000,000,000	90.00% 15.00%	1,048,557,494 1,000,000,000	90.00% 100.00%	4,176,432,182 5,000,000,000	Dinas PUPR Dinas PUPR
	Program pendataan, perencanaan, dan pengendalian teknis dan pengadaan tanah	Persentase realisasi pengadaan tanah yang terupdate Persentase database infrastruktur yang terupdate	65.00% 33.33%	100% 50.00%	3,000,000,000 600,000,000	100% 66.67%	3,000,000,000 1,200,000,000	100.00% 83.33%	3,000,000,000 1,800,000,000	100.00% 100.00%	3,000,000,000 2,400,000,000	100.00% 100.00%	3,000,000,000 2,600,000,000	100.00% 100.00%	15,000,000,000 8,600,000,000	Dinas PUPR Dinas PUPR
04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
04 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan															
	Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan	Pelayanan Penyediaan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan														Dinas PRKPP
		Pelayanan air minum pelayanan air limbah domestik kelompok HIPHAM Pelayanan jalan lingkungan Pelayanan drainase lingkungan Pelayanan Pemukiman	842699 jiwa 581689 jiwa 72 HIPHAM 2,071.15 Km 297.785 jiwa 4 makam	851547 jiwa 598500 jiwa 79 2076.15 297790 2 makam	1,800,000,000 700,000,000 100,000,000 1,175,000,000 1,800,000,000 400,000,000	860489 jiwa 615796 jiwa 86 2,081 297,795 4 makam	1,900,000,000 800,000,000 100,000,000 1,200,000,000 1,900,000,000 400,000,000	869524 jiwa 633593 jiwa 93 2,086 297,800 6 makam	2,000,000,000 800,000,000 100 1,300,000,000 1,900,000,000 400,000,000	878654 jiwa 651904 jiwa 100 2,091 297,805 8 makam	2,000,000,000 900,000,000 100 1,400,000,000 1,900,000,000 400,000,000	887880 jiwa 670744 jiwa 107 2,096 297,810 10 makam	2,000,000,000 1,000,000,000 100 1,500,000,000 1,900,000,000 400,000,000	887880 jiwa 670744 jiwa 107 2,096 297,810 10 makam	9,700,000,000 4,200,000,000 500,000,000 6,575,000,000 9,500,000,000 2,000,000,000	Dinas PRKPP Dinas PRKPP Dinas PRKPP Dinas PRKPP Dinas PRKPP Dinas PRKPP
	Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah layak huni dan terlindungi Ketersediaan rumah akibat bencana alam/ sosial Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung FSU	87.21% 30% 77 Perumahan	88.96% 30% 82%	15,000,000,000 900,000,000 1,300,000,000	90.71% 60% 87%	15,000,000,000 950,000,000 1,400,000,000	92.46% 90% 92%	15,000,000,000 1,000,000,000 1,400,000,000	94.21% 120% 97%	15,000,000,000 1,000,000,000 1,400,000,000	95.96% 150% 102%	15,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000	95.96% 150% 102%	75,000,000,000 4,850,000,000 7,000,000,000	Dinas PRKPP Dinas PRKPP Dinas PRKPP
	Peningkatan Kinerja UPTD	UPTD dengan tingkat kinerja baik	100%	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	750,000,000	Dinas PRKPP
09 01	Dinas Perhubungan															
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pelayanan transportasi terlaksana dengan optimal	100%	100%	1,198,000,000	100%	1,198,000,000	100%	1,198,000,000	100%	1,198,000,000	100%	1,198,000,000	100%	5,990,000,000	Dishub
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan wajib uji yang lulus uji	83.92%	84%	600,000,000	84%	600,000,000	84%	600,000,000	84%	600,000,000	84%	600,000,000	84%	3,000,000,000	Dishub
	Program Pengendalian dan Penguasaan Lalu Lintas	Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik	51%	61%	4,050,000,000	71%	4,050,000,000	80%	4,050,000,000	90%	4,050,000,000	100%	4,050,000,000	100%	20,250,000,000	Dishub
	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik	0.848	0.8784	3,475,000,000	0.9088	2,745,000,000	0.9392	2,745,000,000	0.9696	2,745,000,000	100%	2,745,000,000	100%	14,455,000,000	Dishub
<b>Sasaran : 6.1.2. Meningkatkan ketepatan pemanfaatan ruang daerah</b>																
03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Target	Rp			
				Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)			
03 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
	Program Tata Ruang	Presentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	79.43%	82.00%	636,000,000	84.00%	728,720,000	86.00%	828,294,400	88.00%	934,860,288	90.00%	1,048,557,494	90.00%	4,176,432,182	Dinas PUFR		
		Persentase Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	10.00%	30.00%	1,000,000,000	20.00%	1,000,000,000	15.00%	1,000,000,000	10.00%	1,000,000,000	15.00%	1,000,000,000	100.00%	5,000,000,000			
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																	
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	% kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan RTRW	100%	100%	1,100,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	3,500,000,000	Bappeda		
<b>Sasaran : 6.1.3. Meningkatkan kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam</b>																		
05 01	Dinas Lingkungan Hidup																	
	Program Pengendalian pencemaran , perusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :			5,291,375,000		5,761,125,000		5,789,362,500		6,055,136,875		6,351,643,719		29,248,643,094	Dinas LH		
		Indeks Kualitas Air	66	67		68		69		70		71		71				
		Indeks Kualitas Udara	82.4	82.9		83.4		83.9		84.4		84.9		84.9				
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74.86	75.01		75.26		75.51		75.76		76.01		76.01				
	Program Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan hidup	80%	80%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	80%	1,300,000,000	80%	1,375,000,000	80%	1,425,000,000	80%	6,200,000,000	Dinas LH		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,limbah B3 dan peningkatan kapasitas masyarakat	Persentase Penanganan dan Pengurangan timbulan sampah dan limbah B3	80%	85	7,870,000,000	85%	6,688,500,000	85%	7,022,925,000	85%	7,374,071,250	85%	7,742,774,813	85%	36,698,271,063	Dinas LH		
<b>Sasaran : 6.1.4. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana</b>																		
01 05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	
	Program peningkatan kapasitas kesiapsiagaan, pencegahan dan migas bencana	Prosentase pemenuhan fasilitas kesiapsiagaan , pencegahan dan mitigasi bencana	635,000,000	100%	1,185,000,000	100%	1,210,000,000	100%	1,235,000,000	100%	1,260,000,000	100%	1,285,000,000	100%	6,175,000,000	BPBD		
	Program peningkatan kapasitas tanggap darurat penanggulangan bencana	cakupan penanganan penanggulangan bencana dan korban terdampak	1,190,000,000	100%	1,080,000,000	100%	1,105,000,000	100%	1,130,000,000	100%	1,155,000,000	100%	1,180,000,000	100%	5,650,000,000	BPBD		
	Program peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana	cakupan penanganan Pasca Bencana	20,000,000	100%	130,000,000	100%	135,000,000	100%	140,000,000	100%	145,000,000	100%	150,000,000	100%	700,000,000	BPBD		



## BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

### 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada BAB III Gambaran Keuangan Daerah telah dimuat hasil analisis kinerja keuangan daerah periode 2014 – 2023 serta proyeksi pengelolaan keuangan daerah periode 2019 – 2023, yaitu: 1) proyeksi APBD; 2) proyeksi kapasitas riil keuangan daerah; 3) rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah.

Proyeksi kapasitas riil hasil analisis tersebut, selanjutnya menjadi pertimbangan penggunaan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang digambarkan dalam tabel berikut:



Tabel 7.1  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2019 – 2023  
Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.194.875.825.463	1.256.842.742.881	1.325.608.492.462	1.401.506.751.267	1.484.887.167.831
I	Prioritas I					
	1. Belanja Rutin	98.275.306.415	103.371.917.851,16	109.027.714.852,75	115.270.141.455,98	122.127.955.307,61
	2. Pemenuhan SPM	424.102.235.619	446.096.410.788,80	470.503.723.674,24	497.442.607.659,37	527.037.164.949,82
II	Prioritas II					
	Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati	667.127.629.809	701.725.235.570,77	740.118.791.246,10	782.494.596.684,78	829.047.868.990,94
III	Prioritas III					
	Belanja Tak Terduga	5.370.653.620	5.649.178.670,27	5.958.262.688,92	6.299.405.466,87	6.674.178.582,63



## 7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Penyusunan program Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

1. Mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD.
2. Mampu mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Gambaran program Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk beserta indikasi alokasi anggaran belanja langsung program disajikan pada tabel berikut:

**BAB VII**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Nganjuk**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	01	Pendidikan																	
1	01	01	Dinas Pendidikan																
1	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79%	78.60%	1,130,876,440	78.65%	1,189,524,823	79.00%	1,254,607,401	79.20%	1,326,440,463	79.50%	1,405,354,930	79.50%	6,306,804,058	Diadik	
1	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	80.10%	606,184,700	80.20%	637,622,045	80.30%	672,508,317	80.40%	711,013,057	80.50%	753,313,648	80.50%	3,380,641,767	Diadik	
1	01	01	06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara	80%	85.00%	50,000,000	90.00%	52,593,050	95.00%	55,470,578	100.00%	58,646,569	100.00%	62,135,653	100.00%	278,845,851		
1	01	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100.00%	242,300,000	100.00%	254,865,920	100.00%	268,810,422	100.00%	284,201,273	100.00%	301,109,376	100.00%	1,351,286,992	Diadik	
1	01	01	07	Program Peningkatan Kinerja Satuan Pendidikan	79%	78.60%	2,529,382,400	78.65%	2,660,558,701	79.00%	2,806,126,087	79.20%	2,966,791,989	79.50%	3,143,296,563	79.50%	14,106,155,740	Diadik	
1	01	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	81%	81.50%	20,225,472,950	81.75%	21,274,386,203	82.00%	22,438,373,601	82.25%	23,723,091,899	82.50%	25,134,459,545	82.50%	112,795,784,198	Diadik	
1	01	01	18	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal	78%	78.00%	10,321,400,000	78.20%	10,856,678,125	78.50%	11,450,680,528	78.70%	12,106,293,946	79.00%	12,826,538,662	79.00%	57,561,591,262	Diadik	
				Presentase Anak yang Bersekolah PAUD	52%	52.50%		52.80%		53.00%		53.20%		53.50%		100.00%	Diadik		
				Presentase Satuan Pendidikan AUD yang Memiliki Akreditasi >B	22%	22.50%		23.00%		23.50%		24.00%		24.50%		100.00%	Diadik		
				Presentase Peserta Didik Non Formal yang Tuntas Mengikuti Pendidikan Kesetaraan	66%	66.45%		66.75%		67.00%		67.25%		67.50%		67.50%	Diadik		
				Presentase Satuan Pendidikan Non Formal yang Memiliki Akreditasi >B	25%	30.00%		35.00%		40.00%		45.00%		50.00%		50.00%	Diadik		
1	01	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50%	50.25%	25,224,350,000	50.45%	26,532,510,015	50.75%	27,984,185,613	51.00%	29,586,431,656	51.25%	31,346,629,382	51.25%	140,674,106,666	Diadik	
1	01	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	73%	80.00%	94,944,169,200	81.00%	99,868,068,759	83.00%	105,332,159,351	87.00%	111,362,995,406	90.00%	117,988,359,814	90.00%	529,495,752,530	Diadik	
1	02			Kesehatan															
1	02	01	01	Dinas Kesehatan															
1	02	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	78.53%	78.6%	1,117,138,500	78.65%	1,175,073,917	79.98%	1,239,365,841	79.99%	1,310,326,242	80%	1,388,282,019	80%	6,230,186,519	Dinkes
1	02	01	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65%	70%	1,586,560,500	75%	1,668,840,400	80%	1,760,147,814	85%	1,860,925,801	90%	1,971,638,623	90%	8,848,113,138	Dinkes
1	02	01	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	97%	98.12%	50,000,000	99.12%	52,593,027	100%	55,470,555	100%	58,646,544	100%	62,135,627	100%	278,845,753	Dinkes
1	02	01	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80%	80.50%	50,000,000	81.00%	52,593,027	81.50%	55,470,555	82%	58,646,544	82.50%	62,135,627	82.50%	278,845,753	Dinkes
1	02	01	06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	20,000,000	100%	21,037,211	100%	22,188,222	100%	23,458,618	100%	24,854,251	100%	111,538,301	Dinkes
				Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan															
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1.09	> 2	250,000,000	> 2	262,965,137	> 2	277,352,773	> 2	293,232,720	> 2	310,678,134	> 2	1,394,228,764	Dinkes	
				Persentase ketersediaan item obat yang tersedia di farmasi	50%	50%	250,000,000	50%	262,965,137	52%	277,352,773	54%	293,232,720	54%	310,678,134	54%	1,394,228,764	Dinkes	
				Persentase Produk Alkes dan PKRT yang berkualitas sesuai standar selama periode tertentu	50%	50%	200,000,000	50%	210,372,110	50%	221,882,218	51%	234,586,176	51%	248,542,507	51%	1,115,383,011	Dinkes	
				Rasio Puskesmas per satuan penduduk	> 1	> 1	11,434,999,744	> 1	12,028,025,119	> 1	12,686,115,535	> 1	13,412,464,292	> 1	14,210,417,536	> 1	63,772,022,226	Dinkes	
				Program Pembiayaan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	830,600,000	100%	873,675,373	100%	921,476,852	100%	974,236,387	100%	1,032,197,033	100%	4,632,185,645	Dinkes	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Terakreditasi	60%	80%	13,596,540,160	100%	14,301,664,210	100%	15,084,152,445	100%	15,947,801,790	100%	16,896,590,909	100%	75,826,749,514	Dinkes	
				Persentase Penyehat Tradisional yang memiliki STPT (Surat Tandaftar Penyehat Tradisional)	11.80%	20%	69,260,000	30%	72,851,862	40%	76,837,812	50%	81,237,193	60%	86,070,270	60%	386,257,137	Dinkes	
				Program Penguatan Kesehatan Masyarakat	20%	30%	8,431,103,000	40%	8,868,344,638	50%	9,353,559,173	60%	9,889,101,046	70%	10,477,437,394	70%	47,019,545,251	Dinkes	
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	65.14%	80%	279,700,000	80%	294,205,396	80%	310,302,282	80%	328,068,767	80%	347,586,696	80%	1,559,863,141	Dinkes	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	49%	48%	304,300,000	47%	320,081,165	46%	337,593,795	45%	356,922,866	44%	378,157,425	43%	1,697,055,251	Dinkes	
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC	100%	100%	98,200,000	100%	103,292,706	100%	108,944,169	100%	115,181,812	100%	122,034,371	100%	547,653,058	Dinkes	
		Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam	100%	100%	694,385,000	100%	730,396,188	100%	770,358,420	100%	814,465,608	100%	862,920,945	100%	3,872,526,160	Dinkes	
		Program Peningkatan Kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase Puskesmas dengan tingkat kinerja baik	20%	25%	6,943,229,000	40%	7,303,308,674	50%	7,702,895,256	75%	8,143,927,688	90%	8,628,437,722	90%	38,721,798,341	Dinkes
		Program Jaminan Kesehatan Nasional	Prosentase Puskesmas yang memenuhi standar pelayanan	20%	25%	43,618,026,000	40%	45,880,080,816	50%	48,390,321,787	70%	51,160,929,540	90%	54,204,667,726	90%	243,254,025,870	Dinkes
		Program Pembiayaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	65%	68%	4,834,100,000	80%	5,084,799,084	90%	5,363,004,152	95%	5,670,065,158	90%	6,007,396,673	90%	26,959,365,067	Dinkes
			Prosentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memiliki peralatan kesehatan sesuai standar	50%	50%	4,642,877,279	55%	4,883,659,448	60%	5,150,859,545	65%	5,445,774,124	70%	5,769,761,800	75%	25,892,932,196	Dinkes
1	02	RSUD Neanitik															
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Presentase SPM yang memenuhi target	87	88	125,000,000,000	90	127,000,000,000	92	130,000,000,000	93	132,500,000,000	95	135,000,000,000	95	135,000,000,000	RSUD Njk
			Persentase Penduduk yang memanfaatkan Rumah sakit	15	15.5		16		16.5		17		17.5		17.5	RSUD Njk	
			Indeks Kemauan Masyarakat	79.89	>80		>80		>80		>80		>80		>80	RSUD Njk	
		Program Pembiayaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan perawatan kesehatan bagi penderita akibat demam berdarah	0	80	5,000,000,000	82	5,500,000,000	85	6,000,000,000	85	6,500,000,000	85	7,000,000,000	85	7,000,000,000	RSUD Njk
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD) beserta jaringannya	Terwujudnya sarana dan prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	11,055,492,000	80	18,000,000,000	82	26,500,000,000	82	28,100,000,000	85	29,200,000,000	85	31,400,000,000	85	31,400,000,000	RSUD Njk
			Tersedianya alat kesehatan dan alat kedokteran sesuai standar (DAK)	11,055,492,000	17 Alkes/Alked	7,000,000,000	20 Alkes/Alked	9,000,000,000	22 Alkes/Alked	9,500,000,000	24 Alkes/Alked	10,000,000,000	25 Alkes/Alked	11,000,000,000	25 Alkes/Alked	11,000,000,000	RSUD Njk

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		Pembangunan gedung (DAU/APBD)	0	1 Gedung	11,000,000,000	1 Gedung	8,000,000,000	2 Gedung	8,500,000,000	2 Gedung	9,000,000,000	2 Gedung	9,500,000,000	2 Gedung	9,500,000,000	RSUD Njk			
		Pengadaan alat kesehatan/ke-dokteran (DAU/APBD)	0	0	18 Alkes/Alked	9,000,000,000	20 Alkes/Alked	9,500,000,000	22 Alkes/Alked	9,500,000,000	25 Alkes/Alked	10,000,000,000	25 Alkes/Alked	10,000,000,000	RSUD Njk				
		Perbaikan sarana dan prasarana		10 Paket	500,000,000	12 Paket	600,000,000	14 Paket	700,000,000	16 Paket	900,000,000	16 Paket	900,000,000	16 Paket	900,000,000	RSUD Njk			
1	02	03	RSUD Kertosono																
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Persentase SPM yang memenuhi target	60,000,000,000	80%	63,000,000,000	85%	70,000,000,000	90%	80,000,000,000	95%	90,000,000,000	100%	100,000,000,000	100%	403,000,000,000	RSUD Kts		
			Persentase Penduduk yang memanfaatkan Rumah sakit	47,000	108.054 org		110.075 org	115.100 org		120.050 org		125.075 org		125.075 org					
			Indeks Kemasyarakatan	80%	80%	80%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%				
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Persentase alat kesehatan dan alat kedokteran sesuai standart.	5,000,000,000.00	75%	5,000,000,000	80%	5,259,302,750	85%	5,547,055,452	90%	5,864,654,391	95%	6,213,562,682	95%	27,884,575,275	RSUD Kts		
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD) beserta jaringannya	Persentase alat kesehatan dan alat kedokteran sesuai standar (DAK)	6,449,387,000.00	75%	20,000,000,000	80%	21,037,210,999	85%	22,188,221,809	90%	23,458,617,563	95%	24,854,250,729	95%	111,538,301,100	RSUD Kts		
			Persentase Peralatan Kantor (DAU/APBD)	1,126,000,000	95%	3,162,000,000	100%	3,325,983,059	100%	3,507,957,868	100%	3,708,807,437	100%	3,929,457,040	100%	17,634,205,404	RSUD Kts		
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	B	B	1,529,953,000	B	1,533,693,001	B	1,537,473,000	B	5,010,209,000	B	1,545,143,000	B	11,156,471,001	Dinas PUPR
1	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	100%	100%	1,490,370,600	100%	1,511,092,600	100.00%	1,532,850,600	100.00%	1,555,695,600	100.00%	1,579,684,600	100.00%	7,669,694,000	Dinas PUPR
1	03	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100.00%	6,000,000	100.00%	6,000,000	100.00%	6,000,000	100.00%	30,000,000	Dinas PUPR
1	03	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	baik	baik	50,000,000	baik	50,000,000	baik	50,000,000	baik	50,000,000	baik	50,000,000	baik	250,000,000	Dinas PUPR
1	03	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100.00%	35,000,000	100.00%	35,000,000	100.00%	35,000,000	100.00%	175,000,000	Dinas PUPR
			Program pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan sebelumnya	Panjang Jalan dan Jembatan yang terbangun	1153,48 km	1242,78 km	52,459,500,000	1332,08 km	58,508,690,000	1421,39 km	64,678,863,800	1510,69 km	65,972,441,076	1600,00 km	67,291,889,898	1600,00 km	308,911,384,774	Dinas PUPR	
				Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	294 m	300 m	5,500,000,000	350 m	6,000,000,000	400 m	6,500,000,000	450 m	7,000,000,000	500 m	7,500,000,000	500 m	32,500,000,000	Dinas PUPR	
				Panjang turap/ralud/bronjong yang terbangun	6 km	9 km	6,171,000,000	14 km	6,294,420,000	19 km	6,420,308,400	24 km	6,548,714,568	29 km	6,679,688,859	29 km	32,114,131,827	Dinas PUPR	
				Persentase Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara	48.94%	60.00%	74,546,592,648	67.00%	76,037,524,501	75.00%	77,558,274,991	80.00%	79,109,440,491	85.00%	80,691,629,301	85.00%	387,943,461,933	Dinas PUPR	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Panjang jalan yang terpelihara	-	8,000 meter	3,143,194,000	6,000 meter	4,000,000,000	6,000 meter	4,000,000,000	6,000 meter	4,000,000,000	6,000 meter	4,000,000,000	6,000 meter	19,143,194,000	Dinas PUPR	
			Program peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa konstruksi	Persentase peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa konstruksi dalam kondisi baik	75.00%	75.00%	625,657,800	75.00%	638,170,956	75.00%	650,934,375	75.00%	663,953,063	75.00%	677,232,124	75.00%	3,255,948,318	Dinas PUPR	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan pengairan dalam kondisi baik	60.77%	61.99%	29,504,520,000	63.23%	30,094,610,400	64.49%	30,696,502,608	65.78%	31,310,432,660	67.10%	31,936,641,313	67.10%	153,542,706,982	Dinas PUPR	
				Persentase Jumlah sumbu, waduk, dan bendung dalam kondisi baik	43.42%	45.59%	3,801,000,000	47.87%	3,991,050,000	50.27%	4,190,602,500	52.78%	4,400,132,625	55.42%	4,620,139,256	55.42%	21,002,924,381	Dinas PUPR	
			Program Tata Bangunan	Pemurnaan luas penanaman	27 ha	22 ha	9,282,000,000	18 ha	9,467,640,000	14 ha	9,656,992,800	10 ha	9,850,132,656	5 ha	10,047,135,309	5 ha	48,303,900,765	Dinas PUPR	
				Jumlah fasilitas umum dalam kondisi baik	29 unit	39 unit	11,628,000,000	46 unit	11,860,560,000	49 unit	12,097,771,200	54 unit	12,339,726,624	59 unit	12,586,521,156	59 unit	60,512,578,980	Dinas PUPR	
				Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	51 unit	54 unit	6,013,920,000	71 unit	6,134,198,400	74 unit	6,256,882,368	79 unit	6,382,020,015	84 unit	6,509,660,416	84 unit	31,296,681,199	Dinas PUPR	
			Program Tata Ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	79.43%	82.00%	636,000,000	84.00%	728,720,000	86.00%	828,294,400	88.00%	934,860,288	90.00%	1,048,557,494	90.00%	4,176,432,182	Dinas PUPR	
				Persentase Jumlah dokumen rencana tata ruang yang terasah	10.00%	30.00%	1,000,000,000	20.00%	1,000,000,000	15.00%	1,000,000,000	10.00%	1,000,000,000	15.00%	1,000,000,000	100.00%	5,000,000,000	Dinas PUPR	
			Program pendataan, perencanaan, dan pengendalian teknis dan tendangan tanah	Persentase realisasi pengadaaan tanah	65.00%	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100.00%	3,000,000,000	100.00%	3,000,000,000	100.00%	3,000,000,000	100.00%	15,000,000,000	Dinas PUPR	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1	05	02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	80%	80%	15,000,000	80%	15,000,000	85%	15,000,000	85%	15,000,000	90%	15,000,000	90%	75,000,000	Kesbangpol
				Program Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Persentase masyarakat/lembaga yang meningkatkan wawasan kebangsaannya	80%	80%	450,000,000	80%	485,000,000	80%	520,500,000	80%	556,525,000	80%	593,101,250	80%	2,605,126,250	Kesbangpol
				Program Penguatan Politik dalam Negeri	Persentase organisasi sosial politik yang mendapat bantuan dana hibah dari pemerintah daerah	80%	80%	375,000,000	80%	190,000,000	80%	205,000,000	80%	245,000,000	80%	760,000,000	80%	1,775,000,000	Kesbangpol
				Program Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas	Persentase rekomendasi forum kewaspadaan dini yang ditindaklanjuti	80%	80%	305,000,000	80%	318,750,000	80%	333,187,500	80%	348,455,750	80%	384,262,000	80%	1,689,655,250	Kesbangpol
				Program Penanganan Konflik dan Kewaspadan Nasional	Persentase konflik sosial yang tertangani	80%	80%	857,000,000	80%	982,000,000	80%	1,087,000,000	80%	1,187,000,000	80%	1,287,000,000	80%	5,400,000,000	Kesbangpol
1	06			Sosial															
1	06	01		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
1	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78.88%	80%	528,750,000	85%	556,171,266	85%	586,601,114	85%	620,187,202	85%	657,084,254	85%	2,948,793,835	Dinas PPPA
1	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80.00%	80%	980,400,000	85%	1,031,244,083	85%	1,087,666,633	85%	1,149,941,433	85%	1,218,355,371	85%	5,467,607,520	Dinas PPPA
1	06	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	90%	80%	9,600,000	85%	10,097,861	85%	10,650,346	85%	11,260,136	85%	11,930,040	85%	53,538,385	Dinas PPPA
1	06	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	80	82	100,000,000	85	105,186,055	88	110,941,109	89	117,293,088	90	124,271,254	90	557,691,506	Dinas PPPA
1	06	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	15,000,000	100%	15,777,908	100%	16,641,166	100%	17,593,963	100%	18,640,688	100%	83,653,726	Dinas PPPA
				Program Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan PMKS	84%	85%	8,226,350,000	86%	8,652,973,035	87%	9,126,403,924	88%	9,648,939,930	88%	10,222,988,274	88%	45,877,655,163	Dinas PPPA
				Program Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PSKS yang aktif	75%	80%	900,000,000	85%	946,674,495	85%	998,469,981	85%	1,055,637,790	85%	1,118,441,283	85%	5,019,223,550	Dinas PPPA
				Program Pembiayaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Persentase penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapatkan pelatihan	85.84%	80%	42,000,000	85%	44,178,143	85%	46,595,266	85%	49,263,097	90%	52,193,927	90%	234,230,432	Dinas PPPA
				Program Kesetaraan Gender dan Peran Aktif Masyarakat	Terejadinya keadaan dan kesetaraan gender	90%	90%	1,175,000,000	92%	1,235,936,146	93%	1,303,558,031	95%	1,378,193,782	95%	1,460,187,230	95%	6,552,875,190	Dinas PPPA
				Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	80%	85%	841,000,000	86%	884,614,722	87%	933,014,727	88%	986,434,869	90%	1,045,121,243	90%	4,690,185,561	Dinas PPPA
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan															
2	01			Tenaga Kerja															
2	01	01		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro															
2	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	83%	563,000,000	87%	575,000,000	90%	695,000,000	93%	600,000,000	95%	6,500,000,000	95%	8,933,000,000	Disnaker KUM
2	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	83%	745,000,000	85%	765,000,000	90%	775,000,000	93%	780,000,000	95%	790,000,000	95%	3,855,000,000	Disnaker KUM
2	01	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	95%	96%	12,000,000	97%	15,000,000	98%	18,000,000	99%	21,000,000	99%	21,000,000	99%	87,000,000	Disnaker KUM
2	01	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	85	85	100,000,000	85	100,000,000	85	100,000,000	85	100,000,000	85	100,000,000	85	500,000,000	Disnaker KUM
2	01	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%	92%	25,000,000	93%	25,000,000	95%	25,000,000	97%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	125,000,000	Disnaker KUM
2	01	01	08	Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase penganggur/setengah penganggur yang ditempatkan	41.79%	42%	865,000,000	45%	925,000,000	47%	1,100,000,000	50%	1,250,000,000	53%	1,500,000,000	53%	5,640,000,000	Disnaker KUM
2	01	01	09	Program Pembiayaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Persentase masyarakat setengah penganggur / penganggur yang ditempatkan/mendapatkan pelatihan dengan DBHCHT	41.79%	42%	575,000,000	45%	600,000,000	47%	625,000,000	50%	650,000,000	53%	750,000,000	53%	3,200,000,000	Disnaker KUM
2	01	01	10	Program Pembiayaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase kasus perselisihan HI yang diselesaikan di luar pengadilan	100%	100%	520,000,000	100%	550,000,000	100%	580,000,000	100%	600,000,000	100%	625,000,000	100%	2,875,000,000	Disnaker KUM
2	03			Pangan															
2	03	01		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan															
2	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	388,900,000	80%	403,900,000	80%	415,900,000	80%	418,900,000	80%	434,900,000	80%	2,062,500,000	Dinas KPP
2	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	100%	100%	485,500,000	100%	684,000,000	100%	569,000,000	100%	589,000,000	100%	594,000,000	100%	2,921,500,000	Dinas KPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
2	03	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	-	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	#VALUE!	Dinas KPP		
2	03	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	100%	100%	-	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	#VALUE!	Dinas KPP		
2	03	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	95,000,000	Dinas KPP		
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	302.1	301.1	1,610,000,000	300.1	2,375,000,000	299.1	2,800,000,000	298.1	3,100,000,000	297.1	3,225,000,000	297.1	13,110,000,000	Dinas KPP
					Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita			350,000,000		750,000,000		840,000,000		855,000,000		900,000,000		3,695,000,000	Dinas KPP
					a. Ketersediaan Energi	89.7	91.4		93.1		94.8		96.6		98.3		98.3		
					b. Ketersediaan Protein	1.109	1.022		936.3		850		763.7		677.3		677.3		
2	05			Lingkungan Hidup															
2	05	01	01	Dinas Lingkungan Hidup															
2	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	100%	585,245,000	100%	608,479,250	100%	650,581,000	100%	693,970,233	100%	739,937,201	100%	3,278,212,684	Dinas LH
2	05	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	100%	100%	2,093,177,000	100%	1,982,867,000	100%	2,073,000,000	100%	2,074,000,000	100%	2,074,000,000	100%	10,297,044,000	Dinas LH
2	05	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya kualitas kinerja aparatur dengan baik	100%	100%	6,400,000	100%	7,940,000	100%	7,744,000	100%	7,744,000	100%	7,744,000	100%	36,672,000	Dinas LH
2	05	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP-ASN	79	80	50,000,000	80.5	50,000,000	81	50,000,000	81.5	50,000,000	82	50,000,000	82.5	250,000,000	Dinas LH
2	05	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	19,000,000	100%	19,000,000	100%	19,000,000	100%	22,000,000	100%	22,000,000	100%	101,000,000	Dinas LH
				Program Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			5,291,375,000		5,761,125,000		5,789,362,500		6,055,136,875		6,351,643,719		29,248,643,094	Dinas LH
					Indeks Kualitas Air	66	67		68		69		70		71		71		
					Indeks Kualitas Udara	82.4	82.9		83.4		83.9		84.4		84.9		84.9		
					Indeks Kualitas Turunan Lahan	74.86	75.01		75.26		75.51		75.76		76.01		76.01		
				Program Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase ketepatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan hidup	80%	80%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	80%	1,300,000,000	80%	1,375,000,000	80%	1,425,000,000	80%	6,200,000,000	Dinas LH
				Peningkatan Kinerja UPTD	UPTD dengan tingkat kinerja baik	80%	80%	150,000,000	100%	420,000,000	100%	355,000,000	100%	350,000,000	100%	300,000,000	100%	1,575,000,000	Dinas LH
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas masyarakat	Persentase Penanganan dan Pengurangan timbulan sampah dan limbah B3	80%	85	7,870,000,000	85%	6,688,500,000	85%	7,022,925,000	85%	7,374,071,250	85%	7,742,774,813	85%	36,698,271,063	Dinas LH
				Program Pembiayaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Persentase kelengkapan sarana prasarana penujian kualitas lingkungan hidup	30%	50%	600,000,000	60%	500,000,000	70%	500,000,000	75%	500,000,000	80%	500,000,000	85%	2,600,000,000	Dinas LH
2	06			Administrasi Kependudukan dan															
2	06	01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	70.10%	72%	828,000,000	74%	905,700,000	76%	983,900,000	78%	1,063,700,000	80%	1,145,800,000	80%	4,927,100,000	Dispenduk dan Canil
2	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	70%	75%	1,382,000,000	80%	1,645,000,000	80%	1,833,000,000	85%	2,021,000,000	85%	2,159,000,000	85%	9,040,000,000	Dispenduk dan Canil
2	06	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	90%	100%	64,000,000	100%	72,000,000	100%	80,000,000	100%	88,000,000	100%	100,000,000	100%	404,000,000	Dispenduk dan Canil
2	06	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	18,000,000	100%	19,500,000	100%	21,000,000	100%	90,000,000	Dispenduk dan Canil
				Program Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	98%	98.20%	20,000,000	98.50%	25,000,000	98.70%	30,000,000	98.80%	35,000,000	98.90%	40,000,000	98.90%	150,000,000	Dispenduk dan Canil
				Program Pelayanan Pencatatan Sipil															
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan		75%	25,000,000	76%	28,000,000	77%	31,000,000	78%	34,000,000	79%	37,000,000	79%	155,000,000	Dispenduk dan Canil
				Program Penataan Administrasi Kependudukan															
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	07	01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	07	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	69,68	69,68	296,000,000	70	325,000,000	71	350,000,000	72	390,000,000	73	430,000,000	73	1,791,000,000	Dinas FMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
2	07	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	100%	100%	402,000,000	100%	440,000,000	100%	480,000,000	100%	530,000,000	100%	580,000,000	100%	2,432,000,000	Dinas FMD
2	07	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	762,000,000	100%	762,000,000	100%	80,010,000	100%	84,010,500	100%	88,211,025	100%	1,776,231,525	Dinas FMD
2	07	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	83	83	50,000,000	84	52,500,000	85	55,125,000	86	57,881,250	87	60,775,313	87	276,281,563	Dinas FMD
2	07	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	15,000,000	100%	17,000,000	100%	19,000,000	100%	21,000,000	100%	23,000,000	100%	95,000,000	Dinas FMD
				Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif, Persentase KPMD yang aktif	39%	50%	24,367,600,000	50%	26,810,360,000	75%	29,472,596,000	80%	32,403,853,600	85%	35,651,841,160	85%	148,706,250,760	Dinas FMD
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	13%	15%	12,183,800,000	20%	13,405,180,000	25%	14,736,298,000	30%	16,201,926,800	35%	17,825,920,580	35%	74,353,125,380	Dinas FMD
				Program Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan capaian IKK kategori "Baik"	57.73%	68%	705,000,000	72%	777,000,000	79%	850,000,000	86%	931,000,000	93%	1,026,000,000	93%	4,289,000,000	Dinas FMD
				Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase penurunan audit PKPT Desa	0.23%	100%	10,773,800,000	100%	11,851,180,000	100%	13,036,298,000	100%	14,339,926,800	100%	15,773,920,580	100%	65,775,125,380	Dinas FMD
				Program Pembiayaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyatek) yang terfasilitasi		1 lembaga	20,000,000	5 lembaga	125,000,000	5 lembaga	125,000,000	5 lembaga	125,000,000	5 lembaga	125,000,000	21 lembaga	520,000,000	Dinas FMD
2	08	01		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2	08	01	01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	77.51	80.00%	552,300,000	81.00%	607,530,000	82.00%	668,283,000	83.00%	735,110,300	84.00%	808,622,430	84.00%	3,371,845,730	Dinas PPKB
2	08	01	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	99.00%	99.00%	1,464,500,000	99.00%	2,017,050,000	99.00%	1,822,145,000	99.00%	1,999,399,500	99.00%	2,194,374,450	99.00%	9,497,468,950	Dinas PPKB
2	08	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	99.00%	100.00%	31,400,000	100.00%	34,540,000	100.00%	37,994,000	100.00%	41,793,400	100.00%	45,972,740	100.00%	191,700,140	Dinas PPKB
2	08	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	85	85	24,300,000	87	26,730,000	89	29,403,000	91	32,343,300	93	35,577,630	93	148,353,930	Dinas PPKB
2	08	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00%	100.00%	15,000,000	100.00%	16,500,000	100.00%	18,150,000	100.00%	19,965,000	100.00%	21,961,500	100.00%	91,576,500	Dinas PPKB
				Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak	Persentase pasangan usia subur yang seharusnya KB tapi belum KB (unmet need)	10.20	11.75%	8,686,300,000	11.70%	9,554,930,000	11.65%	10,510,423,000	11.60%	11,561,465,300	11.50%	12,717,611,830	11.50%	53,030,730,130	Dinas PPKB
				Program Keluarga Berencana	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MK-IP)	23.20	26.19%	831,000,000	26.95%	2,001,740,000	27.65%	2,201,914,000	28.29%	2,422,105,400	28.87%	2,664,315,940	28.87%	10,121,075,340	Dinas PPKB
				Program Ketahanan Keluarga	Menurutnya Persentase Pernikahan dibawah usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria	11.81	11.60%	1,125,000,000	11.50%	1,382,500,000	11.40%	1,513,500,000	11.30%	1,657,237,500	11.20%	1,814,968,125	11.20%	7,493,205,625	Dinas PPKB
2	09	01		Perhubungan															
2	09	01	01	Dinas Perhubungan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	baik	baik	15,474,145,800	baik	17,021,560,380	baik	18,723,716,418	baik	20,596,088,060	baik	22,655,696,866	baik	94,471,207,524	Dishub
2	09	01	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	100%	100%	955,000,000	100%	1,050,500,000	100%	1,155,550,000	100%	1,271,105,000	100%	1,398,215,500	100%	5,830,370,500	Dishub
2	09	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	140,000,000	100%	154,000,000	100%	169,400,000	100%	186,340,000	100%	204,974,000	100%	854,714,000	Dishub
2	09	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	baik	baik	-	baik	39,000,000	baik	39,000,000	baik	39,000,000	baik	39,000,000	baik	156,000,000	Dishub
2	09	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	16,000,000	100%	17,600,000	100%	19,360,000	100%	21,296,000	100%	23,425,600	100%	97,681,600	Dishub
				Program Peningkatan Pelayanan angkutan	Pelayanan transportasi terfasilitasi dengan optimal	100%	100%	1,198,000,000	100%	1,198,000,000	100%	1,198,000,000	100%	1,198,000,000	100%	1,198,000,000	100%	5,990,000,000	Dishub
				Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor yang lulus uji	Jumlah Kendaraan wajib uji yang lulus uji	83.92%	84%	600,000,000	84%	600,000,000	84%	600,000,000	84%	600,000,000	84%	600,000,000	84%	3,000,000,000	Dishub
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Perengkapan Jalan yang berfungsi baik	51%	61%	4,050,000,000	71%	4,050,000,000	80%	4,050,000,000	90%	4,050,000,000	100%	4,050,000,000	100%	20,250,000,000	Dishub
				Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	Persentase Perengkapan Jalan yang berfungsi baik	0.848	0.8784	3,475,000,000	0.9088	2,745,000,000	0.9392	2,745,000,000	0.9696	2,745,000,000	100%	2,745,000,000	100%	14,455,000,000	Dishub
2	10			Komunikasi dan Informatika															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD	2023									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
2	10	01	Dinas Komunikasi dan Informatika																
2	10	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	420,450,000	12 bulan	455,737,500	12 bulan	523,873,125	12 bulan	602,229,094	12 bulan	692,338,458	12 bulan	2,694,628,177	Dinas Kominfo	
2	10	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	303,000,000	1 tahun	318,150,000	1 tahun	630,647,500	1 tahun	292,484,000	1 tahun	336,706,600	1 tahun	1,880,988,100	Dinas Kominfo	
2	10	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43 Pegawai	42 Pegawai	4,800,000	42 Pegawai	5,520,000	42 Pegawai	6,348,000	42 Pegawai	7,300,200	42 Pegawai	8,395,230	42 Pegawai	32,363,430	Dinas Kominfo	
2	10	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	10 lap	10 lap	19,500,000	10 lap	22,425,000	10 lap	25,788,750	10 lap	29,657,063	10 lap	34,105,622	10 lap	131,476,434	Dinas Kominfo	
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah implementasi Sistem Informasi	22	27	7,270,000,000	30	5,203,500,000	33	8,809,025,000	36	6,480,378,750	38	4,569,935,563	38	32,332,839,313	Dinas Kominfo
				Program penyelenggaraan pengamanan informasi Pemerintah	persentase sistem informasi yang diretas	18%	15%	75,000,000	12%	80,000,000	10%	85,000,000	7%	90,000,000	5%	95,000,000	5%	425,000,000	Dinas Kominfo
				Program pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	1. Meningkatnya keterbukaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi	7 media	8 Media		9 media		10 Media		10 media		10 media		10 media		Dinas Kominfo
					2. Ditindaklanjuti laporan masyarakat yang dikelola melalui sistem informasi	0	70%	730,000,000	80%	802,000,000	90%	885,850,000	100%	1,002,190,000	100%	1,125,433,800	100%	4,545,473,800	Dinas Kominfo
					3. Jumlah OPD yang mengisi Daftar Informasi Publik pada tahun	8	20 OPD		52 OPD		52 OPD		52 OPD		52 OPD		52 OPD		Dinas Kominfo
				Program sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai	Jumlah media sarana sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	0	4 media	1,620,000,000	4 media	1,766,000,000	5 media	1,960,900,000	5 media	2,177,535,000	5 media	2,419,165,250	5 media	9,943,600,250	Dinas Kominfo
2	11			Koperasi, Usaha Kecil, dan															
2	11	01		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro															
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	67.66%	68%	675,000,000	67.85	700,000,000	67.95	725,000,000	68.10	750,000,000	68.15	800,000,000	68.15	3,650,000,000	Disnaker KUM
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUM	2.24%	2.25%	1,040,000,000	2.50%	1,100,000,000	3.00%	1,125,000,000	3.25%	1,150,000,000	3.50%	1,200,000,000	3.50%	5,615,000,000	Disnaker KUM
					Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi operasional	40 org	40 org	115,000,000	45 org	125,000,000	50 org	140,000,000	60 org	160,000,000	70 org	160,000,000	70 org	700,000,000	Disnaker KUM
2	12			Penanaman Modal															
2	12	01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
2	12	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80.1	532,000,000	80.20%	576,000,000	80.30%	593,000,000	80.40%	616,500,000	80.50%	638,500,000	80.50%	2,976,000,000	DPMPPTSP
2	12	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	82%	1,114,000,000	85%	1,780,779,000	87%	449,000,000	89%	460,000,000	92%	465,000,000.0	92%	4,268,779,000	DPMPPTSP
2	12	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	97%	97.5%	23,200,000	98%	9,600,000	98.5%	9,600,000	99%	9,600,000	100%	9,600,000	100%	61,600,000	DPMPPTSP
2	12	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP-ASN	80.33%	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	9600%	180,000,000	100%	840,000,000	DPMPPTSP
2	12	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20,000,000	100%	27,000,000	100%	27,000,000	100%	31,000,000	100%	31,000,000	100%	136,000,000	DPMPPTSP
				Program Peningkatan Promosi dan Bidm Investasi Penanaman Modal	Persentase investor yang menanamkan investasinya di daerah	70%	73%	175,000,000	75%	275,000,000	77%	302,500,000	79%	332,750,000	80%	365,975,000	80%	1,451,225,000	DPMPPTSP
					Persentase Peluang Investasi	70%	75%	700,000,000	80%	777,500,000	85%	305,250,000	90%	335,250,000	95%	369,302,000	95%	2,487,302,000	DPMPPTSP
				Program pengawasan/Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal	Jumlah izin terbit usaha dan non usaha	65 pelaku usaha	82 pelaku usaha	190,000,000	135 pelaku usaha	190,000,000	150 pelaku usaha	210,000,000	160 pelaku usaha	225,000,000	170 pelaku usaha	240,000,000	170 pelaku usaha	1,055,000,000	DPMPPTSP
				Program Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perizinan	Jumlah izin terbit usaha dan non usaha	3200	3400	449,200,000	3600	529,600,000	3800	549,600,000	4000	574,600,000	4200	599,600,000	4200	2,702,600,000	DPMPPTSP
					Persentase pelaku usaha yang mendapatkan informasi perizinan	100%	100%	112,600,000	100%	215,000,000	100%	235,000,000	100%	245,000,000	100%	255,000,000	100%	1,062,600,000	DPMPPTSP
2	13			Kemudahan dan Olah Raga															
2	13	01		Dinas Pariwisata, Kepemanduan, Olahraga dan Kebudayaan															
				Program Peningkatan Pemasaran Kepemanduan dan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang dibina	60.87%	69.57%	725,000,000	78.26%	800,000,000	82.61%	855,000,000	91.30%	925,000,000	100%	990,000,000	100%	4,295,000,000	Dinas Pariwisata
					Persentase organisasi kependudukan yang aktif	64%	71%	225,000,000	79%	300,000,000	86%	350,000,000	93%	400,000,000	100%	440,000,000	100%	1,715,000,000	Dinas Pariwisata
					Persentase wirasaha muda	16 Kelompok wirasaha muda (@ 15 orang)	26 Kelompok wirasaha muda (@ 15 orang)	450,000,000	36 wirasaha muda (@ 15 orang)	500,000,000	46 wirasaha muda (@ 15 orang)	650,000,000	56 wirasaha muda (@ 150 orang)	800,000,000	66 wirasaha muda (@ 20 orang)	950,000,000	100%	3,350,000,000	Dinas Pariwisata
					Prosentase kasus kenakalan remaja yang tertangani	100%	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	90,000,000	100%	350,000,000	Dinas Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		Persentase peningkatan prestasi olahraga dan pemuda	42%	50%	950,000,000	58%	1,150,000,000	67%	1,350,000,000	75%	1,550,000,000	83%	1,700,000,000	100%	6,700,000,000	Dinas Parporabud			
2	14	Statistik																	
2	14	01	Dinas Komunikasi dan Informatika																
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terpenuhiya kebutuhan data statistik sektoral	2 buku	2 buku	270,000,000	3 buku	300,000,000	3 buku	300,000,000	3 buku	300,000,000	3 buku	300,000,000	3 buku	1,470,000,000	Dinas Kominfo		
2	16	Kebudayaan																	
2	16	01	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan																
		Program Pengembangan Nilai dan Penelelaan Keragaman Budaya	Jumlah nilai budaya (tradisi) yang dikembangkan	22 tradisi	23	1,370,000,000	24	1,474,000,000	25	1,631,000,000	26	1,679,000,000	27	1,790,000,000	27	7,944,000,000	Dinas Parporabud		
			Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	26%	27%	860,000,000	28%	4,910,000,000	29%	3,705,000,000	30%	2,610,000,000	31%	1,465,000,000	31%	13,550,000,000	Dinas Parporabud		
			Jumlah penyelenggaraan even seni dan budaya	60 even	66	2,359,000,000	72	2,840,000,000	78	3,684,000,000	85	6,571,000,000	89	4,195,000,000	114	19,649,000,000	Dinas Parporabud		
2	17	Perpustakaan																	
2	17	01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																
		Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan terarah	93.36%	10%	937,900,000	10%	1,210,000,000	10%	1,085,000,000	10%	1,140,000,000	10%	1,210,000,000	50%	5,582,900,000	Dinas Arpus		
2	18	Kearsipan																	
2	18	01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																
2	18	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	68%	69%	625,800,000	70%	657,800,000	72%	708,800,000	74%	760,800,000	75%	3,582,000,000	Dinas Arpus		
2	18	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	83%	84%	860,000,000	85%	2,125,000,000	86%	2,435,000,000	87%	2,460,000,000	88%	8,620,000,000	Dinas Arpus		
2	18	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	95%	95%	56,500,000	95%	27,500,000	95%	46,000,000	95%	43,500,000	95%	180,000,000	Dinas Arpus		
2	18	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	81.20%	81.40%	50,000,000	81.60%	50,000,000	81.80%	60,000,000	82%	60,000,000	82%	285,000,000	Dinas Arpus		
2	18	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	171,000,000	100%	171,000,000	100%	171,000,000	100%	196,000,000	100%	905,000,000	Dinas Arpus		
		Program Penyusunan Profil Dinas	Jumlah buku hasil penyusunan	100 buku	100 buku	50,000,000	100 buku	55,000,000	100 buku	60,000,000	100 buku	65,000,000	100 buku	70,000,000	100 buku	300,000,000	Dinas Arpus		
		Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rata-rata nilai Audit kearsipan perangkat daerah	61%	63%	187,600,000	65%	212,600,000	67%	237,600,000	69%	260,000,000	71%	290,000,000	71%	1,187,800,000	Dinas Arpus		
		Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	28.288 Dokume arsip terselamatkan dengan baik	30%	36%	330,000,000	42%	360,000,000	48%	385,000,000	54%	410,000,000	60%	430,000,000	60%	1,915,000,000	Dinas Arpus		
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana arsip daerah	Persentase Arsip dalam kondisi baik	100%	100%	167,000,000	100%	175,000,000	100%	195,000,000	100%	210,000,000	100%	225,000,000	100%	972,000,000	Dinas Arpus		
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kearsipan	75%	76%	220,000,000	77%	235,000,000	78%	250,000,000	79%	265,000,000	79%	280,000,000	79%	1,250,000,000	Dinas Arpus		
3	Urusan Pilihan																		
3	01	Kelautan dan Perikanan																	
3	01	01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan																
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan			923,490,000		3,065,000,000		4,005,000,000		4,350,000,000		4,610,000,000		16,953,490,000	Dinas KPP		
			- Budidaya (Ton)	11.785	11.820		11.835		11.844		11.858		11.871		11.871				
			- Non Budidaya (Tn)	656	674		655		666		678		668		668				
			Jumlah ikan dikonsumsi oleh masyarakat (Kil)	22.45	23.89		25.10		26.35		27.12		28.75		28.75				
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi kelompok pembudidaya ikan	0	0		25 Kelompok pembudidaya ikan	200,000,000	25 Kelompok pembudidaya ikan	250,000,000	25 Kelompok pembudidaya ikan	250,000,000	25 Kelompok pembudidaya ikan	250,000,000	25 Kelompok pembudidaya ikan	950,000,000	Dinas KPP		
3	02	Pariwisata																	
3	02	01	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan																
3	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83.7	83.9	1,040,000,000	84.2	1,250,000,000	84.5	1,650,000,000	84.8	1,740,000,000	85.2	1,940,000,000	85.5	7,620,000,000	Dinas Parporabud
3	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75%	78%	1,250,000,000	81%	1,390,000,000	85%	1,460,000,000	87%	1,710,000,000	90%	1,980,000,000	92%	7,790,000,000	Dinas Parporabud
3	02	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	92%	93%	295,000,000	94%	308,000,000	95%	348,000,000	96%	364,000,000	97%	385,000,000	98%	1,700,000,000	Dinas Parporabud
3	02	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	80.5	80.7	125,000,000	80.9	175,000,000	81.1	225,000,000	81.3	275,000,000	81.5	325,000,000	81.7	1,125,000,000	Dinas Parporabud
3	02	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	85%	88%	30,000,000	90%	45,000,000	92%	60,000,000	94%	75,000,000	96%	90,000,000	98%	300,000,000	Dinas Parporabud

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pariwisata Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Jumlah kemitraan pariwisata yang terialin	2.00%	2.10%	750,000,000	2.20%	848,500,000	2.30%	938,100,000	2.40%	1,039,160,000	2.50%	1,157,076,000	2.60%	4,732,836,000	Dinas Parparabud			
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata berbasis potensi lokal	5%	5%	750,000,000	5%	848,500,000	5%	938,100,000	5%	1,039,160,000	5%	1,157,076,000	5%	4,732,836,000	Dinas Parparabud			
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata yang terialin	10 lembaga	13 lembaga	125,000,000	15 lembaga	144,500,000	17 lembaga	165,300,000	20 lembaga	191,360,000	22 lembaga	215,846,000	25 lembaga	842,006,000	Dinas Parparabud			
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	6 OW	10 OW	1,860,000,000	15 OW	11,491,000,000	18 OW	1,097,000,000	21 OW	760,000,000	25 OW	511,000,000	25 OW	15,719,000,000	Dinas Parparabud			
			-	-	-	-	-	1	5,000,000,000	-	-	1	5,000,000,000		#VALUE!	Dinas Parparabud			
3	03	Pertanian																	
3	03	01	Dinas Pertanian																
3	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	86.36	86.5	537,080,000	86.55	569,010,000	86.6	550,235,000	86.65	551,235,000	86.7	2,759,795,000	Diperta		
3	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75%	78%	1,167,810,000	81%	2,167,230,000	84%	1,482,230,000	87%	1,502,230,000	90%	1,532,230,000	90%	7,851,730,000	Diperta
3	03	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	95%	97%	50,000,000	98%	57,000,000	99%	58,000,000	100%	59,000,000	100%	60,000,000	100%	284,000,000	Diperta
3	03	01	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	82	82.2	100,000,000	82.4	100,000,000	82.6	100,000,000	82.8	100,000,000	83	100,000,000	83	500,000,000	Diperta
3	03	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	85%	90%	5,000,000	95%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	31,000,000	Diperta
				Program Perencanaan, Penyusunan Data, Monitoring dan Evaluasi Pertanian	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	75.31	77.50	605,000,000	79.50	300,000,000	81.50	200,000,000	83.50	200,000,000	85.50	292,000,000	85.50	1,597,000,000	Diperta
				Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :			4,648,728,000		4,275,000,000		5,360,000,000		6,445,000,000		7,445,000,000		28,173,728,000	Diperta
					Padi	623,147.62 (ton)	0.89%		0.89%		0.88%		0.87%		0.86%		0.86%	Diperta	
					Jagung	200,293.77 (ton)	3.41%		3.49%		3.37%		3.26%		3.14%		3.14%	Diperta	
					Kedelai	21,460.47 (ton)	2.20%		2.23%		2.18%		2.14%		2.09%		2.09%	Diperta	
					Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	50%	65%	239,000,000	70%	247,000,000	75%	260,000,000	80%	277,000,000	85%	297,000,000	85%	1,320,000,000	Diperta
				Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura :			658,760,000		840,000,000		860,000,000		880,000,000		905,000,000		4,143,760,000	Diperta
					- Bawang merah	1,464,414 (kw)	62.04%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%	Diperta	
					- Cabe rawit	57,262,25 (kw)	0.50%		0.50%		0.50%		0.50%		0.50%		0.50%	Diperta	
				Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan :			250,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		1,450,000,000	Diperta
					- Tebu	16,314.05 (ton)	0.70%		0.80%		0.92%		1.00%		1.10%		1.10%	Diperta	
				Program Peningkatan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	- Produksi tanaman Cengkeh (ton)	473	484		497	525,000,000	503	530,000,000	510	535,000,000	517	540,000,000	517	2,130,000,000	Diperta
					Produktivitas tanaman cengkeh (Kg/Ha)	806	822		839		856		873		891		891		
				Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)	- Produksi tanaman tembakau (ton)	357	392	758,684,100	411	1,071,326,600	441	1,063,004,000	463	995,714,750	504	1,008,314,750	504	4,897,044,200	Diperta
					Produktivitas tembakau (Kg/Ha)	726	740		754		769		784		800		800		Diperta
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Deteksi penyakit menular ternak			200,000,000		300,000,000		330,000,000		332,000,000		335,000,000		1,497,000,000	Diperta
					- Brucella	0.14	0.14		0.18		0.18		0.22		0.22		0.22		
					- Antrax	-	0.03		0.07		0.07		0.11		0.11		0.11		
					- Helintiasis	0.36	0.36		0.36		0.72		0.72		0.72		0.72		
					- Avian Influenza	2.63	4.39		7.02		7.02		7.02		7.02		7.02		
					Produksi Hasil Peternakan			2,060,635,000		1,306,000,000		1,305,000,000		1,325,000,000		1,335,000,000		7,331,635,000	Diperta
					- Susu (ton)	20.63	20.68		20.73		20.78		20.83		20.89		20.89		
					- Telur (ton)	6,655,449	6,755,281		6,856,610		6,959,460		7,063,851		7,169,809		7,169,809		
					Jumlah populasi ternak														
					- Ternak Besar (ekor)	142,680	146,220		149,849		153,569		157,383		161,292		161,292		
					- Ternak Kecil (ekor)	194,802	201,931		209,323		216,987		224,933		233,172		233,172		
					- Unggas	4,857,126	4,905,698		4,954,755		5,004,302		5,054,345		5,104,889		5,104,889		
					- Anca Ternak	36,731	37,098		37,469		37,844		38,118		38,499		38,499		
				Program Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan Penjualan	Persentase pengurangan biaya produksi	10%	13.00%	732,600,000	16%	402,600,000	19.00%	432,600,000	22%	462,600,000	25.00%	492,600,000	25.00%	2,523,000,000	Diperta

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Presentase penyuluh pertanian/perkebunan yang terlatih	30%	35%	914,014,000	50%	776,500,000	65%	801,500,000	80%	801,500,000	80%	816,500,000	80%	4,110,014,000	Diperta	
		Jumlah kelompok tani yang sudah MOU dengan pengusaha hasil bumi	27 Gapoktan, 23 Poktan	35 Gapoktan, 30 Poktan	260,000,000	42 Gapoktan, 37 Poktan	270,000,000	56 Gapoktan, 42 Poktan	280,000,000	67 Gapoktan, 49 Poktan	290,000,000	78 Gapoktan, 56 Poktan	300,000,000	78 Gapoktan, 56 Poktan	1,400,000,000	Diperta	
		Presentase kelompok tani yang menerapkan sistem pertanian terpadu	3%	5%	1,000,000,000	7%	850,000,000	9%	850,000,000	11%	850,000,000	13%	850,000,000	13%	4,400,000,000	Diperta	
3	06	Perdagangan															
3	06	01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Volume usaha perdagangan	769 M	813 M	3,650,000,000	854M	3,957,000,000	897M	4,340,700,000	942M	4,718,320,000	989M	5,102,472,000	989M	21,768,492,000	Disperindag
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Pemilik UTTP yang dibina	12.00%	14.00%	1,306,800,000	16.00%	853,700,000	18.00%	1,457,800,000	20.00%	986,550,000	20.00%	1,278,205,000	100%	5,883,055,000	Disperindag
		Program Pengembangan Pasar	Omzet Perdagangan	768,70 M	813,75 M	1,375,000,000	854,44 M	1,425,000,000	897,16 M	1,320,000,000	942,02 M	1,584,000,000	989,12 M	1,900,800,000	989,12 M	7,604,800,000	Disperindag
		Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal (DBHCHT)	Jumlah Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	10 Kali	10 Kali	100,000,000	10 Kali	120,000,000	10 Kali	144,000,000	10 Kali	172,800,000	10 Kali	207,360,000	10 Kali	744,160,000	Disperindag
3	07	Perindustrian															
3	07	01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	76.00	77.00	712,000,000	78.00	831,000,000	79.00	792,200,000	80.00	1,166,940,000	80.00	1,368,348,000	80.00	4,870,488,000	Disperindag
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	100%	100%	4,252,898,700	100%	4,653,642,500	100%	5,949,044,100	100%	7,162,428,100	100%	9,036,608,900	100%	31,054,622,300	Disperindag
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	134,913,000	100%	196,815,600	100%	158,642,000	100%	9,583,200	100%	142,541,520	100%	642,495,320	Disperindag
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP-ASN	76.00	77.00	324,500,000	78.00	356,950,000	79.00	392,645,000	80.00	431,999,500	80.00	475,100,450	80.00	1,981,104,950	Disperindag
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	221,000,000	100%	277,000,000	100%	283,000,000	100%	339,000,000	100%	405,000,000	100%	1,525,000,000	Disperindag
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil menengah yang terfasilitasi	13.2%	14.40%	4,650,000,000	16.00%	6,725,500,000	16.00%	5,766,750,000	18.00%	6,953,445,000	19.20%	7,747,060,500	19.20%	31,842,755,500	Disperindag
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	Persentase IKM dilindungi industri rokok yang dilatih	12.00%	12.800%	300,000,000	13.60%	330,000,000	14.40%	363,000,000	15.20%	399,300,000	16.00%	439,230,000	16.00%	1,831,530,000	Disperindag
		Program Pembinaan Industri (DBHCHT)	Persentase IKM yang dibina	3.20%	4.00%	150,000,000	4.80%	175,000,000	5.60%	204,500,000	6.40%	239,350,000	7.20%	280,565,000	7.20%	1,049,415,000	Disperindag
3	08	Transmigrasi															
		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Transmigrasi															
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	1 KK	5 KK	445,000,000	8 KK	475,000,000	10 KK	500,000,000	12 KK	550,000,000	15 KK	600,000,000	15 KK	2,570,000,000	Disnaker KUM
4	01	Urusan Pemerintahan Fungsi Perencanaan															
4	01	03	Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	Baik	5,608,000,000	Baik	5,769,000,000	Baik	5,848,020,000	Baik	5,979,000,000	Baik	6,084,000,000	Baik	29,288,020,000	Asisten Administrasi Umum
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	1,400,000,000	80%	1,400,000,000	80%	1,400,000,000	80%	1,400,000,000	80%	1,400,000,000	80%	7,000,000,000	Asisten Administrasi Umum
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IKM pelayanan kerumah tangga	Baik	Baik	1,400,000,000	Baik	1,400,000,000	Baik	1,400,000,000	Baik	1,400,000,000	Baik	1,400,000,000	Baik	7,000,000,000	Asisten Administrasi Umum
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	-	Baik	385,000,000	Baik	415,000,000	Baik	415,000,000	Baik	415,000,000	Baik	415,000,000	Baik	2,045,000,000	Asisten Administrasi Umum
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SKP-ASN	-	Baik	380,000,000	Baik	380,000,000	Baik	380,000,000	Baik	380,000,000	Baik	380,000,000	Baik	1,900,000,000	Asisten Administrasi Umum
		Program Pembinaan, Fasilitas, dan Koordinasi bidang Pemerintahan	Persentase aspek penilaian LPPD dengan kategori sangat baik	-	Baik	286,000,000	Baik	385,000,000	90%	360,000,000	90%	360,000,000	90%	360,000,000	90%	1,751,000,000	Asisten Administrasi Umum
		Program Pembinaan, Fasilitas, dan Koordinasi bidang Pertanian	Persentase penyelesaian permasalahan pertanian	Sangat Baik	Sangat Baik	392,000,000	Sangat Baik	430,000,000	Sangat Baik	430,000,000	Sangat Baik	430,000,000	Sangat Baik	430,000,000	Sangat Baik	2,112,000,000	Asisten Pemerintahan dan Kepra
				80%	80%	65,000,000	80%	150,000,000	80%	150,000,000	80%	150,000,000	80%	150,000,000	80%	665,000,000	Asisten Pemerintahan dan Kepra

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		Program Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi bidang Kewilayahan dan Kerjasama	Persentase rumusan kebijakan administrasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	450,000,000	100%	510,000,000	100%	510,000,000	100%	510,000,000	100%	510,000,000	100%	2,490,000,000	Asisten Pemerintahan dan Kepra			
		Program Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang kesejahteraan rakyat	100%	9,637,000,000	100%	10,107,000,000	100%	10,452,000,000	100%	10,842,000,000	100%	11,162,000,000	100%	52,200,000,000	Asisten Pemerintahan dan Kepra			
		Program Penyusunan dan Penelitian Produk Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi	90%	610,000,000	90%	690,000,000	90%	690,000,000	90%	690,000,000	90%	690,000,000	90%	3,370,000,000	Asisten Pemerintahan dan Kepra			
			Persentase rancangan peraturan desa yang telah dievaluasi	90%	610,000,000	90%	690,000,000	90%	690,000,000	90%	690,000,000	90%	690,000,000	90%	3,370,000,000	Asisten Pemerintahan dan Kepra			
			Persentase rancangan peraturan desa yang diklarifikasi	90%	610,000,000	90%	690,000,000	90%	690,000,000	90%	690,000,000	90%	690,000,000	90%	3,370,000,000	Asisten Pemerintahan dan Kepra			
		Program Peminaan/Penyuluhan hukum	Persentase sosialisasi di bidang hukum yang dilaksanakan dengan baik	-	325,000,000	90%	325,000,000	90%	325,000,000	90%	325,000,000	90%	325,000,000	90%	1,625,000,000	Asisten Pemerintahan dan Kepra			
		Program penerapan/penegakan hukum	Persentase bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang diberikan	-	639,000,000	70%	900,000,000	70%	900,000,000	70%	900,000,000	70%	900,000,000	70%	4,239,000,000	Asisten Pemerintahan dan Kepra			
		Program Fasilitasi/koordinasi bidang administrasi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditetapkan	-	740,000,000	86%	770,000,000	87%	800,000,000	88%	830,000,000	90%	860,000,000	90%	4,000,000,000	Asisten Ekonomi dan Pembangunan			
		Program Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai (DBHCHT)	Persentase penyerapan anggaran DBHCHT	80%	600,000,000	80%	620,000,000	85%	640,000,000	85%	660,000,000	95%	680,000,000	95%	3,200,000,000	Asisten Ekonomi dan Pembangunan			
		Program Fasilitasi/koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang sumber daya alam	Persentase rumusan kebijakan pengelolaan di bidang SDA yang ditetapkan	80%	350,000,000	86%	360,000,000	88%	370,000,000	90%	380,000,000	92%	390,000,000	92%	1,850,000,000	Asisten Ekonomi dan Pembangunan			
		Program Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perencanaan yang ditetapkan	80%	650,000,000	86%	685,000,000	88%	720,000,000	90%	755,000,000	92%	790,000,000	92%	3,600,000,000	Asisten Ekonomi dan Pembangunan			
		Program Fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Bagian Layanan Pengadaan	100%	485,000,000	100%	595,000,000	100%	720,000,000	100%	800,000,000	100%	830,000,000	100%	3,430,000,000	Asisten Ekonomi dan Pembangunan			
			Level maturitas/ kematangan ULP pada level 3	Level 2	485,000,000	Level 2	595,000,000	Level 3	720,000,000	Level 3	800,000,000	Level 3	830,000,000	Level 3	3,430,000,000	Asisten Ekonomi dan Pembangunan			
		Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	nilai aspek pelaporan kinerja dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	-	Baik	350,000,000	Baik	350,000,000	Baik	350,000,000	Baik	350,000,000	Baik	1,750,000,000	Asisten Administrasi Umum				
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan	persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	1,375,000,000	Asisten Administrasi Umum				
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kehumasan dan keprotokolan	IKM pelayanan kehumasan dan keprotokolan	-	Baik	3,035,000,000	Baik	3,100,000,000	Baik	3,005,000,000	Baik	3,125,000,000	Baik	3,240,000,000	15,505,000,000	Asisten Administrasi Umum			
		Program Koordinasi Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	Persentase OPD yang nilai SKM ≥ Baik	Baik	100%	380,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	100%	380,000,000	100%	1,900,000,000	Asisten Administrasi Umum				
4	01	04	Sekretariat DPRD	45,317,921,181															
4	01	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ISKM	70%	72%	2,352,261,000	74%	2,552,261,000	76%	2,552,261,000	78%	2,552,261,000	80%	2,552,261,000	80%	12,561,305,000	Set DPRD
4	01	04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	65%	67%	5,161,820,000	69%	2,561,820,000	71%	2,561,820,000	73%	2,561,820,000	75%	2,561,820,000	75%	15,409,100,000	Set DPRD
4	01	04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	3,250,000,000	Set DPRD		
4	01	04	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	80	81	1,105,577,500	82	1,105,577,500	83	1,105,577,500	84	1,105,577,500	85	1,105,577,500	85	5,527,887,500	Set DPRD
4	01	04	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20,500,000	100%	20,500,000	100%	20,500,000	100%	20,500,000	100%	102,500,000	Set DPRD		
4	01	04	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase AKD yang terfasilitasi	100%	100%	35,877,926,000	100%	35,517,926,000	100%	35,517,926,000	100%	35,517,926,000	100%	177,949,630,000	Set DPRD		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
4	01	04	29																
				Penyusunan dan Penelitian Produk Hukum	Persentase produk hukum yang materi muatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	167,647,200	100%	167,647,200	100%	167,647,200	100%	167,647,200	100%	838,236,000	Set DPRD		
4	01	05		Badan Penanggulangan Bencana															
4	01	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	80%	80%	261,800,000	80%	297,500,000	85%	330,700,000	85%	391,400,000	90%	449,600,000	90%	1,731,000,000	BPBD
4	01	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	80%	80%	205,000,000	80%	217,000,000	85%	477,000,000	85%	240,000,000	90%	250,000,000	90%	1,389,000,000	BPBD
4	01	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	1,500,000,000	BPBD
4	01	05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	80%	80%	15,000,000	80%	15,000,000	85%	15,000,000	85%	15,000,000	90%	15,000,000	90%	75,000,000	BPBD
				Program peningkatan kapasitas Kesiapsiagaan, Pencegahan dan mitigasi Bencana	Persentase pemenuhan fasilitas kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi bencana	635,000,000	100%	1,185,000,000	100%	1,210,000,000	100%	1,235,000,000	100%	1,260,000,000	100%	1,285,000,000	100%	6,175,000,000	BPBD
				Program peningkatan kapasitas tanggap darurat penanggulangan bencana	cakupan penanganan penanggulangan bencana dan korban terdampak	1,190,000,000	100%	1,080,000,000	100%	1,105,000,000	100%	1,130,000,000	100%	1,155,000,000	100%	1,180,000,000	100%	5,650,000,000	BPBD
				Program peningkatan kapasitas penanganan pasca bencana	Cakupan penanganan pasca bencana	20,000,000	100%	130,000,000	100%	135,000,000	100%	140,000,000	100%	145,000,000	100%	150,000,000	100%	700,000,000	BPBD
4	01	06		Kecamatan Bagor															
4	01	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	99,410,600	82%	113,335,000	84%	130,390,000	86%	138,820,000	88%	150,230,000	88%	632,185,600	Kec. Bagor
4	01	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	174,480,000	80%	213,900,000	80%	213,760,000	80%	219,425,000	80%	236,450,000	80%	1,058,015,000	Kec. Bagor
4	01	06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	32,200,000	100%	31,600,000	100%	29,600,000	100%	27,600,000	100%	26,300,000	100%	147,300,000	Kec. Bagor
4	01	06	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	12,700,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	100%	14,700,000	100%	15,000,000	100%	69,400,000	Kec. Bagor
4	01	06	28	Program Penyeleenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	67%	70%	329,267,700	73%	401,680,400	75%	415,662,500	78%	427,752,500	74%	441,092,500	76%	2,015,455,600	Kec. Bagor
4	01	06	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	75%	85%	87,444,000	90%	91,504,000	100%	96,352,000	100%	100,392,250	100%	103,047,450	100%	478,739,700	Kec. Bagor
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kedondong	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Kedondong	1	baik	390,000,000	baik	455,000,000	baik	485,000,000	baik	515,000,000	baik	575,000,000	baik	2,420,000,000	Kec. Bagor
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Guyangan	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Guyangan	0	baik	410,000,000	baik	460,000,000	baik	495,000,000	baik	530,000,000	baik	595,000,000	baik	2,490,000,000	Kec. Bagor
4	01	07		Kecamatan Baron															
4	01	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	80,050,000	82%	134,120,000	84%	144,447,000	86%	150,331,700	88%	156,224,900	88%	665,173,600	Kec. Baron
4	01	07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	82,800,000	80%	92,000,000	80%	95,000,000	80%	98,000,000	80%	101,000,000	80%	468,800,000	Kec. Baron
4	01	07	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	21,000,000	100%	22,500,000	100%	104,500,000	Kec. Baron
4	01	07	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	75,000,000	Kec. Baron
4	01	07	28	Program Penyeleenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	40 KOORDINASI	45 KOORDINASI	178,700,000	50 KOORDINASI	202,790,000	55 KOORDINASI	209,140,000	60 KOORDINASI	213,140,000	65 KOORDINASI	214,140,000	65 KOORDINASI	1,017,910,000	Kec. Baron
4	01	07	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	75%	78%	41,500,000	78%	45,900,000	79%	47,990,000	79%	50,289,000	80%	52,817,900	80%	238,496,900	Camat
4	01	08		Kecamatan Bertek															
4	01	08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	150,400,000	82%	165,140,000	84%	181,354,000	86%	199,189,400	88%	218,808,340	88%	914,891,740	Kec. Bertek
4	01	08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	52,000,000	80%	557,200,000	80%	60,620,000	80%	64,782,000	80%	69,210,200	80%	803,812,200	Kec. Bertek

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4	01 08 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	16,950,000	100%	16,950,000	100%	16,950,000	100%	16,950,000	100%	16,950,000	100%	84,750,000	Kec. Berbek
4	01 08 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	75,000,000	Kec. Berbek
4	01 08 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	3,000,000	6 DOKUMEN	9,000,000	6 DOKUMEN	9,500,000	6 DOKUMEN	9,500,000	6 DOKUMEN	9,500,000	6 DOKUMEN	40,500,000	Kec. Berbek
4	01 08 28	Program Penyelesaian Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelesaian pemerintahan kecamatan	40 KOORDINASI	45 KOORDINASI	308,590,000	50 KOORDINASI	315,590,000	55 KOORDINASI	315,590,000	60 KOORDINASI	321,590,000	65 KOORDINASI	322,590,000	65 KOORDINASI	1,583,950,000	Kec. Berbek
4	01 08 29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	50%	75%	87,444,000	90%	91,504,000	100%	96,352,000	100%	100,392,250	100%	103,047,450	100%	478,739,700	Kec. Berbek
4	01 09	Kecamatan Gondane															
4	01 09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83%	84%	95,000,000	85%	104,500,000	86%	114,950,000	87%	126,445,000	88%	139,089,500	83%	579,984,500	Kec. Gondang
4	01 09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	60%	61%	117,600,000	62%	129,360,000	64%	142,296,000	66%	156,525,600	68%	172,178,160	68%	717,959,760	Kec. Gondang
4	01 09 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	90%	91%	14,100,000	92%	15,510,000	93%	17,061,000	94%	18,767,100	95%	20,643,810	95%	86,081,910	Kec. Gondang
4	01 09 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	80	81	15,000,000	82	16,000,000	83	17,000,000	84	18,000,000	85	19,000,000	85	85,000,000	Kec. Gondang
4	01 09 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	1	1	6,500,000	1	7,150,000	1	7,865,000	1	8,651,500	1	9,516,650	1	39,683,150	Kec. Gondang
4	01 09 28	Program Penyelesaian Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelesaian pemerintahan kecamatan	0.9	1	172,380,000	1	189,618,000	1	208,579,800	1	229,437,780	1	252,381,558	1	1,052,397,138	Kec. Gondang
4	01 09 29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	50%	75%	99,200,000	90%	109,120,000	100%	120,032,000	100%	132,035,200	100%	145,238,720	100%	605,625,920	Kec. Gondang
4	01 10	Kecamatan Jatikalen															
4	01 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	75,213,000	82%	76,800,000	84%	78,450,000	86%	80,300,000	88%	82,300,000	90%	393,063,000	Kec. Jatikalen
4	01 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	141,860,000	82%	324,196,000	84%	162,760,000	86%	165,626,000	88%	168,944,000	90%	963,386,000	Kec. Jatikalen
4	01 10 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	80%	80%	25,560,000	82%	26,250,000	84%	26,600,000	86%	26,900,000	88%	27,600,000	90%	132,910,000	Kec. Jatikalen
4	01 10 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	75,000,000	Kec. Jatikalen
4	01 10 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	80%	80%	5,235,000	82%	5,750,000	84%	6,100,000	86%	6,400,000	88%	6,850,000	90%	30,335,000	Kec. Jatikalen
4	01 10 28	Program Penyelesaian Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelesaian pemerintahan kecamatan	50%	80%	235,292,000	82%	242,567,000	84%	246,100,000	86%	250,130,000	88%	255,566,000	90%	1,229,655,000	Kec. Jatikalen
4	01 10 29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	0	80%	27,500,000	82%	28,450,000	84%	29,400,000	86%	30,300,000	88%	31,200,000	90%	139,650,000	Kec. Jatikalen
4	01 11	Kecamatan Kertosono															
4	01 11 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	163,650,000	82%	176,400,000	84%	197,300,000	86%	209,300,000	88%	221,500,000	88%	968,150,000	Kec. Kertosono
4	01 11 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	249,500,000	80%	185,000,000	80%	216,000,000	80%	196,000,000	80%	225,000,000	80%	1,071,500,000	Kec. Kertosono
4	01 11 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	37,500,000	Kec. Kertosono
4	01 11 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	75,000,000	Kec. Kertosono
4	01 11 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	6 dokumen	6 dokumen	7,000,000	6 DOKUMEN	7,500,000	6 DOKUMEN	8,000,000	6 DOKUMEN	8,000,000	6 DOKUMEN	8,000,000	6 DOKUMEN	38,500,000	Kec. Kertosono
4	01 11 28	Program Penyelesaian Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelesaian pemerintahan kecamatan	40 koordinasi	45 koordinasi	333,000,000	50 KOORDINASI	338,500,000	55 KOORDINASI	338,500,000	60 KOORDINASI	346,500,000	65 KOORDINASI	351,500,000	65 KOORDINASI	1,708,000,000	Kec. Kertosono
4	01 11 29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	0	94%	22,500,000	95%	22,500,000	96%	25,000,000	97%	25,000,000	98%	25,000,000	100%	120,000,000	Kec. Kertosono
4	01 12	Kecamatan Lengkon															
4	01 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	82%	119,779,300	84%	145,100,000	86%	150,100,000	88%	154,700,000	90%	159,100,000	92%	728,779,300	Kec. Lengkon

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
4	01	12	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	82%	125,900,000	84%	95,000,000	86%	86,500,000	88%	66,000,000	90%	93,000,000	92%	466,400,000	Kec. Lengkong
4	01	12	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	80%	82%	20,712,500	84%	16,000,000	86%	22,100,000	88%	16,800,000	90%	23,000,000	92%	98,612,500	Kec. Lengkong
4	01	12	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	4,800,000	100%	5,200,000	100%	5,600,000	100%	6,000,000	100%	6,200,000	100%	27,800,000	Kec. Lengkong
4	01	12	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	286,242,000	6 DOKU MEN	291,660,000	6 DOKU MEN	299,860,000	6 DOKU MEN	307,260,000	6 DOKU MEN	320,560,000	6 DOKUMEN	1,505,582,000	Kec. Lengkong
4	01	12	28	Program Penyeleenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	40 KOORDINASI	45 KOORDINASI	219,882,000	50 KOORDINASI	224,460,000	55 KOORDINASI	231,860,000	60 KOORDINASI	238,460,000	65 KOORDINASI	251,360,000	65 KOORDINASI	1,166,022,000	Kec. Lengkong
4	01	12	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	16 desa	16 desa	66,360,000	16 desa	67,200,000	16 desa	68,000,000	16 desa	68,800,000	16 desa	69,200,000	16 desa	339,560,000	Kec. Lengkong
4	01	13	01	Kecamatan Loceret	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	99,410,600	82%	113,335,000	84%	130,390,000	86%	138,820,000	88%	150,230,000	88%	632,185,600	Kec. Loceret
4	01	13	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	174,480,000	80%	213,900,000	80%	213,760,000	80%	219,425,000	80%	236,450,000	80%	1,058,015,000	Kec. Loceret
4	01	13	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	32,200,000	100%	31,600,000	100%	29,600,000	100%	27,600,000	100%	26,300,000	100%	147,300,000	Kec. Loceret
4	01	13	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	12,700,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	100%	14,700,000	100%	15,000,000	100%	69,400,000	Kec. Loceret
4	01	13	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	6,500,000	6 DOKUMEN	6,000,000	6 DOKUMEN	8,000,000	6 DOKUMEN	9,000,000	6 DOKUMEN	9,000,000	6 DOKUMEN	38,500,000	Kec. Loceret
4	01	13	28	Program Penyeleenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	67%	70%	329,267,700	73%	401,680,400	75%	415,662,500	78%	427,752,500	74%	441,092,500	76%	2,015,455,600	Kec. Loceret
4	01	13	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	50%	75%	87,444,000	90%	91,504,000	100%	96,352,000	100%	100,392,250	100%	103,047,450	100%	478,739,700	Kec. Loceret
4	01	14	01	Kecamatan Nganjuk	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	181,450,000	82%	194,950,000	84%	216,550,000	86%	226,450,000	88%	242,750,000	88%	1,062,150,000	Kec. Nganjuk
4	01	14	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	75%	81%	258,500,000	77%	239,000,000	79%	235,000,000	81%	210,000,000	83%	239,000,000	83%	1,181,500,000	Kec. Nganjuk
4	01	14	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	40 Org	45 Org	62,500,000	50 Org	57,500,000	55 Org	52,500,000	60 Org	47,500,000	65 Org	47,500,000	65 Org	267,500,000	Kec. Nganjuk
4	01	14	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	0	35 orang	15,000,000	35 orang	15,000,000	35 orang	15,000,000	35 orang	15,000,000	35 orang	15,000,000	35 orang	75,000,000	Kec. Nganjuk
4	01	14	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	6 Dok	6 Dok	7,000,000	6 Dok	7,500,000	6 Dok	8,000,000	6 Dok	8,000,000	6 Dok	8,000,000	6 Dok	38,500,000	Kec. Nganjuk
4	01	14	28	Program Penyeleenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	67%	70%	390,280,000	72%	394,500,000	74%	401,500,000	76%	407,500,000	78%	409,500,000	77%	2,003,280,000	Kec. Nganjuk
4	01	14	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	50%	75%	65,000,000	90%	67,500,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	352,500,000	Kec. Nganjuk
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Jatirejo	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Jatirejo	78%	baik	555,994,000	baik	561,304,000	baik	566,704,000	baik	572,104,000	baik	577,504,000	baik	2,833,520,000	Kec. Nganjuk
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Ploso	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Ploso	78%	baik	626,710,700	baik	561,710,700	baik	584,710,700	baik	599,710,700	baik	614,710,700	baik	2,987,553,500	Kec. Nganjuk
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kramat	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Kramat	0	baik	470,003,000	baik	475,603,000	baik	481,203,000	baik	486,803,000	baik	492,403,000	baik	2,406,015,000	Kec. Nganjuk
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Payaman	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Payaman	0	baik	569,397,000	baik	673,252,000	baik	744,052,000	baik	774,352,000	baik	734,852,000	baik	3,495,905,000	Kec. Nganjuk
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kartoharjo	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Kartoharjo	78%	baik	720,616,500	baik	821,852,500	baik	941,615,700	baik	1,083,611,540	baik	1,252,286,548	baik	4,819,982,788	Kec. Nganjuk
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Cangkringan	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Cangkringan	0	baik	1,099,382,000	baik	356,044,500	baik	364,744,500	baik	372,744,500	baik	380,244,500	baik	2,573,160,000	Kec. Nganjuk
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Beso	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Beso	78%	baik	605,686,600	baik	429,330,900	baik	444,330,900	baik	459,330,900	baik	462,876,600	baik	2,401,555,900	Kec. Nganjuk
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kauman	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Kauman	0	baik	418,301,855	baik	442,141,000	baik	471,541,000	baik	500,941,000	baik	525,341,000	baik	2,358,265,855	Kec. Nganjuk

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Ganungkidul	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Ganungkidul	0	baik	394,153,000	baik	400,153,000	baik	406,198,000	baik	412,198,000	baik	418,198,000	baik	2,030,900,000	Kec. Nganjuk
	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Mangundikaran	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Mangundikaran	0	baik	512,496,550	baik	561,906,550	baik	601,316,550	baik	645,726,550	baik	675,136,550	baik	2,996,582,750	Kec. Nganjuk
	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Werungotok	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Werungotok	0	baik	687,800,000	baik	737,050,000	baik	794,046,000	baik	861,441,200	baik	866,441,200	baik	3,946,778,400	Kec. Nganjuk
	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Begadung	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Begadung	0	baik	748,511,900	baik	882,482,500	baik	880,845,435	baik	968,908,280	baik	1,016,971,125	baik	4,497,719,330	Kec. Nganjuk
	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Ringianom	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Ringianom	0	baik	405,112,000	baik	434,612,000	baik	450,112,000	baik	469,612,000	baik	482,112,000	baik	2,241,560,000	Kec. Nganjuk
4 01 15	Kecamatan Ngetos															
4 01 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83%	84%	95,000,000	85%	104,500,000	86%	114,950,000	87%	126,445,000	88%	139,089,500	88%	579,984,500	Kec. Ngetos
4 01 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	136,800,000	81%	343,350,000	81%	208,850,000	82%	305,850,000	82%	132,850,000	83%	1,127,700,000	Kec. Ngetos
4 01 15 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	18,550,000	100%	7,500,000	100%	18,550,000	100%	7,500,000	100%	18,550,000	100%	70,650,000	Kec. Ngetos
4 01 15 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	75,000,000	Kec. Ngetos
4 01 15 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	7,000,000	6 DOKUMEN	7,500,000	6 DOKUMEN	8,000,000	6 DOKUMEN	8,000,000	6 DOKUMEN	8,000,000	6 DOKUMEN	38,500,000	Kec. Ngetos
4 01 15 28	Program Penyeenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	40 KOORDINASI	45 KOORDINASI	168,793,600	50 KOORDINASI	242,000,000	55 KOORDINASI	243,000,000	60 KOORDINASI	259,000,000	65 KOORDINASI	269,500,000	65 KOORDINASI	1,182,293,600	Kec. Ngetos
4 01 15 29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	75%	78%	41,500,000	78%	45,900,000	79%	47,990,000	79%	50,289,000	80%	52,817,900	80%	238,496,900	Kec. Ngetos
4 01 16	Kecamatan Ngluyu															
4 01 16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	85%	99,075,000	85%	107,780,000	87%	114,650,000	87%	124,520,000	87%	131,390,000	87%	577,415,000	Kec. Ngluyu
4 01 16 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	97%	97%	103,600,000	97%	112,800,000	97%	112,800,000	97%	112,800,000	97%	112,800,000	97%	554,800,000	Kec. Ngluyu
4 01 16 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	15 orang	15 orang	6,187,500	15 orang	6,187,500	15 orang	6,187,500	15 orang	6,187,500	15 orang	6,187,500	15 orang	30,937,500	Kec. Ngluyu
4 01 16 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	Baik	Baik	47,500,000	Baik	42,500,000	Baik	37,500,000	Baik	32,500,000	Baik	32,500,000	Baik	192,500,000	Kec. Ngluyu
4 01 16 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	95%	95%	6,000,000	95%	6,000,000	95%	6,000,000	95%	6,000,000	95%	6,000,000	95%	30,000,000	Kec. Ngluyu
4 01 16 28	Program Penyeenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	40 KOORDINASI	40 KOORDINASI	173,376,200	45 KOORDINASI	173,376,200	50 KOORDINASI	173,376,200	60 KOORDINASI	173,376,200	60 KOORDINASI	173,376,200	60 KOORDINASI	866,881,000	Kec. Ngluyu
4 01 16 29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	95%	95%	42,500,000	95%	42,500,000	95%	42,500,000	95%	42,500,000	95%	42,500,000	95%	212,500,000	Kec. Ngluyu
4 01 17	Kecamatan Nronggot															
4 01 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	130,200,000	82%	126,800,000	84%	144,400,000	86%	150,400,000	88%	154,400,000	88%	706,200,000	Kec. Nronggot
4 01 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	115,000,000	80%	130,000,000	80%	151,000,000	80%	155,500,000	80%	169,500,000	80%	721,000,000	Kec. Nronggot
4 01 17 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	1,200,000	100%	1,200,000	100%	1,800,000	100%	1,800,000	100%	1,800,000	100%	7,800,000	Kec. Nronggot
4 01 17 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	75,000,000	Kec. Nronggot
4 01 17 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	6,000,000	6 DOKUMEN	6,000,000	6 DOKUMEN	6,000,000	6 DOKUMEN	6,000,000	6 DOKUMEN	6,000,000	6 DOKUMEN	30,000,000	Kec. Nronggot
4 01 17 28	Program Penyeenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	40 KOORDINASI	45 KOORDINASI	309,500,000	45 KOORDINASI	309,500,000	45 KOORDINASI	331,000,000	45 KOORDINASI	331,000,000	45 KOORDINASI	353,500,000	45 KOORDINASI	1,634,500,000	Kec. Nronggot
4 01 17 29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	75%	85%	65,000,000	90%	67,500,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	352,500,000	Kec. Nronggot
4 01 18	Kecamatan Pace															
4 01 18 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85%	85%	89,945,000	87%	98,445,000	90%	98,945,000	92%	99,445,000	95%	99,945,000	95%	486,725,000	Kec. Pace

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
4	01	18	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	85%	85%	128,155,000	87%	128,155,000	90%	178,155,000	92%	128,155,000	95%	690,775,000	Kec. Pace		
4	01	18	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	9,500,000	100%	9,600,000	100%	9,600,000	100%	9,600,000	100%	47,900,000	Kec. Pace		
4	01	18	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	75,000,000	Kec. Pace		
4	01	18	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	85%	85%	3,500,000	87%	7,000,000	90%	7,000,000	92%	8,000,000	95%	33,500,000	Kec. Pace		
4	01	18	28	Program Penyelesaian Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelesaian pemerintahan kecamatan	85%	85%	167,809,760	87%	207,312,000	90%	275,812,000	92%	280,812,000	95%	1,217,557,760	Kec. Pace		
4	01	18	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	75%	85%	65,000,000	90%	67,500,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	352,500,000	Kec. Pace		
4	01	19	01	Kecamatan Patianrowo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	113,900,000	82%	116,178,000	84%	118,501,560	86%	120,871,591	88%	123,289,023	88%	592,740,174	Kec. Patianrowo
4	01	19	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	159,000,000	82%	162,180,000	84%	165,423,600	86%	168,732,072	88%	172,106,713	88%	827,442,385	Kec. Patianrowo
4	01	19	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	9,500,000	100%	9,600,000	100%	9,600,000	100%	9,600,000	100%	47,900,000	Kec. Patianrowo		
4	01	19	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	75,000,000	Kec. Patianrowo		
4	01	19	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	80%	80%	3,500,000	82%	3,570,000	84%	3,641,400	86%	3,714,228	88%	3,788,513	88%	18,214,141	Kec. Patianrowo
4	01	19	28	Program Penyelesaian Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelesaian pemerintahan kecamatan	40 KOORDINASI	45 KOORDINASI	178,700,000	50 KOORDINASI	202,790,000	55 KOORDINASI	209,140,000	60 KOORDINASI	213,140,000	65 KOORDINASI	214,140,000	65 KOORDINASI	1,017,910,000	Kec. Patianrowo
4	01	19	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	75%	78%	41,500,000	78%	45,900,000	79%	47,990,000	79%	50,289,000	80%	52,817,900	80%	238,496,900	Kec. Patianrowo
4	01	20	01	Kecamatan Prambon Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	87,811,000	82%	90,500,000	84%	102,000,000	86%	113,600,000	88%	129,600,000	88%	523,511,000	Kec. Prambon
4	01	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	134,005,000	80%	161,060,000	80%	187,650,000	80%	183,250,000	2 jenis	188,850,000	2 jenis	854,815,000	Kec. Prambon
4	01	20	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	9,500,000	100%	9,600,000	100%	9,600,000	100%	9,600,000	100%	47,900,000	Kec. Prambon		
4	01	20	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	75,000,000	Kec. Prambon		
4	01	20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	80%	80%	3,500,000	82%	3,570,000	84%	3,641,400	86%	3,714,228	88%	3,788,513	88%	18,214,141	Kec. Prambon
4	01	20	28	Program Penyelesaian Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelesaian pemerintahan kecamatan	40 Koordinasi	45 Koordinasi	169,760,000	50 koordinasi	238,300,000	50koordinasi	263,800,000	55 koordinasi	286,300,000	55 koordinasi	308,800,000	55 koordinasi	1,266,960,000	Kec. Prambon
4	01	20	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	100%	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	65,000,000	Kec. Prambon
4	01	21	01	Kecamatan Rejosari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	110,502,900	82%	153,250,000	84%	164,670,000	86%	178,220,000	0.88	185,750,000	0.88	792,392,900	Kec. Rejosari
4	01	21	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	82%	178,980,000	85%	194,000,000	85%	160,500,000	80%	153,500,000	0.85	192,500,000	0.87	879,480,000	Kec. Rejosari
4	01	21	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	61,440,000	100%	61,440,000	100%	61,440,000	100%	61,440,000	100%	307,200,000	Kec. Rejosari		
4	01	21	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	2,500,000	100%	3,000,000	100%	3,000,000	100%	13,500,000	Kec. Rejosari
4	01	21	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	6 dokumen	6 Dokumen	3,500,000	6,500,000	7,000,000	6 DOKUMEN	7,000,000	7,500,000	8,000,000	6 DOKUMEN	8,000,000	6 DOKUMEN	32,500,000	Kec. Rejosari
4	01	21	28	Program Penyelesaian Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelesaian pemerintahan kecamatan	22 kegiatan	22 Kegiatan	171,173,000	52 kegiatan	279,503,500	52 kegiatan	303,750,000	52 kegiatan	313,500,000	52 kegiatan	348,500,000	52 kegiatan	1,416,426,500	Kec. Rejosari
4	01	21	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	4 kegiatan	4 kegiatan	5,000,000	4 kegiatan	5,000,000	4 kegiatan	5,000,000	4 kegiatan	5,000,000	4 kegiatan	5,000,000	4 kegiatan	25,000,000	Kec. Rejosari
4	01	22	01	Kecamatan Sawahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.69%	89.69%	76,860,000	89.69%	82,098,000	89.69%	88,372,800	89.69%	95,979,402	89.69%	105,300,827	89.69%	448,611,029	Kec. Sawahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
4	01	22	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	99.21%	99.21%	72,800,000	99.21%	76,440,000	99.21%	80,262,000	99.21%	84,275,100	99.21%	88,488,855	99.21%	402,265,955	Kec. Sawahan
4	01	22	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100.00%	100%	18,550,000	100%	7,500,000	100%	18,550,000	100%	7,500,000	100%	18,550,000	100%	70,650,000	Kec. Sawahan
4	01	22	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	100.00%	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	50,000,000	Kec. Sawahan
4	01	22	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100.00%	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	7,500,000	100%	37,500,000	Kec. Sawahan
4	01	22	28	Program Penyeleggaran Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	99.61%	99.61%	180,825,600	99.61%	180,825,600	99.61%	180,825,600	99.61%	180,825,600	99.61%	180,825,600	99.61%	904,128,000	Kec. Sawahan
4	01	22	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	50.00%	100%	27,350,000	100%	27,585,000	100%	27,843,500	100%	28,127,850	100%	28,440,635	100%	139,346,985	Kec. Sawahan
4	01	23	01	Kecamatan Sukomoro	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	110,502,900	82%	153,250,000	84%	164,670,000	86%	178,220,000	0.88	185,750,000	0.88	792,392,900	Kec. Sukomoro
4	01	23	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	60%	61%	72,800,000	62%	76,440,000	63%	80,262,000	64%	84,275,100	65%	88,488,855	65%	402,265,955	Kec. Sukomoro
4	01	23	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	90%	91%	18,550,000	92%	7,500,000	93%	18,550,000	94%	7,500,000	95%	18,550,000	95%	70,650,000	Kec. Sukomoro
4	01	23	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah	35 orang	35 orang	15,000,000	35 orang	15,000,001	35 orang	15,000,002	35 orang	15,000,003	35 orang	15,000,004	35 orang	75,000,010	Kec. Sukomoro
4	01	23	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	78%	79%	7,500,000	80%	7,500,000	81%	7,500,000	82%	7,500,000	83%	7,500,000	83%	37,500,000	Kec. Sukomoro
4	01	23	28	Program Penyeleggaran Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	80%	81%	180,825,600	82%	180,825,600	83%	180,825,600	84%	180,825,600	85%	180,825,600	85%	904,128,000	Kec. Sukomoro
4	01	23	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	78%	79%	27,350,000	80%	27,585,000	81%	27,843,500	82%	28,127,850	83%	28,440,635	83%	139,346,985	Kec. Sukomoro
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Sukomoro	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Sukomoro	20 kegiatan	72%	289,360,000	79%	318,296,000	79%	318,296,000	79%	318,296,000	87%	318,296,000	87%	1,562,544,000	Kec. Sukomoro
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kamas	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Kamas	17 kegiatan	37%	299,100,000	41%	327,550,000	42%	335,550,000	45%	357,550,000	95%	757,550,000	95%	2,077,300,000	Kec. Sukomoro
4	01	24	01	Kecamatan Tanjunganom	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	88%	157,753,000	105%	158,359,000	107%	158,974,000	109%	159,598,000	110%	160,232,000	110%	794,916,000	Kec. Tjanganom
4	01	24	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	95%	96%	144,307,000	97%	66,673,250	98%	68,637,000	98%	70,709,000	98%	73,394,000	99%	423,720,250	Kec. Tjanganom
4	01	24	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	79%	80%	11,400,000	85%	11,400,000	86%	11,400,000	89%	11,400,000	94%	11,400,000	97%	57,000,000	Kec. Tjanganom
4	01	24	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	80%	84%	7,500,000	88%	7,500,000	94%	7,500,000	96%	7,500,000	98%	7,500,000	99%	37,500,000	Kec. Tjanganom
4	01	24	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	85%	99%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	3,500,000	100%	19,500,000	Kec. Tjanganom
4	01	24	28	Program Penyeleggaran Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	90%	97%	336,500,000	98%	370,150,000	98%	406,665,000	99%	446,331,000	99%	489,461,000	100%	2,049,107,000	Kec. Tjanganom
4	01	24	29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	75%	80%	67,500,000	95%	67,500,000	99%	67,500,000	99%	67,500,000	99%	67,500,000	100%	337,500,000	Kec. Tjanganom
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Tanjunganom	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Tanjunganom	95%	97%	3,549,955,000	97.8%	1,105,712,000	98.5%	1,124,509,104	99.5%	1,146,999,286	99.5%	1,169,939,272	99.5%	8,097,114,662	Kec. Tjanganom
				Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Warujayang	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Warujayang	78%	97%	1,153,872,000	97.8%	1,155,955,080	98.5%	1,175,606,316	99%	1,199,118,443	99.5%	1,223,100,812	99.5%	5,907,652,651	Kec. Tjanganom
4	01	25	01	Kecamatan Wilangan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	108,320,000	82%	122,100,000	83%	134,900,000	83%	147,700,000	84%	163,750,000	84%	676,770,000	Kec. Wilangan
4	01	25	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	136,500,000	81%	127,300,000	81%	171,100,000	82%	107,900,000	83%	223,700,000	84%	766,500,000	Kec. Wilangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
4	01 25 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	90%		91%	15,000,000	91%	15,000,000	92%	15,000,000	92%	15,000,000	94%	17,500,000	94%	77,500,000	Kec. Wilangan
4	01 25 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	90%		91%	40,000,000	91%	35,000,000	92%	30,000,000	92%	25,000,000	94%	25,000,000	94%	155,000,000	Kec. Wilangan
4	01 25 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%		100%	6,000,000	100%	7,500,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	37,500,000	Kec. Wilangan
4	01 25 28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	90%		91%	359,484,000	91%	384,620,000	92%	399,620,000	93%	419,680,000	94%	434,680,000	94%	1,998,084,000	Kec. Wilangan
4	01 25 29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	75%		80%	50,800,000	95%	55,750,000	1	59,000,000	100%	61,500,000	100%	65,000,000	100%	292,050,000	Kec. Wilangan
4	02	Pengawasan																
4	02 01	Inspektorat																
4	02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	80	583,500,000	80	722,500,000	85	846,500,000	90	983,000,000	90	1,106,000,000	90	4,241,500,000	Inspektorat	
4	02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	80%	474,500,000	85%	432,500,000	85%	600,000,000	90%	1,290,000,000	90%	550,000,000	90%	3,347,000,000	Inspektorat	
4	02 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	80%	80%	33,000,000	85%	41,000,000	85%	47,000,000	90%	49,500,000	90%	57,000,000	90%	227,500,000	Inspektorat	
4	02 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	60%	70%	130,000,000	75%	170,000,000	80%	190,000,000	90%	250,000,000	90%	275,000,000	90%	1,015,000,000	Inspektorat	
4	02 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	80%	80%	2,546,400,000	85%	3,180,000,000	85%	3,469,000,000	90%	4,180,000,000	90%	4,185,000,000	90%	17,560,400,000	Inspektorat	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan SKM	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%	100%	1,416,400,000	100%	1,580,000,000	100%	1,669,000,000	100%	1,950,000,000	100%	1,925,000,000	100%	8,540,400,000	Inspektorat	
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	70%	75%	730,000,000	80%	880,000,000	85%	900,000,000	90%	1,165,000,000	95%	1,180,000,000	95%	4,855,000,000	Inspektorat	
			Cakupan klinik konsultasi	127 Obwas	127 Obwas		134 Obwas	135 Obwas	143 Obwas	143 Obwas	143 Obwas	143 Obwas	143 Obwas	143 Obwas				
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	Jumlah auditor yang bersertifikat	100%	100%	400,000,000	100%	720,000,000	100%	900,000,000	100%	1,065,000,000	100%	1,080,000,000	100%	4,165,000,000	Inspektorat	
4	03	Perencanaan																
4	03 01	Badan Perencanaan Pembangunan																
4	03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah = (Jumlah responden yang puas/seluruh responden)	B*	B	517,500,000	A	537,500,000	A	555,500,000	A	573,500,000	A	591,500,000	A	2,775,500,000	Bappeda	
4	03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi = (Jumlah BMD dalam kartu inventaris ruangan dalam kondisi baik/jumlah BMD dalam kartu inventaris ruangan)	80%	82%	589,000,000	84%	997,000,000	86%	605,000,000	88%	613,000,000	90%	621,000,000	90%	3,425,000,000	Bappeda	
4	03 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan ASN = (rata-rata kehadiran ASN berdasarkan Sistem Absensi Elektronik)	100%	100%	17,500,000	100%	17,500,000	100%	17,500,000	100%	17,500,000	100%	17,500,000	100%	87,500,000	Bappeda	
4	03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai SKP ASN = jumlah nilai total SKP/ jumlah SKP ASN	baik*	baik	427,000,000	baik	430,000,000	baik	440,000,000	baik	450,000,000	baik	460,000,000	baik	2,207,000,000	Bappeda	
4	03 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	50,000,000	100%	185,000,000	100%	395,000,000	Bappeda	
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	% Kesesuaian usulan kegiatan pembangunan dalam RKPD terhadap prioritas tahunan daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			% data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas	53%	75%	2,780,000,000	85%	2,828,000,000	90%	2,853,000,000	95%	2,909,000,000	95%	2,945,000,000	95%	14,315,000,000	Bappeda	
			% hasil rekomendasi pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti	69.70%	70%		75%		80%		85%		90%		100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	% Outcome program lingkup pemerintahan dengan tingkatan capaian ≥ 80 % Σ kerjasama yang dilaksanakan	100%	100%	1,050,250,000	100%	707,500,000	100%	682,500,000	100%	822,500,000	100%	1,772,500,000	100%	5,035,250,000	Bappeda
	Program Perencanaan Sosial	% Outcome program Bidang Sosial dengan tingkatan capaian ≥ 80 %	100%	100%	762,000,000	100%	762,000,000	100%	762,000,000	100%	762,000,000	100%	762,000,000	100%	3,810,000,000	Bappeda
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	% Outcome program Bidang ekonomi dengan tingkatan capaian ≥ 80 %	100%	100%	537,500,000	100%	537,500,000	100%	537,500,000	100%	537,500,000	100%	537,500,000	100%	2,687,500,000	Bappeda
	Program Perencanaan Bidang Infrastruktur	% Outcome program Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian ≥ 80 %	100%	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	2,250,000,000	Bappeda
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	% Kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan RTRW	100%	100%	1,100,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	3,500,000,000	Bappeda
4 06	Penelitian dan Pengembangan															
4 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pembangunan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitangan (Jumlah kelitangan dalam RKPD/Jumlah kelitangan dalam RPJMD X 100)	100%	100%	10,130,500,000	100%	9,000,000,000	100%	8,000,000,000	100%	7,000,000,000	100%	10,000,000,000	100%	44,130,500,000	Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil kelitangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4 04	Keuangan															
4 04 01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah															
4 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	90	479,000,000	90	502,950,000	90	528,098,000	90	554,502,000	90	582,227,000	90	2,646,777,000	BPKAD
4 04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	80%	439,000,000	80%	460,950,000	80%	483,998,000	80%	508,197,000	80%	533,607,000	80%	2,425,752,000	BPKAD
4 04 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kriteria mendapat diklat minimal 20 JP/Tahun	80%	80%	270,000,000	80%	283,500,000	80%	297,675,000	80%	312,559,000	80%	328,187,000	80%	1,491,921,000	BPKAD
4 04 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20,500,000	100%	21,525,000	100%	22,601,000	100%	23,731,000	100%	24,918,000	100%	113,275,000	BPKAD
	Program Peningkatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran (APBD dan P APBD)	Ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan P APBD)	100%	100%	1,969,550,000	100%	2,068,028,000	100%	2,171,429,000	100%	2,280,000,000	100%	2,394,000,000	100%	10,883,007,000	BPKAD
	Program Peningkatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%	100%	534,000,000	100%	560,700,000	100%	588,735,000	100%	618,172,000	100%	649,080,000	100%	2,950,687,000	BPKAD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menunjukkan SPM sesuai ketentuan	100%	100%	557,000,000	100%	584,850,000	100%	614,093,000	100%	664,797,000	100%	677,037,000	100%	3,097,777,000	BPKAD
	Program fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah ASN pengelola daerah yang terfasilitasi	80%	80%	136,000,000	80%	142,800,000	80%	149,940,000	80%	157,437,000	80%	165,309,000	80%	751,486,000	BPKAD
	Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD	100%	100%	1,630,000,000	100%	880,000,000	100%	924,000,000	100%	970,200,000	100%	10,187,110,000	100%	14,591,310,000	BPKAD
4 04 02	Badan Pendapatan Daerah															
4 04 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	80%	595,000,000	80%	65,700,000	80%	699,500,000	80%	750,000,000	80%	783,500,000	80%	2,893,700,000	Bapenda
4 04 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%	90%	1,547,510,000	90%	778,180,000	90%	671,500,000	90%	857,000,000	90%	704,000,000	90%	4,558,190,000	Bapenda
4 04 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	80%	80%	23,025,000	90%	25,000,000	92%	26,000,000	95%	27,000,000	95%	28,000,000	95%	129,025,000	Bapenda
4 04 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	90%	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	235,000,000	100%	245,000,000	100%	250,000,000	100%	1,160,000,000	Bapenda
4 04 02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20,500,000	100%	20,500,000	100%	22,500,000	100%	23,000,000	100%	25,500,000	100%	112,000,000	Bapenda
4 04 02 19	Program Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak (WP) daerah yang terdaftar	596.000 WP	598.000 WP	1,590,000,000	600.000 WP	1,590,000,000	602.000 WP	1,710,000,000	604.000 WP	1,470,000,000	606.000 WP	1,580,000,000	606.000 WP	7,940,000,000	Bapenda
4 04 02 20	Program Pengawasan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Capaian penerimaan PAD	101%	101%	1,150,000,000	101%	1,160,000,000	101%	1,260,000,000	101%	1,270,000,000	101%	1,400,000,000	101%	6,240,000,000	Bapenda
4 04 02	Program Pengawasan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase kepatuhan Wajib Pajak (WP) daerah	40%	40%	585,000,000	45%	575,000,000	47%	580,000,000	48%	610,000,000	50%	62,500,000	50%	2,412,500,000	Bapenda
4 05	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan															
4 05 01	Badan Kepegawaian Daerah															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	77%	78% (baik)	429,000,000	429,900,000	80%	434,900,000	81%	436,500,000	82%	441,500,000	82% (sangat baik)	2,171,800,000	BKD
4	05 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	95%	96%	480,000,000	560,000,000	98%	880,000,000	99%	560,000,000	100%	880,000,000	100%	3,360,000,000	BKD
4	05 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	99%	100%	15,000,000	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	75,000,000	BKD
4	05 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	30,000,000	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	150,000,000	BKD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang lulus diklat	95%	100%	10,086,000,000	9,540,000,000	100%	9,930,000,000	100%	9,730,000,000	100%	11,680,000,000	100%	50,966,000,000	BKD
		Program Pembinaan dan Pemberdayaan Aparatur	Persentase jabatan struktural yang terisi	92%	100%	4,614,600,000	4,700,000,000	100%	4,980,000,000	100%	5,010,000,000	100%	5,040,000,000	100%	24,344,600,000	BKD
		Program Pengendalian dan Pembinaan Pegawai	Persentase kasus pelanggaran disiplin yang tertangani selesai	100%	100%	985,000,000	985,000,000	100%	985,000,000	100%	985,000,000	100%	985,000,000	100%	4,925,000,000	BKD



## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos, MM dan Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA dilantik sebagai Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa jabatan 2018-2023 mengemban amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan pelayanan publik.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini adalah indikator tujuan RPJMD yang menggambarkan dampak final/akhir (*final impact*) dari pembangunan sebagai agregasi dari hasil (*outcome*) multi-urusan pemerintahan daerah.

Secara umum indikator kinerja daerah menggambarkan tingkat keberhasilan dalam 3 aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Dalam indikator kinerja daerah ini aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, indeks gini serta indeks kesalehan sosial.

Kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai pada akhir kepemimpinan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk di tahun 2023 mendatang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai karena peningkatan kontribusi pertanian pangan dan agro, tingginya investasi, peningkatan iklim usaha industri mikro, kecil dan koperasi, serta tumbuhnya ekonomi sektor pariwisata. Semua itu bisa terwujud berkat daya saing Kabupaten Nganjuk yang semakin kuat.

Aspek pelayanan umum diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat, indeks infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan. Sedangkan aspek daya saing diukur dengan indikator Indeks pembangunan masyarakat, indeks pembangunan kebudayaan, indeks reformasi birokrasi, indeks kualitas lingkungan hidup, skor pola pangan harapan, nilai investasi daerah, Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional serta tingkat pertumbuhan usaha mikro.

Kekuatan daya saing Kabupaten Nganjuk tercipta sebagai dampak kondisi antar wilayah yang semakin terkoneksi, kondisi infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang semakin mantap,



kondisi keamanan, ketertiban dan kerukunan masyarakat yang semakin harmonis serta kondisi birokrasi yang telah tereformasi sehingga melahirkan kepuasan pelayanan publik.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi pengangguran dengan semakin banyak warga Nganjuk yang mendapatkan pekerjaan dan meningkat pendapatannya. Peningkatan pendapatan warga, termasuk para petani, dengan sendirinya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, keberhasilan pembangunan tercapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang hal ini menandai prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan di Kabupaten Nganjuk. Disamping itu, harapan keberhasilan pembangunan mulai tahun awal periode RPJMD hingga pada akhir tahun 2023 juga ditandai dengan semakin meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi: 1) aspek kesejahteraan yang terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga; 2) aspek daya saing; 3) aspek pelayanan umum yang terdiri fokus layanan urusan pemerintahan wajib dan fokus layanan urusan pemerintahan pilihan.

Gambaran lengkap ukuran keberhasilan pembangunan Kabupaten Nganjuk periode 2018 – 2023, dapat dilihat pada tabel VIII.1 Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan tabel VIII.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

## 1. Laju Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Indikator ini juga dimaksudkan menghitung seberapa jauh keberhasilan pembangunan di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal yang terjadi di suatu daerah seperti penambahan sektor-sektor ekonomi, penambahan fasilitas infrastruktur serta penambahan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dihitung dari nilai tertimbang sektor-sektor PDRB. Pertumbuhan tinggi dan stabil menjadi cita-cita daerah yang melaksanakan pembangunan. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 adalah sebesar 6,00 persen atau lebih. Target tersebut bisa diungkit dari pertumbuhan sektor perdagangan, sektor industri serta jasa-jasa kemasyarakatan.

## 2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan presentase dari sejumlah orang yang penghasilannya dibawah garis kemiskinan di suatu daerah. Garis kemiskinan diukur atas kecukupan makanan senilai 2.100 kilo kalori dan kebutuhan non makanan. Semakin kecil presentase penduduk miskin disuatu daerah bisa menggambarkan bahwa seberapa besar tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Target tingkat



kemiskinan Kabupaten Nganjuk setiap tahunnya menurun dan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk sebesar rata-rata tingkat kemiskinan provinsi Jawa Timur atau nasional.

Upaya untuk percepatan penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui langkah-langkah koordinatif secara terpadu dan lintas sektor dalam pelaksanaannya. Pada prinsipnya menggunakan pendekatan sesuai karakteristik kemiskinannya.

### 3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggabungkan 3 indeks yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan serta indeks daya beli. Target indeks pembangunan manusia tahun 2023 adalah 76 sedangkan capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 70,69. Upaya untuk meningkatkan nilai IPM tersebut adalah dengan meningkatkan nilai indeks pendidikan dengan cara memberikan akses kepada masyarakat yang belum menamatkan pendidikan dasar untuk mengikuti kejar paket A, paket B, dan paket C. Disamping itu pemerintah daerah akan memberikan kemudahan akses mengikuti pendidikan dasar dan menengah secara gratis bahkan memberikan beasiswa kepada siswa miskin dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Disamping itu juga diupayakan meningkatkan indeks pendidikan dengan cara meningkatkan usia harapan hidup melalui upaya-upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi serta mengurangi angka kesakitan pada masyarakat. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat pemerintah daerah berupaya meningkatkan PDRB melalui sektor-sektor pengungkit khususnya perdagangan, industri dan jasa kemasyarakatan serta mengoptimalkan produksi pertanian sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

### 4. Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan Sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap Kesalihan Sosial meliputi: solidaritas sosial, toleransi, mutualitas, tengah-tengah, stabilitas. Penetapan indikator kesalihan sosial terdiri atas solidaritas sosial (sosial ekonomi), kerjasama/mutualitas, toleransi (kerukunan beragama dan budaya), adil serta menjaga ketertiban umum (tertib sosial).

### 5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi didasarkan atas indeks kepuasan masyarakat terhadap integritas pemerintah dan indeks persepsi masyarakat terhadap birokrasi yang baik dan bebas dari KKN, akuntabilitas kinerja pemerintah serta pelayanan publik. Target indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Nganjuk tahun 2023 sebesar 68. Upaya-upaya untuk mencapai target tersebut dilakukan dengan cara pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang baik serta rekrutmen maupun penempatan pegawai berdasar



sistem *merit*, penerapan e-govermen menuju *smart city*, pelaksanaan kinerja yang akuntabel serta pelayanan publik yang semakin baik dan inovatif.

## 6. Nilai Tukar Petani

Sebagai daerah agraris sebagian besar penduduk Kabupaten Nganjuk bekerja pada sektor pertanian. Sektor ini masih memberikan kontribusi yang cukup besar tetapi pertumbuhannya cenderung stagnan bahkan cenderung menurun karena berbagai hal diantaranya alih fungsi lahan dan pergeseran tenaga kerja kearah sektor sekunder dan tersier. Meskipun demikian pemerintah Kabupaten Nganjuk tetap berupaya terus meningkatkan kesejahteraan para pekerja disektor pertanian ini dengan berbagai upaya diantaranya kemudahan akses terhadap modal serta bantuan sarana prasarana pertanian. Tingkat kesejahteraan petani diukur dengan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Target pada tahun 2023 NTP Kabupaten Nganjuk sebesar 104,9.

## 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Indeks ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Target indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 sebesar 82. Upaya-upaya untuk mencapai target tersebut adalah dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, melaksanakan inovasi pelayanan publik, penerapan e-govermen menuju *smart city* serta pelaksanaan kinerja yang akuntabel yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## 8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat daerah bisa dilakukan dengan mengukur tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan berusaha mendapatkan pekerjaan. semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat yang berakibat munculnya berbagai masalah sosial. Target pengangguran terbuka di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 adalah sebesar 3,00 persen. Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan cara meningkatkan kegiatan-kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja yang bisa dicapai dengan peningkatan investasi, pelatihan kerja, kegiatan padat karya, penyaluran tenaga kerja melalui bursa kerja, menumbuhkan wirausaha baru khususnya Usaha Mikro dan Kecil yang didukung kemudahan akses permodalan.



## 9. Indeks Pembangunan Gender

Target indeks pembangunan gender tahun 2023 sebesar 97,90. Upaya ini dilakukan dengan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran serta perempuan dalam bidang sosial, ekonomi dan pembangunan. Selain itu juga memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk bekerja disektor-sektor non pertanian khususnya di pemerintahan, perindustrian, perdagangan, dan jasa.

## 10. Nilai Investasi Daerah

Nilai investasi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan nilai produksi sektor-sektor dalam PDRB melalui penambahan modal dalam aktivitas ekonominya. Investasi yang tinggi dapat membantu meningkatkan perluasan lapangan kerja serta peningkatan penyerapan tenaga kerja baru sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu investasi yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan masyarakat melalui multi player efek yang ditimbulkannya. Target nilai investasi daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 sebesar Rp. 2518,99 Milyar. Upaya-upaya untuk mencapai target tersebut adalah melalui program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi serta Program peningkatan iklim investasi investasi yang didukung kemudahan dalam perijinan serta peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola birokrasi pemerintahan yang baik.



TABEL 8.1  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Skor	62,52	62,70	62,88	63,06	63,24	63,42	63,42
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	65	65	66	66	67	68	68
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	70,69	71	71,32	71,64	71,96	72,28	72,28
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	5,3	5,4	5,5	5,65	5,85	6,0
5.	Pemenuhan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	%	59,25	64,30	66,94	69,67	72,32	75,04	75,04
6.	Tingkat Kemiskinan	%	12,11	11,81	11,51	11,21	10,50	10,14	10,14
7.	Nilai Investasi Daerah	Rp (milyar)	1.987,69	2.072,87	2.175,99	2.284,79	2.899,03	2.518,99	2.518,99
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,64	2,30	2,20	2,10	2,05	2	2
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Skor	77,58	78	79	80	81	82	82
10.	Indeks Pembangunan Gender	Skor	93,48	93,78	94,08	94,38	94,68	94,98	94,98



TABEL 8.2  
INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
<b>1</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>								
a.	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	70,69	71	71,32	71,64	71,96	72,28	72,28
b.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	5,3	5,4	5,5	5,65	5,85	5,85
c.	Tingkat Kemiskinan	%	12,11	11,50	10,75	10,36	9,97	9,57	9,57
d.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,64	2,30	2,20	2,10	2,05	2	2
e.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Skor	77,58	78	79	80	81	82	82
f.	Indeks Gini	Skor	0,329	0,328	0,327	0,326	0,325	0,324	0,324
g.	Laju Inflasi	%	3,49	<4	<4	<4	<4	<4	<4
<b>2</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>								
a.	Nilai Tukar Petani	Nilai	102	103	103,7	104,1	104,5	104,9	104,9
<b>3</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>								
b.	Indeks Pendidikan	Skor	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61
c.	Indeks Kesehatan	Skor	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80



d.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	%	48,94	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
e.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Skor	70,41	70,91	71,51	72,11	72,61	73,11	73,11
f.	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	%	79,43	79,63	80,13	80,63	81,23	81,83	81,83
g.	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan	%	80,21	81,26	82,31	83,36	84,41	85,46	85,46
h.	Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/kawasan/kota	%	55,36	58,28	61,14	64,03	66,92	69,81	69,81
i.	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	%	85,46	86,87	88,28	89,69	91,1	92,51	92,51
j.	Persentase pengurangan Kawasan Kumuh	%	0	12,5	25	37,5	50	62,5	62,5
k.	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang terselesaikan	%	100	70	75	80	85	90	90
l.	Cakupan penanganan Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
m.	Persentase penurunan PMKS	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
n.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,64	2,30	2,20	2,10	2,05	2	2
o.	Indeks Pembangunan Gender	Skor	93,48	93,78	94,08	94,38	94,68	94,98	94,98



p.	Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	66,56	66,76	66,96	67,16	67,36	67,56	67,56
q.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	91,7	92	93	94	95	96	96
r.	Indeks Kualitas Air	Skor	66	67	68	69	70	71	71
s.	Indeks Kualitas Udara	Skor	82,4	82,9	83,4	83,9	84,4	84,9	84,9
t.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor	74,86	75,01	75,26	75,51	75,76	76,01	76,01
u.	Persentase cakupan penanganan persampahan	%	9,99	14	19	25	32	39,9	39,9
v.	Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	73	80	75	74	73	72	72
w.	Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	%	18	20	22	24	26	27	27
x.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	98%	98.2%	98.5%	98.7%	98.8%	98.9%	98.9%
y.	Indeks Desa Membangun	Skor	0,6274	0,6280	0,6286	0,6292	0,6298	0,6304	0,6304
z.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,38	0,30	0,33	0,35	0,38	0,40	0,40
aa.	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	0	5	10	15	20	25	25
bb.	Persentase ruas jalan yang memenuhi standard perlengkapan jalan	%	19,7	21	22	23	24	25	25



cc.	Persentase Prasarana Transportasi Darat yang memadai	%	79	84	88	93	98	100	100
dd.	Indeks SPBE	Skor	N/A	Cukup (1,8 – < 2,6)	Cukup (1,8 – < 2,6)	Baik (2,6 – < 3,5)	Baik (2,6 – < 3,5)	Sangat Baik (3,5 – < 4,2)	Sangat Baik (3,5 – < 4,2)
ee.	Persentase koperasi sehat	%	33,94	34	36	38	40	42	42
ff.	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	3,04	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20
gg.	Nilai Investasi Daerah	Rp (milyar)	1.987,69	2.072,87	2.175,99	2.284,79	2.899,03	2.518,99	2.518,99
hh.	Persentase organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pembangunan	%	16	25	33	41	50	58	58
ii.	Jumlah cabang olahraga prestasi dan Olahraga Rekreasi yang berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	Jenis Olahraga	10	12	14	16	18	20	20
jj.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	14,62	14,65	14,69	14,71	14,73	14,75	14,75
kk.	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	26	27	28	29	30	31	31
ll.	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	%	22,22	23	25	28	30	32	32



mn.	Persentase kenaikan pengunjung perpustakaan per tahun	%	14,51	15	15	15	15	15	15
nn.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	40	52	64	76	88	100	100
oo.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3,10	3,30	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20
pp.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	18,95	19,45	19,95	20,45	20,95	21,45	21,45
qq.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	%	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	5,50
rr.	Persentase masyarakat/lembaga yang meningkat wawasan kebangsaannya	%	80	80	80	80	80	80	80
ss.	Predikat SAKIP	Nilai	61, 24 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)	85 (A)	85 (A)
tt.	Nilai EKPPD	Nilai	3,2640	3,3140	3,3640	3,4140	3,4640	3,5140	3,5140
uu.	Maturitas SPIP	Nilai	2,2	3	3	3	3	3	3
vv.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Skor	77,58	78	79	80	81	82	82
ww.	Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target	%	100	100	100	100	100	100	100
xx.	Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (Policy Brief)	%	80	80	80	80	80	80	80



yy.	Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi	%	15	24	30	47	59	71	71
zz.	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
aaa	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	14,46	14,71	14,80	14,80	14,82	14,85	14,85

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1. Pedoman Transisi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yakni dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 akan berakhir pada 24 September 2023 sejalan berakhirnya masa jabatan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan kondisi transisi, dan selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) pada periode berikutnya, selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pilkada pada waktu berikutnya yang kemudian akan disesuaikan dengan RPJMD yang baru. Sedangkan penyusunan RKPD tahun 2019, dan APBD tahun 2019 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018 dan RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2005-2025 yang telah memperhatikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023.

Pada masa transisi setelah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023, penyusunan RKPD dan APBD tetap mengacu/melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya dan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan secara teknis, tata cara penyusunan RKPD tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD.

#### **9.2. Kaidah Pelaksanaan**

Dengan adanya Dokumen RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati Nganjuk menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023 kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD 2014–2018 sedangkan penyusunan RKPD perubahan 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  3. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.
  4. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Nganjuk dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023, yang dimulai Tahun 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  5. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Tahun 2018 – 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, yang dimulai Tahun 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  6. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, agar dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tetap mendukung pencapaian target kinerja dengan mempedomani dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 sesuai tahapan dan berkelanjutan (*sustainable*).
  7. Penyusunan RPJM Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD.
  8. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 178 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Dalam hal terdapat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah baru dan/atau pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah serta dinamika perubahan kebijakan Nasional bersifat mendasar yang dibentuk dan/atau berubah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023, maka dapat dilakukan penyesuaian atas RPJMD ini.
10. Dalam keadaan luar biasa yang tidak ada dalam RPJMD maka tetap dilaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005